ANALISIS IMPLEMENTASI *COMMUNITY* DAN *GOVERNMENT RELATIONS* DI KEBUN SEI-KENCANA PTPN V (PERSERO) PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi Pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Oleh
VINNY FHIADINA NASUTION
13321108

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
2017

SKRIPSI

Analisis Implementasi *Community* dan *Government Relations* di Kebun Sei Kencana PTPN V (PERSERO) Pekanbaru

Disusun Oleh :

Vinny Fhiadina Nasution

13321108

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Tanggal .....

Dosen Pembimbing Skripsi

Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., MA

NIDN : 0505068902

ii

SKRIPSI

Analisis Implementasi *Community* dan *Government Relations* di Kebun Sei Kencana PTPN V (PERSERO) Pekanbaru

Disusun Oleh :

Vinny Fhiadina Nasution

13321108

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Tanggal 15 DEC 2017

Dosen Penguji :

1. Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., MA (.....)
   NIDN. 0505068902
2. Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom (.....)
   NIDN. 0529098201

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Muzayin Nazaruddin, S.Sos.,MA.
NIDN : 0516087901

iii

SURAT KETERANGAN
NO: G-5/SPR/SKT/18/VIII/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Ka Sub Bagian Humas Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara V yang beralamat di Jl Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Vinny Fhiadina Nasution**

Fakultas : **Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data di Bagian Sekretaris Perusahaan Cq. Urs. Humas PT Perkebunan Nusantara V mulai tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan selesai dengan Narasumber sebagai berikut:

1. M. Azman Lubis Staf Sub Bagian Umum
2. Risky Atriyansyah Staf Sub Bagian Humas Sekretaris Perusahaan
3. Amir Syafrudin Asum Kebun Sei Kencana

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Agustus 2017

a.n Ka Sub Bagian Humas

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V KANTOR PUSAT

(Risky Atriyansyah)

Staf Sub Bagian Humas

Jujur, Tulus, Ikhlas

PT Perkebunan Nusantara V (Persero)
Jl. Rambutan No. 43
Pekanbaru 28294, Riau, Indonesia
Tel +62 (761) 66565
Fax +62 (761) 66558
E-mail ptpn5@ptpn5.co.id
Web www.ptpn5.com

Kantor Perwakilan
Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73
Jakarta 10510, Indonesia
Tel +62 (21) 424 4291
Fax +62 (21) 424 5034

PERSYARATAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Vinny Fhiadina Nasution

Nomor Mahasiswa : 13321108

Judul Skripsi : **Analisis Implementasi *Community* dan *Government Relations* Di Kebun Sei-Kencana PTPN V (PERSERO) Pekanbaru.**

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya penjiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setujui dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, Desember 2017

Yang menyatakan,



Vinny Fhiadina Nasution

v

MOTTO:

“Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu (Ali bin Abi Thalib)

Man Jadda Wa Jadda

Man Shabara Zhafira

“yakinlah bahwa setiap tetes peluh dan air mata akan bernilai pahala dan manfaat”

Persembahan :

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtuaku“ Ayah dan Ibu” pemilik cinta serta kasih sayang yang paling suci untuk anaknya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **"Analisis Implementasi *Community* dan *Government Relation* Di Kebun Sei-Kencana PTPN V (PERSERO) Pekanbaru".**

Skripsi ini ditulis berdasarkan sumber-sumber yang penulis peroleh dari berbagai referensi dan literatur. Penulisan skripsi ini adalah untuk melakukan riset dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Ilmu Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini adalah berkat bimbingan, pengarahan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada ayahanda (Ridwan Effendi Nasution) dan ibunda (Sri Wahyuni) tercinta, almarhum abangku (Febi Wahyudi Nasution), kakakku (Erni Puspita Sari, S.Farm, Apt., beserta adikku (Dinda Nita Rahim Nasution) yang selama ini telah memberikan kasih sayang yang tulus, inspirasi dalam setiap kata-kata halus di kalbuku, dan motivasi kepada penulis;
2. Bapak Muzayyin Nazaruddin, S.Sos., MA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membimbing dan mempermudah semua urusan administrasi dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Nadia Wasta Utami, S.I.Kom., M.A., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sangat menghargai dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini sehingga membangkitkan semangat dan percaya diri penulis untuk menyelesaikan skripsi;
4. Ibu Puji Hariyanti, S.Sos., M.I.Kom selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan dalam tahap penyelesaian skripsi penulis, dalam bentuk dukungan selama proses sidang dan setelahnya.

5. Seluruh staf pengajar di Program Studi Ilmu Komunikasi UII yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan sehingga menambah wawasan akademik penulis;
6. Pihak PTPN V Pak Risky Atriansyah, Pak Azman Lubis beserta jajarannya yang sangat membantu penulis dengan melancarkan proses Skripsi yang penulis jalani.
7. Kakak Iis yang senantiasa mengawal skripsiku serta banyak memberikan kritikan membangun hingga terselesaikannya skripsi penulis.
8. Sahabatku Muhammad Ridwan Sammiadjiey yang menjadi bagian dari motivator yang luar biasa beserta bahasa-bahasa "kejamnya" yang menghiasi layar ponsel untuk menyelesaikan Tugas Akhir Penulis.
9. Jazzakillah Khoiran Katsiran kepada keluarga keduaku di perantauan (Nadia Aisyah Salamah, Nur Amanah Ilham Atjo, Apriska Fitriani, Brilliant Ayesha Nadine, Amelia Diva Rachmanti, Ratih Gayatri, Anindita Trinoviana, Rahayu Esr, dan Yolanda Dwi Asmara) yang tidak henti-hentinya memberikan keceriaan, do'a, senyuman, dan kekuatan dalam bingkai ukhuwah. Kalian adalah sahabat-sahabat tiada bandingan yang luar biasa, sukses selalu dalam mengejar mimpi kita masing-masing. Tetap berada dalam "lingkaran kecil illahi".
10. Serta teman-teman seperjuangan Ilkom'13 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis. Tidak lupa seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan masukan dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan. Jika masih ditemukan kesalahan dan kekurangan, baik dari segi sistematika penulisan maupun dari segi penyajian, penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi pembaca serta semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Desember 2017
Penulis,

Vinny Fhiadina Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERSYARATAN ETIKA AKADEMIK v

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL x

DAFTAR BAGAN xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

***ABSTRACT* ..... xiv**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B Rumusan Masalah..... 7

C Tujuan Penelitian 7

D Manfaat Penelitian 7

E Tinjauan Pustaka..... 8

1. Penelitian Terdahulu 8

2. Kerangka Pemikiran 12

F Metode Penelitian 32

1. Pradigma dan Pendekatan Penelitian 32

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 33

3. Narasumber 33

4. Teknik Pengumpulan Data 33

5. Metode Analisis Data 35

BAB II GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 37

A. Sejarah Berdirinya PTPN V dan Unit Sei Kencana 37
B. Fokus Produksi dan Profit Usaha 39
C. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 40
D. Susunan Organisasi PTPN V (Persero) Pekanbaru..... 41

BAB III TEMUAN PENELITIAN 47

A. Implementasi Kegiatan *community relations* yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Kencana 47
B. *Government Relations* pada PT. Perkebunan Nusantara V Unit Sei Kencana kepada Pemerintah Daerah Kampar 76

BAB IV PEMBAHASAN 98

A. Analisis Fungsi *Public Relations* dalam kegiatan *Community Relations* dan *Government Relations* PTPN V 99
B. Analisis Implementasi *Community Relations* Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 111
C. Analisis Implementasi *Government Relations* pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) 124
D. Analisis SWOT pada Implementasi kegiatan *community* dan *Government relations* pada Sei-Kencana PTPN V..... 131

BAB V PENUTUP 139

A. Kesimpulan 139
B. Saran 140
C. Keterbatasan Penelitian 141

DAFTAR PUSTAKA 142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Manfaat keterlibatan Komunitas dalam Perusahaan 20

Tabel 4.1 Ringkasan SWOT 136

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Korelasi Pemerintah, Perusahaan, dan Komunitas 30

Bagan 1.2 Model Analisis SWOT 31

Bagan 2.1 Struktur Organisasi HLKHI 43

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Divisi Umum Tim PKBL 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Perusahaan PTPN V 40

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Umum PTPN V 41

Gambar 3.1 Penyaluran Dana Program Kemitraan 56

Gambar 3.2 Kemacetan Dana Program kemitraan 59

Gambar 3.3 Aktivitas *community relations survey* Perdagangan 60

Gambar 3.4 Aktivitas *community relations* kemitraan Tanaman 61

Gambar 3.5 Aktivitas *community relations* Kemitraan pengusaha kecil 62

Gambar 3.6 Suasana Penyuluhan dan Penyaluran Dana Mitra Binaan 63

Gambar 3.7 kegiatan pemberian fasilitas air bersih 64

Gambar 3.8 *Community Relations* berbagi sembako 64

Gambar 3.9 Penyerahan Hewan Qurban 65

Gambar 3.10 Pemberian Alat Pertanian 66

Gambar 3.11 Bina lingkungan sarana dan Prasarana 66

Gambar 3.12 Berita Acara Bantuan Kantor Kepala Desa Sei Kencana 67

Gambar 3.13 Penyaluran Program Bina Lingkungan 68

Gambar 3.14 *Stakeholders* PTPN V 69

Gambar 3.15 Relisasi Program Bina Lingkungan 72

Gambar 3.16 Kabar berita kegiatan bina lingkungan 72

Gambar 3.17 Kegiatan *government relations* Surat Menyurat dengan Pemda 83

Gambar 3.18 Kegiatan *government relations* surat menyurat 83

Gambar 3.19 kegiatan Government relations surat menyurat 84

Gambar 4.1 kabar berita melalui event perusahaan 102

ABSTRAK

Vinny Fhiadina Nasution. 13321108. *Analisis Implementasi Community dan Government Relations* di Sei-Kencana PTPN V (Persero) Pekanbaru. *Tahun* 2017. Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 2017.

Dalam perusahaan terdapat peran yang dijalankan dalam rangka memberikan manfaat bagi Komunitas yang wilayahnya berada di sekitar perusahaan beroperasional. Yang dimaksud dengan *community* disini adalah masyarakat sekitar/masyarakat setempat.tetangga. Hal ini dikenal dengan kegiatan *community relations.* Dewasa ini komunitas telah mengalami peningkatan dalam kesadaran akan keberadaan perusahaan, oleh karena itu dalam wilayah yang terdapat kehidupan masyarakat dan dijadikan sebuah perusahaan dengan segala macam bentuk kegiatannya, berpeluang terjadinya kritik dari komunitas apabila keberadaan perusahaan tidak membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh komunitas. Kritik yang dimaksud dapat dilihat pada PTPN V yang bersumber dari komunitas pada tahun 2013, terkait lahan yang diklaim sebagai peninggalan dari nenek moyang komunitas. Peristiwa ini diawali dengan kritikan dan berakhir pada tindak anarkis yang merugikan kedua belah pihak dan berimbas besar pada perusahaan dari sudut pandang Pemerintah Daerah.

Salah satu elemen sasaran perusahaan dalam menjalin hubungan yang mampu menjadikan perusahaan berkelanjutan adalah membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah. Urgensi dari *community relations* dengan *government relations* adalah dalam *government relations* mencakup kebijakan pemerintah kepada perusahaan, dan *community relations* mencakup kebijakan perusahaan kepada masyarakat, yang artinya kedua jenis aktivitas ini memiliki satu jalur yang mengaitkan dari kebijakan pemerintah yang diterima oleh perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan komunitas. Dalam hal ini semuanya sama-sama menggunakan lobby dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu; pemerintah, perusahaan dan komunitas.

Penelitian Deskriptif ini berupaya menganalisa Implementasi *community* dan *government relations* pada PTPN V dengan mengambil fokus Objek di Unit Sei Kencana. adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat dan memahami implementasi dengan pertisipasi komunitas dalam program *community* dan *government relations*, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi, serta penelusuran data online. Sasaran dalam penelitian ini adalah komunitas lokal didaerah Sei Kencana PTPN V yang berbenturan langsung dengan permasalahan antara komunitas dengan perusahaan. PTPN V dipilih karena dapat memberikan gambaran mengenai industri persawitan yang cenderung dekat dengan isu komunitas. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari *community relations* pada PTPN V berbentuk pada program PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan) dan pola KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya), sedangkan bentuk dari *government relations* mencakup Lobby langsung, *Grass Rots Lobbying*, yang hubungannya tidak lepas dari kegiatan lobbi dan negosiasi.

Kata Kunci: Komunitas, implementasi *community* dan *government relations,* PTPN V.

ABSTRACT

Vinny Fhiadina Nasution. 13321108. Analysis Of The Implementation Of Community and Government Relations in Sei-Kencana Plantation PTPN V (Persero) Pekanbaru. Years 2017. Bachelor Thesis. Communications Studies Program, Faculty Of Psychology and Socio-Cultural Studies, Islamic University Of Indonesia. 2017.

In a company, there is a role that is run in order to provide benefits for the Community whose territory is in the vicinity of the company operational. The community refers to the surrounding community / local community, and this is known as community relations activity. Nowadays, the community has experienced an increase in the awareness of the existence of the company; therefore, the potential for criticism from the community if the existence of the company does not bring benefits can be felt by the people in the community. All the criticism can be seen from the PTPN V sourced from the community in 2013, related to land claimed as a relic from the ancestors of the community. This event began with criticism, and ended up in anarchist acts that harm both parties. Moreover, it induced such a big impact to the company from the Regional Government point of view of.

One of the target elements of a company in establishing relationships that can make the company sustainable is to build good relationships with local governments. The urgency of community relations with government relations is in government relations to include government policies to companies, and community relations include corporate policy to the community, which means that these two types of activities have one linking connection from government policies received by companies that impact to the community. In this case all involved parties utilize lobby and negotiation to reach mutual agreement which is beneficial to all parties which are; government, companies and communities.

This descriptive research tries to analyze the implementation of community and government relations at the PTPN V by taking the focus of Objects in Unit Sei Kencana. The purpose of this study is to analyze and understand the implementation of community participation in the community and government relations programs, used a qualitative aproach. Data collection method apllied in this research scuh of observation, interview, documentation, and online datea searches. The target in this research is a local community in Sei Kencana area of PTPN V which is directly related with the problems between community and company. PTPN V was chosen because it can provide an overview of the palm oil industry that tends to be close to community issues. This research found that implementation of community relations at PTPN V is in PKBL program (program kemitraan dan bina lingkungan) and KKPA pattern (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya), while form of government relations includes direct lobby and Grass Rots Lobbying which are an activity that is used lobby and negotiation approach.

Keywords: Community, community and government relations implementation, PR, PTPN V.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sumber daya alam yang Indonesia miliki jumlahnya tidak terhingga. Keuntungan ini disebabkan oleh, letak Indonesia yang dilewati garis Khatulistiwa. Segala jenis tumbuhan dapat hidup di tanah Indonesia yang subur. Dari sekian banyak tumbuhan, sawit menjadi salah satu tumbuhan yang menjadi komoditas utama di Indonesia. Ini disebabkan oleh olahan yang menghasilkan keanekaragaman, dan kegunaan yang membuat banyak pihak ingin meraup keuntungan dari hasil olahan tumbuhan sawit. Adapun olahan tersebut dapat berupa mentega, minyak goreng, sabun, dan olahan minyak sawit mentah.

Di Indonesia, peranan dalam produksi minyak sawit dunia sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya. Antara lain, Malaysia, Nigeria, Thailand, dan Columbia (http://www.kemenperin.go.id/artikel/1075/Indonesia-Produsen-Kelapa-Sawit-Terbesar). Penyebaran perkebunan sawit dapat dilihat dari Sumatera hingga Sulawesi. Dari sejumlah daerah-daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau tergolong dalam kategori penghasil sawit terbesar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Drs Zulher, Ms., tahun 2011 menyatakan, " Luas area kelapa sawit mencapai 2,3 juta hektare, atau 25 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia yang telah menghasilkan". (*Crude Palm Oil)* CPO sebesar 8.198.962 ton per tahun (https://www.riau.go.id).

Di propinsi Riau terdapat 410 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi. Tetapi, hanya ada 10 perusahaan yang memiliki sertifikat Indonesia ISPO (*Sustainable palm oil).* Dari data yang didapat pada tahun 2013 PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) telah memperoleh sertifikat ISPO (*Sustainable Palm Oil)*. ISPO *(Sustainable palm oil)* adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai Kementrian Pertanian, yang bertujuan untuk menghindari tudingan miring jika sektor perkebunan melakukan perusakan pada lingkungan sekitar. Kegunaan ISPO (*Sustainable palm oil)* adalah untuk meningkatkan daya saing minyak sawit di Indonesia. Pasar dunia ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen dengan Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk, mengurangi dampak perusakan lingkungan, dan emisi gas rumah kaca. Di lain hal, ISPO *(Sustainable palm oil*) juga meningkatkan tingkat kesadaran pengusaha kelapa sawit

Indonesia untuk memperbaiki lingkungannya. (http://www.ispo-org.or.id/index.php?lang=ina).

Memiliki sertifikat ISPO *(Sustainable palm oil)* sangat penting bagi pengusaha industri perkebunan sawit. Sertifikat ISPO *(Sustainable palm oil)* merupakan langkah awal bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa perkebunan sawit telah dikelola secara lestari. Artinya, proses produksi juga telah memperhatikan keseimbangan alam, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Sehingga, perusahaan tidak merusak citra di Mancanegara terkait perkebunan sawit yang cenderung merusak lingkungan.

Dari 410 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di daerah propinsi Riau, PTPN V (Perseorangan Terbatas Perkebunan Nusantara) menjadi salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PTPN V Pekanbaru di propinsi Riau, memiliki 23 perkebunan dan 40 unit yang tersebar di wilayah Riau. Berdasarkan letak geografis dari cabang perusahaan PTPN V Pekanbaru di propinsi Riau, perusahaan ini mayoritas berada dekat dengan lingkup masyarakat setempat. Maka, ISPO akan mengambil peran penting untuk mengantisipasi adanya gangguan dari masyarakat, yang dapat menghambat operasional perusahaan. Di dalam hal ini, penulis menyebut masyarakat dengan sebutan komunitas.

Komunitas merupakan pemberi dukungan dalam melancarkan jalannya operasional perusahaan. Ini disebabkan perusahaan adalah bagian dari komunitas perusahaan yang tumbuh dan berkembang bersama publiknya, baik secara internal maupun eksternal. Artinya segala aktivitas perusahaan di wilayah operasional, komunitas turut merasakan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pentingnya dukungan yang berasal dari komunitas mampu menciptakan hubungan baik, saling memahami kondisi kedua belah pihak, dan saling menguntungkan.

Istilah *good Profit means good reputation* adalah salah satu bentuk keberhasilan sebuah perusahaan hingga mampu mendapatkan sebuah reputasi yang baik. Caranya, perusahaan akan teus melakukan upaya pembenahan diri. Salah satunya, dengan lebih intens melakukan hubungan baik dengan publikn ya. Jika perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan komunitas maka, akan memunculkan peluang yang sifatnya pemberontakan dari komunitas. Sebaliknya, apabila hubungan perusahaan kepada komunitas berlangsung baik seperti membawa manfaat kepada komunitas maka, tentunya akan menjadi pendukung bagi operasional perusahaan.

Analogi sebuah perusahaan akan melakukan pertahanan ditengah persaingan ketat pada zaman modern ini. Maka, perusahaan sudah seharusnya memiliki kemampuan analitis, dan kemampuan cepat tanggap dalam mengantisipasi perubahan sosial, dan juga perkembangan pasar. Menjaga keharmonisasian perusahaan dengan komunitas juga termasuk dalam antisipasi perbedaan persepsi di lapisan komunitas. Salah satunya melalui *mutual understanding.* Kegiatan ini perlu menjalin hubungan dengan komunitas karena, peran komunitas yang mampu membawa pengaruh ke perusahaan di berikan komunitas dalam bentuk dukungan, atau dalam bentuk penentangan tujuan dari perusahaan. Komunitas tersebut tergolong pada khalayak yang ditargetkan oleh kegiatan *Public Relations* yang dikenal dengan istilah *Stakeholders.*

Kasali, (2003:63) menyebutkan, "*Stakeholders* adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peran penting untuk keberhasilan perusahaan, kelompok ini dapat berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan". Indikator keberhasilan perusahaan dapat melalui kepuasan kelompok-kelompok dalam *Stakeholders*. Maka, akan menjadi efektif apabila perusahaan memilih jalan menyetarakan tingkat kepentingan perusahaan dan kepentingan komunitas dalam lingkungan. Ketika perusahaan telah melakukan tingkat penyetaraan maka, otomatis perusahaan akan mencapai tujuan yang sama pentingnya bagi kedua belah pihak.

Value perusahaan di era Globalisasi telah mengalami pergeseran. Perusahaan dihadapkan dengan tanggung jawab aspek sosial. Aspek keuntungan ekonomis semata, yang direfleksikan dalam kondisi keuangan kini menjadi prioritas kedua. Untuk perusahaan yang menginginkan tumbuh secara berkelanjutan (*Sustainable)* tidak dapat mengandalkan finansial semata. Keberlanjutan perusahaan juga ditimbang berdasarkan sejauh mana perusahaan meletakkan perhatiannya terkait aspek sosial dan lingkungan.

Fenomena yang terjadi antara komunitas dengan perusahaan dapat dijumpai pada kasus PTPN V Pekanbaru di propinsi Riau. Salah satunya, di Kebun Sei Kencana yang menyebabkan adanya tindakan pemberontakan komunitas. Konflik yang bersumber dari komunitas Senama nenek (suku komunitas) berupa sengketa lahan sebesar 2.800 ha. Komunitas ingin menduduki lahan tersebut. Karena, menurut salah satu sumber lahan tersebut digunakan usaha PTPN V Sei Kencana adalah lahan milik nenek moyang komunitas. Adanya peluang belum terbitnya Hak Guna Usaha (HGU) di Sei Kencana desa

Senama nenek turut dirasakan komunitas. Hal ini menjadi pemicu komunitas untuk, mempertahankan hak lahan yang diakui sebagai peninggalan nenek moyang komunitas.

Di dalam dokumen yang tidak diterbitkan oleh PTPN V diketahui bahwa, data berupa kronologi kejadian tindak anarkis pada hari senin, tanggal 21 Oktober 2013 (http://regional.kompas.com/read/2013/10/21/1449442/Bentrok.di.PTPN.V.Senama.Nenek.Warga.Luka-luka). Anarkis tersebut mengartikan adanya perlakuan yang menjatuhkan korban, akibat dari baku tembak dan lemparan batu antar karyawan dengan komunitas. Pemberitaan ini muncul di media televisi Metro TV dalam kurun waktu yang sama pada tanggal 21 Oktober 2013. Keterlibatan jumlah yang besar dari konflik tersebut membuat Sei Kencana menurunkan 3000 personil karyawan perusahaan serta aparat kepolisian sebagai alasan mencuatnya berita ini.

Berdasarkan konflik yang terjadi antara komunitas dengan lingkungan sekitar perusahaan, relasi hubungan yang dimiliki kebun Sei Kencana PTPN Pekanbaru, Riau, dengan komunitas tidak berjalan dengan baik. sehingga, perlu menerapkan sebuah kegiatan yang namanya *community relations*. Hal ini dapat berguna sebagai penanganan konflik yang menggunakan berbagai macam bagian dari program *community relations*.

Jerold dalam Iriantara (2004: 20) mendefenisikan, "*Community relations* sebagai peningkatan kepedulian atau partisipasi dan posisi organisasi didalam lingkup komunitas melalui upaya-upaya guna kemaslahatan bersama bagi organisasi maupun komunitas". Adapun komunitas secara umum dapat diartikan sebagai klien, lingkungan, investor, pemerintah, serta lembaga lainnya. *Community relations* merupakan salah satu bentuk cara dalam melakukan interaksi dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan jalannya perusahaan.

Menurut Kasali (1999: 27), "Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal pada wilayah di sekitar perusahaan". Masyarakat tersebut meliputi masyarakat yang menetap atau bermukim untuk mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan, atau disekitar aset tetap perusahaan lainnya. Nama lain dari masyarakat sekitar juga dikenal dengan *community* atau komunitas. Program *community relations* dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan. Pertama, tidak menutup diri saat publik melakukan kiritikan, berikan penjelasan guna meluruskan selisih paham disertai melakukan upaya meraih dukungan dan opini yang positif dari komunitas. Kedua, dapat memperoleh sokongan dari pihak hukum untuk mempengaruhi suasana kerja komunitas.

Ketiga, guna mendapatkan hal-hal yang berkaitan sikap, keluhan dan harapan dari komunitas. (Cutlip, Center & Broom, 2000).

Di sisi lain *community relations* sangat menguntungkan jika penerapannya dilakukan dengan benar. Salah satunya dengan cara bekerjasama dengan baik. sehingga, perusahaan bergantung dengan komunitas, begitu juga sebaliknya komunitas bergantung dengan perusahaan. Bagi perusahaan, lingkungan digunakan sebagai tameng pencegahan pihak eksternal yang menjadi penghambat operasional, dan pihak lain yang mengancam terjadinya krisis. Selanjutnya bagi komunitas, perusahaan dapat menjadi wadah untuk meminimalisir jumlah angka pengangguran.

Menurut Iriantara (2013:70), "Keuntungan melakukan *community relations* juga dapat berupa kemanan yang lebih besar, "lisensi untuk beroperasi" secara sosial, infrastruktur dan lingkungan sosial yang lebih baik, Reputasi dan citra organisasi yang lebih baik". Keuntungan ini masih berkaitan dengan sebuah insiden gangguan dari pihak eksternal perusahaan yakni komunitas. Apabila program *community relations* terselenggara dengan baik maka, dapat meminimalisir peluang adanya pemberontakan tindak anarkis yang berasal dari komunitas lingkungan perusahaan tersebut. Konflik yang terjadi pada PTPN V Pekanbaru di propinsi Riau, tepatnya di kebun Sei Kencana menjadi tamparan untuk meningkatkan kewaspadaan ancaman krisis dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal yang dialami PTPN V Pekanbaru, juga menjadi sorotan media. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dapat terlepas dari pantauan pemerintah.

PTPN V Pekanbaru di daerah propinsi Riau, memerlukan koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah memiliki posisi yang tidak kalah penting dari komunitas. *Government relations* berfungsi menciptakan keselarasan untuk kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada setiap perusahaan milik negara. Artinya, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak, investasi, dan hal penting lainnya menjadikan pemerintah selaku penjamin tempat berlindung kala krisis menerpa perusahaan. *Government relations* merupakan bagian khusus dari tugas *public relations* yang bertujuan untuk membangun, serta memelihara hubungan baik dengan pemerintah dalam kepentingan mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. Kasali (1994) dalam jurnal Margaretha (2012)

Pada *government relations* memiliki berbagai program yang diterapkan dan digunakan oleh praktisi PR. Salah satunya komponen yang melekat pada *government relations* adalah *lobby* dan negosiasi. Tentunya perusahaan akan berhubungan dengan perizinan untuk perusahaan beroperasi, khususnya PTPN V yang bersinggungan dengan lahan sawit. Perusahaan akan mengurus perizinan dari pihak pemerintah agar menghindari hal-hal yang melanggar aturan hukum dan menghindari protes ketidaknyamanan komunitas.

Di dalam implementasi *community* dan *government relations*, Humas (Hubungan Masyarakat) atau *public relations* hadir untuk berhadapan dengan berbagai macam bentuk publik dan pemerintah. Perusahaan menggunakan *public relations* sebagai penghubung organisasi ke masyarakat dan pemerintah. *Public relations* berperan untuk menjembatani kepentingan organisasi yang berkaitan dengan pihak eksternal perusahaan.

Andil pemerintah dikatakan cukup besar tanggung jawabnya dengan masyarakat. Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah melayani rakyat. Namun, pemerintah masih pada batas pemilik otoritas. Pemerintah, masyarakat, dan perusahaan adalah tiga elemen yang saling memiliki keterkaitan kepentingan. Untuk memudahkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan diperlukan adanya komunikasi yang tepat.

Ada pun pemerintah yang dimaksud di sini ialah pemerintah Kabupaten Kampar (pemerintah daerah) propinsi Riau, yang berhubungan langsung dengan perusahaan PTPN V kebun Sei Kencana. Perusahaan PTPN V yang merupakan BUMN selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki otoritas pengambil kebijakan yang mengikat secara hukum semua lapisan masyarakat. Artinya, pemerintah akan memonitoring perusahaan melalui tanggung jawab sosial *corporat.* Membangun relasi yang intensif dengan pemerintah akan turut mendukung perjalanan kehidupan perusahaan di tengah masyarakat. Pemerintah dangan rakyatnya akan memiliki hubungan yang lebih dekat dari pada ke perusahaan.

Sesuai paparan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi *community* dan *government relations* di Kebun Sei Kencana PTPN V Pekanbaru. Dari 23 perkebunan yang ada, terdapat tiga perkebunan yang termasuk ke dalam daerah konflik. Salah satunya di kebun Sei Kencana yang menjadi sorotan dari tiga perkebunan, melalui pemberitaan media dengan konflik yang dialami antara perusahaan dengan komunitas. Karena bentuk konflik yang dominan pada komunitas maka, peneliti

tertarik untuk mengangkat tema terkait *community relations* yang berdasarkan dari adanya hambatan dalam menjalankan program *community relations.*

Oknum-oknum komunitas yang mengklaim tanah pada wilayah tersebut, merupakan harta turun temurun dari orang-orang sebelumnya. Sehingga komunitas meminta perusahaan untuk memerlukan izin terlebih dahulu. Tujuan mendapatkan keuntungan lebih teridentifikasi dari modus komunitas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perusahaan memperlakukan komunitas, dan bagaiman hubungan perusahaan pada pemerintah sehingga menimbulkan pemberontakan yang melibatkan komunitas. Peneliti berharap agar dapat menjadi penyambung dari ketiga bagian ini, yakni Perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Baik itu pada perubahan sosial, maupun pada jalinan hubungan baik dengan pemerintah selaku *stakeholders*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah analisis implementasi *community* dan g*overnment relations* di unit perkebunan Sei Kencana PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan analisis implementasi *community* dan *government relations* di unit perkebunan Sei Kencana PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan bermacam manfaat, baik manfaat secara akademik maaupun manfaat sosial. Selanjutnya juga dapat dijadikan sebuah peran serta bagi akademisi, dan masyarakat umum, guna menyelesaikan masalah pada bidang ilmu komunikasi. Khususnya pada kajian *community* dan *government relations*. Adapun manfaat penelitian akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Manfaat akademik
    1. Penelitian ini untuk memperkaya khasanah teoritik pada bidang *community* dan *government relations* bagi instansi yang diteliti;

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya dalam menyelesaikan krisis dengan komunitas dan perusahaan berikutnya.

b) Manfaat Sosial

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi lembaga (objek yang diteliti) sebagai bahan acuan dalam mempertimbangkan landasan pengambilan kebijakan keputusan terkait dengan implementasi *community* dan *government relations*;
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan pengambilan kebijakan publik akan pengetahuan perkembangan penerapan *community* dan *government relations*;
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber mata air lainnya dalam menambah pengetahuan terkait *community* dan *government relations* pada sebuah instansi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Dari identifikasi penulis terdapat penelitian terdahulu sebagai bentuk referensi bagi peneliti ini. Adapun beberapa penelitian tersebut memiliki hubungan yang berkesinambungan bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dijadikan rujukan peneliti mengandung unsur yang tidak jauh dari *government* dan *community relations*, juga masih di bawah naungan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut pemaparan dari penilitian terdahulu.

Pertama, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Brilliant pada tahun 2014 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII yang berjudul "Aktivitas *Community Relations* yang dilakukan oleh Humas PT. (Persero) Angkasa Pura 1 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menjalin Hubungan dengan Komunitas Lokal". Tujuan aktivitas *community relations* dilakukan adalah dalam rangka membangun hubungan harmonis dengan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya program *community relations* yang berlangsung pada PT. Persero Angkasa Pura 1 merupakan program berbentuk fisik, dan non fisik dengan pembagian dua kelompok yang terpisah. Adapun aktivitas pertama *bersifat charity*, dan aktivitas kedua melalui *long term goal*. konsep ini berlandaskan pada kemitraan dan

pengembangan masyarakat. Secara garis besar aktivitas *community relations* yang dilakukan pihak PT. Persero Angkasa Pura 1 lebih memberatkan kepada konsep kemitraan. Dengan konsep kemitraan terlihatlah hasil akhir yang bersifat jangka panjang dalam melakukan pendekatan kepada komunitas lokal.

Kedua, penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Ndaru Kuncoro dalam bentuk skripsi pada tahun 2015 mahasiswa Program Studi Jurusan Ilmu Komunikasi FKI UMS. Judul penelitiannya adalah "Strategi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Jakarta dalam Menjadikan DKI Jakarta Sebagai Kota Gas (City Gas) di Indonesia)". Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukannya meliputi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa arsip data terkait program kota gas yang dilakukan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Hasil penelitiannya adalah memperlihatkan peran besar dari praktisi *public relations* dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintah melalui hubungan baik dengan *stakeholder*, baik secara internal maupun eksternal. Adapun strategi yang dilakukan PR dengan pemilihan taktik untuk melakukan strategi *government relations* yakni dengan cara *direct lobbying, grassroots lobbying, dan corporate approachment*. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa tantangan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan gas bumi, persaingan antara perusahaan BUMN yang cukup tinggi dalam pengembangan jaringan gas di Jakarta, dan kurangnya pemahaman perusahaan terkait birokrasi di pemerintahan.

Ketiga, Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Arni Prabawati pada tahun 2014 mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR dengan judul "Strategi Government Relations PT. PAL Indonesia (Persero) Untuk Mempengaruhi Komite Kebijakan Indistri Pertahanan Dalam Penunjukan Lead Integrator Alutsista Matra Laut Pada Tahun 2012". Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah, "Bagaimana strategi *government relations* yang dilakukan pihak PT. PAL Indonesia (Persero) dalam menjadikan PT. PAL sebagai penunjukan lead integrator alutsista matra laut pada tahun 2012 ?". Hasil penelitiannya adalah departemen Humas pada implementsi *government relations* ini tidak terlibat dalam perencanaan strategi *government relations* secara langsung dan menyeluruh, tetapi hanya selaku fasilitator komunikasi dan pelaksana teknis. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. PAL dalam penerapan *strategi government relations* dengan menyasar langsung pada decision maker yaitu *melalui direct lobbying,*

audiensi dan special event. Hal yang telah diterapkan oleh PT. PAL menjadi *best practice* ketika perusahaan telah memiliki *bargaining power* yang tinggi pada pemerintah.

Keempat, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Moh Aniq dengan judul penelitian "Penerapan Strategi Komunikasi Program Community Relations Oleh Sebuah Organisasi (Studi kasus Program Dana Kompensasi Batubara PLTU 1 Rembang Oleh PT. Zelan Priamanaya Kepada Masyarakat Desa Leran dan Trahan Sluke, Kabupaten Rembang). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode analisis studi kasus. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini membahas program community relations untuk mengatasi penolakan masyrakat dengan pembangunan PLTU Rembang yang akan merusak lingkungan masyarakat. Kegiatan community relations dilakukan dengan memberikan dana kompensasi yang diharapkan mampu menjalin hubungan yang baik dengan komunitas sekitar proyek pembangunan PLTU 1 Rembang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada metode penerapan program community relations dengan pemberian dana kompensasi polusi debu batubara bukan keaktifan dari pihak PT. Zelan Priamanaya , namun program ini terlaksana karena adanya keinginan dari hasil tuntutan masyarakat desa Leran dan Trahan. Namun setelah menerima dana kompensasi sebagian warga merasa tidak puas atas besaran nominal yang telah diberikan oleh PT. Zelan Priamanaya dari dana kompensasi yang telah diberikan.

Kelima, Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Titi Mora Margaretha pada tahun 2012 mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UI, dengan judul "Strategi Komunikasi Dalam Hubungan Pemerintahan *(Government Relations)* Pada Pemerintahan Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Pada PT Mosesa Petroleum)". Tujuan Penelitian ini adalah, "Bagaimana kegiatan divisi *government relations* yang dilakukan oleh *public relations* oleh PT Mosesa Petroleum dalam upaya membina hubungan baik dengan pemerintah?, Beserta kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?". Penelitian ini menggunakan metode paradigma kontruktivis, pendekatan kualitatif, dan penelitian deskriptif. Dalam melaksanakan kegiatan *Government Relations*, PR menggunakan konsep kegiatan dan sasaran *government relations* yang benar melalui kegiatan Lobby, negosiasi, penyuluhan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, dan seminar terkait kegiatan operasional perusahaan dengan melibatkan pihak-pihak pemerintahan sebagai peserta. PR *Mosesa Petroleum* melakukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan konsep. Seperti Lobby langsung, negosiasi

formal, kegiatan CSR dengan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah operasional, kegiatan penyuluhan yang berhubungan denga kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, dan kunjungan ini bersifat formal. Adapun kendala yang didapatkan oleh PT Mosesa Petroleumterkait kebijakan perusahaan yang berasal dari kebijakan BP Migas yang mengatur tidak diperkenankannya pemberian uang kepada pemerintah yang berdampak pada permasalahan sistem birokrasi yang sulit dalam pemerintahan. Namun, sejauh ini PR mampu menanganinya dengan baik.

Kaitan dengan Penelitian Terdahulu dengan peniliti saat ini dipaparkan sebagai berikut dari penelitian yang kedua yaitu dari skripsi Ndaru Kuncoro dengan judul "Strategi PT.Perusahaan Gas Negara (Persero) Jakarta dalam menjadikan DKI Jakarta sebagai Kota Gas (City Gas) di Indonesia" dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran aktif dari praktisi *Public Relations* dalam pelaksanaan menjalin hubungan baik dengan pemerintah melalui membangun hubungan dengan *stakeholders* internal maupun eksternal, melalui kegiatan *Direct Lobbying, Grasroots Lobbying,* dan *Corporate Approachment*. Implementasi *Government Relations* pada penelitian terdahulu perusahaan memiliki hasil akhir yang kemudian mengahrapkan kemudahan dalam hal birokrasi atas kegiatan operasional PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) yang diberikan pemerintah, dan adanya bantuan dalam membujuk masyarakat yang tinggal pada daerah sekitar operasional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hasil akhir pada *government relations* tidak menggunakan Pemerintah Daerah dalam rangka pendekatan dengan Komunitas Sei Kencana.

Penelitian ketiga yaitu dari Skripsi Moh. Aniq dengan judul "Penerapan Strategi Komunikasi Program *community relations* oleh sebuah Organisasi (Studi kasus Program Dana Kompensasi Batubara PLTU 1 Rembang Oleh PT. Zelan Priamanaya Kepada Masyarakat Desa Leran dan Trahan Sluke, Kabupaten Rembang). Hasil dari penelitian ini membahas program *community relations* dengan cara pemberian dana kompensasi kepada masyarakat yang mana komunitas adalah pihak penuntut. Kompensasi yang dilakukan kepada masyarakat bukan semata-mata dari tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi atas dasar tuntutan dari komunitas yang menjadi kendala dari operasional perusahaan. sedangkan hasil dari penelitian penulis *community relations* dijalankan berdasarkan tanggung jawab sosial dengan melakukan perencanaan hingga evaluasi melalui PKBL dan pola KKPA yang tidak bergantung pada kompensasi dan sejenisnya.

2. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang *Public Relations*

a. Pengertian *Public Relations*

Kehumasan kerap kali dinilai sebagai bentuk komunikasi satu arah. Dimana kehumasan dikaitkan dengan hal "pembujukan". Membujuk publik untuk paham akan keberadaan sebuah instansi yang memiliki tujuan baik. Defenisi ini telah usai seiring ilmu kehumasan yang selalu mengalami perkembangan usai perang dunia II. Humas kini tak lagi hanya sebagai komunikasi satu arah yang bertujuan membujuk pihak lain, namun humas kini bertransisi pada komunikasi dua arah. Dua arah artinya adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Tidak lagi hanya instansi yang mendapatkan keuntungan, namun publik berhak mendapatkan keuntungan, yaitu berupa bentuk dari tanggung jawab sosial instansi.

Perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas *public relations*. *Public relations* dapat dikatakan sebagai fasilitator komunikasi. Dimana *public relations* memiliki tanggung jawab sebagai penghubung corporat, dengan mitra, atau pun pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan melalui komunikasi. Menurut Broom, dkk. (2009:6), "*Public relations* adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut". Defenisi ini sejalan dengan pendapat Iriantara dalam Bernays (2010:5), "Bahwa *public relations* suatu profesi yang melakukan hubungan atau membangun relasi-relasi dari satu unit ke publiknya dengan didasari berlangsungnya kehidupan".

Ini salah satu alasan mengapa organisasi sulit dipisahkan dari *public relations*. Alasan *public relations* mengemban tugas dalam menciptakan suatu hubungan dua pihak, yang mana kedua belah pihak tersebut adalah antara corporat dengan publiknya. Hubungan publik dengan corporat memiliki peranan penting sebagai penentu kegagalan, ataupun keberhasilan dari corporat.

Defenisi mengenai *public relations* yang lahir dari para ahli memiliki banyak jenis. Memiliki sifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan gelora komunitas yang cenderung akan mengikuti pergeseran zaman sebagai sumber dari beragamnya defenisi *public relations*. Defenisi lainnya datang dari kutipan DeFleur dan Dennis dalam Iriantara (2010:5), "*Public relations* merupakan proses terjadinya komunikasi, yang di dalamnya

melibatkan satu unit dengan publik didasari sebagai relasi untuk berlangsungnya kehidupan".

Dalam perspektif *public relations,* selain komunitas pemerintah juga menjadi salah satu elemen penting pada otoritas pengambilan kebijakan dan keputusan yang mampu membawa pengaruh suatu perusahaan. Menurut Kasali dalam jurnal Margaretha (2012) *government relations* salah satu tugas *Public Relations* yang orientasinya pada upaya membangun hubungan dengan pemerintah dengan misi suatu kepentingan guna mempengaruhi suatu kebijakan.

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan tersebut, posisi *public relations* selalu berkaitan dengan proses komunikasi dan penerapan kegiatan dalam suatu perusahaan. Kegiatan *public relations* hakikatnya sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Baik dari sektor pemerintah, Profit, dan Non-Profit. Ada kalanya *public relations* sebagai media yang menjembatani perusahaan dengan publiknya, mampu meminimalisir sekaligus menghindari masalah yang akan timbul. Caranya dengan memberikan pemahaman kepada salah satu perusahaan untuk melakukan komunikasi dari dua arah. Komunikasi dua arah akan membawa dampak *mutual understanding* dari kedua belah pihak. Sehingga tujuan tersebut akan terlaksana dengan baik.

b. Fungsi *Public Relations*

Fungsi Management telah melekat pada profesi *public relations* yang menggunakan metode komunikasi, dengan mencakup berbagai ragam teknik komunikasi. Fungsi *public relations* menurut Widjaja (2002:2) adalah, "Aktivitas yang memiliki tujuan dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi dalam upaya membangun hubungan harmonis antara publik internal dan publik eksternal".

Menurut Ruslan dalam Dizier dan Broom (2002:21), "Peranan *public relations* dapat dibagi dalam empat kategori dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. *Expert Describer* adalah menggunakan praktisi *Public Relations* pada peran *Looking for a Solution* (pencari solusi) yang mendukung perusahaan keluar dari permasalahn hubungan dengan publiknya;
2. *Communication Fasilitator* adalah setiap keadaan untuk membantu manajemen dalam menampung aspirasi dari publiknya kepada perusahaan dengan tindakan *Public Relations* selaku komunikator atau mediator yang mampu memberikan penjelasan

kembali bagaimana harapan dan keinginan yang disertai kebijakan perusahaan kepada publiknya;

3. *Problem Solving Process Fasilitator* merupakan penempatan peran *Public Relations* sebagai penasehat (*adviser)* hingga tindakan eksekusi (keputusan) yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan dalam menangani persoalan secara rasional dan profesional;
4. *Communication Technican* yaitu suatu bentuk layanan teknis komunikasi dan dilakukan dengan sistem komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan. Hal ini disesuaikan dengan masing-masing bagian dan level.

Di dalam praktiknya pengaruh peran *public relations* memiliki power cukup kuat dalam aspek internal dan eksternal. Aspek internal meliputi, karyawan dan investor. Aspek internal merupakan bagian khusus dari *public relations* yang menjaga sebuah hubungan baik dan menimbulkan manfaat antara manager dengan karyawan tempat organisasi beroperasi. Sedangkan publik eksternal meliputi, media/pers, komunitas, konsumen, dan pemerintah. Perusahaan besar rentan terkena tuntutan dan segala macam yang berkaitan dengan hukum, dari berbagai pihak yang ingin mengambil keuntungan perusahaan. Maka *public relations* di dalam penelitian ini mengambil alih fungsi dalam membangun dan mengembangkan kerja sama dengan departemen hukum.

Dalam pengadaan fungsi *Public Relations* dirumuskan kedalam tiga peran: yakni Kedalam Fungsi Strategis yaitu Strategi didefinisikan sebagai rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan taktis memiliki sari sebagai berikut Taktis didefinisikan sebagai melibatkan atau berkaitan dengan tindakan, tujuan, atau sarana yang bersifat langsung atau jangka pendek dalam durasi, dan / atau kurang penting atau besarnya, dibandingkan strategi atau tujuan yang lebih besar, fungsi operasional adalah Operasional didefinisikan sebagai atau berkaitan dengan operasi mengenai program-program jangka pendek.
(https://winsukardi.wordpress.com/2015/06/21/peran-strategis-dan-perumusan-strategi-taktis-dan-operasional-fungsi-pengadaan/ diaskes pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 22.00 WIB).

C. Proses Public relations

Rumanti (2005:7-8) mengatakan, Ada empat tahap yang akan dilalui oleh *Public Relations*. Pertama penelitian yang didahului penemuan. Penemuan akan berguna untuk membawa PR ke akar permasalahan. Kemudian kedua analisis, melalui pengolahan data untuk mendapat hasil konkret dengan penjelasan yang dapat dibuktikan. Ketiga planning yaitu pelaksanaan yang dapat dilakukan bermula dari penemuan yang telah didapat dan berdasarkan hasil data. Keempat evaluasi yaitu penilaian setiap tahap dan evaluasi.

Seorang praktisi *public relations* hendaknya memiliki syarat kejiwaan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran, integritas, dan loyalitas merupakan kunci utama praktisi *public relation* dalam etika profesi *public relation*. Karena yang akan dihadapi *public relation* adalah manusia. Manusia dengan beragam pemikiran yang memerlukan analisa panjang. Tidak akan menjadi hal yang mudah bagi seorang praktisi *public relations*, dimana ia dituntut untuk melindungi perusahaan tanpa menipu pihak-pihak lain hanya dengan tujuan untuk menjaga citra semata

Maka, *public relations* akan melalui tahap panjang. Meliputi, pertama menciptaan bagaimana *public relations* akan mengidentifikasi peluang apa yang dapat mengangkat ekonomi komunitas. Kedua, ketika telah menemukan peluang maka tugas *public relations* akan beralih fokus kepada pengembangan melalui media ataupun lainnya, dan ketiga adalah *follow-up* selalu mengikuti naik turunnya peluang yang telah dikembangkan, atau dengan kata lain selalu melakukan pemantauan (sumber).

Adapun ruang lingkup *public relations* dikenal dengan singkatan PENCILS, yaitu *publications, events, news, community involment, identity media, lobbying, social investment* (Kriyantono, 2012: 23).

a. Publications (publikasi)
   suatu aktivitas mengupayakan organisasi atau individu ditempatkan dalam suatu berita melalui media massa dengan tujuan meningkatkan citra dari yang diberitakan.
b. Events (Kegiatan)
   Events telah dirancang dengan menggunakan perencanaan akurat demi mencapai suatu tujuan dari Public Relations.

c. News (Pemberitaan)

   Kegiatan dalam mengumpulkan berita dari aktivitas perusahaan untuk menjadi bahan berita di media massa.

d. Community Involvement (kepedulian kepada Masyarakat)

   Menjalin hubungan baik dengan lingkungan dengan memperlihatkan sikap ramah hingga terjalin keakraban. Biasanya diterapkan pada perusahaan yang mendirikan cabang ataupun pada perusahaan yang terletak pada georafis dekat dengan masyarakat.

e. Identity Media (penggunaan media sebagai identitas)

   Segala hal atribut dari perusahaan mulai dari amplop, kartu nama, kertas dan hal kecil lainnya dipakai dan didesain dengan semenarik mungkin. Ini dapat meningkatkan citra dari perusahaan.

f. Lobbying (Mempengaruhi)

   Adanya interaksi secara langsung ataupun tidak langsung yang bersifat pribadi untuk mencapai tujuan tertentu.

g. Social Investment (investasi sosial)

   Segala aksi yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian dari khalayak. Dengan maksud menyentuh sisi empati khalayak dengan kegiatan membangun masjid, jembatan, ataupun fasilitas umum yang berguna bagi khalayak.

D. Tujuan *Public Relations*

Peran *public relation* mengharuskan praktisi meletakkan kewaspadaannya terhadap media. Di era keterbukaan pers pada masa kini mengindikasikan bahwa media lebih senang dan tertarik mengangkat isu kemiringan atau penyimpangan yang dilakukan perusahaan dari pada mengangkat prestasi dari perusahaan itu sendiri. Menurut Soemirat dan Ardianto (2015:12, “Membina suatu hubungan baik dengan pers akan menjadi jalan untuk lebih dekat dengan komunitas, dimana media akan mempublikasikan seluruh kegiatan perusahaan agar komunitas merasakan kedekatan dengan instansi”.

Jika ditelaah fungsi dari peran *public relations* dalam organisasi, *publick relations* merupakan pembangun pondasi kuat pada suatu lembaga dan tentu saja komunitas akan menjadi sasaran utama *public relations*. Bertitik tolak dari uraian tersebut menarik melihat posisi *pubic relations* tidak diperkenankan untuk mempublish hal negatif dari organisasi.

Untuk memperlancar interaksi kepada komunitas (publik) sesuai apabila, dilakukan dengan cara kampanye (berlanjut).

E. Community Relations dalam Corporat

a. Pengertian dan Fungsi Komunitas

Komunitas diartikan dengan beragam makna tergantung bagaimana pada konteks kalimatnya. Komunitas dalam *public relations* adalah kelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki kepentingan yang sama. Peak dalam Iriantara (2004: 22) menyebutkan, "Komunitas dalam konteks PR telah mengalami pergeseran. Komunitas bukan lagi sekedar kumpulan orang yang tinggal pada lokasi yang sama tapi juga menunjukkan terjadinya interaksi diantara kumpulan orang tersebut. Artinya komunitas tidak lagi berlandas pada lokalitas semata namun menjurus pada struktur".

Peran komunitas bagi keberhasilan perusahaan memiliki pengaruh besar secara keseluruhan. Semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya dari menjalin hubungan baik dengan komunitas. Loyalitas komunitas akan menjadi pondasi utama pertahanan terkuat yang bisa menahan serangan krisis. Hubungan perusahaan dengan komunitas dapat dipandang sebagai suatu relasi yang terus mengalami pengembangan, guna membuka ruang bagi terealisasinya tanggung jawab sosial perusahaan.

Tentunya pada orde ini, organisasi lagi-lagi memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tempat organisasi beroperasi. Menurut Broom, dkk. (2009:5), "Tanggung jawab sosial ini suatu kewajiban yang muncul dipermukaan sekitar tahun 1960-an". Maka akan semakin berat kewajiban perusahaan dalam memahami berbagai variasi asumsi dari tanggung jawab sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat Daugherty dalam Iriantara (2010:26), "Tanggung jawab sosial adalah Hasil dari pengembangan yang ditujukan untuk proses evaluasi *stakeholders* dan tuntutan lingkungan juga implementasi segala jenis program dalam penanganan isu-isu sosial". Ada tiga elemen yang akan saling berkaitan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yakni, kode-kode etik, sumbangan perusahaan program-program *community relations*, dan tindakan mematuhi ranah hukum. Dari defenisi tersebut perusahaan dapat dilihat melalui dua sudut yaitu, perusahaan sebagai lembaga yang mencari laba (ekonomi), dan perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang memikul beban untuk kesejahteraan komunitas.

Semakin rapat dan rapi jalinan hubungan dengan komunitas, maka semakin baik pula citra perusahaan di mata komunitas. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan komunitas diperlukan proses berupa tahap-tahap dalam *penerapan community relations* tentunya dengan menganalisa terlebih dahulu bagaimana kondisi dari komunitas itu sendiri.

Konsep dasar komunitas meliputi :

a. Perkumpulan (Association), yaitu organisasi kelompok yang terdiri dari komunitas. Titik fokus kelompok diletakkan pada penyediaan terkait layanan atau dapat juga seperti pengkoordinasi usaha lokal;
b. Pelaku Utama (Actors), yang berarti pimpinan. Mobilisasi atau penyerahan dari pimpinan menjadikan anggota perkumpulan beserta penduduk lainnya menunggu;
c. Tindakan (Action) yaitu dalam aksi nyata yang dapat dilihat dan dirasakan melalui pembangunan, pembuatan kebijaksanaan, dan berupa aktivitas lainnya yang berupa fisik dengan tujuan pengenalan dasar komunitas;
d. Susunan kepentingan (interest configuration) merupakan kumpulan data atau file-file dari hasil perkumpulan atau aktivitas yang berkepentingan dengan komunitas. (Kaufman, 1988: 55)

Komunitas yang memiliki urgensi dengan perusahaan tentunya memiliki perbedaan dengan masyarakat atau manusia yang berkerumun oleh manusia lainnya. Untuk membedakannya, ada lima faktor yang mampu membedakan dua jenis manusia yang terlihat sama yaitu:

1. Pembatasan dan ekslusivitas mengelompokkan siapa yang menjadi anggota dan yang bukan anggota;
2. Tujuan yang jelas berbeda, tujuan merupakan acuan keberadaan komunitas;
3. Aturan yang memberikan pembatasan akan perilaku komunitas. Artinya pelanggaran yang dilakukan komunitas juga termasuk didalamnya;
4. Komitmen terhadap kesejahteraan sesama atau orang lain. Sehingga terciptanya rasa kepedulian kepada orang lain yang berada dalam lingkungan yang sama. Secara tidak langsung mengajarkan komunitas dalam bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap komunitas lainnya;
5. Kemandirian, mendapatkan kebebasan secara luas dalam menetapkan sebuah pilihan yang akan dilakukan dan cara memasuki komunitas. (Iriantara, 2004: 25)

Publik dan komunitas dalam kajian komunikasi teori *public relations* dituangkan dalam aplikasi praktis. Di mana para ilmuwan menemukan ambiguitas pada teori komunikasi *public relations.* Ini juga terkait dengan perbedaan komunitas dan manusia yang tidak memiliki kepentingan dan telah di paparkan sebelumnya. *Community relations* memiliki konsep yang kompleks sehingga lebih mempresentasikan esensi dari *public relations*. Adapun komunitas pada dewasa ini dituntut untuk bersifat pro-aktif, bukan hanya sebatas reaktif.

Sikap saling peduli yang dibangun pada komunitas dan organisasi menjadi bagian utama dalam penerapan konsep *community relations.* Menurut Kruckeberg dan Sturck (1988 : 117), "Sebuah peran untuk mendukung terciptanya dukungan sosial kemanusian, hal ini merupakan salah satu fungsi kemanusiaan dan altruisme organisasi disamping sikap filosofi pragmatisnya".

Salah satu dari perbedaan publik dengan komunitas adalah sebuah pandangan yang diberikan organisasi terhadap publik dan komunitas. Publik sulit dalam menentukan posisi hingga pada saat publik memperlihatkan sebuah perhatian lebih untuk membuat posisinya terkenal. Komunitas mudah dalam menentukan posisi yaitu familiar, atau komunitas telah terbiasa dengan hal yang berkaitan dengan kepentingan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Broom dan Dozier dalam Putra (2008: 5.27-5.29), "Telah melakukan pendekatan segmentasi publik sebagai cara memahami siapa saja publik perusahaan dengan mengkategorisasikan. Segmentasi publik tersebut yaitu, Geografis, Demografis, Psikografis, Covert Power, Posisi, Reputasi, Keanggotaan, Peranan, dan Perilaku Komunikasi Publik".

b. Pengertian dan Program *Community Relations*

Urgensi *community relations* dengan komunitas adalah menciptakan keuntungan dari kedua belah pihak dalam lingkup lingkungan yang akan menjadikan komunitas peduli dengan kesadaran penuh untuk membina lingkungannya. Sehingga lembaga dengan komunitas akan menjalin kerja sama yang baik. Artinya hubungan yang dijalin perusahaan dengan komunitas dapat bersifat simbiosis (saling menguntungkan).

Gregory Dalam Iriantara (2004: 21), *"Community relations* atau kata lain hubungan komunitas adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan lebih satu stakeholders, guna meningkatkan reputasi perusahaan menuju perusahaan yang baik untuk masyarakat". Praktik *community relations* selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Ini berhubungan dengan konsep komunikasi yang selalu mengalami kemajuan pada bidang ilmunya. *Community relations* kini merambat pada tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan.

Menempuh cara dengan membagikan sembako dan memberikan bantuan-bantuan dalam acara keagamaan, atau pun sumbangan pada hari-hari besar untuk mendekatkan pada komunitas. Hal ini bukan lagi menjadi proses yang efektif, karena salah satu alasannya bahwa hakikat manusia ketika diberikan sesuatu yang kecil secara cuma-cuma, maka selanjutnya manusia akan menuntut hal yang lebih besar lagi untuk bantuan berikutnya.

Memperbaiki mutu kehidupan komunitas yang beroperasi disekitar organisasi akan terlihat lebih konkret dalam usaha membangun hubungan dengan komunitas. Jerold dalam Iriantara (2004:10) mendefenisikan, "*Community relations* berperan dalam meningkatkan keterlibatan pihak internal organisasi kepada komunitas sebagai bentuk jalan keluar dalam menghadapi permasalahan dikedua belah pihak yakni organisasi dengan komunitasnya".

Menurut Grunig dan Hunt dalam Yudarwati, Jurnal Ilmu Komunikasi, (2013 : 143-156) program *community relations* dibagi menjadi dua bagian, meliputi:

1. Fokus pada aktivitas pada posisi membantu komunikasi organisasi dengan pemimpin komunikasi lokal;
2. Fokus pada aktivitas yang melibatkan organisasi terhadap aktivitas komunitas, example lebih pada pemberian dukungan terhadap proses pendidikan dan sekolah ataupun dalam bentuk pemberian donasi pada organisasi lokal.

c. Manfaat *Community Relations*

Investasi yang menjanjikan bagi perusahaan dapat ditempuh melalui membantu komunitas. Rogovsky dalam Iriantara (2010:69), menyusun manfaat keterlibatan komunitas perusahaan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Komunitas	**Perusahaan**
Pada Perusahaan	**Pada Komunitas**
• Reputasi dan citra organisasi yang lebih baik; • "Lisensi untuk beroperasi" secara sosial;	• Peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan;

• Memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal; • Keamanan yang lebih besar; • Infrastruktur dan lingkungan sosioekonomi yang lebih baik; • Menarik dan menjaga personel berkaliber tinggi untuk memiliki komitmen yang tinggi; • Menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa dan mungkin pelanggan lokal yang bermutu; • Laboraturium pembelajaran untuk inovasi organisasi.	• Pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur; • Keahlian komersial; • Kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat; • Representatif bisnis sebagai juru promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

Sumber: Rogovsky dalam Iriantara (2010:70)

Pada tabel yang telah diuraikan tersebut, Rogovsky memperlihatkan manfaat *community relations* yang dibangun berdasarkan visi tanggung jawab sosial perusahaan. Adanya manfaat dari kedua belah pihak guna mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Maka program-program yang telah dibangun bukan hanya bermanfaat bagi komunitas semata, tetapi berguna untuk perusahaan dan komunitas.

d. Esensial *Community Relations*

Kehadiran *community relations* akan menjadi kepercayaan yang berefek pada *stakeholder* dan menumbuhkan image yang baik terkait perusahaan. Bekerja secara transparan dan akuntabel menjadi tujuan dari *community relations*. Dimana komunitas dapat melihat proses dari jalannya perusahaan tanpa harus ada yang ditutupi.

Faktanya adalah harapan komunitas yang telah berkembang karena adanya perubahan pada pengetahuan komunitas yang semakin sadar keberadaan perusahaan, kini komunitas mengubah harapannya dari *tangible* menjadi *intangible. Tangible* yaitu hanya berporos pada gaji, lapangan kerja, donasi dan hal lainnya. Sedangkan *intangible* lebih pada keturut sertaan organisasi terhadap komunitas seperti kemanan dan stabilitas, rasa bangga terhadap organisasi dan hal-hal yang menerlibatkan pihak internal perusahaan.

Hasil yang dilahirkan dari ekspektasi komunitas pada dasarnya adalah akar dimana perubahan dapat terjadi mengenai perubahan pandangan organisasi memandang komunitas. Dengan berlandasan masyarakat yang demokratis, sehingga aspirasi masyarakat yang berkembang akan terdengar dan akan terwujud demokratis sesungguhnya. Upaya perbaikan kehidupan ekonomi di komunitas dapat menjadi bahan kajian yang patut di anggap serius oleh organisasi. Mengingat dari ekspektasi komunitas yang besar, menciptakan sebuah daerah yang akan hidup semangat kerja sama halnya akan membawa daerah itu mampu bersaing dengan daerah lain, dan meminimalisir tingkat kemiskinan, serta buruknya ekonomi kehidupan komunitas.

Uraian tersebut menjelaskan bentuk *community relations* yang telah di letakkan pada implementasi lebih luas. Bukan hal yang jarang lagi ketika perusahaan bisnis banyak menerapkan program kegiatan *community relations* terkait pengembangan diri masyarakat di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan menempuh pengembangan kewirausahaan.

Menurut Iriantara (2013: 79) *dalam konsep public relations, community relations* dapat dipandang berdasarkan dari dua pendekatan:

1. Memposisikan Organisasi selaku pemberi donasi. Maka program *community relations* bewujud bagian dari aksi dan komunikasi dalam PR. Aksi komunikasi artinya berdasarkan pengumpulan fakta dan perumusan masalah ditemukannya komunitas, maka PR akan melakukan sebuah perencanaan dalam bentuk program *community relations*. Inilah yang dikatakan menggunakan aksi komunikasi pada proses perencanaan yang dilaksanakan;
2. Memposisikan komunitas sebagai mitra, menganut konsep komunitas yang luas. Artinya suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang menggunakan konsep komunitasnya bukan hanya sekedar sekumpulan orang yang berdiam di sekitar wilayah operasi organisasi.

Berdasarkan landasan dari pendekatan kedua, maka terdapat tahapan-tahapan dalam *public relations* yang bersifat siklis yakni *community relations* akan melalui proses sebagai berikut:

1. Pengumpulan fakta. Permasalahan yang kompleks mulai dari pencemaran sumber air, penggundulan hutan, permasalahan ekonomi yang menjadikan tingginya angka pengangguran, sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan. Semuanya

mengandung unsur yang berbau sosial. Dari pengumpulan fakta ini dapat ditemukan melalui banyak sumber. Penelusuran dapat dilakukan melalui internet, laporan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terkait pendidikan anak, atau terkait kegiatan sosial yang menyebar dari berbagai lembaga organisasi bisnis.

2. Perumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dialami, diperlukannya kemampuan pikiran dan keterampilan sebagai solusi menyelesaikan masalah. Untuk itu perumusan masalah akan mengidentifikasi program apa saja yang tentunya sesuai dengan fakta-fakta yang telah didapatkan. Karena tidaklah mungkin jika semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara *community relations*. Karena pendidikan di keluarga pun turut berperan dalam mempengaruhi sikap mental seseorang. Jadi, dalam perumusan masalah dimulainya memfokuskan pada komunitas organisasi berdasarkan lokasi wilayah operasi organisasi.

3. Perencanaan dan pemograman. Dalam perencanaan pemograman mampu mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan sebagai celah terciptanya lapangan kerja. Penyusunan aspek-aspek program dengan sebuah perencanaan yang telah dipersiapkan dengan matang akan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh komunitas.

4. Aksi dan komunikasi. Penggunaan watak dari PR melalui kegiatan komunikasi. Menyusun pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas dengan menggunakan media apa dan dengan cara apa. Berkomunikasi dengan melakukan dialog secara langsung pada komunitas untuk menjelaskan sebuah perencanaan dan penetapan program yang telah dilakukan diharapkan berkembangnya pandangan yang positif dari komunitas terhadap organisasi.

5. Evaluasi. Sebuah keharusan dalam melakukan evaluasi pada setiap akhir program yang telah di laksanakan. Dengan tujuan mengetahui efektivitas dan efisiensinya program. Dari evalusi ini maka dapat diputuskan apakah program akan berlanjut atau dihentikan. Hal terpenting juga terdapat pada evaluasi atas sikap publik.

Komunitas kerap kali mengalami kritikan mau pun kendala yang berhubungan dengan suatu organisasi. Penyelarasan setiap komunitas tentunya memiliki sebab masalah yang berbeda-beda terhadap organisasi. Hal ini disebabkan karena setiap organisasi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Berangkat dari permasalahan yang membuat ketidak

selarasan antara organisasi dengan komunitas *community relations* ikut turut andil dalam mencari celah untuk keluar dan sama-sama memprioritaskan keduanya hingga mencapai keselarasan.

Community ralations akan melakukan komunikasi MASSA (mass communications). Yaitu petunjuk penilaian dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari segi khalayak, media, serta dari sifat pesan yang diberikan. *Community relations* akan lebih efisien dengan menggunakan *mass communications*. Menurut Cangara (2014:41), "Komunikasi massa memiliki ciri tersendiri yang sifat pesannya terbuka". Terbuka di sini diartikan dapat menjangkau dari segala aspek kehidupan manusia. Baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan, segi kebutuhan, dan lain-lain.

Mass communication juga berkesinambungan dengan pernyataan terkait target khalayak menurut Grunig dalam Morrisan (2008:161-162) menyebutkan, "Pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) : karyawan, pemegang saham, alumni, konsumen, masyarakat sekitar". Organisasi pemerintah, masing-masing dapat dikategorikan dalam bukan khalayak (non public), khalayak tersembunyi (latent publics), khalayak sadar (aware publics), dan khalayak aktif (active publics). Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

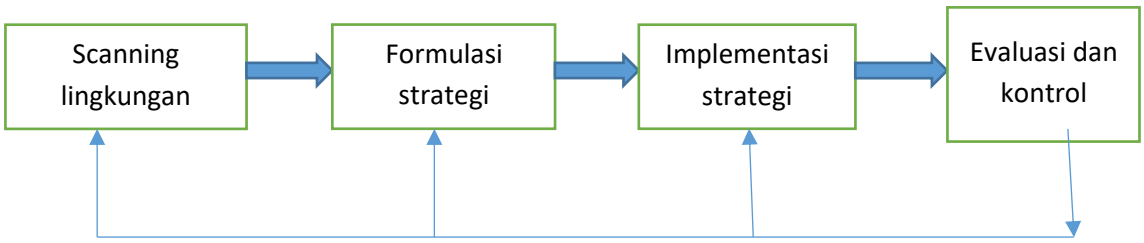
1. Bukan khalayak (non publics), yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh rendah terhadap perusahaan, begitupun perusahaan ke khalayak yang sangat rendah pengaruhnya kepada kehidupan mereka;
2. Khalayak tersembunyi (latent publics), yaitu rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh khalayak akan hubungan atau keterkaitan yang khalayak miliki dengan organisasi;
3. Khalayak sadar (aware publics), yaitu tingginya tingkat kesadaran khalayak akan adanya hubungan dengan perusahaan, sehingga menimbulkan pengaruh dengan masalah yang muncul. Namun khalayak belum melakukan komunikasi satu sama lain hanya sebatan kesadaran tinggi dari khalayak;
4. Khalayak aktif (active publics), yaitu dengan kesadaran penuh akan keterkaitan hubungan khalayak dengan perusahaan. Maka khalayak juga mengetahui permasalahan perusahaan menjadikan khalayak sebagai bagian di dalamnya. Selanjutnya, khalayak dan pihak lainnya yang juga terpengaruh bersama-sama melakukan komunikasi dan membahas sesuatu terkait masalah tersebut.

Realitas sosial yang kerap berubah dalam setiap kurun waktu akan membentuk managemen strategis. Ini merupakan salah satu bentuk upaya organisasi guna penyesuaian

perubahan lingkungan. Menurut Rowe, at.al. dalam Robson, (1997:6) manajemen strategis suatu penyeimbangan dalam potensial internal corporat berupa kekuatan dan kelemahan terkait ancaman dan peluang yang akan datang pada lingkungan eksternal perusahaan.

Penekanan dan pemantauan juga dilakukan dengan evaluasi menjadi satu bahan analisis, untuk mengetahui peluang ancaman lingkungan eksternal di masa yang akan datang. Maka butuh penyelarasan antara organisasi dengan lingkungannya. Lingkungan kebudayaan erat kaitannya dengan Indonesia. Pengetahuan luas akan budaya diperlukan oleh praktisi *public relations*. Realitanya masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari budaya. Meminimalkan masalah-masalah antar budaya dengan masyarakat dapat melalui cara dari Coulter dan Stephen, (2010:112) yaitu, "Kesadaran". Kesadaran akan adanya kesenjangan kebudayaan dapat didorong melalui dialog terbuka, untuk membahas perbedaan yang ada dan menjadi penghambat.

Scanning lingkungan merupakan hal utama yang harus diterapkan dalam menganalisa komunitas. Seperti proses yang digambarkan oleh Wheelen dan Hanger dalam Iriantara, (2013:105) seperti berikut:



Gambar 1: Proses Manajemen Strategis
Sumber: Wheelen dan Hunger dalam Iriantara, (1995:9).

Berdasarkan penggambaran tersebut, maka berlanjut pada perencanaan yang kemudian diikuti oleh perencanaan strategis, perencanaan operasional, hingga sampai pada merencanakan program *community relations*. Setelah penetapan dari program *community relations* yang nantinya akan melalui tahap panjang maka Public Relations dapat berinteraksi melalui media. Dalam hal ini media juga memiliki peran yang mempengaruhi keberhasilan dari program *community relations.* Melalui penggambaran media yang telah di kemas rapi dapat mempengaruhi khalayak melalui kognitif (pemikiran), afektif (perasaan), dan behavioral (perilaku).

Menurut Esman dalam Yudarwati, (Jurnal Ilmu Komunikasi, No 1, Desember 2013 :151) terdapat cara dalam mengidentifikasi pola hubungan organisasi dengan komunitas yaitu:

a. *Enabling linkage*: Hubungan yang dibangun antara organisasi dengan komunitas yang memberikan otoritas dan kontrol yang menjadikan peluang besar komunitas menjadi eksis, termasuk dengan pemerintah lokal;
b. *Functional linkage*: Terdapat dua pola yaitu *input linkage* dan *output linkage*. *Input linkage* berhubungan dengan karyawan lokal, kelompok lokal, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan *input* organisasi. *Output linkage* ini berkaitan dengan organisasi ke organisasi lainnya yang menggunakan produknya seperti konsumen;
c. *Normative linkage*: Hubungan organisasi dengan organisasi lain yang memiliki permasalahan yang sama dan memiliki kepentingan yang sama;
d. *Diffused linkage*: Hubungan dengan elemen masyarakat yang memiliki peran untuk menyebarkan opini publik, contohnya media lokal dengan pemuka pendapat lokal.

Dalam melangsungkan *community relations* yang berkenaan dengan komunitas, akan perlunya juga strategi pendekatan untuk memasuki wilayah komunitas, dalam hal ini Johnston dan Zawawi (2004:299:302) menjadikan 5 point cara pendekatan: pertama dengan menggunakan *consultations* (konsultasi) yaitu pengembangan komunikasi dua arah dalam penyampaian aspirasi antara komunitas dengan perusahaan, *feeling the gups* (merasakan kesenjangan) merupakan suatu rumor yang memiliki kecepatan dalam berkembang melalui satu mulut ke mulut lainnya dalam lingkup komunitas, lalu *scanning the environment* salah satu cara dengan menggunakan pembacaan lingkungan dimana komunitas tinggal guna mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh organisasi, selanjutnya *Collaboration With Company Groups* (Kolaborasi dengan kelompok-kelompok komunitas) artinya kegiatan yang berbentuk dalam kerja sama dimana perusahaan akan menggandeng komunitas secara operasional, yang terakhir Negotiation yaitu melakukan dialog yang dilksanakan melalui tahap mediasi dan dua pihak yang sama-sama mempunyai kepentingan dalam berlangsungnya proses.

Eksistensi Humas akan menyentuh setiap bagian lapisan masyarakat. Maka dari itu perlu media untuk menggapai seluruh target dalam penyampaian program. Semua elemen memiliki fungsi yang sama dengan tujuan yang sama pula. Masyarakat modern akan menjadikan media sebagai bentuk informasi dan sekaligus dapat menjadi sumber hiburan

serta edukasi. Di sinilah *public relations* bermain dalam penggunaan seni bahasa dengan menggunakan hasil analisis yang telah dilakukan di awal Prioritas utama dari praktisi *public relations* selalu dalam lingkaran informasi. *Public relations* harus memastikan arus informasi yang disampaikan akan sampai kepada pihak internal dan eksternal corporat. Mewujudkan manajemen yang baik tentunya dengan pemahaman sosial yang mendalam pula. *(https://www.kompasiana.com/affanputra/komunikasi-dalam-hubungan masyarakat_54f469bc745513802b6c8b08, diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 11.30)*

Dari uraian yang membahas eksistensi praktisi *public relations* tersebut, memiliki pemahaman tentang perencanaan yang akan dilaksanakan dari menyaksikan akar permasalahan terlebih dahulu yang bersumber dari komunitas. Evaluasi pada tahap ini akan sangat berguna dalam mengukur keberhasilan program yang telah dilakukan dengan tahap-tahap program yang telah dilewati.

3. Government Relations

Spesialis *public relations* pemerintah biasanya disebut pejabat *public affairs.* Di Amerika Serikat pejabat informasi, atau penerangan, atau pejabat hubungan masyarakat (humas) di negara lain adalah penghubung penting antara rakyat dan pemerintah (Scoot M.Cutlip, et al., 2011: 465). Kegiatan *public relations* yang meletakkan titik fokus pada menjalin hubungan dengan pemerintah tidak dapat dihindarkan. Karena status perusahaan publik yang terikat dengan pemerintahan.

Pemerintah memiliki *power* yang besar untuk mendorong organisasi dalam pelaksanaan di lapangan. *Power* yang kuat di sini adalah pemerintah. Pemerintah merupakan peranan terpenting yang memiliki kekuasaan untuk dapat memperlancar jalannya perusahaan. Berlandaskan perspektif *public relations,* peran penting yang di mainkan oleh pemerintah di sini adalah hal yang berkaitan dengan penentu kebijakan serta keputusan normatif lainnya. Kebijakan yang dimiliki pemerintah tentunya mampu membawa pengaruh besar kepada perusahaan/organisasi.

Kemudahan yang dimaksud dari menjalin hubungan baik dengan pemerintah dapat di jelaskan seperti perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam jalannya perusahaan tidak akan berdampak pada pelanggaran hukum. Sehingga kebijakan yang telah di buat dapat terwujud sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah.

Pemerintah selaku pihak yang berkuasa tentunya tidak hanya mampu memperlancar perusahaan namun, juga dapat sebagai penghambat proses bisnis perusahaan. Untuk meminimalisir kemungkinan *government relations* sebagai penghambat proses berjalannya operasional perusahaan, maka dari itu diperlukannya strategi komunikasi yang baik.

Adapun strategi komunikasi menurut Middleton dalam Cangara, (2013:64) strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari seluruh elemen komunikasi yaitu mencakup:

1. Komunikator yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan dengan pengunaan bahasa yang mampu dipahami oleh penerima dan tentunya dengan pesan yang relevan;
2. Pesan yaitu makna menjadi penting bagi isi pesan untuk penerima pesan. Dengan relevansi pesan merupakan kewajiban untuk menyelaraskan situasi yang dialami penerima pesan;
3. Saluran (media) yaitu kemapanan (established) untuk menyampaikan pesan. Artinya saluran bersifat tetap tidak berubah-ubah dengan tujuan proses penyebaran akan menjadi efisien. Mimilih saluran dengan selektif akan membantu dalam pmencapai khalayak sasarannya;
4. Kemampuan penerima yaitu efek dari penerima guna mencapai tujuan yang optimal dengan memperhitungkan kemampuan penerima. Menganalisa penerima dalam hal kebiasaan khalayak, pengetahuan kemampuan membacanya dan hal lainnya. Ini bertujuan mengupayakan agar sampainya pesan kepada penerima sesuai isi pesan yang hendak disampaikan komunikator.

Government relation memiliki tujuan serta sasaran. Tujuan *government relations* menurut Kasali (1994:56) adalah:

1) Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi Negara;

2) Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha;

3) Mendorong partisipasi memilih rakyat pada setiap lapisan pemerintah;

4) Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya;

5) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kasali (1994: 79), untuk mencapai tujuan *government relations* memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menggali data dari pemerintah;
2. Memonitoring langkah-langkah yang telah dibuat pemerintah;
3. Perusahaan akan menyampaikan *feedback* atas kebijakan dari pemerintah;
4. Tugas dalam membangun posisi;
5. Bertugas dalam mendukung pemasaran.

Posisi *government relations* yang menduduki peran penting bagi perusahaan memiliki arti sebagai bentuk upaya adanya keselarasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ke perusahaan. Karena hubungan yang dibangun perusahaan pada government ini akan menjadi tanggungan government yang berupa perlindungan dikala krisis menerpa perusahaan, serta dapat mempercepat birokrasi yang sering berkontradiksi fungsi layanannya atas berbagai macam kepentingan perusahaan.

Lobby dan negoisasi (perundingan) merupakan salah satu bentuk yang paling membawa pengaruh besar dari kegiatan government relations. *Public relations* selalu berurusan dalam hal lobi dan negosiasi dalam pencapaian keuntungan bersama baik dari pemerintah maupun organisasi. Kegiatan ini tentunya memiliki tujuan sebagai upaya pendekatan ke badan pemerintah bagi *public relations*. Adapun Negosiasi akan membawa pada tahap hasil, dimana kedua belah pihak akan mencapai puncak tujuan bersama dengan bermusyawarah. Hal ini selaras dengan defenisi *Public Relations* oleh Zaenal Abidin yang menegaskan bahwa aktivitas *Public Relations* mengandung ilmu dan upaya dalam menjaga reputasi yang bertujuan memperoleh pemahaman serta dukungan yang mempengaruhi opini dan perilaku (https://id.scribd.com/mobile/doc/118096214/DIPLOMASI-lobi-Negosiasi, diakses pada tanggal 24 oktober 2017 pukul 11.00 Wib)

Lobby dalam *government relations* dilakukan sebagai berikut, *lobby* langsung (konvensional) artinya mengadakan pertemuan secara langsung dengan pemerintah, *Grass Roots Lobbying* artinya adanya keterlibatan dengan warga masyarakat yang berada di sisi perusahaan pada proses lobbying. Misalnya turut serta dalam mengemukakan pendapat bahwa perusahaan ini memiliki faedah atau kepentingan dengan masyarakat pada pemerintah. *Political Action Committees* artinya meleburnya unsur politik dengan melibatkan masyarakat atau masa namun dengan konsep yang lebih formal.

(lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318058-S-Titi%20Mora%20Margaretha%20S.pdf, akses 21 Desember 2016).

Bentuk dari *government relation* menurut Willey.dkk. dalam Prabawati, (Jurnal Unair, 2014) juga dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut *direct lobbying*, *grassroot lobying, electoral activities, litigation communication*, dan juga melalui aktivitas protokol .

Hubungan dengan pihak pemerintah merupakan salah satu bentuk dari aktivitas eksternal dari public relations. Adapun harapan besar yang diletakkan perusahaan terhadap pemerintah mampu membantu perusahaan dalam mensosialisasikan rencana yang telah perusahaan buat ini sesuai dengan tujuan dari tanggung jawab sosial yang mana perusahaan beroperasi dengan salah satu tujuan yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah operasional.

Adapun urusan yang berkaitan dengan pemerintah terbilang rumit oleh karena terdapatnya urusan birokrasi didalamnya. Birokrasi perizinan dalam pemerintahan mengarah pada hal kesensitivan. Dari satu sisi pemerintah berkewajiban membela kepentingan masyarakat, namun pada satu sisi lainnya pemerintah memerlukan sumber pemasukan seperti devisa negara dari perusahaan-perusahaan swasta.

Dalam rangka memelihara hubungan harmonis dengan pemerintah. Baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terdapat bentuk kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah, yaitu:

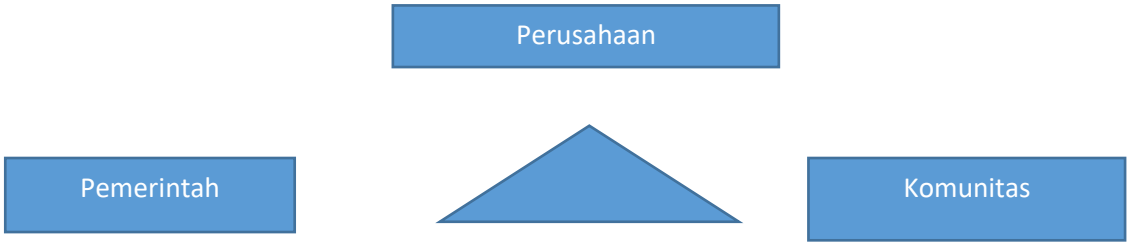
1. Memberikan ucapan pada hari spesial pemerintah, seperti hari jadi pemerintah;
2. Pengiriman agenda bagi instansi terkait;
3. Mengadakan kegiatan yang berbau kesenian, olahraga dan menjadi sponsor dalam konteks nasional maupun internasional;
4. Menjalin silaturahmi dengan berupa undangan kepada pemerintah dalam peresmian perusahaan maupun hal lainnya;
5. Kegiatan lobby dengan konsep “kampanye” terus menerus secara baik dengan pemerintah.

Pemerintah selaku elemen terkuat memiliki wewenang yang begitu luas dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bahkan pemerintah berperan penting dalam mengatasi krisis perusahaan. Keputusan pemerintah dikatakan sebagai cerminan dari

kebutuhan masyarakat. Sifat untuk melindungi sejatinya melekat pada pekerja di perusahaan. Maka hubungan yang baik dengan pemerintah akan melindungi keberlangsungan perusahaan dengan menaati kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah tentunya.

Kategori perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diwajibkan dalam menjalin hubungan dengan pemerintah. Hubungan baik dengan pemerintah bagi perusahaan ini memegang peranan yang terbilang strategis. Pemerintah bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) bukan hanya sebagai *stakeholders*, namun disebut sebagai pemegang saham.

Pada perkembangan konsep *community relations* perusahaan menempuh program yang dapat memberdayakan komunitas. Ini merujuk pada penempatan komunitas sebagai kemitraan diantara *stakeholders*, pemerintah dan komunitas (*civil society)* ini juga dikenal dengan sebutan *tri-sector partnership*. Harapan yang besar melalui sistem kemitraan menjadikan program *community relations* yang dilaksanakan tidak mengalami tumpang tindih.



Gambar 1.1 *(Korelasi tiga elemen Pemerintah, perusahaan, komunitas)*

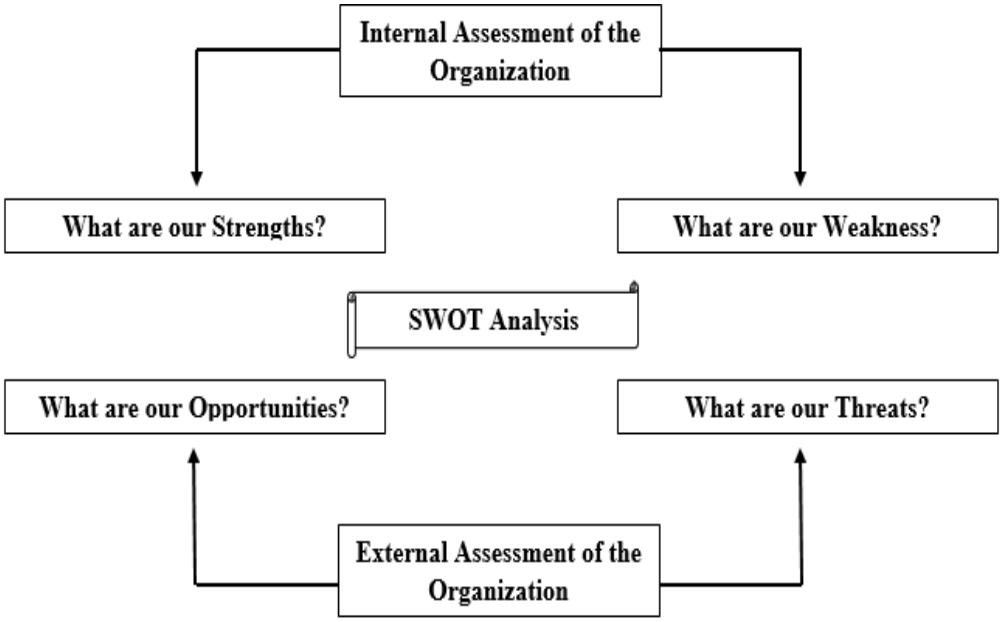
(Sumber: pribadi)

Dengan melibatkan ketiga pilar utama dari gambar di atas, yang didalamnya terdapat pemerintah, perusahaan, dan komunitas. Jika dikaitkan dengan pola kemitraan akan memiliki potensi yang mampu berkembang agar terciptanya suatu kolaborasi dalam proses pengembangan dalam pemberdayaan komunitas.

4. ANALISIS SWOT

Menurut Cangara (2014:106), “Analisis SWOT ialah instrumen perencanaan yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan-kekuatan yang dimiliki (*strength),* W= *Weakness* – kelemahan-kelemahan yang ada, serta peluang lain bisa diperoleh O=

Opportunities serta T= *Threats* – Ancaman-ancaman yang bisa ditemui". Analisis SWOT digunakan sebagai suatu proses dalam mengidentifikasi segala faktor secara sistematis, dan dapat untuk merumuskan strategi apa yang ada pada perusahaan. Analisis SWOT pada dasarnya diterapkan dalam situasi yang berubah-ubah. Di dalam penggunaan keempat elemen ini untuk memaksimalkan sebuah perencanaan. Secara umum proses pengambilan strategi dan keputusan sebuah perusahaan akan bersinggungan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan perusahaan. Sehingga perencanaan dimulai dengan menganalisa elemen-elemen dalam penerapan analisis yakni kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kondisi yang ada.



Bagan 1.1 Model Analisis SWOT

(Sumber: Cangara, 2014:107)

Berlandaskan bagan yang telah digambarkan siatas melalui empat komponen yang digunakan dalam Analisis SWOT terlihat ada dua faktor yang mempengaruhi SWOT, yaitu:

1) Faktor Ranah Internal

   Faktor ini besinggungan terkait situasi dalam suatu perusahaan. Faktor internal erat kaitannya dengan manajemen fungsional dengan sumber daya yang disebut sebagai asesmen internal. Dalam ranah internal organisasi terdapat komponen kekuatan dan kelemahan (Cangara, 2014:109).

2) Faktor Eksternal

Faktor ini mengenai hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. komponen yang terdapat di faktor eksternal adalah peluang dan ancaman. Faktor eksternal dengan kedua komponen terjadi akibat dinamika yang terjadi pada lingkup masyarakat (Cangara, 2014:109).

F. Metode Penelitian

1) Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang merupakan landasan berfikir pembelajaran kontekstual yaitu pengetahuan yang dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit lalu di konstruksi kembali pengetahuan tersebut dan akan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. Berdasarkan paradigma konstruktivisme, kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif tanpa mengada-ada dan tidak ada yang dirubah.

Menurut Sudaryanto (1993:9), "Metode adalah cara yang harus dilaksanakan". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Azwar (1998:5), "Metode kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah". Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan paradigma konstruktivisme yang menyatakan realitas berdasarkan pengalaman sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 3) yang memaparkan, "Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi ini menitik beratkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, yaitu data deskriptif kualitatif". Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena (M. Djamal, 2015)

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan januari hingga juni 2017 dengan jangka enam bulan. Lokasi penelitian akan dilaksanakan pada tiga tempat yaitu:

1. Jln. PTPN V, Sidomulyo Tim., Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.
2. PTPN V SEI KENCANA DS. Senamanenek Kampar, Riau, 28464.
3. Kantor Bupati Kampar, Jln. H.R. Soebrantas S, Bangkinang - Riau Telepon : (0762) 20358, 20561 Email : admin@kamparkab.go.id Website : http://kamparkab.go.id/.

Ketiga tempat ini akan dijadikan tempat penelitian dalam proses pengambilan data yang akan peneliti analisis.

3) Narasumber

Pada penelitian ini penulis akan mencari data dengan mewawancarai beberapa narasumber yaitu:

a. Staff Departemen Umum bagian keuangan perkebunan PTPN V Pekanbaru Riau, yang berurusan dengan *community relations* yaitu M. Azman Lubis.
b. Staff Departemen Kehumasan HLKHI PTPN V Perkebunan Riau yang berkaitan dengan penanganan *government relations* yaitu Risky Atriansyah.
c. Asisten Umum (Humas Unit) PTPN V Pekanbaru yang berkaitan dengan *community* serta *government* di lapangan Sinamanenek yaitu Amir Syafrudin.
d. Komunitas atau masyarakat sekitar lingkungan perusahaan warga Senamanenek. Warga yang dipilih oleh penulis sebagai informan berdasarkan masyarakat yang tentunya memiliki peran atau sebagai ketua dari wilayah Senamanenek yaitu Samsir dan Mardianto.
e. Pemerintah daerah kabupaten kampar yang menangani langsung perkebunan Sei Kencana PTPN V perkebunan Riau Divisi Dinas Perkebunan dan Tata Pemerintahan yaitu Sofyan Hadi dan Andri Miko.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dikumpulkan dengan berbagai opsi. Sumber primer dan sekunder akan digunakan jika melihat data yang nantinya akan di pakai. Adapun penjelasan dari sumber data primer adalah sumber yang berasal dari data yang secara

langsung didapat dari pihak internal perusahaan.Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang didapat secara tidak langsung misalnya dari dokumen dan lainnya

a. Jenis Data

I. Data Primer

Data ini merupakan data yang diambil dari lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait Divisi Kehumasan dan Divisi Umum yang terkait dengan tema penelitian. Tidak diperlukan media perantara karena bersifat sumber asli yang bersifat asumsi oknum individual maupun kelompok, terhadap benda hasil:

a. Observasi: Pengamatan dan pencatatan secara sistematik pada objek penelitian. Observasi mengamati gejala-gejala tentang fenomena sosial yang terjadi, akan dikumpulkan dan dilakukan pada objek peneliti di Sei Kencana PTPN V Pekanbaru, Riau.
b. Aktivitas atau insiden, dan hasil yang diperoleh dari pengujian penelitian .
c. Wawancara: Komunikasi wawancara dilakukan antara dua orang atau lebih. Wawancara ini dilakukan bertujuan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang telah ditetapkan. Adapun wawancara yang digunakan terbagi dua yakni, wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur (Mulyana, 2006 : 180). Wawancara tak terstruktur merupakan mendalam yang mana dalam prakteknya dilakukan dengan wawancara terbuka atau intensif. Sedangkan wawancara terstruktur lebih kepada wawancara yang sebelumnya telah disiapkan dan ditetapkan tentunya dengan jawaban yang telah disediakan. Percakapan wawancara tak terstruktur ini menjurus pada percakapan informal. Dari kedua jenis wawancara menurut Mulyana penulis akan menggunakan wawancara terstruktur atau wawancara mendalam. Melakukan dialog dengan divisi-divisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin memperoleh data dan informasi dengan kejelasan dan mendalam terkait penerapan dari community dan government relations.

II. Data Sekunder

Data ini didapatkan melalui dari buku, publikasi nasional, internet, dan base lembaga perusahaan dan hal lainnya yang masih berkaitan dengan perusahaan. Ini dilakukan dengan menjelajahi internet dari situs yang perusahaan PTPN V kelola. Pada umumnya ini dapat dikatakan sebagai penelusuran dokumen dari berbagai sumber

Dokumentasi pada teknik ini peneliti menggunakan dokumen dan record (rekaman). kemudian dokumen resmi yang terbagi menjadi dua bagian yakni, dokumen internal dan dokumen eksternal (Moleong, 2001 : 163). Dokumen internal berbentuk memo, pengumuman, instruksi, dan aturan dari lembaga masyarakat khusus yang telah digunakan dalam lingkup itu sendiri. Dokumen eksternal berbentuk informasi yang berasal dari suatu lembaga sosial seperti, majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan oleh media massa. Pada umumnya Bentuk dokumentasi sendiri seperti catatan peristiwa yang telah terlewati atau yang lalu. Dokumen yang digunakan dapat berupa file, gambar, atau sebuah karya yang dapat dijadikan pendukung penelitian.

H. Metode Analisis data

Penelitian ini mengadopsi dari pendekatan kualitatif. Maka dari itu analisis dalam metode studi kasus kurang lebih terdapat sebuah kesamaan dengan analisis data pada penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada penelitian.

Menurut Seiddel dalam buku Prof. Dr. Moleong, M.A (2007) metodologi penelitian kualitatif, tahapan proses terlaksananya analisis data kulitatif sebagai berikut: Mencatat, berlandaskan catatan lapangan kemudian Mengumpulkan, menyaring kembali, memilah, mengklarifikasi, mensistensiskan, membuat ikhstiar dan membuat indeksnya dan berfikir, menempuh cara dalam mengkategorikan data agar memiliki makna, lalu mencari dan menemukan pola yang berhubungan untuk membuat temuan umum.

Dalam penelitian yang dilakukan akan menggunakan model analisis deskriptif yaitu, menganalisa data yang telah diperoleh pada hasil penelitian. Miles dan Huberman (1992 : 16) mengatakan ada tiga alur kegiatan yang terjadi dalam analisis data:

1. Reduksi data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “yang belum diolah” yang muncul berupa catatan dari lapangan. Dengan menggunakan reduksi data mampu menyederhanakan dan mentransformasi dalam berbagai cara seperti, melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dengan demikian penulis dapat memilah data mana yang dapat digunakan dan data yang mampu dipertajam.

2. Penyajian Data

   Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membawa kepada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tentunya proses ini berupa bentuk penyajian yang telah melewati tahap reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

   Berbicara secara konseptual jenis-jenis analisis dalam melakukan reduksi data (menghitung mean, standar deviasi, dan indeks), penyajian data (tabel korelasi, dan cetakan angka-angka regresi), dan penarikan kesimpulan (derajat signifikansi, perbedaan eksperimental/kontrol membutuhkan perhatian yang maksimal. Tiga tahap yang saling menyusul akan berakhir pada tahap penarikan kesimpulan. Artinya kesimpulan ini bukanlah hal finish, namun berupa permulaan sebagai temuan yang nantinya penulis akan memulai lagi jika saja data yang telah diambil masih dangkal. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan dapat dijadikan acuan pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses observasi dan wawancara hingga tercapainya data yang lengkap dan valid. Pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi.

BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru, Riau

1. Sejarah Berdirinya PTPN V dan Unit Sei Kencana

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan PP No. 10 tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia guna pendirian perusahaan. PTPN V sebelum adanya PP (Peraturan Pemerintah) no. 72 tahun 2014 yakni tentang peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengalihan saham PTPN V se Indonesia kepada PTPN III selaku holding. Perusahaan PP tahun 1966 itu adalah dasar hukum berdirinya PTPN V. Asalnya bermula dari kebun-kebun pengembangan PT perkebunan yang ada di Sumatera Utara. Jadi, sebelum menjadi PTPN V terdapat kurang lebih sekitar 30 PT Perkebunan se Indonesia. *(https://www.ptpn5.com/*, Diakses pada tanggal 18 Desember 2017, pukul 09.30 WIB)

30 PT. Perkebunan yang dimaksud berasal dari nasionalisasi kebun-kebun Belanda atau kebun-kebun peninggalan penjajah, tapi ada juga yang merupakan kebun-kebun pengembangan dari nasionalisasi. Kebun-kebun peninggalan penjajah yang ada di Sumatera Utara dimerdekakan melalui TNI, yang kemudian dilakukan pemberdayaan atas kebun-kebun tersebut oleh pabriknya. Pada tahun 1996 dikonsolidasi atau digabungkannya beberapa PTP yang bermula dari 30 menjadi tinggal 14 PTP. Penggabungan dilakukan secara garis besar sesuai dengan lokasinya atau teritorialnya. Adapun lokasinya tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan masing-masing provinsi hingga ke bagian timur. *(wawancara dengan Risky Atriansyah*, 10 Mei 2017)

Untuk PT Perkebunan Nusantara V adalah kebun-kebun pengembangan atau secara analogi kebun yang sudah ada di Sumatera utara. Kemudian dilakukan penambahan areal di Riau kebun PTP II, IV, dan PTP V. Setelah itu kantor yang berada di Sumatera Utara melakukan pengembangan atau melakukan pembukaan kebun baru di Provinsi Riau. Namun, ditahun 1996 dijadikanlah PTP II, V, dan V menjadi satu perusahaan yang berpusat di Riau menjadi PTPN V. Sebelum dilakukannya penggabungan tidak disertakannya Nusantara cukup dengan PTP saja. Setelah ada PP tahun 1996 ketiga perkebunan bertransisi

sepenuhnya menjadi PTPN V yaitu PT Perkebunan Nusantara V. *(wawancara dengan Risky Atriansyah,* 10 Mei 2017)

PT Perkebunan Nusatara V memiliki status Persero Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana 100 % sahamnya berada pada pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang finalnya sejalan dengan terbitnya PP No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara III. Saham PTPN V dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 10%, dan PTPN III 90% (Holding). Dengan jumlah 1,3 juta lembar saham, dan modal disetor sebesar Rp1,3 triliun. Perubahan struktur saham ini merubah setatus perusahaan dari BUMN menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan dengan PTPN III sebagai *Champion*. *(wawancara dengan Risky Atriansyah,* 10 Mei 2017)

Perubahan saham yang kini berpindah pada PTP III memiliki dampak seperti hak-hak yang dimiliki oleh PTP III holding dalam mengangkat, memberhentikan direksi, penyesuaian struktur organisasi, mengefesiensikan organisasi merupakan wewenang PTP III. Salah satu contoh dari wewenang yang telah dilaksanakan oleh PTP III adalah holding direksi PTPN V dulu ada lima di perkecil menjadi tiga. Begitu pula dengan komisaris awalnya ada lima menjadi tiga. PTP III melakukan penyesuaian ulang struktur organisasi guna meningkatkan efesiensi dan evektifitasnya. Ini merupakan sejarah ringkas terkait bagaimana status hukum berdirinya PTPN V. *(wawancara dengan Risky Atriansyah,* 10 Mei 2017)

Untuk lokasi kantor pusat hanya ada di Kota Pekanbaru saja, dan kantor perwakilan berada di Jakarta. Sedangkan untuk lokasi dari pengembangan kebun-kebun dan pabrik PTPN V saat ini terdapat enam Kabupaten. Ada di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Rokan Hilir, dan Kuantan Singingi.

Untuk sejarah berdirinya Kebun Sei Kencana PTPN V adalah kebun peninggalan atau eks-PTP II. Disebut dengan eks PTP II karena di tahun 1996 masih ada tiga PTP yang memiliki kebun di Riau. Eks PTP II itulah yang dinamakan dengan kebun Sei Kencana. Setelah seluruhnya menjadi PTPN V maka eks PTP dua sepenuhnya dimiliki oleh PTPN V yang awalnya adalah eks PTP II. Untuk Sei Kencana dibangun pada awal tahun 90-an. Dikelola dengan satu managemen kebun yang dipimpin oleh manajer dan beberapa *afdelling*. Jumlah total kebun Sei Kencana ada 4.866 Hektar, yang terdapat di tiga desa yaitu

desa Sinamanenek, desa Sumber Sari, dan desa Kusau Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Dasar pembangunan Sei Kencana berasal dari area yang memperoleh pelepasan kawasan hutan dari menteri pertanian. Menteri pertanian di Kabupaten Kampar melepaskan hutannya kurang lebih sekitar 30.000 Hektar. Kemudian dicadangkan oleh Gubernur sekitar 30.00 Hektar untuk menjadi areal kebun yang dijadikan PTPN V sebagai perkebunan.

2. Fokus Produksi dan Profit Usaha

PT Perkebunan Nusantara V adalah salah satu perusahaan negara yang membudidayakan serta mengolah kelapa sawit dan karet. Adapun kegiatan utama PT Perkebunan Nusantara V mengelola kebun inti, plasma/ KKPA, dan melakukan pembelian TBS Plasma/ KKPA serta pihak ketiga.

Luas keseluruhan areal yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara V untuk kelapa sawit (KS) 83.564 Hektar, Karet 8.830 Hektar, dengan total 92.394 Hektar. Untuk mengelola komoditi kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V memiliki 12 unit pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 570 ton TBS per jam dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Kemudian untuk mengolah lanjut komoditi inti sawit, Perusahaan memiliki 1 unit Pabrik Palm Kernel Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit/hari dengan hasil olahan berupa Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM). Kemudian perusahaan memiliki dua unit Pabrik Pengolahan Karet (PKR), dan satu unit Pabrik Palm Kemel Oil (PPKO). PT Perkebunan Nusantara V memiliki Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total 11.971 orang, dengan jumlah karyawan pimpinan 511 orang dan karyawan pelaksana 11.448 orang. *(Powerpoint Profil PTPN V,* pada tanggal 10 Mei 2017)

Untuk produk PTPN V khusus kelapa sawit produk yang dihasilkan antara lain ada Minyak Sawit/ *crude palm oil* (OIL), Minyak Inti Sawit/ *Palm Kernel Oil* (PKO), dan Palm Kemel Meal (PKM). Untuk komoditi karet produk yang dihasilkan antara lain Standard Indonesia Rubber 10 (SIR 10) dan Standard Indonesia Rubber 20 (SIR 20). Kemudian untuk mekanisme penyampaian produk ke pelelangan, pertama penjualan produk ditender melalui PT. KPBN kemudian akan dilanjutkan ke Trader Processor dan terakhir akan melalui End User, kedua penjualan secara langsung. *(Powerpoint Profil PTPN V,* pada tanggal 10 Mei 2017)

3. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan



Gambar 2.1 Logo PT. Perkebunan Nusantara V
Sumber: suarakampar.com

Dalam menjalankan usahanya PT Perkebunan Nusantara V tentunya memiliki visi dan misi. Untuk visi, PTPN V bertekad menjadi perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan. Adapun misinya, PTPN V akan mengelola agro industri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan *stakeholders*. Lalu PTPN V akan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance,* kriteria minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industry, dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan. Kemudian PTPN V berusaha menciptakan keunggulan kompetitif dibidang sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen sumber daya manusia terkini. Hal ini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan. (http://www.bumn.go.id/ptpn5/halaman/120, diakses tanggal 24 oktober 2017 pukul 11.36 WIB)

Sistem Tata Nilai Perusahaan sendiri dijadikan dalam bentuk dasar yang berbunyi "Setiap insan PT PN V (Persero) meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas akan bermakna bagi perusahaan, mitra kerja, masyarakat, dan lingkungan, untuk mencapai kinerja unggul". Dilanjutkan dengan Motto "*Journey to excellence* (menuju keunggulan)". Perusahaan juga memiliki nilai-nilai Perseroan yakni "SINERGI, INTEGRITAS, DAN PROFESIONAL (S I P)". Dan terakhir perusahaan menamakan kompetensi inti seperti berikut Mengelola Kebun Inti, Plasma dan Kemitraan dalam pemenuhan bahan baku untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan dan sesuai harapan pasar.

(http://www.bumn.go.id/ptpn5/halaman/120, diakses tanggal 24 oktober 2017 pukul 11.36 WIB)

4. Struktur Manajerial



Gambar 2.2 struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara V
(Sumber: Dokumentasi PTPN V)

B. Divisi Bagian Sekertaris Perusahaan di PT Perkebunan Nusantara V

Divisi sekertaris perusahaan di PT Perkebunan Nusantara V ini ada dua penyebutan, ada disebut dengan sekretariat kontemporer dan ada juga yang disebut dengan Humas Legal. Untuk tugasnya sama saja dengan kontemporernya di pemerintahan seperti mengatur jadwal direksi, mengatur pertemuan-pertemuan, undangan-undangan atau acara-acara yang melibatkan perusahaan, menciptakan situasi yang kondusif agar *Stakeholders* perusahaan memiliki rasa memiliki. Jika Humas Legal memiliki fungsi khusus untuk kehumasan yang berada di kantor pusat PTPN V. Tugasnya mulai dari pelayanan media, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau orang-orang yang sekedar berkunjung ke Kantor Pusat PTPN V.

Tugas Humas Legal yang berada pada sub bagian sekertaris perusahaan ini juga tidak luput dari tugas mengatasi masalah dengan instansi kepolisian. Namun hanya sebagai perantara yang akan dilanjutkan oleh divisi umum perusahaan.

Tugas *government relations* dibagian divisi umum adalah mengurus kegiatan surat menyurat. Misalnya terkait perizinan terkait ketenagakerjaan atau terkait hal-hal yang hukum itu semuanya ada di bagian umum. Humas mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Pada setiap undangan yang diberikan untuk mewakili perusahaan tertentu, biasanya Humas menjadi pelaksana saat direksi sedang berhalangan. Misalnya Gubernur mengundang makan malam bersama, apabila direksi berhalangan maka Humas menggantikan keberadaan direksinya. Dari contoh tersebut tampak perbedaan antara pemerintah dan Humas dilihat dari fungsinya, bedanya yang satu lebih kepada tugas komunikasi dan yang satu lebih kepada sifatnya prinsipil. Humas juga memiliki perananan penting terkait perizinan tenaga kerja perusahaan yang berhalangan maupun surat menyurat. Data di sebuah unit (Kebun) humas memiliki data yang lebih konkret di lapangan dibandingkan data unit yang yang dikelola humas kantor pusat (tingkat Provinsi). Sebab Humas kantor pusat tentunya mengelola satu provinsi sementara di kebun hanya bisa terfokus pada satu kecamatan.

Pada umumnya tugas Humas yang berada di PT Perkebunan Nusantara V lebih kepada bagaimana menjaga hubungan atau mengkomunikasikan *stakeholders.* Baik secara eksternal maupun internal kepada bagian-bagian unit yang terkait. Maksudnya adalah pada setiap tindakan langsung yang diambil akan ditindak lanjuti oleh Humas, tetapi jika tidak memungkinkan Humas mengkomunikasikan dengan Bagian Umum atau kepada orang yang memiliki wewenang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Jadi untuk hal-hal pencitraan, publikasi, penanganan wartawan itu adalah wewenang Humas. Untuk menjadi *public speaker* seperti memberikan pernyataan-pernyataan yang diberikan kekuasaan untuk hal itu adalah Direksi, Kabag Sektor, dan Humas.

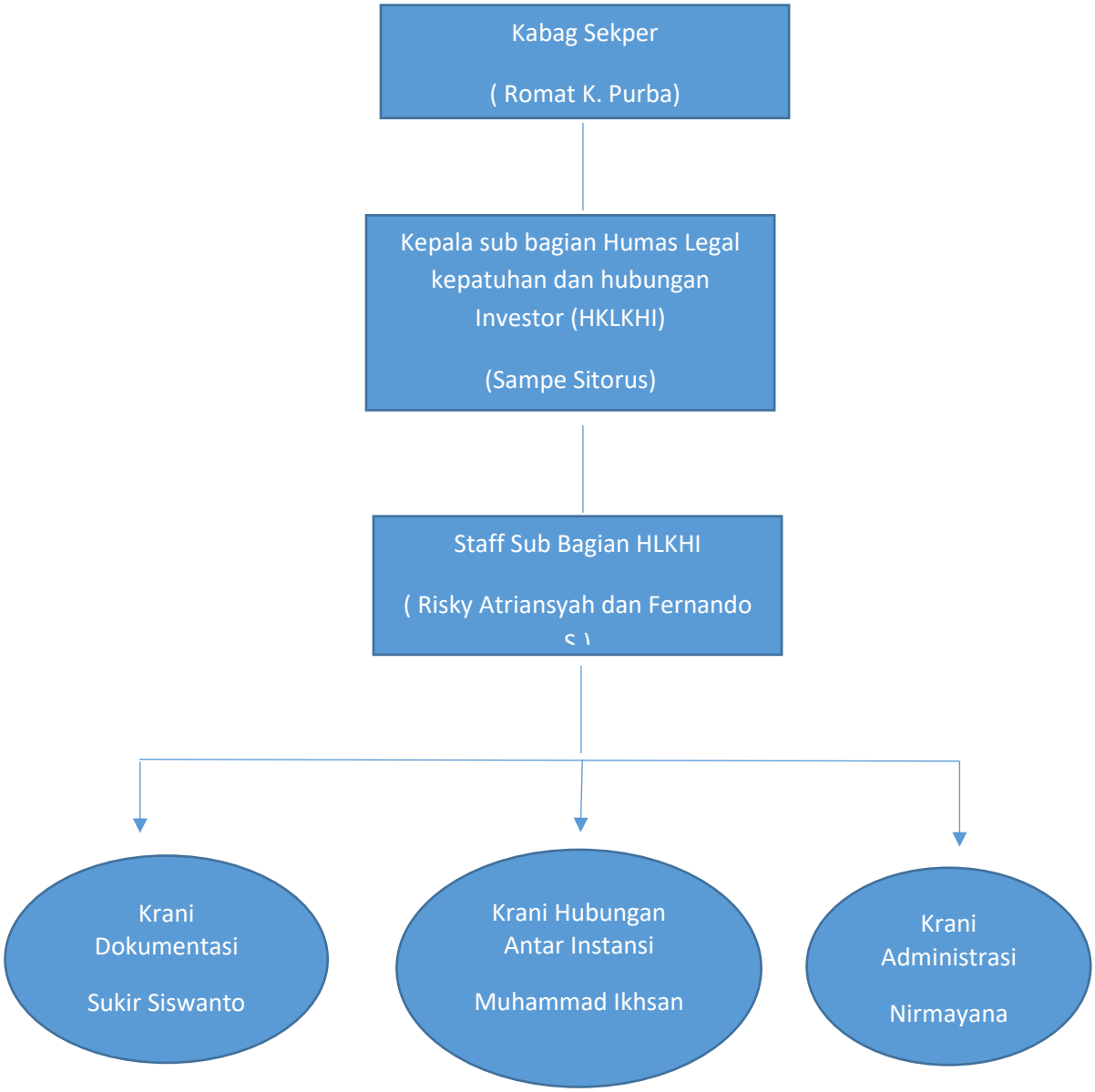
Untuk Humas di Unit (kebun) disebut dengan Asisten Umum (ASUM). Asisten Umum (ASUM) inilah yang menjalankan peran sebagai Humas di kebun. Namun memiliki perbedaan fungsi Humas di Kantor Pusat yang tidak hanya melakukan publikasi atau melayani wartawan semata. ASUM kebun juga melaksanakan personalia, penggajian, santunan sosial, Pemberhentian karyawan (PHK), dan pemberi peringatan kepada karyawan. Semua hal tersebut merupakan kuasa dari Asisten Umum (ASUM). Bahkan urusan

hubungan dengan pemerintahan setempat dilaksanakan oleh ASUM administrasi SDM umum. Perbedaan Humas kantor pusat dengan Humas kebun lebih pada pertanggung jawaban masing-masing. Humas kebun bertanggung jawab sepenuhnya pada satu kebun saja, tetapi untuk Humas kantor pusat seluruh kebun di pertanggung jawabkan.

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh Divisi bagian Sekertaris Perusahaan (Humas):

Struktur Organisasi *Public Relations* PT Perkebunan Nusantara V

Bagan 2.1 (struktur organisasi divisi HLKHI)
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)



Dalam struktur Organisasi Humas Legal Kepatuhan dan Hubungan Investor (HKLHI) terdapat pimpinan langsung yang dipimpin oleh Kabag Sekektaris Perusahaan (SEKPER) hingga jajaran bawahnya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

C. Divisi Bagian Umum

Divisi bagian umum perusahaan PT Perkebunan Nusantara V lebih kepada tugas teknis yang mencakup aspek *community relations* dan *government relations* perusahaan. Di bagian umum *government Relations* menangani hal-hal seperti surat menyurat misalnya terkait perizinan terkait ketenagakerjaan atau terkait hal-hal yang berbau hukum. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan pemerintah, terkait menghadiri undangan-undangan mewakili perusahaan itu merupakan wewenang dari Humas. Dikatakan secara jelas ketika acara Gubernur mengadakan pertemuan makan malam dengan alih silaturahmi yang melibatkan dua divisi ini, biasanya hal ini lebih kepada sektor Humas yang berperan penting. Jadi perbedaan yang terlihat antara Humas dengan bagian umum terletak pada humas lebih kepada komunikasinya sedangkan bagian umum lebih kepada prnsipil.

Untuk divisi umum terdapat bagian atau tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau kata lain dari *community relations.* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) artinya perusahaan melimpahkan kuasa kepada divisi umum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PKBL ini telah diatur dalam Permen-05/MBU-2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan (PK) berurusan dengan pemberian pinjaman usaha dengan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sifatnya adalah masyarakat mengajukan dan tim PKBL yang akan melakukan survey dan memeriksa segala persyaratan. Untuk Bina Lingkungan (BL) merupakan sebuah program yang ditempuh melalui penyaluran dana untuk kepentingan pengembangan masyarakat.

Tim PKBL menjalankan program dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dengan bentuk pembinaan yang sifatnya "*free"* dengan misi meningkatkan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi. Artinya Program Kemitraan (PK) akan ikut serta pada pameran berskala nasional ataupun yang sifatnya bazar di tempat-tempat yang berpotensi menjual. Sedangkan Bina Lingkungan (BL) yang sifatnya lebih pada program pemberdayaan kondisi situasi sosial masyarakat menggunakan pemanfaatan dana dari laba. BL dalam teori komunikasi memiliki peran yang sama dalam menangani masyarakat. Seperti halnya bergerak di bidang pendidikan, bantuan kesehatan, pembangunan sarana ibadah,

pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan fasilitas umum di seluruh unit perkebunan PTPN V tanpa terkecuali.

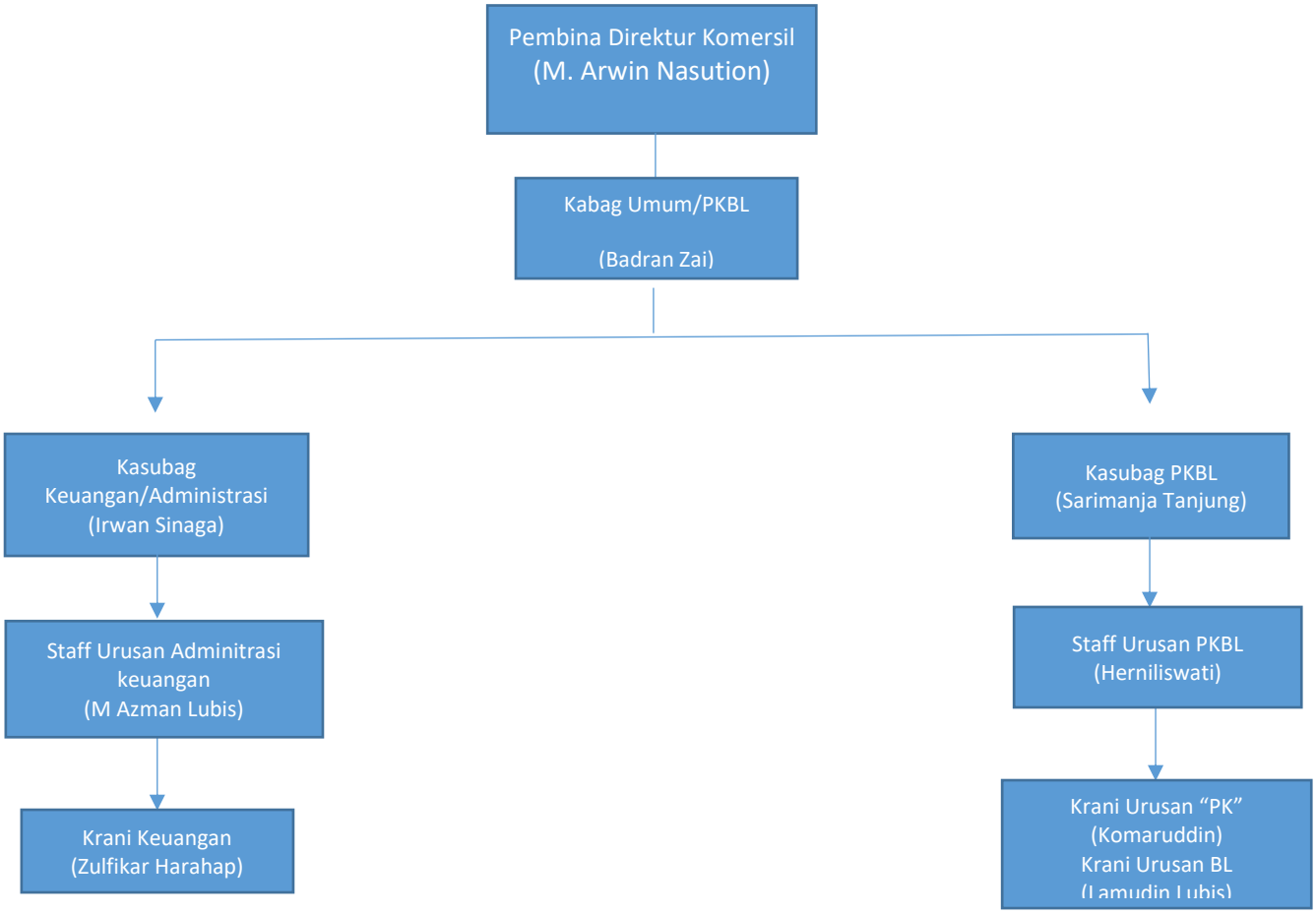
Adapun pembagian tugas dapat dijelaskan sebagai berikut: Direktur Komersil M. Arwin Nasution, dibawahnya ada Kabag Umum/PKBL Badran Zai bertugas dalam mengajukan usul ke Direksi. Untuk Program Kemitraan (PK) atau di Bina Lingkungan (BL) krani keuangan, dan krani urusan PK. Krani urusan BL ini berurusan dengan lapangan, sedangkan Staff urusan Administrasi Keuangan dan staff urusan PKBL ini sifatnya mengkepalai krani-krani untuk terjun ke lapangan "ayo survey". Jadi selaku staff bukan hanya fokus dalam mengatur keuangan namun juga di lapangan.

Untuk sistem kerja biasanya dibagi tim menjadi dua bagian. Dari hasil survey yang menandatangani adalah Staff Urusan Administrasi Keuangan. Setelah di paraf proposal akan sampai pada Kasubag, setelah di paraf Kasubag proposal diberikan ke Kabag umum, dan bila Kabag Umum menyetujui proposal maka akan diberikan kepada direksi. Jadi ada tahapan-tahapan, yang artinya keputusan akhir berada di direksi selaku pembina. Tugas direksi pada umumnya diposisi menyalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai ketetapan perusahaan.

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara V:

Struktur Organisasi Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara V

Bagan 2.2 (struktur organisasi divisi Umum Tim PKBL)



(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

BAB III

TEMUAN DATA PENELITIAN

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan. Hal ini menjadikan fungsi *community* dan *government relations* akan dijalankan baik dari segi struktural maupun fungsional. Adapun di dalamnya terdapat tiga elemen yang saling berkesinambungan yakni pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* yang terkait. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil reduksi data yang telah penulis lakukan dan nantinya akan dilakukan analisis terkait bentuk-bentuk dari aktivitas *community* dan *government relations* yang dilakukan oleh PTPN V.

Data yang akan dikembangkan penulis nantinya tentunya telah melewati proses pemilahan data berdasarkan kebutuhan dan kecocokan yang tertera pada kerangka pemikiran penulis. Data yang akan penulis gunakan berasal dari data wawancara, observasi dan penelusuran melalui *website* perusahaan pada Divisi Sekertaris Perusahaan, Divisi Umum Program Kemitraan, dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN V. Data pelengkap ditempuh penulis dengan mewancarai pejabat pemerintahan Divisi Tata Pemerintahan dan Divisi Dinas Perkebunan, beserta ketiga komunitas yang mendapatkan dampak dari jalannya perusahaan. Adapun tujuan dari observasi ini adalah adanya harapan mendalami objek untuk mencapai inti permasalahan penelitian yang dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara ditempuh dengan cara *face to face* dan via telepon.

A. Implementasi Kegiatan *Community Relations* yang Dilakukan PT. Perkebunan Nusantara V Unit Sei Kencana

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis kepada narasumber, diperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan *community relations* di PTPN V dengan komunitas Unit Sei Kencana. Pelaksanaan *community relations* ditempuh melalui program-program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA). Tentunya tidak mengurangi dampak atau manfaat yang dirasakan langsung oleh komunitas Sei Kencana, sekaligus komunitas lain yang diluar lokalitas. Penulis akan melakukan gambaran saat berlangsungnya aktivitas *community relations* dalam program PKBL serta Pola KKPA yang dapat diketahui melalui pemaparan sebagai berikut:

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau dikenal dengan *Community relations* juga sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan kepada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan segelintir kelompok atau komunitas yang hidupnya dalam satu wilayah geografis dengan perusahaan, artinya adalah komunitas yang hampir setiap harinya akan merasakan dampak dari aktivitas perusahaan perkebunan. Implementasi kegiatan *community relations* bagi perusahaan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi terutama bagi perusahaan BUMN. Ini telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PTPN V salah satu perusahaan milik BUMN yang menggunakan PKBL sebagai salah satu konsep dari *community relations.*

Di dalam kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis. Penulis menemukan beberapa jenis program yaitu ada PKBL dan pola KKPA yang merupakan program Pemerintah dan telah diterapkan oleh seluruh perusahaan perkebunan BUMN. PKBL adalah dua kata terpisah tentang Program Kemitraan dan Bina lingkungan. Perbedaannya terletak pada dana yang akan digunakan oleh perusahaan. Secara singkat bentuk peminjaman dana pada PK akan dikembalikan komunitas ke perusahaan dengan biaya administrasi sedangkan, untuk BL akan dianggap sebagai dana Hibah perusahaan yang tidak memerlukan pengembalian.

Kondisi ini memperlihatkan adanya aktivitas *community relations* yang dijalankan perusahaan. Namun dalam penemuan penelitian, penulis menemukan beberapa pernyataan narasumber yang menyatakan ketidakpuasan akan kegiatan *community relations* yang telah dilakukan oleh pihak PTPN V. Oleh karena itu penulis akan memaparkan penemuan-penemuan di lapangan yang berkaitan dengan komunitas dan PTPN V.

Aktivitas *community relations* dikelola oleh Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Divisi Umum PT Perkebunan Nusantara V. Kondisi lingkungan sosial komunitas sekitar dimana BUMN berdomisili, akan dipraktekan sesuai sistem peraturan Menteri BUMN yang berada di bawah pengawasan seorang direksi. Hal ini diperkuat dengan adanya informasi dari narasumber yang mengatakan bahwa:

(DATA 1)

> "*Kalau untuk di divisi umum tentunya di PKBL dibina langsung oleh Direktur Komersil M. Arwin Nasution, dibawahnya ada Kabag Umum/PKBL Badran Zai tugasnya dia mengajukan usul ke Direksi....")(Wawancara M. Azman Lubis Staff keuangan PKBL, 12 April 2017)*

Community relations di programkan pada konsep PKBL yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh PT Perkebunan Nusantara V untuk menjalin hubungan dengan komunitas. Adapun komunikator dilakukan oleh tim divisi PKBL, dari mulai dana PKBL ada di divisi Umum, tim PKBL yang tentunya kebijakan akhir tetap di otoritasi oleh direksi. Mengutip dari Narasumber Risky Atriansyah yang mengatakan, "Bahwasanya pengelolaan PKBL disamping sifatnya yang wajib perusahaan telah melakukan ini sebagai kesadaran, demi tercapainya visi dan misi perusahaan". Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Risky Atriansyah sebagai berikut :

(DATA 2)

> *"Kalau untuk pertahun itu ada RKAP, cuman di RKAP ini untuk komunitas memang gak kayak detail. Cuman dianggarkan jumlah total misalnya di PKBL rencana kerja untuk tahun 2017 untuk pendidikan misalnya nanti untuk kampar berapa juta, Kampar itu kan Sinamanenek". (Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Pelaku pelaksana kegiatan yang akan menjembatani antara perusahaan dengan komunitas, selain melalui Tim PKBL divisi Umum dengan campur tangan praktisi *public relations* pada divisi HLKHI yang berada di kantor pusat maupun yang berada di Unit. Pelaku ini terbagi menjadi dua fungsi yaitu, aksi dan komunikasi. Dalam menjalankan aksi dan komunikasi sesuai identifikasi masalah yang ada dilapangan. Divisi HLKHI dan Divisi Umum merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan *community relations* dalam membentuk program, melalui survey hingga evaluasi, dan berjalan sesuai potensi dan peluang di masing-masing bidang.

Untuk aksi dijalankan oleh tim Divisi umum PT Perkebunan Nusantara V dan khusus *Public Relations* dalam HLKHI di kantor pusat akan menangani perihal komunikasi. Divisi HLKHI di Unit perkebunan akan melakukan kedua tugas dalam aksi maupun komunikasi. Merujuk dari kedua tugas divisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Aksi pada lingkup *community relations* terlaksana di bagian Umum Perusahaan dalam segala bentuk yang berkaitan dengan "survey dan analisa" langsung ke lapangan, dalam menentukan kelayakan kondisi komunitas bantuan untuk PKBL. Sedangkan untuk segala hal yang berkaitan dengan "penyaluran informasi kepada komunitas" maupun *stakeholders* ini ada pada otoritas HLKHI. Penjelasan ini diperkuat peneliti dari narasumber tentang wewenang sesuai potensi yang dimiliki divisi sebagai berikut:

(DATA 3)

> *"...kalau yang di Humas hanya sebatas itukan kantor pusat bagian umum lebih terkait untuk itu kalau communitynya, tapi kalau di pencitraannya ada dikita. Tapi kalau dikebun itu memang dipegang penuh sama humasnya (Asum) mau yang community mau yang government....". (Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Implementasi kegiatan *community relations* yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V terbagi menjadi beberapa tipe, meliputi:

1. Langkah pertama dilakukan dengan cara membuat program yang berfokus pada aktivitas komunikasi perusahaan dengan komunitas lokal. Seperti dalam pemberian penyuluhan *soft skill* dengan cara non teknis bertemakan perkebunan, perdagangan, serta pembukuan pada komunitas;
2. Langkah kedua fokus kepada aktivitas yang melibatkan perusahaan pada aktivitas komunitas, seperti bentuk dukungan terhadap sarana dan prasarana komunitas lokal;
3. Kemudian dilakukan dengan cara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Untuk skala per unit dikatakan mendapatkan porsi rata dari perusahaan. Jenis program yang telah dilaksanakan selama ini juga tidak ada perbedaan yang signifikan untuk unit perkebunan yang tersebar di wilayah Riau.

Perilaku komunitas Sei-kencana mengalami kompleksitas yang mana terjadinya pergeseran terkait persepsi yang diciptakan oleh komunitas terhadap perusahaan. pendekatan-pendekatan berdasarkan philantropy khusus Sei-Kencana tidak mendorong komunitas untuk terlibat aktif kedalam perusahaan. Jika ditinjau dalam penemuan terlihat adanya keinginan yang datang dari elemen Komunitas yang mengatakan:

(DATA 4)

"...untuk hal yang sifatnya sarana prasarana itu masih berjalanlah, sampai sekarang perusahaan perduli dengan desa...namun intinya tolonglah rangkul kami masyarakat baik dari pemerintahan atau perusahaan dengan mengganti lahan yang belum dikabulkan ... " (wawancara Syamsir, 1 Juni 2017)

Komunitas di unit Sei Kencana ditentukan dalam beberapa kategori guna sebagai pembeda konsep atau program untuk pelaksanaan *community relations.* Komunitas yang pertama ada pada komunitas petani KKPA. Ini merupakan masyarakat yang berada disekitar unit kerja dan berdampingan, bahkan tempat tinggalnya sebagian besar bersebelahan

langsung dengan perusahaan. Kemudian dikatakan ada komunitas binaan, dimana komunitas ini yang mendapatkan bantuan-bantuan kemitraan dari usaha-usaha dalam program PKBL. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan nara sumber Risky Atriansyah selaku Staff *Public Relations* perusahaan, beliau mengatakan:

(DATA 5)

> *"Berarti komunitasnya yang pertama ada komunitas petani Plasma dan KKPA itu komunitas yang pertama yang pasti itu adalah masyarakat yang ada disekitar unit kerja benar-benar berdampingan bahkan tempat tinggalnya mungkin ada yang sebelahan betullah dengan perusahaan. Ada komunitas Binaan yang mendapatkan bantuan-bantuan kemitraan itu dan usaha-usaha itu. Itu kami katakan komunitas juga karena sesekali waktu mereka ada dikumpul dan ada di buatkan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan-pembinaan..." (Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Risky Atriansyah juga menambahkan tentang keberadaan komunitas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Komunitas tersebut adalah komunitas petani Plasma dan komunitas PKBL. Komunitas PKBL yang perusahaan maksud adalah komunitas yang sifatnya luas untuk program kemitraan. Tidak harus pada lokasi perusahaan berada, sehingga perusahaan memang mengatakan khusus untuk kegiatan *community relations* PT Perkebunan Nusantara V sudah dalam skala besar.

Karakteristik komunitas yang berada di lahan perkebunan PTPN V menurut penjelasan dari narasumber M. Azman Lubis, komunitas memposisikan perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul seperti soal lingkungan hidup yang dampaknya dipikul oleh komunitas. Atau juga digambarkan seperti persoalan sosial yang mengarah pada beban ekonomi komunitas. Komunitas yang berada di Unit Sei Kencana memiliki karakter yang rumit, dan memiliki *mindset* kegiatan *community relations* yang merupakan sebuah bentuk apresiasi perusahaan untuk memperkaya dalam skala per individual. Mengutip dari hasil wawancara narasumber dari M. Azman lubis mengatakan:

(DATA 6)

> *"Mereka gak pernah merasa itu untuk bantuan pribadi inikan mereka sifatnya ke pribadi jatuhnya baru merasa dapat. Karena kita kan membangun sarana prasana ini balik lagi ya ke Kencana, membantu ekonomi perorangan ha perorangan kan hanya ekonomi tadi dan itu berproses bukan tinggal metik. Dan yang berhasil ini memang rata-rata orang baik yang pedagang, peternak, petani ini kan orang-orang yang mau kerja. Yang ribut ini kan yang mau ongkang-ongkang kaki aja. Ini*

sama halnya yang kayak kamu bilang memberdayakan masyarakat hanya beda penyebutan kata. Itulah tujuannya memberdayakan masyarakat, memang terusnya kita sampaikan saat penyuluhan, tujuan dana ini dibuat untuk ini ini ini kalau harapan kami kan gitu dengan adanya pemberian ini meningkatlah ekonomi ibu bapak."(wawancara M Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)

Pernyataan narasumber didukung oleh hasil wawancara dari salah satu komunitas yang bernama Mardi. Mardi ikut menjelaskan atas ketidakpuasan berdasarkan naluri manusia yang tidak pernah merasa cukup. Apalagi jika ini bersinggungan dengan ekonomi komunitas yang pasti memilki keinginan sukses secara instan. Hal ini dikatakan sebagai berikut:

(DATA 7)

"Kalau dibilang cukup ya enggak jugalah masih kurang hehehe. Tapi tingkat persentasenya sudah lumayan lah ya namanya kami nih masyarakat tetap kurang. Karena segala lini diperhatikan ya contohnya perbaikan jalan dilaksanakan, acara-acara kami didesa seperti olahraga mintak tolong ke perusahaan kami dibantu, ekonomi kami diangkat, tapi ya gak menyeluruh."(Wawancara Mardi selaku komunitas Sinamanenek, 4 Juni 2017)

Hasil dari penelusuran penulis juga menemukan tentang komunitas yang sangat sadar akan keberadaan perusahaan. Artinya bagi Asum atau Humas yang berada di wilayah Unit Sei Kencana enggan untuk melakukan pendekatan kepada komunitas. Di Unit Sei Kencana sendiri mengungkapkan bahwa ketika Humas ingin lebih dekat dengan komunitas, berarti Humas memiliki kelebihan dana. Dana tersebut tumbuh di pemikiran komunitas yang berasumsi, ketika mereka di temui oleh pihak perusahaan maka, mereka akan diberikan iming-iming serta apapun yang menguntungkan mereka. Oleh sebab itu Humas di lapangan atau di Unit Sei Kencana membatasi pergaulan dengan komunitas itu sendiri. Ini dikuatkan dengan pernyataan narasumber yang mengatakan:

(DATA 8)

"Kalau untuk silaturahmi yang sifatnya informal gak pernah saya. Hehe karena ada image yang jelek yang ada di mindsetnya komunitas "Asum kalau mau main seperti itu harus banyak modal". Kita kalau sudah dua sampai tiga kali kedesa orang desa tuh beranggapan kita akan memberikan apa yang mereka minta. Begitu kita tolak satu kali dia dah langsung "melengos" kekita."(Wawancara Amir Syafrudin, 22 Juli 2017)

Dalam Implementasi *community relations* memerlukan wadah untuk menghadapi komunitasnya. Dengan tujuan memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan *community relations.* Untuk penggunaan media PT Perkebunan Nusantara V dalam

menggunakan media konvensional, dan nonkonvensional oleh PT Perkebunan Nusantara V dalam tingkat penggunaan yang berbeda. Dalam hasil wawancara penulis dengan narasumber Risky Atriansyah menjelaskan tentang media *community relations* yaitu:

(DATA 9)

> *" ... Di kantor pusat karena jarang bersinggungan langsung dengan yang dikebun itu melalui media baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional. Konvensional maksudnya media cetak elektronik yang nonkonvensional eee jarang sekali sih, tapi itu larinya nanti ke humas asum kebun. Tapi intinya kantor pusat lebih sering menggunakan media cetak dan elektronik. Paling besar itu publikasi di tahun 2015-2016 mencapai 70 % terkait PKBL ...."(Wawancara Rizky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Secara terfokus, program yang diterapkan oleh PT Perkebunan Nusantara V menganut pola PKBL dan KKPA. Segala jenis bantuan atau pun pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan termasuk dalam Bina Lingkungan. Sedangkan segala bentuk yang menjadikan komunitas sebagai mitra, termasuk ke dalam program kemitraan. Selanjutnya KKPA atau plasma merupakan sistem yang dijalankan dengan perusahaan, selaku penyedia lahan dengan masyarakat yang mengelola dengan pembagian hasil untuk kedua belah pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Risky Atriansyah menjelaskan bahwa:

(DATA 10)

> *"Itu biasanya komunitasnya itu berdasarkan proposal yang masukkan tadi di PKBL. Siapa yang mengajukan, misalnya dari satu tempat ada 10 orang 20 orang diseleksi didatengin survey kemudian nanti dia akan mendapatkan keputusan dibantu atau tidak....Perusahaan berperan dalam penyedia lahan atau pemilik modal dengan masyarakat selaku pengelola. Nanti untuk hasil itu persentasenya 60% pemilik modal 40% pengelola. Seperti itu kalau KKPA, hampir sama dengan plasma...." (Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Benefit dari kegiatan *community relations* yang dilaksanakan PTPN V pada elemen ini dapat dilihat dari segi aset penting perusahaan yang dijelaskan oleh narasumber. Untuk *community relations* timbal balik yang didapatkan perusahaan dari komunitas berupa "mitra" dalam bentuk kerja sama penjualan buah sawit. karena komunitas petani menempati posisi rantai pasok atau sumber bahan baku yang diolah pabrik PTPN V sebagian besar berasal dari komunitas tadi. Seperti penjelasan dari narasumber yang mengatakan bahwa:

(DATA 11)

> "*Karena memang sejak awal dibangun PTPN V ini untuk menampung buahnya masyarakat. Kalau dengan 575 ton kapasitas sekarang untuk TBS ya olahnya perjamnya 575 ton kalau mengandalkan hasil produksi TBS milik PTPN V sendiri masih kurang. Jadi butuh kita memang."(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Benefit lainnya yang didapatkan perusahaan melalui implementasi *community relations* adalah *safety* (keamanan). Kehidupan PTPN V yang tumbuh berdampingan dengan komunitas menuntut perusahaan meletakkan kewasapadaan, tentunya dalam hal buah sawit. Untuk menghindari hal-hal seperti adanya pencurian buah dan penjarahan oleh oknum-oknum dari komunitas. Kegiatan *community relations* terbilang efektif untuk dijadikan pencegahan.

Penulis akan memaparkan lebih spesifik terkait komunitas beserta program yang telah diimplementasikan oleh PTPN V yakni melalui PK dan BL, serta komunitas KKPA sebagai berikut:

1. Program Kemitraan (PK)

Program kemitraan merupakan suatu kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan pinjaman usaha, dan pembinaan kepada usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM). Program Kemitraan sama halnya dengan menciptakan komunitas mandiri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi komunitas sekitar, dimana BUMN berdomisili. Dengan catatan untuk program kemitraan adanya biaya administrasi yang harus dikembalikan oleh mitra dengan memiliki keterbatasan atau jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan. Adapun keistimewaan dari program ini dengan pengenaan bunga hanya 6% flat per tahun dan diberikannya pembinaan secara "Gratis". Gratis di sini menjelaskan perusahaan selaku penanggung jawab keseluruhan pembinaan kepada komunitas.

Pembinaan yang telah dilakukan PTPN V berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi yang mengikutsertakan komunitas pada acara-acara besar maupun kecil. Layaknya pameran skala nasional atau hanya berupa penyelengaraan bazar di lokasi yang bisa dijangkau pengunjung. Misalnya lokasi Mall yang berada di Riau. Hal ini adalah salah satu bentuk upaya dalam mengatasi keterbatasan komunitas yang kerap kali kesulitan dalam hal pemasaran, SDM, manajemen, permodalan, dan teknologi. Oleh karena

itu PK akan menjadi peluang besar, sekaligus solusi bagi komunitas dalam membranding produknya hingga ke tahap nasional maupun internasional.

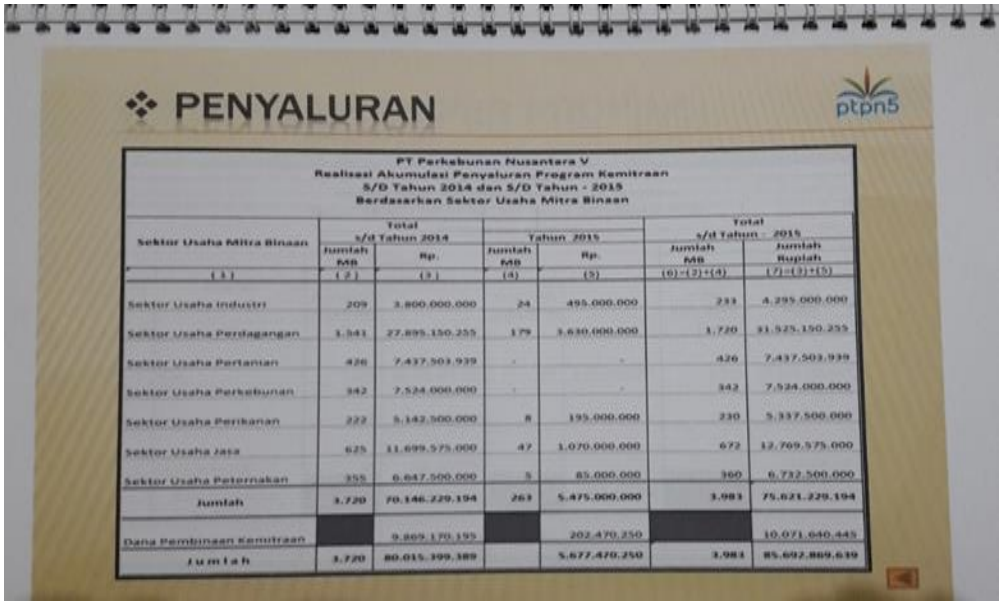
PK dalam rangka menentukan tentang calon mitra tentunya memiliki langkah-langkah atau alur program penyaluran hingga pada tahap pemutusan akhir. Penulis akan meringkas beberapa tahapan yang telah dijelaskan oleh narasumber tim PKBL sebagai berikut:

1. Calon mitra binaan diharuskan mengajukan surat permohonan bantuan dengan melampirkan proposal terkait usaha yang akan dirilis ke PTPN V, tertuju kepada Administratur/kepala unit kerja. Kemudia Tim akan menyalin informasi tersebut kedalam aplikasi;
2. Administratur/kepala unit kerja akan melakukan mendisposisikan ke PKBL unit kerjanya;
3. PKBL unit kerja melakukan evaluasi kepada calon mitra binaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Tim PKBL akan melanjutkan kegiatan survei kesesuaian di lapangan calon mitra berada. Dari survey akan didapatkan berbagai macam informasi tambahan yang akan di masukan ke dalam aplikasi, guna memperlengkap profil calon mitra binaan.
5. PKBL unit kerja akan membuat berita acara hasil dari survei yang telah dilaksanakan;
6. Usulan proposal dan berita acara hasil survei PKBL unit kerja diajukan ke Direktur selaku pembina bidang PKBL;
7. Tim PKBL melaksanakan disposisi pembina antara lain dalam bentuk survei disertai pembuatan berita acara survey, didampingi lembaga keuangan, perbankan, dan koperasi;
8. Bidang PKBL membuat memo hasil survei tadi, yang ditujukan kepada direktur selaku Pembina;
9. Untuk tahap akhir direktur akan memberikan persetujuan atau penolakan komunitas yang akan dijadikan mitraa binaan;
10. Setiap bulannya PKBL akan menerima angsuran yang diperoleh dari mitra binaan melalui tunai ke petugas, transfer, atau bisa juga langsung melalui kantor pusat.

Untuk mitra Binaan akan mendapatkan jumlah maksimal Rp 75 Juta dengan jangka waktu pinjaman selama satu sampai dengan tiga tahun. Artinya tidak semua komunitas secara personal mendapatkan jumlah maksimal Rp 75 juta dari PTPN V. Tahapan prosedur yang telah penulis jabarkan tersebut juga berkaitan dengan wewenang pengeluaran dana

PKBL, apabila telah disetujui proposal oleh direksi. Kegiatan PKBL akan dimulai dari perencanaan yakni, penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Pembinaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan selanjutnya akan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RKAP yang telah disetujui oleh RUPS bisa dilanjutkan melalui penyaluran sembil menunggu alokasi per wilayah dari Kementrian Negara BUMN. kemudian untuk keputusan dan wewenang penyaluran dana PKBL diotorisasi oleh kepala bagian PKBL selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan PKBL. Apabila dalam tahun anggaran dana PKBL belum tersalurkan, maka otomatis saldo dana dijadikan sumber dana berikutnya. Penyaluran dana PKBL terhadap calon mitra binaan wajib memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah di tetapkan oleh PTPN V.



Gambar 3.1 Penyaluran Dana program Kemitraan 2014/2015
(*Sumber: Dokumentasi PTPN V)*

Prinsip PK yang paling utama adalah mengenai *condition* kelayakan komunitas, tentunya khusus di level menengah ke bawah. Untuk lokasi PTPN V sendiri tidak membatasi sejauh mana jarak yang akan ditempuh selagi komunitas memenuhi kriteria PK. Selagi lokasi tempat komunitas tinggal dapat dijangkau sekalipun dengan medan yang berat, Tim PKBL akan tetap turun asalkan proposal telah diterima PTPN V. Artinya, untuk PK PTPN V

menerapkannya secara luas, tidak selalu komunitas yang hanya di lingkungan PTPN V. Ini dijelaskan oleh narasumber yang mengatakan sebagai berikut:

(DATA 12)

"*...Derah pelosok kita kejarnya sampai sana kayak saya di daerah Air Molek namanya sungai paret sana ada proposal dari kampung masuk ke kita, sampai nyebrang kekampung sana gak bisa mobil naik pompong sejenis kapal kecil ha naik itulah kami untuk survey. Itukan rasa kepedulian kita walaupun dia di pelosok-pelosok dunia kita bilang kita kejar karena tanggung jawab sosial tadi. Ha pas kita tengok ternyata cocok wajar dia menerima lengkap semua datanya kondisinya juga sesuai dengan syarat-syarat yang kita terapkan ya kita kasih gitu. Bukan harus berarti hanya dilingkungan kita tok bukan." (Wawancara M. Azman Lubis, 12 April 2017)*

Program kemitraan juga sedikit berbeda dengan Bina Lingkungan. Untuk realisasi akumulasi penyaluran PK ditentukan berdasarkan Propinsi, tidak ditetapkan dengan cara per unit. Jadi, untuk Sei Kencana sendiri masuk dalam Propinsi Riau Kabupaten Kampar. Kegiatan PK di Sei Kencana akan dihitung dalam kabupaten Kampar, bagaimanapun syarat utama PK adalah mengajukan, bukan PTPN V yang mencari namun PTPN V akan membuka peluang.

Untuk dana hitungannya terbatas maka, akan disesuaikan dengan instruksi permen pemerintahan dan tim PKBL yang akan mempelajari proposal komunitas. Komunitas yang telah mengajukan akan dipilah lagi dan didukung dengan survey yang telah dilakukan. pemberian dana juga pastinya akan dalam jumlah yang berbeda tidak seluruhnya PTPN V memberikan Rp 75 Juta. Caranya:

1. Tim PKBL memberikan batasan putaran, berapa putaran individu perhari;
2. Lalu tim akan mengevaluasi melalui perhitungan hasil dibuat dengan resume;
3. Memperkirakan program kedepan yang akan dilakukan komunitas;
4. Apa yang akan dilakukan komunitas?

Cara ini berguna untuk penentuan dana yang akan disalurkan oleh calon mitra. Cara PK yang diterapkan oleh PTPN V sebagai upaya dalam meminimalisir kemacetan dana. Tahapan dengan *resume* yang dibuat Tim PKBL menegaskan kepada komunitas bahwa pinjaman dana harus berjalan mengikuti kesepakatan rencana. Kelengkapan data komunitas apabila telah dilengkapi dengan waktu yang telah ditentukan maka akan diproses oleh PTPN V. Jika tidak, secara otomatis komunitas akan gugur dan dianggap tidak memenuhi kriteria beserta kelengkapan data. Ini diperkuat dengan narasumber yang menjelaskan bahwa:

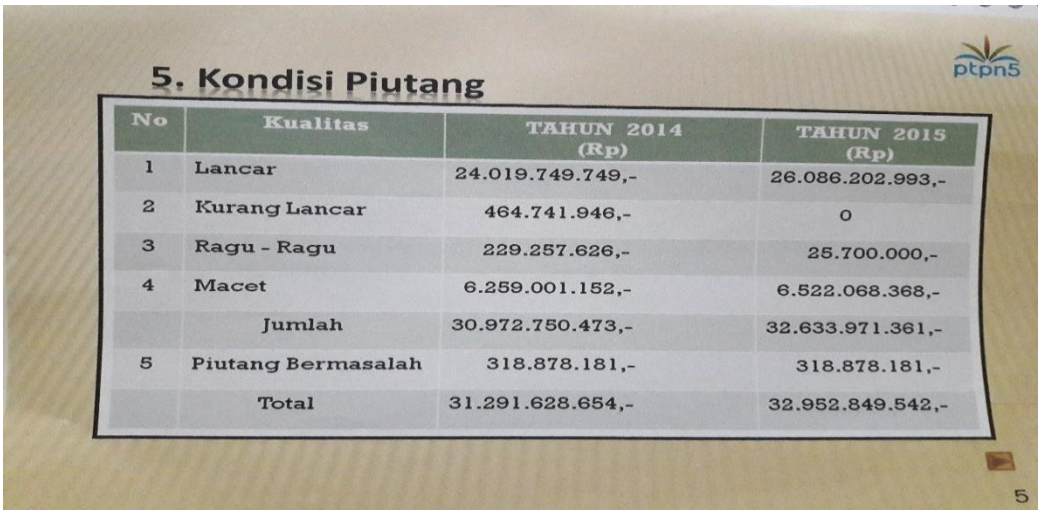
(DATA 13)

"*Itu kita itung semua kita evaluasi nah setelah hasil itu kita buatlah satu resume kitakan keuangan dia kita tengok program dia kedepan apa yang mau dia buat kita pelajari mampu gak berputarnya mangkanya sekianlah paling maksimal. Jadi gak sembarangan gitulah dia, sempat kita kasih jor-joran hancurlah perusahaan. Pokoknya segala bentuk yang ini tadi kita pakai evaluasi, survey dulu yang pertama. Syarat utama tadikan mengajukan bukan kita yang mencari tapi kita buka peluang. Diajukan mereka kita pilah-pilah dah kita survey. Pada saat survey kita sampaikan ke mereka lengkapi ini ini ini kita kasih batas waktu kenapa? Programkan jalan harus sesuai dengan rencana paling lambat sampai dengan tanggal sekian harus masuk yang kekurangan bapak ibu ini ini ini kalau enggak apa boleh buat kami gak bisa bantu lagi. Kita tunggu sampai batas waktu itu mana yang masuk kita proses yang gak ya kita tinggal." (wawancara M. Azman Lubis, 12 April 2017)*

Dalam sifatnya yang terus bergulir maka dana menjadi pendukung utama untuk berjalannya PK. Penulis menemukan hambatan terkait PK yang kerap kali menjadi tantangan bagi Tim Divisi PKBL. Seperti banyaknya setoran/cicilan yang tidak teridentifikasi akibat mitra binaan dalam menyetor ke Bank bukan atas nama mereka. Lalu pada saat diadakan penagihan secara langsung kepada mitra binaan kategori macet pada umumnya usaha mitra binaan sudah tidak beroperasi lagi. Dampak dari kemacetan dana akan merugikan komunitas baru yang akan mengajukan permohonan PK. Hal ini dijelaskan oleh narasumber berdasarkan pengalamannya ketika sedang bertugas di lapangan, yaitu:

(DATA 14)

"Haaa...masalah keuangan inilah yang rumit. Komunitas ini suka kali lari-larian kalau sudah kita turun. Hemmm jadi tim PKBL ini kan selalu mengalami pergantian orang ya, nah jadi setiap orang beda penanganan. Kalau cara saya nih ya, saya dekati betul komunitas ini, saya tengok suku dia. Dari logat suku batak dia nih kan, masuklah saya kan saya tanya "marga kau apa"? Lubis pak. Ha cocok dalam hati nih kan, langsung saya tembak "sinilah kau dulu minum kopi kita, duduk. Jadi cemana mau kau kasih berapa cicilan tuh? Janganlah pulak kau buat mau marga lubis ah" ahaha itulah salah satu cara yang saya gunakan untuk komunikasi."(Wawancara M. Azman Lubis, 12 April 2017)



5. Kondisi Piutang

No	Kualitas	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	Lancar	24.019.749.749,-	26.086.202.993,-
2	Kurang Lancar	464.741.946,-	0
3	Ragu - Ragu	229.257.626,-	25.700.000,-
4	Macet	6.259.001.152,-	6.522.068.368,-
	Jumlah	30.972.750.473,-	32.633.971.361,-
5	Piutang Bermasalah	318.878.181,-	318.878.181,-
	Total	31.291.628.654,-	32.952.849.542,-

Gambar 3.2 Kemacetan dana PK PTPN V
(Sumber: Dokumentasi PTPN V)

Penyaluran berdasarkan sektor usaha Mitra Binaan di PTPN V yang dapat diberikan bantuan pinjaman meliputi, Sektor Usaha Industri, Sektor Usaha Perdagangan, Sektor usaha pertanian, Sektor usaha perkebunan, Sektor usaha perikanan, Sektor usaha jasa, dan Sektor usaha perkebunan. Adanya pemberian PK ini membawa harapan PTPN V meningkatnya ekonomi komunitas. Dengan pembekalan yang telah di berikan Tim PKBL terkait cara dalam pembukuan, pemasaran, dan evaluasi. Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber:

(DATA 15)

> *"Tujuannya memberdayakan masyarakat, memang terusnya kita sampaikan saat penyuluhan tujuan dana ini dibuat untuk ini ini ini kalau harapan kami kan gitu dengan adanya pemberian ini meningkatlah ekonomi ibu bapak. Caranya bagaimana kita ajari. Contoh walaupun kita cuman pedagang sayur buat pembukuannya ha kan kita ajarin dia, nanti jangan campurkan hasil ini dengan hasil yang lain. Pelajari peningkatannya, sehingga ibu-ibu tau apa yang mau ibu buat kedepannya menjadi meningkat lagi udah kita sampaikan semuanya. Evaluasi kalau malas perbulan pertiga bulan buat evaluasi ibu hasil kerja ibuk, udah kita buatnya itu."(Wawancara M .Azman Lubis, 12 April 2017)*

Dari praktisi *public relations* juga mengungkapkan adanya strategi yang digunakan dalam memasuki ranah komunitas, yang memiliki permasalahan dalam pembayaran. Salah satunya dengan melibatkan lembaga kejaksaan. Ranah hukum memang menjadi pilihan sebagai jalan penyelesaian kemacetan dana bagi komunitas yang tidak patuh, karena bagaimanapun PTPN V merupakan BUMN yang memiliki wewenang untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hal ini diperkuat dengan penjelasan narasumber sebagai berikut:

(DATA 16)

"Jadi kejaksaan itukan berperan sebagai penuntut di pengadilan dia yang menuntut pidana orang bisa juga jadi jaksa pengacara negara untuk BUMN untuk pemerintah jatuhnya menjadi pengacaranya PTPN V lah. Itu juga menggunakan jasa si jaksa untuk melakukan hal-hal lah ntah kadang mereka menjelaskan secara hukum kalau mereka gak bayar apa yang bisa dilakukan. dalam tanda kutip memberikan tekanan-tekananlah seperti itu. Biasanya sih dimulai dari pendekatan persuasif dulu apa yang bisa dibuat mendudukkan kembali menstruktur hutanglah."(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)

Mengacu pada ke tujuh bagian sektor yang dijalankan oleh PTPN V penulis akan memaparkan contoh berupa gambar yang penulis dapat dari dokumentasi PTPN V, yang berada di Kabupaten Kampar. Prosedur pelaksanaan Sektor Program Kemitraan sebagai berikut:

"KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN TIM SURVEY PERDAGANGAN DAN RUMAH MAKAN"



Gambar 3.3 Aktivitas *community relations* melalui program kemitraan Daerah Kampar usaha kecil "rumah makan" sektor perdagangan
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Melalui usaha kecil rumah makan, termasuk dalam cakupan sektor perdagangan. Dimana terjadinya aktivitas tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama tanpa pemaksaan. Sektor perdagangan di Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa tidak adanya pembatan usaha. Sekalipun usaha dalam lingkup kecil tidak menutup kepentingan tim PKBL terjun langsung ke lapangan seperti penjelasan narasumber di atas.



Gambar 3.4 Aktivitas *community relations* melalui program kemitraan suasana "survey" di bidang budidaya ikan, bibit tanaman, ahli kerajinan besi.
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Tahapan-tahapan lain yang telah dilakukan oleh Tim PKBL ketika terjun ke komunitas dijelaskan dalam wawancara dengan M. Azman Lubis. Menurutnya pengajuan proposal yang akan direpitulasi, dan mengadakan survey yang melibatkan orang-orang pemerintahan daerah. Selanjutnya diakhiri dengan penyuluhan beserta pencairan dana untuk komunitas yang telah terpilih. Seperti penjelasan dari narasumber yaitu:

(DATA 17)

"...Pertama proposal mereka, kedua kita adakan rekapitulasi begitu kita rekap kita adakan survey pada saat survey kita mintaklah memberikan keterangan mereka, apa kekurangan mereka terkait tujuannya maunya apa pokoknya semualah di situ. Setelah lengkap data mereka kita evaluasi. Evaluasi tadi ya hasil survey tadi itu evaluasi itu wajar itu gak wajar. Setelah ini semua wajar kita kan semacam kemitraan kan kita kerja sama dengan dinas koperasi daerah bukan bergerak sendiri kita. Orang dinaspun kita ajak tolong didik mereka kayak gitu. Nanti baru penyuluhan artinya pencairanlah itu semua datang itu dinas koperasi datang Camat dating, Bupati kalau ada datang ini kepala-kepala dinas yang dipanggil. Dari kita perwakilannya direksi kalau gak kabag, penyuluhannya model saya lah penyuluhannya."(Wawancara M. Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)



Gambar 3.5 Kegiatan *community relations* melalui Program kemitraan pada pengusaha kecil mulai dari usaha toko parfum, bengkel mobil, toko busana, Laundry, dan supermarket.
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Kegiatan program kemitraan oleh perusahaan diputuskan dengan beberapa tahapan. Berdasarkan rekapitulasi proposal yang telah diterima perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan survey ke lokasi usaha dan juga kelengkapan persyaratan administrasi UKM. Seperti dokumentasi yang telah penulis paparkan sebelumnya ketika tim PKBL melakukan survey. Proposal yang diekspose oleh perusahaan telah dilakukan evaluasi tentunya, yang kemudian akan diajukan tim PKBL kepada pembina selaku direksi untuk penyaluran dana. Melalui persetujuan direksi maka akan dilanjutkan dengan penyuluhan dan penyerahan dana program kemitraan. Dalam penyerahan dana akan dihadiri oleh Dinas koperasi, calon Mitra Binaan, Direksi, beserta orang-orang yang memiliki kepentingan.



Gambar 3.6 suasana Penyuluhan dan penyaluran dana kepada mitra binaan
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

2. Bina Lingkungan

Bina lingkungan (BL) juga merupakan wujud rasa kepedulian PTPN V terhadap komunitas. Sekaligus dalam misi membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. BL ini berupa program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dengan memanfaatkan dana laba PTPN V. Berbeda dengan PK dari segi dana dan penempatan komunitas per unit. Untuk dana sendiri, BL bersumber dari 4 % keuntungan perusahaan yang telah di jadikan dana hibah.

Program lainnya dalam bina lingkungan juga telah diimplementasikan oleh pihak perusahaan. Bina lingkungan merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari laba. Bentuk bantuan dapat berupa tanggap bencana alam dan hal lainnya yang telah penulis paparkan dalam gambar sebelumnya. Berikut sektor-sektor yang termasuk dalam program bina lingkungan meliputi, sektor pendidikan, sektor kerohanian, sektor kesehatan, sektor olahraga, bantuan untuk bencana alam, dan infrastruktur data. Kegiatan bina lingkungan khusus Sei Kencana yang telah dijangkau oleh perusahaan meliputi:

a. Sektor Kesehatan

Implementasi BL dalam sektor kesehatan yang terlihat sejauh perusahaan beroperasional meliputi sumbangan posyandu-posyandu terdekat, dan cek kesehatan gratis. Misalnya pengecekan gula, tensi, dan sebagainya. Kemudian terdapat peduli air bersih dengan bantuan yang diturunkan oleh perusahaan. Namun tidak seluruh rangkaian program terdokumentasi, hingga beberapa kegiatan tidak terekspos bagi komunitas.



Gambar 3.7 Kegiatan pemberian fasilitas Air bersih Di Desa Sinamanenek Sei Kencana
(Sumber: Dokumentasi PTPN V)

b. Bantuan Sosial ekonomi Komunitas

PTPN V dalam kegiatan BL sering menggunakan pasar murah dan pembagian sembako gratis sebagai bentuk kepedulian untuk komunitasnya. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan kehidupan komunitas untuk hidup lebih layak.



Gambar 3.8 CR dalam bentuk berbagi sembako gratis di Sei Kencana
(Sumber: Dokumentasi PTPN V)

c. Sektor Kerohanian

Kegiatan dalam penerapan BL di sektor kerohanian membawakan hewan kurban, berupa sapi yang ditujukan kepada komunitas sekitar lingkungan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan unit Sei Kencana sebagai kantor cabang PTPN V yang dihadiri oleh pimpinan kantor Unit tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan desa, beserta beberapa perwakilan komunitas. Untuk

kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari raya Idul Adha.



Gambar 3.9 penyerahan Hewan Qurban
(sumber: Dokumentasi PTPN V)

d. Sektor Perkebunan

Pemberdayaan masyarakat dilakukan PTPN V dengan menempuh cara yang beragam. Salah satunya PTPN V melakukan penyuluhan dengan mendatangkan pembicara-pembicara yang berkecimpung di keahliannya masing-masing. Dalam penyuluhan PTPN V akan menghadirkan narasumber yang berasal dari pemerintah daerah atau orang yang telah dipercaya menguasai dalam bidang perkebunan. Penyuluhan juga akan dihadiri oleh beberapa komunitas dan beberapa Tim Divisi PKBL. Di akhir acara, PTPN V juga menyertakan pemberian SOLO 425 yang merupakan alat penyemprot untuk berkebun. Sistem ini menarik antusias komunitas untuk hadir di program Bl yang dilaksanakan oleh PTPN V.



Gambar 3.10 pemberian alat pertanian di Sei Kencana
(Sumber: Dokumentasi PTPN V)

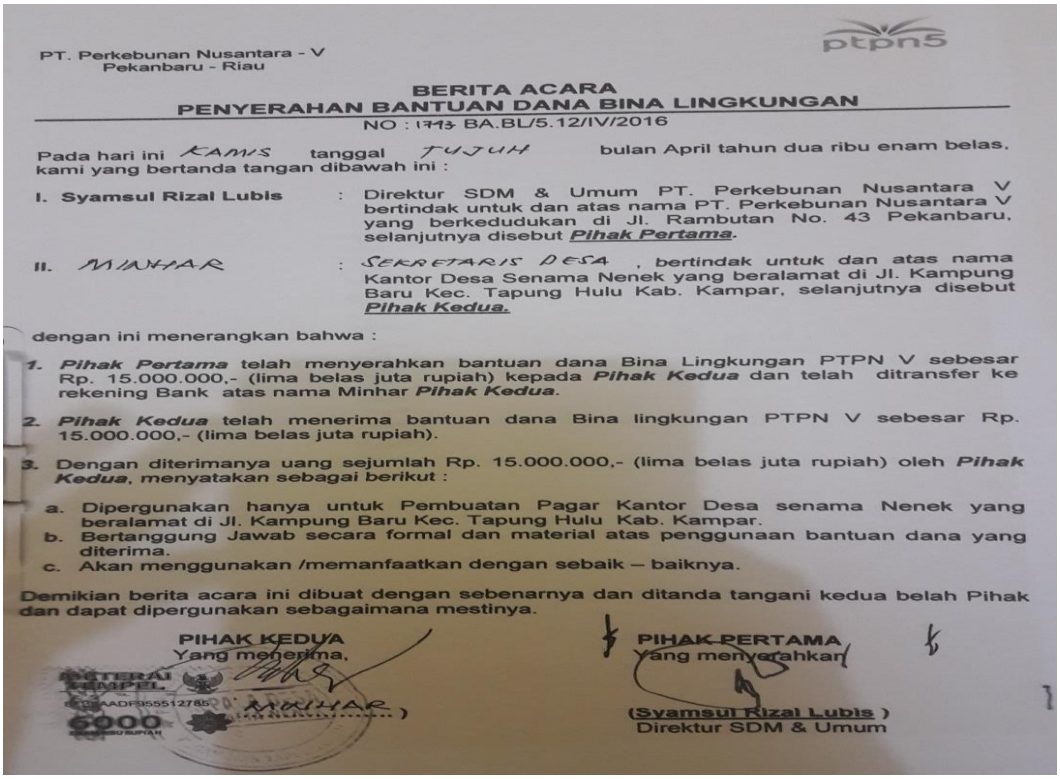
Diluar sektor yang penulis sebutkan, terdapat beberapa kegiatan lain yang juga termasuk ke dalam kategori *community relations.* Dukungan dalam pendidikan, bencana alam, mendukung dalam budidaya tambak ikan, pembuatan jalan yang terdokumentasi oleh PTPN V unit Sei Kencana. Seperti yang dapat dilihat dari beberapa gambar berikut:



Gambar 3.11 beberapa contoh suasana kegiatan Bina lingkungan Sei Kencana di bencana alam, pendidikan, perbaikan jalan, dan tambak ikan
(Sumber: website PT Perkebunan Nusantara V)

Peran lain yang di jalankan oleh PTPN V juga menerlibatan PTPN V melalui partisipasi sosialnya ke Perangkat desa. Wujud ini diinterpretasikan dengan bantuan keuangan guna kepentingan pembangunan gedung kepala desa. PTPN V selalu membuka

segala permohonan sekira permintaannya dapat dijangkau oleh PTPN V. Bagaimana pun aparatur dari desa juga mempunyai peran penting untuk meredam amarah dari komunitas yang ingin mengusik perusahaan. Hal ini diabadikan melalu pembuatan berita acara sebagai dokumen PTPN V sebagai berikut:



PT. Perkebunan Nusantara - V
Pekanbaru - Riau

ptpn5

BERITA ACARA
PENYERAHAN BANTUAN DANA BINA LINGKUNGAN
NO : 1713 BA.BL/5.12/IV/2016

Pada hari ini KAMIS tanggal TUJUH bulan April tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Syamsul Rizal Lubis** : Direktur SDM & Umum PT. Perkebunan Nusantara V bertindak untuk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara V yang berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***.

II. MINHAR : SEKRETARIS DESA , bertindak untuk dan atas nama Kantor Desa Senama Nenek yang beralamat di Jl. Kampung Baru Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua.***

dengan ini menerangkan bahwa :

1. ***Pihak Pertama*** telah menyerahkan bantuan dana Bina Lingkungan PTPN V sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada ***Pihak Kedua*** dan telah ditransfer ke rekening Bank atas nama Minhar ***Pihak Kedua***.
2. ***Pihak Kedua*** telah menerima bantuan dana Bina lingkungan PTPN V sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Dengan diterimanya uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh ***Pihak Kedua***, menyatakan sebagai berikut :
   a. Dipergunakan hanya untuk Pembuatan Pagar Kantor Desa senama Nenek yang beralamat di Jl. Kampung Baru Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
   b. Bertanggung Jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan dana yang diterima.
   c. Akan menggunakan /memanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani kedua belah Pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

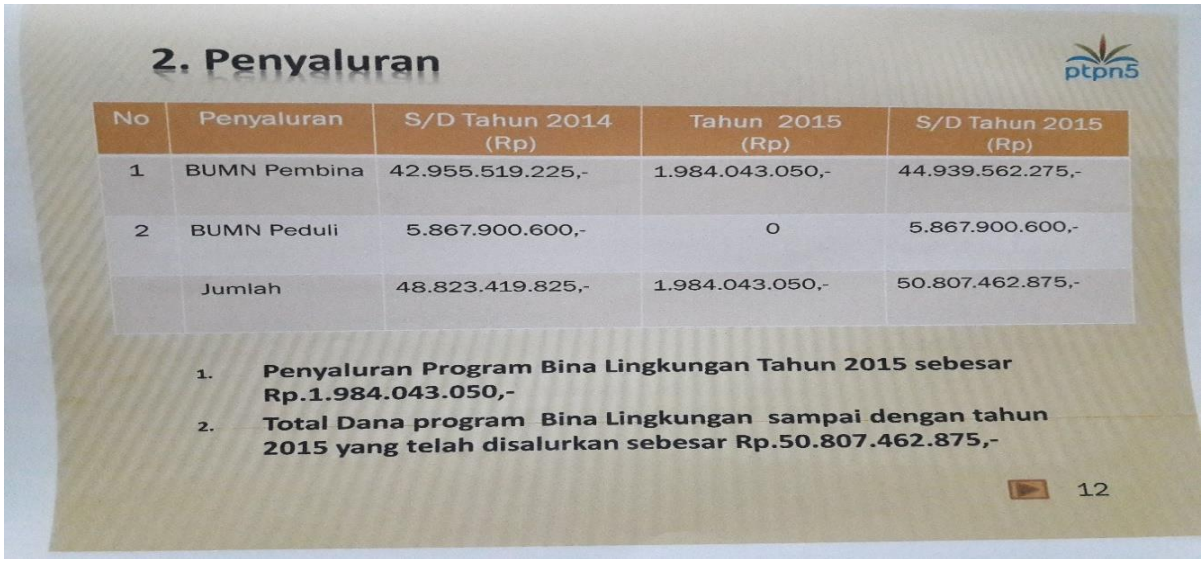
METERAI TEMPEL
6000
(MINHAR)

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

(Syamsul Rizal Lubis)
Direktur SDM & Umum

Gambar 3.12 Berita acara bantuan dana pembangunan kantor kepala desa Sinamanenek
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

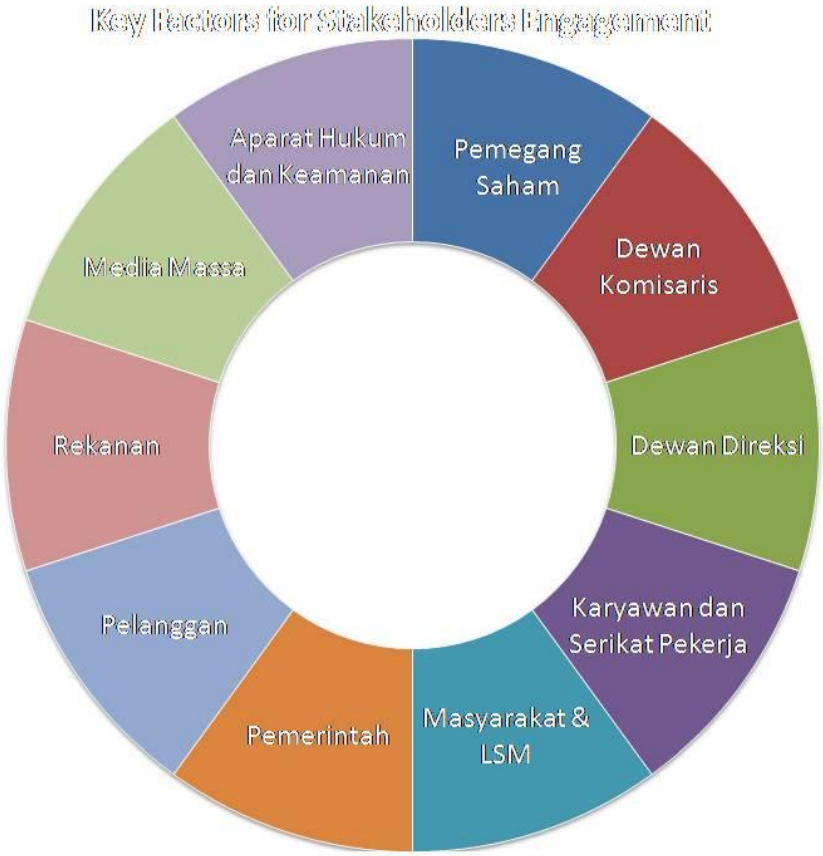
Risky Atriansyah menambahkan untuk penyaluran dana itu sifatnya dia menunggu dengan proposal yang masuk dari desa Sinamanenek. Saat anggaran ada, tim PKBL melakukan survey untuk validasi layak atau tidaknya komunitas (personal) untuk dibantu. Untuk rencana jangka panjang secara detail atau eksplisit jelas tidak ada, tapi jelas di jangka panjang dibutuhkan akan mengolah lebih banyak lagi. Jadi kita harus membangun sendiri, kemudian kita harus memiliki mitra melalui proses tentunya. Kalau dalam jangka panjang ini RJP itu ada tapi memang sifatnya tidak detail. RJP lebih umum anggaran-anggarannya saja. Biasanya itu untuk rencana kerja dalam setahun ini, selanjutnya berapa persen nantinya jika diperoleh selama lima tahun ke depan. Laba yang diperoleh diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Untuk anggaran rutin yang dimaksud juga ada di RKAP semua.



Gambar 3.13 penyaluran program Bina Lingkuhan Per tahunnya
(sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Program pengembangan komunitas dimaknai sebagai kelompok manusia yang biasa tinggal dalam satu wilayah, atau juga berbagai lokasi berbeda yang memiliki jarak jauh dari perusahaan. PT Perkebunan Nusantara V menggunakan dua tipe komunitas ini, tentunya untuk bina lingkungan tidak diperlakukan tetapi ini berlaku untuk program kemitraan. Untuk unit Sei Kencana tipe komunitas yang menunjuk pada lokalitas, digunakan dalam bentuk kegiatan yang sederhana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun pada dasarnya perusahaan telah mengalami perkembangan dimana perusahaan memandang komunitas adalah semua *stakeholdes* yang dilayani perusahaan.

Berdasarkan pemaparan panjang sebelumnya, perusahaan di sini diumpamakan bukan sekedar peminjam modal. Tapi lebih kepada pemberi dana kerja yang sifatnya bergulir. Artinya, ketika dana telah dikembalikan dengan penambahan biaya administrasi 6% ke perusahaan, dana tersebut akan kembali diserahkan lagi ke pengusaha kecil lainnya. Program kemitraan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 6% . Contohnya, PK diawal akan diberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 dalam jangka waktu satu atau dua tahun batas pengembalian. Berbeda dengan bina lingkungan, bina lingkungan tidak menggunakan hal-hal yang bersifat penambahan dana. Misalnya pada saat memperbaiki masjid, membangun sekolah yang sifatnya bina lingkungan, ketika telah diserahkan menjadi dana hibah tidak kembali lagi pada perusahaan.



Gambar 3.14 *stakeholders* dari PT Perkebunan Nusantara V

(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

PTPN V dengan BL secara ringkas melakukan bantuan dari sarana dan prasarana seperti membangun masjid, bantuan ke kepala desa, pembuatan jalan, beasiswa, memberikan pengetahuan dalam mengasah *skill* misalnya dari pemberian ternak kambing, perusahaan memberikan 30% wajib minimal pekerja dari penduduk setempat, bantuan alat pertanian, dan jenis lainnya. Dengan harapan dapat mensejahterakan masyarakat dan terbangunnya ekonomi masyarakat. Namun untuk pendidikan ditetapkan dengan per kabupaten. Sehingga untuk unit Sei Kencana yang masuk ke dalam wilayah daerah Kampar, belum ada anak-anak yang menerima beasiswa. Karena untuk beasiswa sendiri penjaringannya sifatnya luas, tentunya bagi anak-anak yang berprestasi. Untuk Desa Sinamanenek yang ada di unit Sei Kencana faktanya tidak ditemukan anak-anak yang masuk dalam kategori kelayakan untuk menerima beasiswa.

Penemuan data lainnya penulis memperoleh bahwasanya ada ketidakseimbangan antara komunitas yang berasal dari warga lokal desa Sinamanenek yang berada dalam lingkungan unit Sei kencana. Ketidakseimbangan ini bersumber dari persoalan lahan yang

untuk segelintir komunitas menuntut hingga saat ini. Akibatnya menimbulkan perselisihan yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Implementasi *community relations* yang dilaksanakan pada desa Sinamanenek di unit Sei Kencana ini rupanya tidak berdampak besar untuk menjalin hubungan baik dengan komunitasnya. Menurut penjelasan narasumber M. Azman Lubis hal-hal yang termasuk dalam kategori menyokong ekonomi desanya seperti sarana dan prasarana ataupun yang telah PTPN V lakukan untuk hitungan personal. Seperti pemberian kambing, kemudian menghadirkan ahli-ahli yang berkecimpung di dunia peternakan, dan seluruhnya difasilitasi oleh perusahaan itu 90 % gagal. Ini dipacu oleh permasalahan lahan yang masih mereka tuntut. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan berikut:

(DATA 18)

> "*Mereka fokus pada yang besar sehingga kegiatan community relations kita yang bertahap membangun desa dan memberdayakan masyarakat tak terlihat oleh mereka. Segala cara sudah dibuat kita adakan kunjungan ke kampung mereka, dipanggil tokoh masyarakatnya. Kami perlu kambing katanya kami kasih kambing, itukan langkah-langkah yang kalau mereka gunakan dengan benar mungkin ekonomi mereka pada saat ini bagus. Kambing disitu cemana dibilang ya daerah masih luas masih bebas memelihara tapi itu tadi pagi diterima sore dijual." (Wawancara M. Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)*

M. Azman lubis juga menambahkan bahwasanya kasus kambing, diakui oleh komunitas kalau pada saat ini hanya tersisa sekitar 10 % . Padahal menurutnya kinerja perusahaan sudah dalam tahap maksimal untuk merangkul komunitas warga lokal desa Sinamanenek untuk membangun ekonominya. Salah satunya dengan cara, setiap ada acara perusahaan sifatnya sudah wajib panggil komunitas. Semacam program desa miskin, perusahaan perdayakan masyarakat, kepala desa, aparat desa, dinas pertanian, dan dinas peternakan. Penyuluhan ini dilaksanakan bukan Cuma-Cuma. Di dalam kegiatan penyuluhan ini perusahaan memberikan honor kepada instansi terkait tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis dapat dari narasumber yaitu Samsir selaku Komunitas mengatakan bahwa kegagalan program dari ternak kambing yang memang dirasakan oleh komunitas. Tidak secara gamblang namun Samsir tidak mengelak akan kambing yang tidak tampak hasilnya dengan penjelasan sebagai berikut:

(DATA 19)

"Seperti kambing yang di berikan ke masyarakat. Kemaren ada Asum yang menanyakan berapa persen kambing yang ada dan berapa persen kambing yang mati untuk didata ke kantor pusat, tapi kita sendiri tidak bisa meralisasikannya. Jadi karena atuk tidak bisa, perusahaan membuat proposal untuk masyarakat yang mendapatkan kambing. Saya rasa menurut Pak Asum, yang berhasil membudidayakan kambing akan mendapatkan tambahan kambing lagi, namun yang tidak ada sama sekali maka tidak akan dipercaya untuk mendapatkan kambing untuk seterusnya. Kalau menurut atuk sendiri kira-kira hanya ada 10% kambing yang tersisa."(Wawancara Samsir Komunitas Sinamanenek, 1 juni 2017)

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber M. Azman Lubis menjelaskan juga bahwa TIM ketika melakukan survey dan pemerintah daerah ini harapan kedua belah pihak dalam menemukan kata sepakat. Pertemuan ini melibatkan komunitas beserta Pemda dan PTPN V. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

(DATA 20)

"*Ya mengadakan survey-surveylah. Bertemu mencari sumber masalahnya apa? Kan dia gini prosesnya ada dibentuk TIM, TIM kerjalah namanya dah kerja hasil analisa mereka dibawa ke direksi dah dibahas di direksi, setelah dianalisa inilah ke pemerintah dibawa pemerintah daerah ha itulah yang dibahas disitu. Jadi pemerintah daerah jadi penyambung tengah penyambung lidahlah dipanggilnya komunitas dipanggilnya PTP rapatlah dipemerintahan sampai hasil keputusan akhir tadi itu mengganti lahan tuntutan komunitas ini." (Wawancara M Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)*

Kemudian M. Azman lubis juga menambahkan bahwa:

(DATA 21)

"..... Perusahaan melakukan kontrol yang terhadap komunitas yang terlibat dalam community relations seperti memantau, mendengar isu kan lalu perusahaan pelajari, misalnya dalam satu desa itu tidak seluruhnya pro dengan komunitasnya, jadi nanti apa yang rapat di desa itu sampailah ke perusahaan. Ini rencana mereka begini-begini, nanti mengantisipasinya perusahaan akan pelajari. Lalu perusahaan panggil pimpinannya cerita-cerita untuk melakukan pendekatan. Kalau PKBL paling perusahaan datang penyuluhan kasih pengertian berinteraksi langsung, dikasih jarak waktu buat program yang telah dijalankan tadi. Contoh "bagaimana kambing kau udah berapa anaknya" seperti itu. Intinya kalau perusahaan bilang perduli udah cukup kali perduli. Cuman tidak bisa perusahaan buat macam kota besar, terkendala pada dananya. Benang merahnya begini setiap individu berharap keuntungan personal bukan keuntungan desa tidak. Bukan ada pejuang desa disitu, tidak sama sekali berfikiran mendorong ekonomi desa. Keuntungan pribadilah tujuan awal komunitas itu". (Wawancara M Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)



Gambar 3.15 Realisasi program bina lingkungan pembangunan kandang ternak kambing beserta kambingnya untuk 60 KK dengan nilai RP. 360 jt
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)



Gambar 3.16 kabar berita melalui website perusahaan kegiatan *community relations* melalui program bina lingkungan
(Sumber: Website PTPN V)

Aspek prospek usaha dilakukan melalui penyuluhan yang melibatkan beberapa ahli yang berasal dari pemerintahan atau pun dari TIM PKBL sendiri. Komunitas yang telah terpilih oleh Tim PKBL yang telah melalui tahapan pelaksaan survei menggunakan asas kepercayaan *(trust)*, asas kehati-hatian (*prudential),* aspek prospek usaha, serta kebutuhan dana aktual dari calon penerima dana, akan diberikan pembinaan secara periodik. Pelaku penyuluhan dari tim PKBL divisi umum di lakukan berdasarkan *structural*. Termasuk narasumber penulis M Azman Lubis yang kerap kali menjadi pembicara bagi komunitas yang pernyataannya sebagai berikut:

(DATA 22)

"Caranya bagaimana kita ajari. Contoh walaupun kita cuman pedagang sayur buat pembukuannya ha kan kita ajarin dia, nanti jangan campurkan hasil ini dengan hasil yang lain. Pelajari peningkatannya, sehingga ibu-ibu tau apa yang mau ibu buat kedepannya menjadi meningkat lagi udah kita sampaikan semuanya. Evaluasi kalau malas perbulan pertiga bulan buat evaluasi ibu hasil kerja ibuk, udah kita buatnya itu. Kadang suntuk kita ngomong itu capek tak didengar kemauan nya gak ada. Dari segi kepembukuan kita ajari, dari segi memasarkan kita ajari." (Wawancara M Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)

Selain tahapan-tahapan menjalankan program ada beberapa syarat berupa wewenang untuk pengeluaran dana PKBL yang dijalankan oleh Divisi Umum Tim PKBL PT Perkebunan Nusantara V. Mengutip dari hasil wawancara yang dilakukan dengan M. Azman Lubis sebagai staff PKBL urusan administrasi keuangan yaitu: "Kegiatan PKBL dilakukan dari tahap perencanaan dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembinaan (RKAP) yang memerlukan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS)." RKAP yang telah disetujui akan dilanjutkan dengan penyaluran menunggu alokasi per wilayah. Wewenang dalam hal pemutusan akhir untuk menyalurkan dana PKBL kepada calon mitra binaan diotorisasi oleh kepala bagian PKBL selaku penanggung jawab pelaksanaan PKBL. Pada saat anggaran PKBL belum tersalurkan secara otomatis saldo dana akan dijadikan sumber dana untuk tahun berikutnya. Kemudian penyaluran dana PKBL kepada calon mitra binaan wajib memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh PT Perkebunan Nusantara V pada umumnya berbentuk surat atau sejenis sertifikat yang telah tervalidasi. Pencairan dana akan di iringi dengan penyuluhan dari pejabat pemerintah, kecamatan, dan orang yang memilki kewenangan di perusahaan seperti direksi.

Dilain hal penulis menemukan kebenaran dari narasumber yang menjelaskan terkait solusi dalam menghadapi persoalan dana. Dalam konteks ini PTPN V melakukan bentuk kerjasama dengan sesama perusahaan BUMN ketika perusahaan mengalami kemacetan dana. Hal ini dijelaskan oleh narasumber yang mengatakan bahwa:

(DATA 23)

"*Kalau caranya kita gunakan skala prioritas mana skala prioritas ini yang maju ini yang maju ha kalau disini ada tambahan lagi BUMN inikan ada dana sinerginya. Gini maksudnya dana di pertamina itu triliunan mereka gak sanggup melakukan ini ha nanti bisa saja dari intruksi menteri dipindahkan dana mereka ke kita. Kita yang menjalankan tapi dianggap program pertamina. Terlaksana tapi nama pertamina hanya bekerja sama dengan kita macam mensponsori. Macam ini yg terakhir Pelindo sama PTP dana sama-sama 50:50 kayak gitulah terus cara mengatasinya. Jadi kementrian nanti yang*

mengatur. Cuman kalau banyak untung kita ya banyak dana kita makanya kerja sama dengan komunitas itu penting saling memahamilah"(Wawancara M Azman Lubis, 12 April 2017)

3. Tanggung Jawab Sosial Pola Kredit Kepada Koperasi Primer (KKPA)

Komitmen perusahaan adalah menjaga eksistensi dan keberlanjutan operasionalnya dengan memberikan manfaat optimal kepada shareholders serta stakeholdersnya. Komunitas merupakan salah satu dalam kategori stakeholders perusahaan. Dimana Pola KKPA digunakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap komunitas tempatan. Kemitraan yang dibangun melalui KKPA telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit.

Standar kehidupan yang lebih baik bagi petani di percayai dengan menggunakan pola KKPA. Pola KKPA yaitu dimana perusahaan berperan sebagai bapak angkat dari komunitas. Bapak angkat disini diartikan selaku penyedia lahan dan komunitas sebagai pengelola. Komunitas akan bekerja sama dengan perusahaan, dalam hal produksi dan distribusi buah sawit. produksi meliputi kegiatan pembangunan kebun, pemeliharaan, dan pemanenan. Sedangkan kegiatan distribusi meliputi pengiriman buah sawit ke pabrik minyak milik perusahaan.

Karakteristik Pola KKPA adalah pembiayaan pola KKPA yang berasal dari pinjaman lembaga perbankan, besaran pembiayaan dibebankan kepada peserta KKPA sebagai hutang, perusahaan PT Perkebunan Nusantara V akan berperan sebagai penjamin kredit. Untuk pengelola komunitas lokal akan menjadi prioritas perusahaan. Ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mengatakan bahwa:

(DATA 24)

"Khusus untuk komunitas di Pola KKPA ini hemm kita akan mempekerjakan komunitas etnis atau warga lokal dimana perusahaan beroperasi. Tidak boleh yang namanya petani dari luar, itu beda lagi nanti sistemnya kalau pekerja dari luar daerah. Inikan diprogramkan untuk mengangkat ekonomi warga asli sana, jadi dengan program ini ya diharapkan untuk terangkatlah ekonominya begitu." (Wawancara M Azman Lubis, 12 April 2017).

Khusus di Sei Kencana ini dilaksanakan tapi tidak pada desa Sinamanenek, ini berpusat di desa lainnya yang masih dalam satu wilayah dengan Sei Kencana. Untuk persantese hasil dikatakan untuk 60 % pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Perusahaan disini diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai pembina dan pendamping

perkebunan. Penulis mendapatkan fakta untuk pola KKPA disini sebagian besar telah mencapai keberhasilan namun tidak seluruhnya. Ini dikarenakan dari pihak perusahaan maupun dari komunitas sendiri. Sebagai contoh ketika komunitas tidak mentaati peraturan perkunan yang mana ketika hasil panen buah akan disetorkan kepada perusahaan. Sayangnya banyak komunitas yang membandingkan sawit dari segi harga ketika perusahaan lengah dalam menerapkan harga maka komunitas akan melirik toke sawit swasta.

Inti atau tujuan utama dilaksanakannya pola KKPA ini adalah mengangkat sumber daya manusia dalam memperkejakan komunitas lokal, hingga terbantunya kehidupan komunitas. Peluang komunitas sangat besar apabila kedua belah pihak mentaati peraturan tertulis maupun tidak tertulis dalam hal kerja sama produksi dan distribusi kelapa sawit. ini diperkuat dengan pernyataan komunitas yang tergabung dalam program KKPA, beliau mengatakan bahwa:

(DATA 25)

> *"Gini Anggota KKPA kami khususnya memperoleh banyak sekali keuntungan dari program tersebut. Kami mendapatkan pendapatan yang lebih lebih banyak saat ini dan kami bahkan bisa menabung. Infrastruktur juga diperbaharui secara pesat .Sebelumnya, kami hanya mampu mengunjungi pasar seminggu sekali tuh dek, karena terlalu jauh kan dari tempat kami tinggal dengan berjalan kaki atau sepeda . Sekarang tengoklah , kami bisa pergi ke pasar setiap hari memakai sepeda motor dan mobil untuk mendapatkan bahan yang lebih segar karena jalan telah dibangun dan kami memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepeda motor atau mobil ."*

Perusahaan telah bermitra dengan sejumlah 15 Koperasi Unit Desa dan telah terealisir kebun Kelapa Sawit pola KKPA seluas 7.200 Ha. Hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani.

B. *Government Relations* pada PT. Perkebunan Nusantara V Unit Sei Kencana kepada Pemerintah Daerah Kampar.

Sebagai perusahaan yang mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet PT Perkebunan Nusantara V tergolong perusahaan nasional besar di Indonesia. Berada di bawah naungan BUMN, PT Perkebunan Nusantara V menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan kebijakan serta aturan-aturan yang telah ditentukan BUMN.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan operasional PT Perkebunan Nusantara V tentunya dalam menjaga citra perusahaan melalui perilaku perusahaan yang baik di mata pemangku kepentingannya. Dalam menjaga citra perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai usaha tentunya. Pada pemaparan ini penulis akan mencoba menjelaskan upaya-upaya yang diimplementasikan PT Perkebunan Nusantara V dalam menjaga citranya, yaitu menjalin hubungan baik dengan *government* relations seperti diungkapkan narasumber sebagai berikut:

(DATA 26)

> *"Yang pasti tujuannya adalah bagaimana caranya agar proses bisnis perusahaan tadi lancar itu dulu.... Rencana yang di harapkan shareholder aspirasi gak bisa diwujudkan." (Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Di dalam perusahaan, fungsi membina hubungan dan upaya tersebut akan dijalankan oleh Divisi HLKHI yang di dalamnya terdapat praktisi *Public Relations* dan dibantu dengan divisi Umum pada perusahaan. Divisi HKLHI dan divisi Umum merupakan fungsi khusus yang dibentuk dalam penanganan komunikasi eksternal. Bedanya dalam porsi masing-masing divisi, yang mana pada saat penanganan urusan komunikasi akan dilimpahkan sepenuhnya oleh tim *public* relations, namun pada saat terjadi suatu permasalahan yang harus bersinggungan dengan ranah hukum maka akan diambil oleh tim Divisi Umum.

Fungsi *Public Relations* memainkan perannya dalam penyambung lidah demi tercapainya hubungan baik dengan Pemerintah tingkat Daerah, serta lancarnya aktivitas perusahaan tanpa hambatan yang ditimbulkan dari arah komunitas maupun perusahaan yang berada pada kawasan kampar, yaitu unit Sei Kencana. Peran *Public Relations* di PT Perkebunan Nusantara V dilaksanakan oleh divisi Humas Legal Kepatuhan dan Hubungan Investor (HLKHI). *Public Relations officer* memiliki keahlian dengan notabenenya Hukum, Pendidikan, serta orang-orang yang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan komunitas dan jurnalistik.

Secara struktural perusahaan yang terpusat di kantor pusat Rambutan Pekanbaru, merupakan bagian dimana jajaran direksi sebagai *decision maker* terhadap kebijakan yang akan diputuskan perusahaan. *Public Relations* berada di bawah Direksi, artinya *Public Relations* di PT Perkebunan Nusantara V dalam bagian sekretaris perusahaan. Terdapat dua jenis penyebutan dalam pembagian tugas yaitu sekertarian kontemporer dan humas legal. Jadi mengutip dari hasil wawancara oleh Risky Atrianyah selaku Staff Sub Bagian HLKHI orang yang menerapkan teori dan mengatasi secara langsung ke lapangan sebagai berikut:

(DATA 27)

> *"Tugasnya sama kayak kontemporernya di pemerintahanlah. mengatur jadwal direksi, pertemuan-pertemuan, undangan-undangan- acara-acara. Kalau humas legal ini fungsinya khusus biasanya untuk kehumasan yang ada di kantor pusat. Mulai dari pelayanan media, LSM atau mereka yang berkunjung ke kantor pusat ini. Walaupun mungkin ada permasalahan misalnya kepolisian memanggil seseorang atau memanggil pejabat di kantor pusat mungkin bisa saja humas yang menerima terlebih dahulu tapi nanti akan diteruskan kepada bagian umum."(Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Public relations dengan kompleksitas yang ada di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara V, memiliki perpecahan tugas sesuai dengan wewenang dan porsinya masing-masing. *Public Relations* untuk kantor pusat lebih kepada menjalankan strategi dalam menjaga hubungan atau mengkomunikasikan stakeholders dalam lingkup eksternal maupun internal, kepada bagian-bagian terkait kepada unit yang terkait. Dengan catatan tindakan dan keputusan akhir tetap berada pada wewenang jajaran Direksi melalui komunikasi yang dilakukan *Public Relations*.

Berbeda dengan *jobdesk Public Relations* Unit dengan *public relations* di kantor pusat. Dari peran fungsi *public relations* unit disebut dengan Asisten Umum Administrasi SDM. Asum Administrasi SDM melaksanakan Personalia, penggajian, santunan sosial, PHK, Peringatan, hubungan dengan pemerintah setempat. Perbedaan yang mencolok dari fungsi peran kantor pusat dengan unit. Faktanya di lapangan kantor pusat urusan *Government relations* terdapat pembedaan wewenang untuk divisi HLKHI dengan Divisi Umum perusahaan. Seperti penjelasan narasumber Risky Atriansya tentang perbedaan *jobdesk* sebagai berikut:

(DATA 28)

> *"Kalau government itu di bagian umum juga karena surat menyurat misalnya terkait perizinan terkait ketenagakerjaan atau terkait hal-hal yang hukum*

itu semuanya ada di bagian umum. Tetapi yang sifatnya kayak tadi ada pemerintah buat acara atau buat apa itu larinya ke humas. Misalnya ada undangan-undangan ini mewakili perusahaan itu biasanya humas kalau direksi tidak bisa. Gubernur misalnya mengundang makan malam bersama atau apa itu biasanya kadang-kadang dua-dua tapi memang itu lebih kepada sektor nanti humasnya nanti yang lebih berperan. Jadi nanti nampak bedanyakan yang satu lebih kepada tugas komunikasi yang satu lebih pada sifatnya yang prinsipil. Kerjaannya perusahaan izin-izin terkait tenaga kerja itu semuanya dibagian umum."(Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)

Risky Atriansyah menambahkan bahwasanya kuasa untuk penanganan urusan *government relations* tidak akan bisa dilakukan seperti yang dilakukan *Public Relations* di unit. Kalau Unit memiliki lingkup kecil yang lebih jelas, karena unit memiliki data yang lebih konkret dengan penanganan satu wilayah saja. Berbeda dengan *Public Relations* kantor pusat, menangani satu provinsi yang tidak bisa fokus pada satu unit saja. Hubungan dengan pihak pemerintah di PT Perkebunan Nusantara V salah satu bentuk dari kegiatan eksternal dari *Public Relations* dan Divisi umum perusahaan. Khusus hubungan yang dijalin dengan PEMDA Kampar yang berkaitan dengan Unit Sei Kencana dalam tahap perbaikan. Dalam tahap melaksanakan pendekatan dengan pihak pemerintahan, divisi yang menangani *government relations* PT Perkebunan Nusantara V memulai dari menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintahan dari tingkat paling rendah dalam hal kecamatan, pejabat desa, aparat, beserta Pemda.

Adapun bentuk-bentuk dalam menjalin hubungan baik dengan PEMDA dapat dilakukan dengan beberapa upaya:

1. FORMAL

Bentuk-bentuk *government relations* yang dijalankan PT Perkebunan Nusantara V kepada Pemerintah Daerah Kampar ditemukan dari hasil wawancara pihak perusahaan dan pejabat pemerintahan saling berhubungan. Diantaranya melalui hubungan formal, formal yaitu sebuah kata sifat adjektif dari kata dasar form yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti "bentuk" artinya adalah "resmi".

Dalam hal ini Bentuk *lobby* dan *negosiasi* diberlakukan PT Perkebunan Nusantara V ini dipraktekkan langsung ke puncak pejabat pemerintah. Tidak dengan dinas perkebunan ataupun dinas pemerintahan yang dijadikan penulis sebagai narasumber guna menjadi data pelengkap. Berdasarkan penjelasan dari narasumber hubungan formal lobby diterapkan

PTPN V dengan PEMDA lebih kepada pejabat puncak yang masih memiliki unsur politisinya. Adapun hal ini di jelaskan narasumber Sofyan Hadi sebagai berikut:

(**DATA 29)**

"Kalau di situ saya tengok ada unsur politisinya juga tuh, bisa jadi ke unsur pemerintahannya tapi tanda kutip bukan dinas perkebunan dalam hal ini mungkin kepala daerahnya karena dia memang mungkin ada unsur kedekatannya dengan kepala daerah. Karena dia memang ada mungkin unsur kedekatan dengan kepala daerah...."(Wawancara Sofyan Hadi, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perkebunan, 25 Juli 2017)

Sedangkan dari hasil wawancara dengan staff HLKHI Risky Atriansyah membenarkan adanya kegiatan lobby formal maupun non formal yang dilakukan perusahaan dengan Pemerintah Daerah, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut:

(DATA 30)

"Ya menjalin hubungan baik formal maupun informal...." (Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)

Mengenai membina hubungan baik dengan pemerintah daerah yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V dalam bentuk pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA). Maka penulis akan lebih lanjut menjabarkan mengenai apa saja bentuk-bentuk dalam membina hubungan baik dengan PEMDA sesuai dengan data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi sebagai berikut:

a. Memberikan Sponsorship

Diantara kegiatan-kegiatan pelaksanaan *government relations*, pemerintah daerah juga kerap kali memerlukan dana yang cukup besar. Perusahaan membuka mata dalam penyediaan dana dalam hal mensponsori kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti salah satu contoh informasi yang didapatkan dalam acara Perayaan ulang tahun pemerintah daerah. Ini dikuatkan dengan wawancara oleh salah satu narasumber pejabat pemerintah mengatakan:

(DATA 31)

"Biasanya ada acara ulang tahun Kampar ulang tahun Kabupaten ya mereka nyumbang. Saya nyumbang Pak ini untuk hadiah ini buat acara di desa tanding-tanding bola olahragalah ya ya dibayarin perusahaan. Intinya tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang. Kalau uang nanti habis. Jadi barang apa

yang dibutuhkan bola atau apa oke dikasih bola. Kalau uang dikasih habis sama panitianya." (Wawancara Andri Miko, 25 Juli 2017)

Bentuk kepedulian dari hal sekecil apapun yang dilakukan perusahaan kepada PEMDA, tentunya memiliki tujuan membantu dan memperoleh opini yang diarahkan pemerintah ke perusahaan. Segala harapan yang nantinya berdampak pada kemudahan birokrasi atau pun dalam bentuk izin perusahaan yang akan bersinggungan dengan PEMDA. hal ini dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

(DATA 32)

"Yang pasti tujuannya adalah bagaimana caranya agar proses bisnis perusahaan tadi lancar itu dulu. Kalaulah tidak ada hubungan baik izin-izin gak keluar ya tentu kita gak bisa berusaha proses bisnis terganggu. Terganggunya proses bisnis tentunya kita gak bisa melakukan produksi tidak bisa melakukan penjualan tentu ya profit yang yang diharapkan gak dapat."(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)

b. Kunjungan secara tetap dan Paket Informasi

Bentuk-bentuk *government relations* seperti pertemuan formal dengan melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah untuk selevel PT Perkebunan Nusantara V dikatakan sering dilakukan. Luasnya pemerintah daerah mulai bupati ataupun dibawahnya seperti dinas-dinas perkebunan dan lainnya dengan kepentingan kunjungan yang berbeda. Kegiatan dalamkategori formal dimaksudkan dengan suatu kunjungan melalui undangan yang diberikan pemerintah daerah ke perusahaan ataupun sebaliknya. Bentuk dari *government relations* ini juga dikenal dengan lobby langsung. *Grass Roots Lobying* juga digunakan PT Perkebunan Nusantara V seperti menerlibatkan komunitas dalam menyalurkan argumen komunitas kepada pihak wewenang dengan keterkaitan perusahaan dengan komunitas.

Karena kunjungan yang sering kali dilakukan bersinggungan dengan perizinan dan pemberian informasi, untuk waktu dalam setiap tahun itu wajib hukumnya. Dimana perusahaan akan melaporkan informasi terkait tenaga kerja ke dinas ketenagakerjaan dengan memberikan laporan. Ini dalam tiga bulan sekali dinasnya juga akan datang ke perusahaan untuk memeriksa batas baku mutu air untuk memastikan tidak adanya pencemaran. Ini diperkuat dengan penjelasan dari narasumber yang mengatakan:

(DATA 33)

"Yaaaa....datangnya biasanya yang pasti untuk kepentingan-kepentingan perusahaan atau undangan. Dua itu aja atau kepentingan perusahaan tadikan luas

ada yang pengurusan izin ada yang untuk silaturahim... . Contoh setiap tahun itu ada kita memberikan informasi terkait tenaga kerja ke Dinas Ketenagakerjaan itu wajib hukumnya. Setiap tahun kita datang tuh, untuk mengirimkan surat memberikan laporan. Ini loh surat ketenaga kerja di kebun kami selama setahun ini loh nihil lo. Tapi ini bukan ke Bupati, ke dinas ketenagakerja dengan BRH sekali tiga bulan mereka akan datang ke tempat kita memeriksa batas baku mutu air itu kan ada gak pencemaran seperti itu jadi sifatnya gak ada yang sama. (Wawancara Risky Atriansyah, Staff HKLHI, 10 Mei 2017)

Kunjungan ke instansi pemerintah suatu hal yang amat penting. Karena dari kegiatan ini perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai perusahan dan kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah daerah. Melalui kunjungan formal ini juga salah satu peluang perusahaan memperoleh segala informasi yang menguntungkan bagi perusahaan.

c. Direct Mail

Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan ke pemerintah daerah, sifatnya dalam kegiatan memberikan apresiasi. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan kegiatan seperti undangan, donatur, dan kunjungan yang dilakukan disertai dokumnetasi perusahaan. Ini dikuatkan dengan penjelasan narasumber yang mengatakan:

(DATA 34)

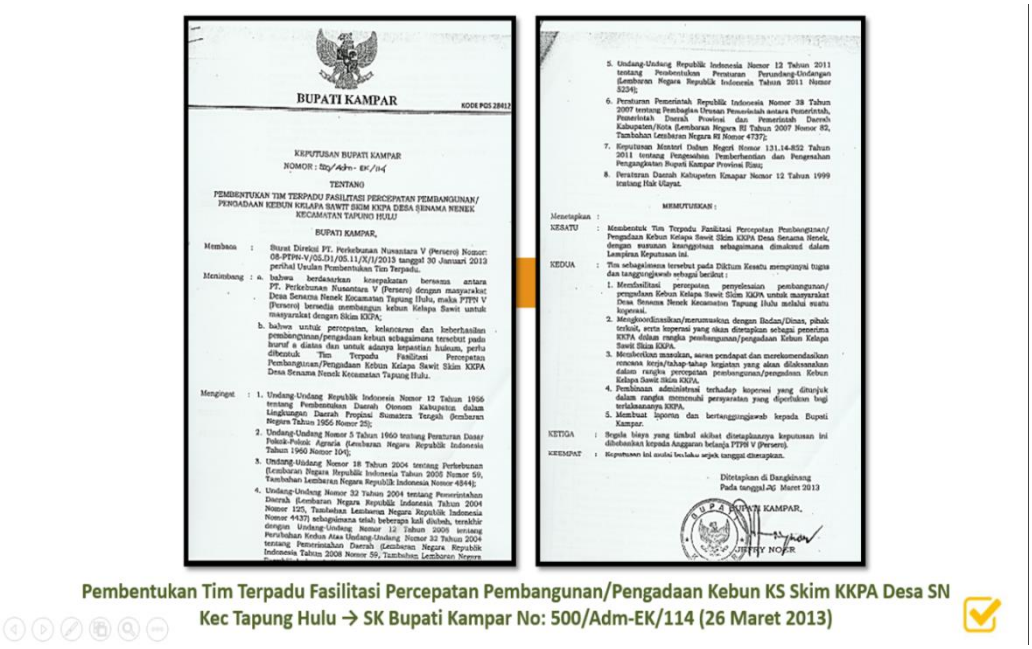
"Atas dasar undangan bisa, atas dasar kepentingan perusahaan bisa. Tapi kalau gak ada apa-apa biasanya jarang datang gitu aja. Pasti semua ada kepentingan namanya perusahaankan silaturahmi pun ada kepentingankan menjaga hubungan baik. (Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)

Dilain hal pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama dengan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri. Hal ini dijelaskan oleh narasumber yang mengatakan sebagai berikut:

(DATA 35)

"Ya, balik ke kepentingan pemerintah tadi kalau dia memang butuh informasi dia datang. Kalau butuh sesuatu dia datang samanya kalau itu. Jarang kayak orang bersaudara datang ya cuman pengen datang liat saudaranya. Haha (Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)

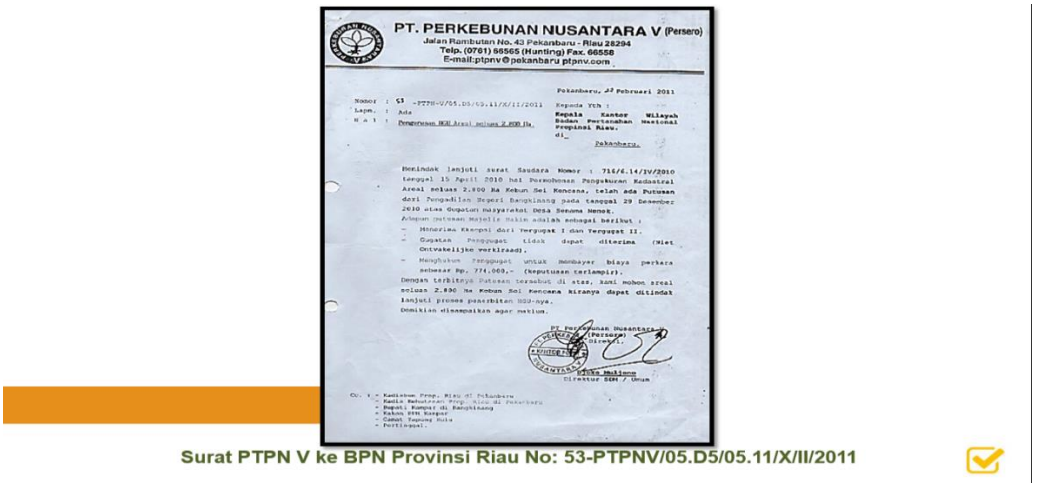
d. Produk surat menyurat



Gambar 3.17 Kegiatan *Government Relations* dalam surat menyurat PEMDA ke perusahaan

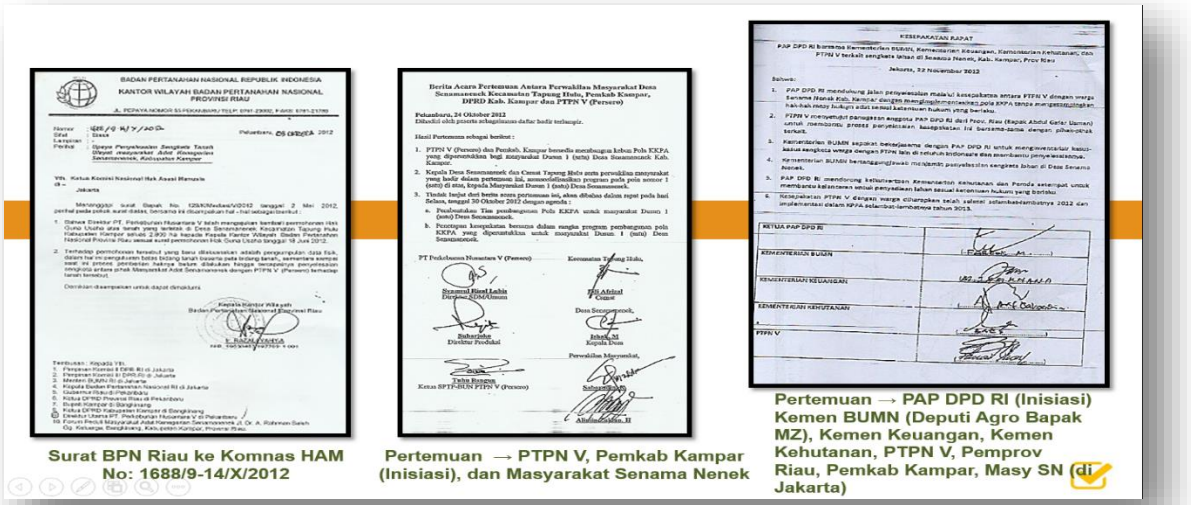
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Jenis kegiatan ini merupakan kegiatan yang teramat sering digunakan oleh pihak perusahaan dalammenjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah. Tentunya suarat yang berbau kepentingan perusahaan ataupun kepentingan pemerintah daerah.



Gambar 3.18 Kegiatan *Government Relations* surat menyurat PT Perkebunan Nusantara V ke BPN

(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)



Gambar 3.19 Kegiatan *Government Relations* pada PT Perkebunan Nusantara V saat terbentur dengan komunitas lokal
(Sumber: Dokumentasi PT Perkebunan Nusantara V)

Dari gambar 3.19 tampak adanya kegiatan yang melibatkan komunitas, perusahan dan pemerintah daerah. Dalam teori komunikasi dikatakan Bentuk *government relations* yakni *Political Action Committees.* Dimana terjadinya pertemuan antara komunitas perusahaan dan pejabat pemerintah daerah. Berdasarakan data melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak pejabat pemerintah oleh Kasubag Tata Pemeritahan Andri Miko menjelaskan bahwa:

(DATA 36)

"Kita, intinya memfasilitasi. Antara dua pihak tadi kita berada di tengah-tengah gak boleh mihak sama aja semuanya intinya kalau kita ini ya harusnya ke masyarakatnya. Jadi kita fasilitasi kita cari data fakta yang ada kita sampaikan kita terbuka saja. Makanya kadang ada perusahaan yang melobi-lobi ndak bisa...jadi kita adakan pertemuan antara perusahaan dengan komunitas."(Wawancara Andri Miko, Kasubag Tata Pemerintahan, 25 Juli 2017)

2. INFORMAL

Untuk membangun hubungan yang sifatnya harmonis dengan pemerintah,ditempuh tidak hanya melalui formal namun juga dapat dilakukan dengan upaya-upaya informal. Tujuan utama dalam jenis kegiatan ini lebih kepada membangun jaringan yang baik dalam pemerintah daerah.

Secara jelasnya kegiatan informal ini dilakukan pada waktu senggang atau di luar jam kerja atau juga dilakukan di tengah-tengah pertemuan formal. Ini biasanya digunakan pada saat kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat yang dilanjutkan dengan informal. Kegiatan ini dapat digambarkan seperti berikut:

1. Komunikasi via telepon

   Komunikasi Via telepon atau dikenal dengan kontak pribadi yang sifatnya informal juga dilaksanakan oleh PTPN V kepada Pemerintah Daerah kampar. Pada dasarnya tujuan dari hubungan ini adalah mengakrabkan diri untuk mencairkan suasana yang belum terselesaikan pada pertemuan formal.
2. Makan bersama

   Suatu agenda silaturahmi dalam kegiatan *government relations* yang dilakukan PTPN V terkadang datang dari ajakan pihak PEMDA terlebih dahulu atau PTPN V. Pertemuan ini tidak terdokumentasi dari pihak PTPN V ataupun Pemerintah daerah. Cara yang dilakukam dengan berkumpul bersama diluar jam kerja menurut narasumber hal biasa untuk lebih menjalin silaturahmi.
3. Personal lobby

   Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh Manajemen Puncak ke Tingkat Daerah. Dari hal yang berbau informasi biasanya cara ini di aplikasikan namun tidak sering, tergantung pada kondisi saat itu. Adapun seperti urusan genting makan PTPN V melakukan personal lobby.
4. Ucapan selamat

   Kegiatan-kegiatan yang memiliki keistimewaan bagi pihak PEMDA ataupun PTPN V melakukan rasa kepedulian dengan ucapan-ucapan selamat. Hubungan ini dikatakan sebagai dukungan positif yang bisa dilakukan dengan secara langsung maupun dengan papan bunga dan sebagainya.

Pada umumnya untuk hubungan PT Perkebunan Nusantara V dengan pemerintah daerah Kampar terkait Sei Kencana ini hanya berorientasi pada birokrasi sesuai undang-undang. Baik dalam hal perizinan atau pun perpajakan dan sejenisnya. Untuk hubungan yang informal terbilang memiliki frekuensi yang sangat jarang terjadi. Ini diperjelas dengan penjelasan narasumber Risky Atriansyah tentang hubungan formal dengan PEMDA yaitu:

(DATA 37)

"Kalau dibilang sering untuk selevel PTPN V pasti sering. Karena kebun kitakan bukan hanya Kencana ajakan. Masing-masing kebun tadi sedangkan sekarang pemerintah juga apakah harus bupati saja atau yang dibawahnya dinas-dinas atau seperti apa. Tapi yang pasti yang disebut pemerintah tadi mulai dari bupatinya sampai ke camat desanya kades kemudian yang di sebut PTPN V dari yang dikebun sampai kantor pusat ya pasti sering."(Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)

Hubungan *government relations* yang terjalin dalam setiap periode memiliki jenis komunikasi yang berbeda. Seperti yang lalu berdasarkan penjelasan narasumber yang meskipun tidak secara gamblang mengatakan terkait hubungan yang mengarah kepada politisi. Untuk Sei Kencana khususnya kerap kali di amanahkan dalam pemilihan kepala daerah. Ini dikuatkan oleh penjelasan Human unit yang mengatakan:

(DATA 38)

"Kalau itu terusnya itu, kalau itu gak bisa dihindarin. Macam manapun apanya dia ee istilahnya hubungan kita dengan dia dianggap tidak bagus, tapi kalau untuk masalah politik hehehe gak perduli dia tetap masuk itu. Kayak semalamlah untuk dia gak usah kita sebut namanya ya, untuk sinamaneneklah husunya kan menang kita buat. Karena waktu itukan permintaan dari kabupatenlah. Tapi ini sifatnya memang tertutup."(Wawancara Amir Syafrudin, 22 Juli 2017)

C. Government, Business, dan Society Relations

a. Conflict

PTPN V asal mulanya dari kebun-kebun pengembangan PTP yang ada di Sumatera Utara. Jadi sebelum adanya PTPN V ada sekitar 30 an kebun Belanda atau kebun-kebun peninggalan penjajah dan sebagain ada kebun-kebun yang merupakan hasil dari pengembangan dari Nasionalisasi. Dahulu kebun yang terdapat di Sumatera Utara peninggalan penjajah yang kemudian di merdekakan oleh pemerintah melalui TNI. Kemudian dilakukannya pemberdayaan diatas kebun-kebun lengkap dengan pabrik-pabriknya.

Pada tahun 1966 di Konsolidasi atau digabungkannya dari 30 PTP yang ada menjadi tinggal 14 PTP, digabungkan sesuai dengan lokasi atau teritorialnya di masing-masing Provinsi. Untuk PTPN V adalah kebun-kebun pengembangan dari PTP II, PTP IV, dan kebun PTP V yang ada di Sumatera Utara. Secara analoginya kebun yang sudah ada sejak

awal di Sumatera Utara, melakukan penambahan areal atau pembukaan kebun baru di RIAU. Di tahun 1966 dijadikanlah satu perusahaan yang terdapat tiga PTP tadi di Riau menjadi satu perusahaan dan menjadilah namanya PTPN V. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Pada saat ini Saham Pemerintah ada di PTPN 1, II, III, sampai XIV 10 % saham pemerintah yang berada di PTPN saat ini. Tapi PTPN III selaku holding tetap 100 % punya pemerintah dengan kata lain PTPN I sampai XIV semacam anak perusahaan BUMN kecuali PTPN III. Artinya PTPN III memiliki otoritas dalam mengangkat, memberhentikan direksi dan penyesuaian struktur organisasi, mengefesiensikan organisasi itu adalah hak dari PTPN III dan BUMN. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

PTPN V saat ini terdapat enam Kabupaten yaitu ada di Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Siak, dan Kuansing. Untuk kebun Sei Kencana adalah kebun peninggalan dari ex PTP II yang setelah berubah dimiliki PTPN V bergantilah namanya menjadi unit Sei Kencana. Sekitar tahun 1990 awal sekali dibangun dengan komoditas sawit. dikelola oleh satu manajemen kebun yang dipimpin oleh manager dan beberapa *afdeling.* Dengan jumlah total 4.866 ha yang memiliki tiga desa yaitu Sinamanenek, Desa Sumber Sari, dan desa Kusau kabupaten Kampar. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Desa Sinamanenek terkenal dengan daerah konflik dengan permasalah lahan. Berdasarkan dasar pembangunan dulu Sei Kencana merupakan bagian dari areal yang dapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri Pertanian. Jadi Menteri Pertanian di Kabupaten Kampar telah melepaskan hutannya kurang lebih 30.000 ha. Kemudian dicadangkan oleh Gubernur 30.000 ha tadi, menjadi areal perkebunan dengan pembebasan hutan tadi. Berangkat dari adanya pelepasan kawasan hutan yang telah di cadangkan oleh gubernur tadi masuklah PTPN V untuk mendirikan kebun. Terbitlah HGU di daerah Sei Kencana namun baru sebagian, sebagian lagi tanpa HGU karena sedang bermasalah dengan komunitas. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Dalam prinsip Badan Pertanahan Nasional (BPN) selagi belum adanya *clear and clean* mereka belum bisa menerbitkan HGU. Walaupun PTPN V telah mengantongi dasar-dasar untuk menerima HGU seperti pelepasan kawasan hutan, izin pemerintah, rekomendasi dari "Bupati" pada saat ini Sei Kencana masih bersatatus ataupun terdata masih adanya komunitas yang mengklaim hingga terkendalanya penerbitan HGU. Jika acuannya dari sisi legalitas, Sinamanenek adalah daerah lahan yang telah dilepaskan status kawasan hutan oleh

pemerintah pusat yang telah melalui proses peraturan menteri kehutanan. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Dari ranah hukum PTPN V sudah tiga kali terkena gugatam, satu kali PTPN V menang. Karena memang PTPN V memilki pelepasan kawasan hutan dan punya rekomendasi dari pemerintah daerah. Dua kali komunitas menarik diri ditengah jalan untuk menuntut PTPN V, karena komunitas tidak dapat membuktikan atas dasar apa lahan tersebut milik komunitas. Jadi ketika ada gugatan perdata dari pemerintah daerah kampar di Bangkinang, PTPN V memenangkan lahan tersebut. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Sebenarnya, HGU ini diurus pada tahun 79 an keatas sedangkan PTPN V berada disana pada tahun 1980 an. Pada tahun 1980 di zaman Pak Harto bagi PTPN seIndonesia tidak memerlukan urusan HGU. Setelah Reformasi Agraria terjadi dan keluar undang-undang agraria diwajibkannya semua perusahaan memakai HGU. Jadi , ketika pada tahun 98 an pak Harto lengser dan berubah ke reformasi diberlakukanlah undang-undang agraria secara penuh. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Kebun Sei Kencana ini seperti satu hamparan berbentuk ketupat, termasuklah Sei Kencana didalamnya dengan 30.000 ha dan di Kebun Sei Kencana ada 4.800 ha yang bermasalah 2.800 ha. Dari total 30.00 ha tadi, BPN tidak sanggup untuk mengHGUkannya sekaligus. Untuk mengHGUkan itu kan menggunakan sertifikat datang ke lokasi diukur barulah disiapin surat-suratnya. Ternyata karena sistemnya bertahap dan jatahnya Sei Kencana untuk di ukur oleh BPN, ada sekitar 10 orang yang datang mengklaim bahwa lahan itu adalah lahan peninggalan nenek moyang komunitas. Maka dari itulah sebabnya BPN hingga saat ini belum bisa mengeluarkan HGU. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

BPN meminta PTPN V untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan komunitas. Tahun 97 dan 98 itu kan terhitung masa pengukuran klaim terjadi sampai tahun 2007 demo terus. 2007 pemerintah ikut campur dari gubernur hingga kementrian, dan dibentuklah tim untuk menyelesaikan sengketa oleh gubernur. Dari 2007 ke 2009 tim melakukan pergerakan, hasilnya rekomendasi dari pemerintah agar lahan tadi diserahkan kepada komunitas. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Dari anggaran dasar yang bisa menghapuskan aset dan menyerahkan, menghibahkan, menjual bukan direksi atau komisaris namun rapat umum pemegang saham. Kemudian surat

rekomendasi dari pemerintah daerah tadi akan dikirim PTPN V ke BUMN menginformasikan bahwasanya ada mandat dari tim khusus pemda untuk menyerahkan lahan. Karena untuk PTPN V kewenangannya berasal dari pemegang saham. Karena yang memberi pemerintah adalah pemegang saham bukan pemerintah. Aset negara bisa berpindah pertama melalui jual beli, hibah, dan melalui putusan pengadilan. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Jadi pemerintah atau pemegang saham hingga menteri BUMN tentunya mengetahui undang-undang kekayaan negara tidak bisa begitu serta merta diserahkan tanpa adanya persetujuan DPR. Maka PTPN V pergi ke DPR pusat mengadakan rapat dengan DPR komisi 6 yang membidangi kementrian BUMN dan hasilnya tetap mereka tidak berani untuk menyerahkan lahan ke komunitas, karena tidak adanya dasar menyerahkan lahan tersebut. Kemudia dilakukan pengkajian hukum, tetap PTPN V jelas lebih kuat di kementrian BUMN dan DPRD pusat Jakarta dibuatlah tidak bisanya mengikuti rekomendasi yang telah dibuat oleh tim penyelesaian pemerintah daerah. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

2011 komunitas melapor ke Komnas HAM, melalui politik tidak tembus di hukum PTPN V memang akhirnya masalah ini sampai kemana-mana hingga presiden. Masuklah Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD bukan DPRD lagi dibuatkan oleh DPD mempertemukan komunitas dengan PTPN V. Karena bagaimanapun PTPN V tidak memiliki otoritas dalam melepaskan lahan. Oleh Bupati akhirnya ditahun 2012 mendapat kata sepakat PTPN V membangunkan kebun untuk komunitas dengan diberikan jangka waktu satu tahun. Ternyata mencari lahan sulit karena terkendala di tata ruang Riau yang sampai sekarang belum final. Apabila PTPN V salah lagi dalam memberi lahan yang masih kawasan hutan juga akan menambah kerumitan masalah. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Akhirnya terbelilah lahan 95 ha yang masih didapatkan oleh PTPN V miliki swasta. Karena polanya plasma dalam UU kewenangan Bupati menemukan calon petani calon lahan atau CPCL. Bupati bingung siapa yang akan dijadikan CPCL dengan 1400 orang mana yang akan dipilih. Masalahnya dipilih satu yang lain nuntut jika tidak diberi, dan berakhir dengan ketidak selesaian masalah. Bupati enggan dengan sistem PTPN V yang melakukan pergantian lahan dengan pertahap. Sedangkan PTPN V susah dalam mencari lahan untuk komunitas. *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Untuk lahan 2.800 ha tadi belum ada yang dilepaskan oleh pihak PTPN V, maka dari itu konflik kerap terjadi di daerah Sinamanenek ini. Hingga pada tahun 2013 PTPN V

mengalami demo dan berdampak selama dua minggu buah sawit tidak dapat dipanen karena komunitas memasuki areal. Dengan tindakan para ibu melakukan aksi telanjang tanpa sehalai benangpun di badannya, hingga membuat ketidaknyamanan petugas (aparat) PTPN V karena dihadapkan dengan situsi yang demikian dan memutuskan untuk mundur dari areal.

Menyinggung konflik yang identik dengan Sei Kencana tadi, dari penemuan penulis ternyata adanya keterlibatan pihak luar yang bukan komunitas perusahaan. Dari konflik yang mempersoalkan tanah ninik mamak ini. Sekitar 80 % pelaku demo disebabkan dari campur tangannya oknum-oknum yang berasal dari lingkungan perusahaan dei tercapainya keuntungan pribadi. Dijelaskan oleh Humas unit selaku praktisi humas yang berada dilapangan yang juga melakukan kontak langsung dengan komunitas lokal, berikut penjelasannya:

(DATA 39)

> *"Kemudian pada waktu itu ada namanya tokoh itu mengatasnamakan LSM dari Pekanbaru dia membawa pasukan sekitar 40 orang untuk merusuhi. Jadi sebenarnya kalau murni bukan orang kampung cuman diperalatlah orang-orang kampung ini dibawah komando oknum-oknum luar tadi ini. Kebetulan polisi menangkap oknum-oknum ini ketika diwawancarai rata-rata orang pekanbaru bukan asli orang kampung sinamanenek. sejak itu diselesaikan oleh manajemen puncak kantor pusat dan kita di unit tetap menjalin hubungan seperti memberikan sumbangan-sumbangan...."(Wawancara Amir Syafrudin, 22 Juli 2017)*

b. Urgensi Pemerintah, Perusahaan, dan Komunitas

Government relations melalui perilaku perusahaan yang baik akan mejadi point penting untuk perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jelas pada posisi Pemerintah daerah penting bagi perusahaan, arti penting government relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan (investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan.

Begitupun dengan aspirasi rakyat menjadi kepentingan yang wajib dilayani pemerintah daerah, karena kebijakan pemerintah daerah akan menjadi solusi untuk mengenali kebutuhan, keinginan dan permasalahan komunitas. Transparansi sebagai solusi konflik tanpa pemihakan yang dilakukan pemerintah daerah. Netral menjadi pilihan pemerintah untuk meredam kedua belah pihak. PT Perkebunan Nusantara V dibawah

naungan BUMN melakukan tahapan-tahapan dalam pengidentifikasian hingga tahap evaluasi. Tentunya dengan keterbukaan Pemerintah Daerah kepada PTPN V yang mencoba untuk menjalin hubungan yang baik lagi demi tercapainya satu pemikiran sepahaman dengan pendekatan yang wajar.

Kemudian Urgensi dari sebuah konflik yang menerlibatkan PTPN V terlihat seberapa besar pengaruh dari Bupati dan pemerintah daerah untuk tahap penyelesaian dengan komunitas. Bupati atau pejabat pemerintah yang berada di Daerah kampar wilayah perusahaan beroperasi akan sangat mempengaruhi izin dan kegiatan dengan mengenali masyarakatnya. PTPN V melakukan hubungan baik dengan manajemen puncak dan mendapatkan dukungan dari aparat. Sehingga pada berlangsungnya konflik diatas dapat diatasi dengan rapi meski tidak sempurna.

Di dalam perusahaan PT Perkebunan Nusantara V, fungsi membina hubungan dan upaya tersebut dijalankan oleh Divisi Umum, divisi HLKHI staff *public relations* beserta ASUM Unit dengan porsi *jobdesk* masing-masing. Jadi, dalam perusahaan ini tim khusus untuk penanganan *government relations* itu tidak ada secara struktural. Tapi berdasarkan peran dan fungsi ini menjurus pada divisi yang telah disebutkan tadi. Ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan narasumber Risky Atriansyah yang mengatakan bahwa:

(DATA 40)

> *"Mau kasih bantuan untuk masyarakat kebanjiran di kampar waktu banjir dulu itu bupati yang telfon. Nanti humas bisa komunikasikan atau orang PKBL nya langsung yang dia kontak humasnya nanti akan publikasikan jadi semuanya saling terkait. Jadi tim itu saya simpulkan mereka yang terkait dengan kegiatan tadi punya porsi dan kewenangan masing-masing. Sedikit berbeda dengan teori ada satu tim khusus yang menangani itu tidak. Karena masing-masing bisa bekerja dengan jobdesknya. Dikebunkan bisa bergerak sendiri selagi sesuai dengan kewenangan manager tapi kalau udah lewat dari kewenangan manager dia kana ditunjuk ke direksi kantor pusat. Direksi nanti akan menyuruh bagian yang ada di kantor pusat untuk melaksanakan."(Wawancara Risky Atriansyah, Staff Public Relations, 10 Mei 2017)*

Tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk komunitasnya ini menjadikan pemerintah sedikit meringankan tugas pemerintah terkait kesejahteraan komunitas. Namun karena jarangnya komunikasi informal untuk jajaran pejabat pemerintah per divisi yang bersinggungan dengan perkebunan, penulis menemukan adanya *mutual understanding* antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Salah satunya pada divisi dinas perkebunan yang tidak mengetahui program dari asah *soft skill* peternakan

kambing yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara V. Ini dapat dilihat dari penjelasan narasumber Andri Miko Selaku Kasubag Tata Pemerintahan yaitu:

(DATA 41)

> *"Ya itu makanya, jadi kita gak bisa menyalahkan masyarakat. Seharusnya perusahaan bertanya dulu bapak ibu apa maunya? Kita kasih nih tapi betul-betul dikerjain bukan dan perusahaan harus memantau jugak. Gimana hasilnya? Ya berikan bimbingan dulu cari ahli yang dari luar untuk monitoring. Maklumlah kita masyarakat kita gak bisa ngapa dijual? Ya mungkin mereka malas ternak dikasih kambing mana akan mau. Sebelum kita memberikan suatu hal kita tanya dulu maunya apa? Pak saya mau jait tapi kami gak bisa jahit, tentu didatangkanlah tenaga ahlinya buat ngajarin biar ada kerjaan ibu-ibu tuh."(Wawancara Andri Miko, Kasubag Tata Pemerintahan, 25 Juli 2017)*

Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan yang telah penulis dapatkan dari narasumber dengan jabatan Staff Urusan Administari Keuangan yang sekaligus juga memantau ke lapangan secara langsung. M.Azman Lubis yang menjelaskan bahwa sebenarnya sektor peternakan tadi telah menjalin kerja sama dengan narasumber yang berada dibidangnya dengan biaya di tanggung oleh PTPN V. Bahkan untuk program ternak kambing ini bekerja sama dengan mahasiswa UNRI yang perannya menjadi kaki tangan PTPN V. Ternak kambing ini juga dilakukan atas dasar keinginan komunitas yang diterima oleh tim PKBL. Hal ini diperkuat dengan penjelasan narasumber yang mengatakan:

(DATA 42)

> "*Masalah Kambing itu kita merekrut mahasiswa Universitas Riau sebagai konsultanlah katakan. Jadi mahasiswa inilah yang gerak kesana, mensosialisasikan, membimbing, mengarahkan, sampai tahap mengevaluasi. Masyarakat setuju, bahkan kambing nih kan hasil survey kita. Kita tanyakan ke mereka maunya apa bapak-bapak ibu-ibu? Jadi intinya kalau kambing itu kita pakai perwakilan apa namanya survey mahasiswa UNRI buat kontrak dengan perusahaan dah kan dikasihnya terus penyuluhan perusahaan menyediakan kambingnya. Jadi istilahnya ini proyek UNRI kita penyedia Kambing. Kerja samalah jatuhnya, udah kita sediakan kambing yang buat penyuluhanpun orang UNRI langsung sampai menyuntiknya sampai mendatangkan dokternya ya mahasiswa. Cuman masyarakat ini datang pagi dijual sore." (Wawancara M.Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)*

Ada pun birokrasi terkait perijinan merupakan hal yang sensitive bagi pemerintah. Dimana pada satu sisi pemerintah merupakan wakil rakyat sedangkan perusahaan juga merupakan mitra perusahaan. Digaji oleh komunitas, namun pada sisi lainnya pemda juga mempertimbangkan Menteri. Pemda Seperti yang dijelaskan oleh narasumber M.azman lubis tentang pandangan pemerintah yaitu:

(DATA 43)

"Ya berat lah bingung kalau PTP nih kan ada aja instruksi dah lepaskan tanah kelen tuh pasti kami lepaskan. Kami ya pening kali, bukan hebat kali 2800 ha tadi. Orang aset negara kok, macam mana kami mau bilang. Instruksi pemerintah begini tuntutan masyarakat begini PTP terjepit. Jadi kalau pemerintah kita bilang pasti pemerintah ngambang juga jawabnya kalaupun kita tanya ngambang itu gak tau dia mana yang dibelanya. Dibelanya masyarakatnya dilawannya mentri, di belanya PTP lawannya masyarakat. Sedangkan yang gaji dia masyarakat, pening kan."(Wawancara M. Azman Lubis, Staff Divisi Umum PKBL, 12 April 2017)

Banyaknya pengaruh dalam kehidupan komunitas di sekitar daerah operasional menjadikan PT Perkebunan Nusantara V memiliki oknum-oknum yang sekiranya dapat menyokong jalannya aktivitas perusahaan. PTPN V membangun hubungan dari pemerintah mulai tingkat terendah kecamatan, desa, aparat hingga tingkat provinsi dengan pematokan budget yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Dari beberapa unit atau kantor cabang perkebunan yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara V pada umumnya masih memiliki status hubungan yang baik. Hanya saja karena tersangkut di unit sei kencana yang berhubungan dengan pemerintah daerah kampar image dari PTPN V mengalami penurunan.

Sebagai evaluasi PT Perkebunan Nusantara V akan menempuh cara diskusi untuk membahas strategi yang akan di tempuh dalam melakukan pendekatan-pendekatan ke komunitas lokal. Maka dari itu dibutuhkannya peran dari pemerintah dalam memberikan pandangan-pandangan terkait upaya perusahaan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi desa.

Strategi komunikasi biasanya komunikator dilakukan oleh *Public Relations,* yang menjadikan persoalan bagi pemerintah karena adanya perbedaan wewenang terbatas yang dimiliki *public relations.* Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Sofyan Hadi selaku seksi pembinaan pengawasan perkebunan mangatakan bahwa:

(DATA 44)

"Itu humasnya, jadi tiap ada konflik tiap ada permasalahan problem baik itu diluar maupun didalam itu yang turun tangan jarang Direktur. Itu pasti humasnya dulu, kalau seandainya masalahnya selesai dengan humas cukup sampai di situ. Kalau tidak baru sampai pada direksi, tergantung kondisi permasalahan."(Wawancara Sofyan Hadi, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perkebunan, 25 Juli 2017)

Dinas perkebunan berdasarkan narasumber melalui wawancara Sofyan Hadi menjelaskan adanya persepsi yang menimbulkan hubungan tidak baik untuk pemerintah

daerah dan PTPN V. Diantaranya dalam anggapan atau status dari pemerintah daerah ini. Sofyan Hadi berasumsi bahwa PTPN V tidak memandang PEMDA sebagai mitranya, hingga keterbukaan perusahaan dengan pemda belum terealisasikan. Khususnya di divisi dinas perkebunan kabupaten Kampar. Sofyan Hadi menjelaskan sebagai berikut:

(DATA 45)

"Jadi memang beberapa tahun terakhir ini kita coba selalu kita sosialisasikan kepada didalam pembinaan pengawasan itu selalu kita sampaikan ya paling tidak kita itu merubah mindsetnya jangan gaya lama. Jadi kalau saya artikan gaya lama itu setiap orang pemerintahan datangkan lihat bayangan dia kan gitu. Bayangannya negativ saja, mungkin orang pemerintah mau cari ini mau cari itu kan gitu. Jadi saya tekankan disitu rubah pola pikirnya, yang penting sekarang ini anggap pemerintah ini mitra kerja saling mengisi. Jadi keterbukaan itu belum ada, dan karena itu juga dicampuri dengan politiskan."(Wawancara Hadi Sofyan, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perkebunan, 25 Juli 2017)

Penulis juga menemukan tentang peran pemerintah kepada komunitas yang memiliki problem dengan perusahaan pada masa lalu. Dimana komunitas berada pada posisi yang sama dengan perusahaan. Pemerintah menetapkan dirinya pada posisi dingin yang netral sebagai memfasilitasi kedua pihak ini untuk saling berbicara untuk mencapai kata sepakat. Ini dikuatkan dengan pernyataan komunitas yang mengatakan:

(DATA 46)

"*Oh iya....inikan kita nanti melalui pemerintah desa dahulu mereka mengadu ke pemda nanti biasanya ada mediasi antara ketiga belah pihak. Nah pemda itu tidak berat pada satu sisi tidak, biasanya nanti mereka mempertemukan kita dengan perusahaan lalu dicarikanlah solusi buat permasalahan kami. Kalau yang sudah-sudah seperti itu."(Wawancara Mardianto, 22 Juli 2017)*

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak pemerintah yang menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan. Pemerintah hanya sampai menjadi fasilitator dan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku serta melihat kelengkapan data dari perusahaan yang akan pemerintah bandingkan dengan komunitas. Namun begitu pemerintah tetap siap untuk membela komunitas serta warganya dengan menawarkan penyelesaian menggunakan musyawarah. Berikut narasumber pejabat pemerintah mejelaskan:

(DATA 47)

"Kita tidak pernah yang namanya pemerintahan kan perusahaan itu jugak kita anggap itu adalah mitra kita, masyarakat itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Kita tidak ada pilih kasih pilih asuh, kita terhadap pemerintah daerah

eeee perusahaan dengan masyarakat kita anggap sama. Kita hanya menyangkut regulasinya, jadi kita sesuaikan dengan regulasinya kita identifiksi permasalahannya dimana kita selesaikan dengan cara musyawarah. Jadi kita temukan masyarakat dengan perusahaan kita fasilitasi jadi pemerintah memfasilitasi, misalnya masyarakat ada konflik dengan perusahaan kita fasilitasi secara kecil wadahnya secara dinas perkebunan kalau tidak nanti kita coba lapor ke pimpinan ke bupati coba didaerah kalau tidak bisa ke bupati kita coba ke DPR. Toh seandainya ini tidak berjalan kita coba fasilitasi melalui dinas provinsi melalui gubernur kalau tidak DPR Propinsi kita lempar secara terstruktur seperti itu."(Andri Miko, 22 Juli 2017)

Tarik menarik kepentingan dari berbagai elemen yang masing-masing memiliki kepentingan, menyebabkan dampak yang buruk bagi perusahaan. Ini dirasakan oleh PT Perkebunan Nusantara V yang telah mendapatkan coretan merah terkait tanggung jawab sosial akibat adanya konflik sosial di unit Sei Kencana. Ini didukung oleh pernyataan pejabat pemerintah daerah yang mengatakan hubungan dengan perusahaan, sebagai berikut:

(DATA 48)

"Khusus PTPN V saya katakan belum baik." (Wawancara Sofyan Hadi, 22 Juli 2017)

Namun, hal lain datang dengan pendapat yang berbeda dengan jajaran dinas pemerintahan daerah yang menyatakan hubungan baik yang dijalin dengan Sei Kencana PTPN V. Adapun hal ini dikatakan sebagai berikut:

(DATA 49)

"baik, tidak ada masalah. Kalau bermasalah kami suruh pindah aja hehehe. Kan sekarang baik-baik aja kerja-kerja lah kan gitu. Gak ada bermasalah keluarlah dari kampar kan tidak. (wawancara, Andri Miko 25 Juli 2017)

Peneliti juga menemukan sebuah data yang membenarkan bahwa PTPN V telah melakukan tanggung jawab sosial kepada masayarakat yang ada di Sei kencana, namun demikian hal ini mendapatkan kritikan dari pemerintah yang mengatakan sebuuah kewajiban tidak dapat di sejajarkan dengan apa yang dinamankan membangun hubungan dengan komunitas. Adapun hal ini diperkuat dengan hasil pernyataan pihak pemerintah:

(DATA 50)

"itukan kewajiban dia seluas 20 % lahan untuk komunitas diatur dalam Permentan 98 tahun 2013."(wawancara Sofyan Hadi, 25 Juli 2017)

Lebih lanjut hasil wawancara terkait *corporat communication* dengan pemerintah daerah yang jelas mangatakan minimya komunikasi yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Persepsi negatif yang dimunculkan oleh pemerintah daerah terkait sitem kerja PTPN V yang dekat dengan persoalan lahan dengan perizinannya.

Untuk persoalan sebab akibat dari ketidak optimalan pengawasan dan pembinaan khusus dinas perkebunan, ditemukan data bahwa sulitnya komunikasi yang ditempuh oleh pemda dengan perusahaan. komunikasi yang dilakukan dalam bentuk surat, mengalami keterlambatan atau sangat lambatnya respon yang diberikan oleh pihak PTPN V kepada pemda. Adapun asumsi ini dipekuat dengan data yang mengatakan:

(DATA 51)

"...karena pernah saya saat melakukan pembinaan, saya sampaikan ke manager kebun karena untuk berkomunikasi saja sulit. Ada beberapa surat itu untuk melakukan pembinaan beliau tidak respon"...(wawancara Sofyan Hadi, 25 Juli 2017)

Dari beberapa penjelasannya, pemerintah daerah membenarkan konstribusi yang besar dari keberadaan perusahaan. yang mana PTPN V berhasil dalam hal *philantropy.* Ini sejalan dengan pernyataan narasumber yang mengatakan:

(DATA 52)

"...jadi kalau diperkebunan ini cara perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat ya dengan cara perkebunan pulak. Banyak aspek perusahaan dalam membuka lapangan kerja yang memprioritaskan masyarakat tempatan". (wawancara Sofyan Hadi, 25 Juli 2017)

Keseimbangan dalam konteks perusahaan dengan memperhitungkan dari seluruh elemen yang memiliki efek dari operasional perusahaan, pada dasarnya telah dimiliki perusahaan sejak lama melalui visi perusahaan. Perkebunan yang kini bukan lagi sekedar membuka lahan mendapatkan keuntungan sendiri, namun untuk keseluruhan elemen sosial politik. Saat ini People, planet, profit menjadi misi PTPN V dalam menjalankan perusahaan. Ini diperkuat dengan pernyataan narasumber yang mengatakan:

(DATA 53)

"*... Kan tadi tetap dibilang sejak awal tujuan utama kitakan bukan hanya sekedar mencari profit, tapi people planet profit. People sama planetnya gimana*

kalau gak ada izin-izin atau gak ada kerja sama yang baik komunikasi yang baik gimana kita bisa berproses. Karenakan sekarang pasti bukan hanya sekedar mencari laba tetapi juga harus berkesinambungan. " *(Wawancara Risky Atriansyah, 10 Mei 2017)*

Begitu pun dengan harapan yang di sampaikan oleh narasumber pejabat pemerintah. Adanya keinginan suatu hubungan yang memilki berkesinambungan antara perusahaan, komunitas dan pemerintah daerah. Menjalankan komunikasi yang transparan dan sama-sama memiliki keinginan saling menjaga. Ini dikatakan oleh narasumber sebagai berikut:

(DATA 54)

"Harapannya saling komunikasi saling koordinasi intinya jagala tali bapilin tigo tadi. Sama-sama menjaga hubungan baik dari perusahaan ke pemerintah perusahaan dengan masyarakat, komunikasinya harus bagus."(Wawancara Andri Miko, 25 Juli 2017)

"buat transparasi dari PTPN V, karena kalau buahnya ini khusus KKPA buah masyarakat, jika tidak diambil atau tidak dibeli oleh PTPN V otomatis masyarakat ngadunya ke pemda. Maka dari itu ubah mindset PTPN V untuk memperlakukan pemerintah sebagai mitra" (Wawancara Sofyan Hadi, 25 Juli 2017)

Tak lepas juga dengan komunitas yang tentunya terdapat berbagai harapan besar baik kepada pemerintah maupun perusahaan, dimana komunitas ingin perusahaan segera mengabulkan kesepakatan yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah dalam pencarian lahan pengganti. Tidak dengan cara anarkis, namun dengan cara bermusyawarah dan PTPN V tidak menutup diri untuk komunitas Sei Kencana khususnya Sinamanenek. berdasarkan pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa:

(DATA 55)

"*Cuman permintaan masyarakat tuh belum dikabulkan, belum terealisasi masalah lahan itu. Jangan sempat terulang lagi dua kali bentrok-bentrok masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan taulah tanggung jawab dia, masyarakat istilahnya kalau nuntut sih boleh-boleh saja tapi jangan anarkis kan gitu. Cuman kalau istilahnya kita duduk satu meja dengan perusahaan dengan berdada lapang dan kepala dingin semuanya bisa selesai. Tapi kalau istilahnya mengeras mana akan selesai , karena tidak ada masalah yang tidak selesai. Intinya tolonglah rangkul kami masyarakat baik dari pemerintahkah ataupun perusahaan, semoga ketiga elemen ini mampu menuju satu pemikiran yang tak merugikan pihak manapun."(Wawancara Samsir, 1 Juni 2017)*

BAB IV

PEMBAHASAN

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang agro industry kelapa sawit dan karet. Perkembangan status berdasarkan pencapaian laba dalam operasional perusahaan, telah mengalami pergeseran dengan diembannya tanggung jawab sosial perusahaan pada sekumpulan orang yang hidup dalam satu wilayah yang sama dengan perusahaan. Ini disebabkan oleh tata letak geografis yang sifatnya menyebar diberbagai kabupaten Provinsi Riau, telah membawa PTPN V pada arah entitas sosial yang saling menguatkan.

Dominasi komunitas lokal di kawasan Sei Kencana mengalami macam-macam persepsi yang berbeda tentang keberadaan PTPN V. Apalagi dengan ditambahnya pendatang atau komunitas dari luar daerah Sei Kencana dan menetap didaerah tersebut. Semakin beragamnya pandangan yang ditujukan komunitas ke perusahaan, kan semakin besar peluang perusahaan dikritik oleh komunitas. Oleh sebab itu PTPN V menggunakan kegiatan *community relations* sebagai salah satu jalan menuju satu pemikiran dengan komunitas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam merangkul komunitas, akan menyesuaikan dengan *planning* yang sudah perusahaan buat, melihat stabilitas kawasan yang teridentifikasi sebagai daerah yang baru terbuka atau berkembang. Dalam menciptakan terobosan-terobosan baru dalam memberdayakan komunitas, diperlukan peran PTPN V serta peran pemerintah daerah selaku kunci pokok pada masyarakat atau sebuah tempat yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting yang membuat sebuah perusahaan baik atau bahkan menjadi buruk dari sudut pandang komunitas. Dari hasil temuan data pada bab sebelumnya, peneliti mengidentifikasi implementasi *community* dan *government relations* yang dilaksanakan oleh PTPN V. Adapun fokus kegiatan ini tersusun dalam program PKBL dan mitra tani KKPA. Pada lingkup *government relations*, PTPN V melakukan hubungan sesuai dengan regulasi kepentingan perusahaan dengan Pemerintah daerah baik formal ataupun informal. Untuk lebih jelasnya dalam analisis ini, penulis akan menjabarkan pembahasan secara sistematis.

A. Analisis Fungsi *Public Relations* dalam Kegiatan *Community Relations dan Government Relations* PTPN V

Public relations mempunyai ruang lingkup yang cukup luas dengan beberapa kegiatan *public relations.* Seperti *community relations, government relations, press relations* dan lain sebagainya. Mengingat *public relations* akan menangani pihak-pihak yang berada di lingkungan dalam perusahaan maupun yang berada di lingkungan luar perusahaan. Artinya akan timbulnya beragam keinginan, kebutuhan dan masing-masing kepentingan secara luas dan kompleks. *Public relations* menjadi salah satu fungsi komunikasi dalam perusahaan dengan beragam karakter perusahaan yang telah dipengaruhi. Fungsi komunikasi yang dilakukan *public relations* kepada pihak-pihak terkait, baik itu internal ataupun eksternal dilihat dari segi konsep, yang merupakan bagian struktural perusahaan.

Pengamalan fungsi *public relations* dalam praktik bisnis turut dipengaruhi oleh tingkat komunikasi yang dibutuhkan perusahaan serta pihak komunikan. Terkait dengan hal tersebut, *public relations* memiliki beragam definisi. diantaranya seperti ungkapan Cutlip, Center and Broom (*Effective Public Relations,* 2009:6) yang mengatakan bahwa, "*Public Relations* suatu fungsi manajemen yang berguna dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang baik juga memberikan manfaat antara organisasi dengan publik, yang nantinya akan membawa pengaruh dalam memberikan kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut". Kemudian pemahaman lainnya yang mengatakan "*Public Relations as the management function that establishes and maintains mutually beneficial relationship* yang dikutip dari defenisi *Public Relations* Cutlip, Center dan Broom.

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut terdapat realisasi berkenaan fungsi dari *public relations* pada komunitas. Yaitu menjalankan komunikasi melalui pengelolaan komunikasi yang sudah terencana, antara perusahaan yang memiliki tujuan dalam memberikan stimuli atas sikap publik, juga menanamkan keyakinan komunitas akan keberadaan perusahaan hingga memperolah satu pemahaman yang sama dari komunitas kepada perusahaan. misalnya komunitas memiliki ketergantungan akan keberadaan dari perusahaan, sehingga komunitas tidak menganggap perusahaan sebagai ancaman lingkungan daerahnya. Hasil dari upaya yang telah dilakukan secara otomatis akan menciptakan hubungan yang harmonis dan akan terjadinya hubungan saling menguntungkan di kedua belah pihak. Dalam pengertian ini PTPN V menggunakan "divisi Umum pada tim PKBL" yang akan melakukan interaksi secara langsung dengan bertatap muka dengan

komunitas Sei Kencana, dan melakukan komunikasi dua arah. Lalu Dilihat dari struktural perusahaan, kedudukan, dan fungsi dari *public relations* yaitu berada pada kesekertariatan perusahaan HLKHI. Hal ini menunjukkan HLKHI belum mencapai tataran managemen puncak dari peran *public relations*. Dalam hal ini terlihat bahwa praktisi *public relations* hanya sebagai pelaksana komunikasi dan managemen. Praktisi *public relations* belum diberi hak sepenuhnya untuk melakukan kebijakan mengelola hubungan yang harmonis dengan komunitasnya.

Jika dikaitkan dengan kedua pengertian di atas mengenai fungsi *public relations,* dalam hal ini PTPN V memang tidak memiliki divisi khusus tentang *public relations*. Namun secara umum aktivitas penggabungan tanggung jawab secara tidak langsung PTPN V menempatkan fungsi *public relations* pada divisi Humas Legal Kepatuhan dan Hubungan Investor (HLKHI) dan Divisi Umum. Segala jenis yang berhubungan dengan kegiatan *public relations* dapat ditemukan pada divisi ini. Hal ini disesuaikan dengan *Job descriptions* HLKHI yang mengemban tanggung jawab dengan skala kesekertariatan pemerintah pada umumnya yang berotasi pada urusan pendampingan, dan melayani kebutuhan dari manajemen puncak. Mulai dari mengatur jadwal direksi hingga aktivitas surat menyurat. Kemudian pada Divisi Umum juga terdapat kegiatan *public relations* yang dijalankan dapat dilihat dari peranannya sebagai penghubung perusahaan dengan pemerintahan, juga sebagai penghubung perusahaan dengan komunitas.

Tingkatan struktural *public relations* dalam PTPN V akan menjadi strategis. Karena kebijakan perusahaan atas publiknya dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, dan juga sikap yang berasal dari proses komunikasi yang dibangun keduanya. Akan menjadi lebih efektif jika *public relations* dijadikan bagian dari pengambil keputusan atas sikap dan kebijakan dalam menagemen perusahaan. Dalam hal ini PTPN V menempatkan *Public Relations* dalam struktur kesekertariatan. Posisi staff dan fungsi *public relations* dalam PTPN V belum dapat disebut pada level managemen puncak masih pada level menengah. Artinya, fungsi *public relations* belum diberikan otoritas sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan pendekatan strukturan fungsional PTPN V masih menggunakan managemen ekonomi. Dimana fungsi komunikasi belum menjadi inti operasionalisasi perusahaan.

Komunikasi dalam skala yang tergolong luas akan memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan evaluasi. Oleh sebab itu *public relations* dalam sebuah struktur manajemen perusahaan akan turut mempengaruhi fungsi dan kewenangan bagian

tersebut. Dilihat dari sudut pandang *public relations* yang menekankan pada urgensi bahwa penerapan fungsi manajemen *public relations* hanya akan maksimal pada saat kedudukannya berada dalam top managemen. Namun terlepas dari struktural *public relations* dalam perusahaan, praktiknya tetap menjadi kegiatan perusahaan. Guna membina hubungan dengan pihak-pihak terkait.

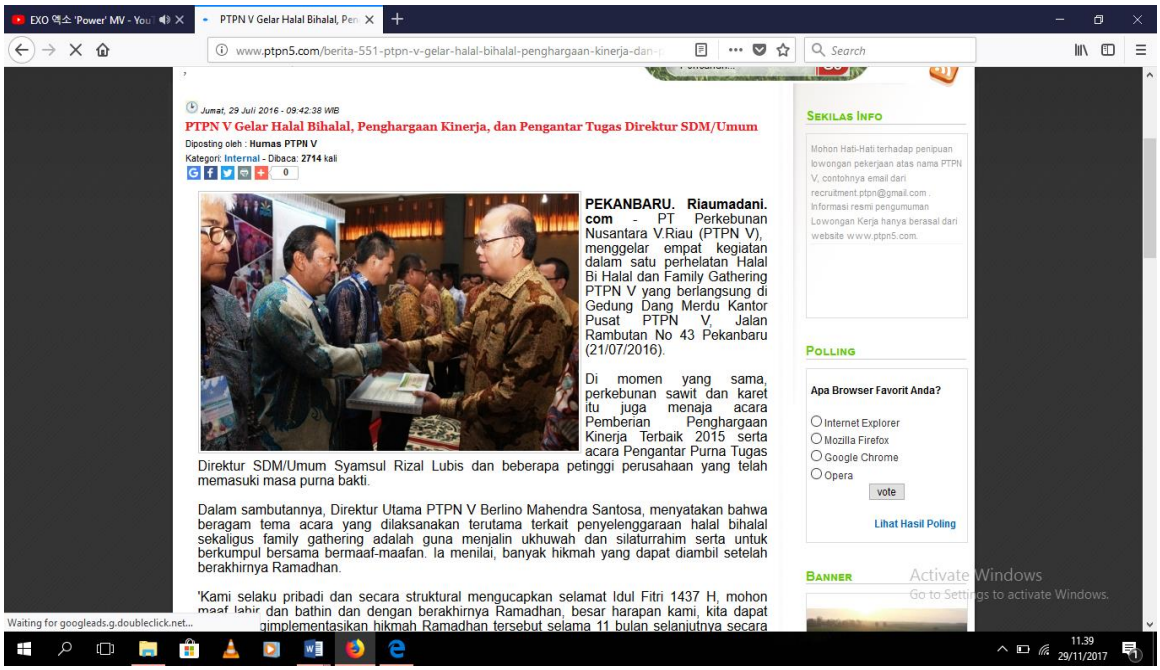
Kegiatan yang dilakukan oleh divisi HLKHI yang di dalamnya terdapat *staff public relations* juga menerapkan apa saja yang menjadi ruang lingkup *public relations.* Ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kriyantono, (2012: 23) yang merangkum lingkup *public relations* dengan singkatan PENCILS.

1. Publikasi

   Publikasi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya membahas semua tentang perusahaan yang akan disebarluakan melalui segala jenis media, yang akan dikonsumsi oleh stakeholders perusahaan. Segala jenis aktivitas yang berisikan rangkaian kegiatan PTPN V bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan citra, yang dikemas melalui pemberitaan. Pada PTPN V kegiatan ini di limpahkan kepada Humas Legal divisi HLKHI. Humas legal akan melayani media, LSM, ataupun orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap PTPN V melalui perannya Urusan pencitraan perusahaan dapat ditemui dalam divisi HLKHI, termasuk publikasi dan penanganan wartawan. Publikasi dalam hal ini banyak dilakukan dengan pemberian informasi dari hasil kegiatan PKBL dan KKPA seluruh unit PTPN V.

   Kategori produk yang dihasilkan oleh HLKHI dalam publikasi disalurkan melalui website PTPN V, dan juga dapat menggunakan kerja sama media lokal mau pun nasional. PTPN V juga memiliki media yang bernama majalah internal perusahaan. Ada pun penyajian informasi terdapat beberapa tema meliputi, perubahan perusahaan, produk terbaru beserta pengembangannya, informasi tentang kompetisi di pasar, mengupdate kondisi perusahaan terbaru, atau juga dapat berupa pesan prinsip dari jajaran direksi atau lainnya. Namun khusus pada kegiatan yang bersinggungan dengan komunitas dan pemerintah juga dapat ditemui pada website perusahaan. Pada tahun 2009 PTPN V sempat meraih penghargaan portal PKBL dan publik, kemudian pada tahun 2011 PTPN V diberikan penghargaan IT *Governance.*

2. *Event*



Gambar 4.1 kabar berita melalui website perusahaan kegiatan event yang berkaitan dengan pimpinan
(Sumber: Website PTPN V)

Kegiatan pada tipe promosi yang kerap digunakan perusahaan sebagai penghubung sebuah merek pada runtutan acaranya atau bisa jadi berupa tematik yang dikembangkan. Pada divisi HLKHI telah mengimplementasikan kegiatan ini dalam rangka mempertemukan sekelompok orang dengan ragam tujuan diantaranya yakni tujuan perayaan, reuni, pendidikan, dengan perantara HLKHI akan melakukan perencanaan, koordinasi serta pengawasan untuk merealisasikan kehadiran kelompok dalam kegiatan yang telah di rancang. Menyelenggarakan kegiatan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan bagi sebuah perusahaan. PTPN V menggunakan kegiatan ini sebagai salah satunya bertujuan menciptakan citra positif perusahaan baik bagi internal atau pun eksternal perusahaan.

3. *News*

Bagian ini merupakan pekerjaan seorang *public relations* tentang kualitas kemasan dalam produk tulisan. Hal ini sifatnya informatif yang akan disebarkan kepada publik. Penerapan ini dilakukan pada HLKHI dalam pembuatan *Press release* dalam melakukan persiapan materi untuk memberikan statement kepada wartawan. Hal ini merupakan bagian tugas yang dijalankan oleh divisi HKLHI di kantor pusat PTPN V. Pekerjaan HLKHI dalam membina hubungan dengan media (*pers*), begitu juga dengan PTPN V berlaku untuk seluruh unit akan

dilakukan melalui HLKHI kantor pusat PTPN V. Untuk melakukan hubungan dengan media. Melalui media cetak lokal seperti Riau Pos, Tribun, mau pun nasional seperti Kompas.

Hal ini telah diimplementasikan pada PTPN V. Divisi HLKHI khususnya bagian dokumentasi akan turut serta menemani tim PKBL untuk turun lapangan melakukan pengambilan dokumentasi untuk di publikasikan dan di konsumsi oleh khalayak melalui media yang menjadi partner perusahaan. Memperlancar interaksi dengan komunitas melalui media pada unit Sei Kencana belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan minimnya pemberitaan yang disegmentasikan kepada komunitas lokal Sei Kencana. Hingga tertutupnya informasi mengenai konstibusi yang telah dilakukan oleh PTPN V pada upaya pembangunan desa komunitas. *Public relations* pada PTPN V terkait pemberitaan-pemberitaan terfokus kepada perusahaan yang berada di Kantor Pusat. Wewenang dalam bekerja sama dengan media tidak diperoleh oleh Humas unit yang setiap harinya terjadi interaksi dengan komunitas. Mempublish hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan menjadi tanggung jawab HLKHI kantor pusat. Sehingga lemahnya informasi yang diterima oleh komunitas.

Pihak HLKHI menjelaskan mengapa media dibatasi pada perusahaan unit khususnya di unit Sei Kencana. Tipe komunitas lokal yang berada di unit Sei Kencana pada saat ini masih tergolong sekumpulan orang yang ingin menuntut persoalan lahan yang mereka klaim sebagai lahan nenek moyang komunitas. Hingga pada saat perusahaan melakukan segala jenis pencitraan melalui media justru mendapatkan efek sedikit respon dari komunitas. Persepsi komunitas lokal di unit Sei Kencana sudah sangat melekat. Ketika PTPN V melakukan pendekatan dengan komunitas maka PTPN V dinilai memiliki kepentingan yang akan memberikan segala apa pun tentang keinginan komunitas. Maka dari itu, Humas unit PTPN V tidak melakukan pendekatan secara informal. Kegiatan ini sangat memiliki batasan-batasan yang tidak berani Humas lampaui. Disisi lain juga ada keterbatasan dana yang akan digunakan oleh Humas perkebunan, dan dana menjadi kendala pada implementasi media di perkebunan.

Tujuan *public relations* pada tingkat media diidentifikasi bahwa media sangat tertarik dengan aktivitas perusahaan yang sekiranya dapat menjatuhkan

citra, atau berita perusahaan yang cenderung mengakibatkan konflik secara eksternal, dan sebagainya. Oleh sebab itu ketepatan dalam bersikap dengan bekerjasama kepada media sebagai mitra adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh *public relations.* Menurut Soemirat dan Ardianto (2015:122), "Memang membina hubungan baik dengan pers salah satu jalan untuk lebih dekat dengan komunitas, karena media akan mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan".

4. Community Involvement

Tugas ini mengenai peran *public relations* yang harus berurusan dengan elemen masyarakat. Hubungan ini dijalin dengan memberikan rasa kepedulian terhadap masyarakat. Penerapan ini dapat ditemukan pada dua divisi yang terdapat di PTPN V yaitu divisi umum PKBL, dan HLKHI yang memiliki peran dari *public relations*. Kedua divisi memiliki perannya sesuai porsinya masing-masing. Untuk divisi umum PKBL lebih cenderung melakukan interaksi langsung dengan komunitas. Ini dikarenakan segala hal yang bersangkutan dengan program untuk komunitas mulai tahap perencanaan hingga sampai pada tahap evalusi menjadi wewenang divisi umum tim PKBL. Sedangkan HLKHI bertugas pada masa keperluan menyampaikan pesan kebutuhan penagihan dana, atau pun penyampaian hal-hal yang menyertakan komunitas pada acara-acara unit Sei Kencana. HLKHI mengambil peran sebagai komunikator. HLKHI juga akan menerlibatkan Staff Dokumentasi yang akan mengikuti tim PKBL. Hal ini berguna untuk merangkum keseluruhan kegiatan agar dapat dikemas sebagai berita lalu akan dipublikasikan.

Dalam menjalin hubungan dengan komunitas tersebut, komunitas merupakan salah satu publik yang akan dihadapi oleh PTPN V. Wujud penanganan komunitas ditanggung jawabkan oleh divisi HLKHI serta peran dari Divisi Umum yang mana dalam tugasnya selalu berhubungan dengan komunitas. Iriantara (2013: 24) menyatakan, "Komunitas adalah lingkup manusia yang melakukan hubungan antara satu dengan lainnya didasari dengan kesamaan dalam lokalitas dan memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang sama yang disebut Perry sebagai lokalitas atau struktur."

Dibagian divisi umum sendiri, ada tugas yang meliputi bidang pendidikan, dan sosial mencakup pada satu tim yakni PKBL. PKBL memiliki target sasaran mulai dari komunitas lokal hingga komunitas di luar perusahaan. PKBL yang selalu menempatkan komunitas pada target sasaran, mengartikan bahwa divisi Umum memiliki porsi yang lebih besar dalam hal berinteraksi dengan komunitas dibandingkan divisi HLKHI. Hal ini disebabkan oleh divisi HLKHI secara struktural diletakkan pada kesekertariatan perusahaan. Begitu pun untuk pola KKPA yang sudah menjadi bagian inti perusahaan dengan harapan dapat mensukseskan perusahaan dalam hal mencapai produksi hasil buah sawit mau pun karet.

5. *Identity Media*

Identity Media merupakan dan melalui website yang dijalankan oleh divisi IT melalui HLKHI yaitu https://www.ptpn5.com yang menjadi pendukung perusahaan untuk membentuk diri, dan sebagai citra positif bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan yakni stakeholders. Kemudian dalam pembentukan identitas perusahaan PTPN V menggunakan *House Journal* yaitu istilah yang mengacu pada pada pemeliharaan citra positif dan dukungan *public* yang menguntungkan.

House Journal ini diterbitkan untuk setiap publik yang berbeda, artinya penyebaran *House Journal* akan menjangkau seluruh *Stakeholders* dari PTPN V. Adapun komposisi informasi yang tertera dalam rubrik-rubrik *House Journal* ini adalah mengacu pada kepentingan perusahaan PTPN V itu sendiri, dengan komposisi presentasi yang menyesuaikan. Dalam data yang telah didapatkan penulis, pada tahun 2015-2016 70 % publikasi dalam *House Journal* terkait kegiatan PKBL.

6. *Lobbying*

Kegiatan *lobbying public relations* dituntut mempunyai keahlian persuasif dan negosiasi dengan perbagai pihak. PTPN V selaku perusahaan BUMN yang memiliki hubungan luas dengan berbagai lapisan elemen, seperti pemerintah daerah dalam hal mengurus hal-hal perizinan, dan birokrasi yang dilakukan oleh hampir semua lini perusahaan. Masing-masing divisi memiliki kepentingan-kepentingan yang harus berurusan dengan pemerintah daerah. Namun secara khusus terkait komunitas Sei Kencana menggunakan peran HLKHI hingga jajaran Direksi yang mampu mengambil kebijkan-kebijakan. Cara ini ditempuh

menggunakan upaya dalam menampilkan pesan dan informasi yang akan disampaikan komunikator pada instansi pemerintah. Melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan pemerintah daerah dijalankan juga dari berbagai lini perusahaan. penerapan ilmu *Lobbying* pada PTPN V memang tidak selamanya akan dikerjakan oleh *public relations* karena segala jenis urusan yang luas dan penanganan yang berbeda-beda.

Lebih jelasnya untuk *Job Description* HLKHI yang telah menjalankan kegiatan *public relations.* Dalam hal ini Tampak adanya hubungan yang sangat dekat antara HLKHI dengan tugas-tugas Direksi Perusahaan. Konteks *public relations* bekerja tetap bertitik fokus sebagai penghubung komunikasi dan segala persiapan terkait surat yang ditujukan kepada *stakeholders.* Di dalamnya terdapat komunitas dan pemerintah daerah. Adapun sebuah harapan untuk menciptakan serta mempertahankan reputasi Positif PTPN V yang berhubungan dengan komunitas dan pemerintah daerah.

7. Social Investment

Akuntabilitas dari praktisi *public relations* memperlihatkan keuntungan apa saja yang diberikan kepada perusahaan, baik secara struktural mau pun managerial dalam membangun hubungan dengan komunitas. Aksi ini dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Hal ini serupa dengan perlakuan PTPN V dalam membangun hubungan dengan komunitas yang melakukan pembangunan masjid, jembatan, atau pun fasilitas umum yang dapat digunakan oleh komunitas. PTPN V juga menyebutkan kegiatan ini dalam rangka membangun desa. Kegiatan ini didukung oleh tim PKBL dan managemen perusahaan yang bersedia memberikan bantuan desa. Sei Kencana sebagai salah satu desa di Sinamanenek yang berkembang menjadi sebuah Kecamatan. Hasil dari PTPN V yang mengulurkan tangan hingga semua akses sangat mudah. Baik berupa jalan atau pun akses kepada unit-unit yang memiliki pengaruh kepada desa.

PTPN V sendiri menempatkan divisi *public relations* pada satu kesatuan kerja dalam kesekertariatan perusahaan. Secara struktural kesekertariatan dalam perusahaan ini berada di bawah jajaran direksi, akan tetapi ia tidak berdiri sebagai satuan divisi yang memiliki kewenangan penuh. Artinya HLKHI akan tetap dilibatkan dengan perundingan-perundingan

perusahaan namun tetap saja keputusan akhir diotoritasi oleh jajaran direksi. HLKHI memiliki hak memutuskan sebuah masalah, hanya bila hal yang sifatnya mendesak sekali *(urgent)*. Divisi HLKHI di PTPN V diumpakan pintu untuk mengakses komunikasi antara perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Utamanya yaitu seperti media relations, *Government relations,* dan investor/stakeholder relation.

Menurut Dizier dan Broom, yang dikutip oleh Ruslan (2002:21), peranan *Public Relations* memiliki empat kategori dalam sebuah perusahaan diantaranya:

A. *Communications Fasilitator* (Fasilitator Komunikasi)

Communication Fasilitator dalam hal ini bertindak sebagai komunikator atau mediator yang berfungsi membantu manajemen segala harapan yang dijatuhkan komunitas terhadap perusahaan. Peran *public relations* sebagai penghubung, penerjemah, penengah, dan mediator antara perusahaan dengan eksternal perusahaan. Kedudukan dan fungsi *public relations* yang diterapkan di PTPN V dapat dilihat dari peranan *public relations* yang menempatkan fungsi *communication fasilitator*. Dikatakan *communication fasilitator* karena difungsikan memanagemen sebagai arus komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah, melalui tindakan protokoler bagi tamu resmi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kedinasan, dan lain-lain. *Communication fasilitator* merupakan tempat dimana berbagai tindakan seperti surat menyurat, pemberitaan, proposal, dan komunikasi di proses.

Keberadaan unit operasional perusahaan yang terbagi dalam beberapa wilayah kantor membuat struktur *communication fasilitator* ini dipusatkan di kantor pusat. Hal ini untuk memudahkan arus komunikasi dan tindakan komunikasi yang akan diimplementasikan dari banyaknya unit PTPN V. Sedangkan pada masing-masing unit operasi perusahaan memiliki perwakilan dan kesekretariatan yang merupakan perpanjangan tangan dari kesekretariatan pusat. Ada pun Staff bertugas di unit sedikit berbeda dengan tugas divisi HLKHI yang berada di kantor pusat. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab yang berbeda. Untuk divisi HLKHI yang berada di kantor pusat sepenuhnya bertanggung jawab untuk seluruh unit perkebunan sejumlah 14 perkebunan. Sedangkan Humas di unit akan bertanggung jawab pada satu wilayah dimana perusahaan itu beroperasi saja.

B. *Communication Technician* (Teknisi Komunikasi)

Peran *public relations* dalam *Communication Technician* menjadikannya sebagai *Journalist in resident*. Artinya kegiatan yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi, juga sebagai pelaksana pekerjaan teknis dari pimpinan di bidang komunikasi, dan menjalin relasi dengan eksternal perusahaan. Penempatan bagian *public relations* dalam kesekertariatan perusahaan pada HLKHI memfungsikan bagian ini sebagai *public officer*. Yaitu fungsi yang berperan dalam penerima tamu-tamu perusahaan yang berkunjung. Sedangkan menjadi bagian dengan fungsi memfilter, layaknya mengarahkan dan sebagai perpanjangan lidah jajaran-jajaran yang ada dalam perusahaan. Bagian ini dipandang sebagai fasilitas informasi kepada publik yang berkepentingan dengan perusahaan. atau juga fasilitas informasi kepada pemerintahan yang berkepentingan dengan perusahaan.

Analisis mengenai keberadaan *public relations* sebagai fungsi *communication technician* dikarenakan Staff *public relations* difungsikan sebagai media relations. Dimana tugasnya mengamati pemberitaan media, opini publik, mengelola kritik dan saran pengunjung, melakukan *press release*, pembaruan portal berita, dan teknisi yang mewakili perusahaan menyapaikan komunikasi kepada publik.

Pelaksanaan fungsi *public relations* tidak hanya dilakukan oleh Staff *public relations* pada keskretariatan semata. Karena pada dasarnya semua bagian struktural perusahaan memainkan peran *public relations*, namun dalam porsi fungsi dan kewenangan yang berbeda. Fungsi dan kewenangan tersebut sebagai pelaksana dari *public relations* di perusahaan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Strategis, yaitu segala hal fungsi pelaksanaan serta tanggung jawab yang berkenaan dengan arah dasar strategis perusahaan menyangkut visi dan misi PTPN V dalam jangka waktu panjang. Dalam hal ini fungsi *public relations* di PTPN V masih belum pada level maksimal, karena secara struktural terlihat masih berada pada kesekertariatan memang di bawah direktur langsung. Tetapi tetap dengan keterbatasan wewenang eksekusi dalam pengambilan keputusan. Fungsi *public relations* melekat pada proses managemen. Eksistensi *public*

relations sebagai pelembagaan kegiatan komunikasi dalam perusahaan justru untuk menunjang upaya managemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kegiatan *HLKHI* masih berada pada sifat yang berkaitan dengan komunikasi.

2. Fungsi taktis, yaitu sebuah fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana strategis. Fungsi ini berkaitan dengan suatu program atau tindakan menengah antara dua sampai tiga tahun. Dalam bagian ini *public relations* PTPN V berperan sebagai fasilitator dari direksi kepada tingkat di bawahnya. Namun dalam skala fungsi statis Staff *public relations* akan melakukan fungsi riset. Yaitu menganalisis, mendata, dan melaporkan terkait tugas atau program yang dilimpahkan untuk Staff *public relations*. Diantara tugas yang sifatnya taktis ini adalah penelitian opini publik yang terkait perusahaan di media cetak dan internet, melakukan peliputan, dokumentasi, evaluasi majalah atau media yang dikelola mau pun bekerja sama dengan perusahaan, dan mengadakan acara terkait media relations.

3. Fungsi operasional, yakni suatu tugas dan tanggung jawab mengenai program-program jangka pendek. Fungsi operasional merupakan turunan dari program taktis yang biasanya telah terpola sesuai kelender kegiatan PTPN V selaku perusahaan. Fungsi ini berupa pendampingan protokoler, peliputan dan pelaporan kepada atasan akan menjadi fungsi *public relations* PTPN V. Dalam operasionalisasinya, *public relations* membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan khalayak. Selain itu juga mencegah terjadinya rintangan psikologis pada pihak komunitas salah satunya menggunakan kegiatan yang banyak melibatkan komunitas pada bidang kesenian ataupun olahraga. HLKHI juga bertanggung jawab atas sifat harmonis yang di sini mengandung makna luas, yakni adanya saling mempercayai *(mutual confidence)*, iktikad baik *(goodwill)*, toleransi *(tolerance)*, membina saling pengertian *(mutual understanding)*, saling menghargai *(mutual appreciation)*, dan membangun citra baik *(good image)*.

Menyinggung pengertian di atas dalam pelaksanaan *public relations* dan Tim PKBL, komunitas lokal dipandang sebagai mitra untuk mencapai tujuan perusahaan yang mana *people* menjadi prioritas dibangunnya perusahaan. Dengan adanya *value* yang diberikan perusahaan kepada komunitas hingga timbul kepentingan dan nilai-nilai yang sama dengan PTPN V. Melalui fungsi *public relations* yang merupakan suatu fungsi managemen khusus

yang terencana, aktif, dan berkelanjutan antara PTPN V, Komunitas, dan *government.* Guna menjaga arah komunikasi dalam dua arah, pemahaman, mendefenisi, dan mengungkapkan tanggung jawab managemen ke komunitas, membantu menegemen tanggap, dan efektif dalam memanfaatkan perubahan, dan segala jenis kegiatan yang menggunakan riset dan teknik komunikasi yang relevan sebagai alat. HLKHI juga bekerja dalam memonitoring hubungan dengan pemerintah daerah melalui memanagemen masalah isu-isu dengan teknik komunikasi.

Melalui *community* dan *government relations* PTPN V beserta komunitas dan Pemerintah daerah memiliki harapan baru dengan efektif. Apabila ketiga elemen saling berkesinambungan dan selalu melakukan komunikasi dua arah yang seimbang. Ini akan menjadi efetif apabila proses komunikasi dua arah dapat tercapai dan terealisasikannya harapan dari ketiga elemen. Hingga terbangunnya hubungan harmonis antara PTPN V, komunitas, dan pemerintah daerah.

B. Analisis Implementasi *Community Relations* Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

I. *Community Relations* PT Perkebunan Nusantara (PTPN V)

Kegiatan *community relations* merupakan suatu kewajiban dan telah menjadi tugas penting dari Perusahaan PTPN V, sebagai wujud tanggung jaw ab sosial BUMN terhadap publiknya. Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PTPN V di unit Sei Kencana berupa keterlibatan pihak perusahaan secara langsung dalam upaya pengembangan masyarakat sekitar, dengan membentuk suatu program yang dibutuhkan oleh komunitas. Dalam pelaksanaan program-programnya melalui pola PKBL mengacu pada kegiatan yang terkelompok dalam kerangka lima pilar (*The Five Pilars)* yakni ada pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosbudagor (sosial, budaya, agama, dan olahraga), dan keamanan.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan, kegiatan *community relations* pada PTPN V tidak seperti penyebutan dalam teoritik. Melalui pemahaman yang berbeda namun memiliki jenis kegiatan dan tujuan yang hampir serupa. *Community relations* dipandang PTPN V sebagai *community development center* atau secara lebih mudahnya dikatakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Kegiatan *community relations* yang dilaksanakan oleh divisi Umum PKBL PTPN V terhadap komunitas yang berada di lingkungan unit Sei Kencana. Dengan tujuannya sebagai

pengembangan komunitas, memberikan pelatihan keterampilan, menunjang kepentingan pendidikan, dan kesehatan komunitas yang bersumber dari pemanfaatan laba perusahaan sebesar 4 % dari keuntungan perusahaan. Pada kesempatan lain PTPN V juga pernah melakukan bentuk kerjasama dengan sesama perusahaan BUMN, yaitu dengan menggunakan dana sinergi yaitu melalui kerja sama dengan Pertamina sebagai partner dan program yang dilaksanakan. Hal ini akan menggunakan nama Pertamina dan pelaksana tetap ada pada PTPN V beserta pembagian dana sebanyak 50:50. Menurut Iriantara (2004:75), "Kegiatan *community relations* pada PTPN V yang melibatkan instansi lain dengan asumsi bahwa instansi yang telah dipilih telah memilki kemampuan, sumber daya dan pengalaman dalam menjalankan kegiatan pengembangan masyarakat". Penarikan partner yang dilakukan PTPN V.

Dalam pelaksanaan *community relations* PTPN V menyesuaikan dengan peluang komunitas berlandaskan wilayah. Seperti memberdayakan masyarakat dengan ternak kambing, berkebun, dan hal-hal yang dapat mendukung di wilayah komunitas lainnya. PTPN V melihat adanya suatu peluang yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Sei Kencana dengan daerahnya yang luas dan memiliki kebebasan penuh untuk memelihara hewan ternak. Pelaksanaan ini salah satu cara dalam memberdayakan komunitas melalui potensi komunitas dan penyesuaian wilayah komunitas tinggal.

Uraian di atas memperlihatkan adanya suatu hubungan yang dibangun kepada komunitas yang menjadi publik eksternal PTPN V Sei Kencana. Menurut Uchana (2002:18), "Dalam membangun suatu hubungan yang efektif dan efisien dilakukan dengan menggunakan strategi komunikasi yang didalamnya ada seni-seni komunikasi yang diadaptasi oleh objek studi ilmu komunikasi". Ternyata memang PTPN V Sei Kencana selaku perusahaan yang berporos pada industri sawit dan karet yang memiliki suatu misi, selalu melibatkan komunitas untuk tujuan mengentaskan kemiskinan yang berkembang di komunitas. Dari hal itu menjadikan PTPN V selalu berkaitan dengan komunitasnya.

Menurut Iriantara (2013:79) Bentuk konsep *public relations, community relations* dapat dipandang berdasarkan dua pendekatan. Ternyata PTPN V juga mengalami dua cara pandangan dari sisi komunitas:

1. Perusahaan sebagai pemberi donasi

   Pandangan perusahaan sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *Phylantrophy*. Diwujudkan bagian dari aksi dan komunikasi dalam *public relations.* Artinya aksi komunikasi didasari oleh pengumpulan fakta dan perumusan masalah yang berasal dari komunitas, maka dari itu *public relations* akan melakukan sebuah perencanaan dalam bentuk aksi komunikasi. Aktivitas dari perusahaan selaku pemberi donasi ada pada program bina lingkungan (BL), karena konstribusi yang dilakukan PTPN V melalui pembangunan ekonomi sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, dan lingkungan. *Giving Back* dari perusahaan ke komunitas dilakukan dengan cara memperhatikan kepentingan komunitas atau eksternal perusahaan dengan menciptakan kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya melalui penyaluran dana bantuan, seperti Pendidikan, Kerohanian, Pengembangan sarana dan prasarana umum, bencana alam, Kesehatan, Pelestarian alam, Bansos untuk Pengentasan kemiskinan, dan Bansos untuk pendidikan dan pelatihan.

   Khusus pada perusahaan PTPN V dimana mereka menyandang sebagai perusahaan pemerintah tidak lepas dari peran perusahaan selaku pemberi Donasi. PTPN V juga melakukan peran ini melalui anggaran dana CSR perusahaan perkebunan yang disalurkan melalui dua program, yakni program PK dan BL. Mengenai BL akan disesuaikan pada laba bersih perusahaan yang menjadi patokan setiap tahunnya. Namun pihak PTPN V secara keseluruhan artinya tidak untuk khusus unit Sei Kencana saja. Program BL dimulai dari tahun 2000 hingga tahun 2014 jika diakumulasikan anggarannya mencapai Rp. 2.264.448.330. Ada pun penyalurannya dalam bentuk uang, dan ada juga dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Memposisikan Komunitas sebagai Mitra

   Perusahan yang menetapkan komunitas sebagai mitra artinya hal ini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi perusahaan. Konsep komunitas kini tidak lagi sebatas perkumpulan orang yang sama-sama hidup dalam satu wilayah yang sama dengan perusahaan. Tetapi komunitas akan diposisikan selaku mitra perusahaan. *Community relations* dalam hal ini PTPN V menggunakannya pada seluruh unit perkebunan berdasarkan pola KKPA dan juga melalui program Kemitraan (PK), yang menjadikan komunitas terlibat dengan perusahaan. Dengan menggunakan kedua

program ini PTPN V berupaya untuk meningkatankan partisipasi dan posisi perusahaan di dalam sebuah komunitas, melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan komunitas.

Untuk PK kegiatan pengembangan komunitas yang telah diselenggarakan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses komunitas, guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. PK dilakukan dengan dirangkum dalam beberapa sektor yakni Sektor Usaha indutri, Sektor Usaha Perdagangan, Sektor Usaha Pertanian, Sektor Usaha Perkebunan, Sektor Usaha Perikanan, Sektor Usaha Jasa, dan Sektor Usaha Perkebunan. Hal ini juga dapat ditemui pada gambar 3.1 sebagai bukti adanya kegiatan tersebut. Sedangkan pada pola KKPA akan terlihatnya interaksi langsung dimana komunitas bekerja untuk perusahaan. Kemitraan dengan komposisi luas areal dan jumlah petani meliputi aspek pemasaran hasil produksi, fasilitator pembiayaan pembangunan kebun, pembinaan teknis, fasilitator perencanaan dana peremajaan iuran dana peremajaan tanaman perkebunan, dan sebagainya. Mitra yang telah diciptakan oleh PTPN V mengalami perubahan bertahap. Komunitas KKPA mendapatkan pembinaan melalui orang-orang ahli dibidangnya dan kemudian mitra akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kualitas komunitas bekerja.

Bentuk konsep *public relations* dalam *community relations* yang meletakkan perusahaan berperan sebagai pemberi donasi dan menjadikan komunitas sebagai mitra dari data dan fakta yang diperoleh dari tahap analisa situasi tersebut, dapat diketahui bahwasanya PTPN V masih berada pada pemahaman *corporate social responbility* (CSR). Yang mana dalam CSR terdapat penekanan pada terbentuknya ruang komunikasi dua arah yakni perusahaan dengan komunitas yang dijalankan melalui program bantuan saja. *Community relations* merupakan satu bagian dari CSR yang berfungsi membantu perusahaan memahami komunitas dan permasalahannya, melalui cara menciptakan dialog yang seimbang antara perusahaan dengan komunitas, bukan merupakan suatu usaha membentuk hubungan komunitas.

Berdasarkan data pihak PTPN V belum terlihat adanya suatu program kewajiban moral dan sosial yang berusaha untuk memahami komunitas dan permasalahannya yang diterapkan untuk suatu kegiatan *community relations.* Yang terjadinya aktifitas atau andil untuk ikut secara aktif antara internal PTPN V dengan Komunitas Sei Kencana. Namun,

komunikasi lazimnya suatu program bantuan yang akan diberikan PTPN V kepada komunitas. Adapun letak fokus tidak jauh dari seputar dunia perkebunan.

Hal ini diperkuat dengan pemahaman *community relations* dalam Iriantara (2004:10) yang mendefinisikan *community relations* berperan dalam meningkatkan keterlibatan pihak internal organisasi kepada komunitas sebagai bentuk jalan keluar dalam menghadapi permasalahan di kedua belah pihak yakni organisasi dengan komunitasnya. Sedangkan pada data PTPN V melakukan komunikasi dengan komunitas masih pada seputar *Philantropy.*

Segmentasi komunitas juga memerlukan analisis karena total kahalayak begitu luas. Masing-masing komunitas yang telah teridentifikasi akan memudahkan kerja perusahaan untuk mengefesiensikan program yang akan diterapkan. Kemudian, analisis ini juga berguna dalam membangun tingkat keterampilan komunitas yang belum terekspos. Hal ini sejalan dengan paendapat Grunig dalam Morrisan (2008: 161-162), "Bahwa dia mengatakan untuk membedakan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat dikategorisasikan dalam empat jenis". Pembagian ini juga dapat menjadi pengukuran tingkat kewaspadaan terhadap komunitas dimana beragam sifat komunitas akan berbeda-beda. Ada pun empat jenis tersebut diulas sebagai berikut:

1. Bukan Khalayak

   Tingkat pengaruh khalayak kepada perusahaan sangat rendah, juga sebaliknya perusahaan ke khalayak sangat rendah pengaruhnya kepada kehidupan mereka. Di unit Sei Kencana dengan komunitasnya tidak dalam jenis hubungan yang seperti ini. Karena adanya kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang sangat membuka diri pada kepentingan komunitas dan segala perangkat desa. *Non Publics* dalam konteks yang demikian tidak terdeteksi, disebabkan masih adanya interaksi yang diberikan perusahaan dengan komunitas, dan juga sebaliknya.
2. Khalayak Tersembunyi

   Khalayak yang memiliki kesadaran rendah atas keterkaitan yang khalayak miliki dengan perusahaan. Khalayak jenis ini di unit Sei Kencana dengan kasat mata khalayak sadar akan kehadiran perusahaan PTPN V. Realitas dari komunitas jenis ini hampir jauh dari ketidakperdulian (*uncommitted)* komunitas. Komunitas tidak menempatkan perusahaan sebagai faktor penting dalam kehidupan komunitas di unit Sei Kencana. Dengan melibatkan perusahaan hanya sebatas rangkaian kegiatan yang berbau olahraga, keagamaan, dan hal lainnya.

Salah satu penyebabnya kurangnya kesadaran komunitas tentang bagaiamana perusahaan bisa berperan dan menjadi faktor penting untuk kesejahteraannya.

3. Khalayak Sadar

   Kemampuan khalayak ditingkat kesadaran yang tinggi dari keberadaan perusahaan. kesadaran yang tinggi menimbulkan beberapa permasalahan yang membawa pengaruh akan masalah tersebut. Tingkat ini khalayak belum melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya hanya sebatas kesadaran yang tinggi. Level ini sudah terlihat pada komunitas Sei Kencana, pasalnya beberapa komunitas sangat paham bagaimana perusahaan seharusnya memperlakukan dirinya. Tetapi di unit Sei Kencana, komunitas tidak menggalakkan apresiasi yang menjurus pada hal-hal yang sekiranya mampu menunjang kehidupan komunitas. Komunitas di unit Sei kencana membiarkan komunitas luar masuk dan mempengaruhi keputusan komunitas, yang mengakibatkan penolakan kepada perusahaan. Artinya komunitas di kendalikan oleh segelintir khalayak luar.

4. Khalayak Aktif

   Khalayak yang mempunyai kesadaran penuh tentang keterkaitan hubungan yang ada antara komunitas dengan perusahaan. dan didukung oleh perusahaan yang dalam operasionalnya menjadikan komunitas menjadi bagian perusahaan. Jenis ini juga mengalami komunikasi dan interaksi komunitas satu dengan yang lain, bisa saja dalam membicarakan kendala dari perkembangan desanya ataupun permasalahan dari perusahaan yang melibatan dua elemen ini. Memang ini ada pada Sei Kencana, beberapa khalayak aktif yang memberikan sumbangsih kepada perusahaan dengan caranya bekerja sebagai karyawan KKPA dalam mengikuti prosedur untuk memenuhi target produksi perusahaan dan hal lainnya. Beberapa kali perusahaan juga melakukan interaksi dengan cara informal atau pun bermusyawarah dengan komunitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan bisa membantu komunitas, dan juga perusahaan mensosialisasikan melalui Humas unit apa-apa saja yang dapat dilakukan perusahaan kepada komunitas.

Dalam melangsungkan tindakan *community relations* yang berkenaan dengan komunitas, akan perlunya strategi pendekatan untuk memasuki wilayah komunitas. Dalam hal ini kata Johnston dan Zawawi (2004: 299:302) ada lima point cara pendekatan. Namun

berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, *community relations* yang telah dilangsungkan oleh PTPN V khususnya di unit Sei Kencana melalui pendekatan-pendekatan terhadap komunitas dengan cara sebagai berikut:

1. *Consultation* (Konsultasi)

   Konsultasi dicapai melalui pengembangan hubungan dua arah yang terjadi antara PTPN V dan Sei Kencana dengan komunitas. PTPN V mengharuskan keterlibatan perangkat desa wilayah di unit Sei Kencana sebagai perwakilan penyaluran aspirasi dari komunitas. Setelah akan membawa harapan bagi PTPN V agar mampu membuat komunitas berpartisipasi dalam proses program KKPA maupun PKBL.

2. *Feeling the gups* (Merasakan kesenjangan)

   Sebuah rumor memiliki kemudahan dan kecepatan penyebarannya melalui satu mulut ke mulut lainnya. Rumor yang terjadi pada lingkup komunitas PTPN V rentan terjadi dengan terlibatnya beberapa provokator dari pihak luar. Maka sebab itu, PTPN V gencar untuk memberikan banyak informasi yang ditujukan kepada komunitas untuk mengklarifikasi segala jenis rumor yang berdampak pada citra PTPN V. Meminimalisir rumor ini dilakukan PTPN V dengan peran serta komunitas yang PRO dengan PTPN V, dan memiliki pengaruh besar di dalam komunitas itu sendiri. Namun ternyata pesan yang dikemas oleh Humas PTPN V belum menjadi efektif, dikarenakan sangat minimnya media yang masuk dan keterbatasan komunitas untuk mengetahui keadaan perusahaan.

3. *Scanning the environment* (Membaca Lingkungan)

   Membaca lingkungan adalah cara bagaimana PTPN V mengenali komunitasnya. Membaca lingkungan dapat dilakukan melalui Humas unit dengan cara bermusyawarah, tukar pikiran dan juga melibatkan pihak perangkat desa secara langsung, cara ini digunakan PTPN V berdasarkan program PKBL. Kemitraan yang dilangsungkan membutuhkan *scanning* terhadap lingkungan yang akan di jadikan mitra. Misalnya terkait *strength* dan *weaknesses* yang dimiliki komunitas. Bagaimana situasi ekonomi, budaya, kekuatan politik dan hal lainnya yang sangat membantu PTPN V dalam menentukan sikap dan pengambil keputusan akan program yang sesuai dengan komunitas di unit Sei Kencana.

4. *Collaboration With Company Groups* (Kolaborasi dengan kelompok-kelompok komunitas)

   Kolaborasi dengan kelompok-kelompok komunitas adanya kagiatan berupa kerja sama yang baik antara perusahaan dengan komunitasnya. Cara ini adalah adanya sentuhan langsung dari komunitas untuk kesuksesan perusahaan secara operasional. Pada PTPN V cara ini diterapkan dengan komunitas yang dianggap sebagai mitra perusahaan. Mitra diartikan sebagai bagian penting dalam mensukseskan operasional perusahaan. Seperti halnya pada Program KKPA yang mana perusahaan mengantungkan pencapaian produksi buah sawit melalui komunitas yang bergabung di KKPA. KKPA memang sekelompok komunitas yang diciptakan melalui peraturan pemerintah. Salah satu bentuk pengentasan kemiskinan dengan cara adanya program KKPA dimana pemerintah penyedia lahan dan komunitas sebagai pengelola. Program ini hanya dikhususkan untuk komunitas lokal saja. Begitu pula dengan program kemitraan suatu aktivitas mandiri untuk komunitas. Melalui tangan panjang perusahaan berbentuk bantuan dana sehingga komunitas mampu mengembangkan usahanya hingga level nasional.

   Kolaborasi dengan komunitas hanya ditempuh melalui KKPA, sedangkan komunitas pada umumnya masing-masing memiliki perbedaan *skill* dan hal-hal yang menunjang, oleh karena itu PTPN V tidak memaksimalkan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat memupuk atau membangun hubungan PTPN V dengan komunitas. Maka salah satu kontra dari komunitas, tidak kunjung teratasi.

5. *Negotiation*

   Cara ini terbilang cukup familiar khususnya di komunitas PTPN V yang berada di unit Sei Kencana. Negosisasi yang berlangsung antara perusahaan dengan komunitas terkait penuntutan lahan yang menjadi konflik mengaharuskan penanganan ekstra diluar tanggung jawab sosial perusahaan. Insiden ini melibatkan pemerintah daerah dalam proses negosiasi antara perusahaan dengan komunitasnya. Hal lainnya negosiasi juga dilaksanakan PTPN V ketika penentuan program yang akan dijalankan pada komunitas dengan harapan dapat memberdayakan masyarakat, dan meminimalisir komunitas yang berekonomi rendah.

Berkaitan dengan menjalin hubungan dengan komunitas yang diterapkan oleh PTPN V tidak lagi hanya sekedar membagi-bagikan hadiah dengan percuma, namun segala jenis usaha yang berbentuk sistematis pada ukuran perbaikan mutu kehidupan komunitas sekitar wilayah Sei Kencana. Untuk itu PTPN V melakukan berbagai upaya dengan memonitoring dengan jangka waktu per tiga bulan untuk mengetahui perkemabngan dari komunitas hingga pemantauan dalam jangka waktu tahunan. Ini agar efektivitas *community relations* berjalan sesuai dengan harapan PTPN V dan komunitasnya.

Dengan kelima strategi pendekatan dengan komunitas pada data 4 didukung bahwasanya, kini *philantropy* bukan menjadi prioritas komunitas dalam mengharapkan kehadiran perusahaan. *community relations* dianggap sebagai program tersendiri yang diluar kewajiban perusahaan dengan komunitas sekitar perusahaannya. Artinya perusahaan dituntut untuk menampilkan sisi sebagai suatu lembaga/instansi yang akan bersama-sama dengan komunitas berusaha dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh komunitas untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

Berangkat dari berbagai strategi pendekatan dan tujuan utama diadakannya kegiatan *community relations* yang telah diuraikan tersebut, beberapa program *community relations* yang sudah direalisasikan oleh pihak PTPN V yakni, pola PKBL dan Pola KKPA. Apabila dijabarkan pada pola PKBL adanya kegiatan seperti untuk PK ada pemberian pinjaman khusus bagi usaha kecil, menengah yang sifatnya pinjaman tambahan. Di dalamnya ada terbagi beberapa sektor yaitu, sektor usaha industri, sektor usaha perdagangan, sektor usaha pertanian, sektor usaha perkebunan, sektor usaha perikanan, sektor usaha jasa, dan sektor usaha peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 sebelumnya. Kemudian pada BL ada beberapa kegiatan seperti, bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan, dan bantuan lainnya. Kegiatan ini juga dapat dilihat melalui gambar 3.6 sebelumnya.

Dalam analisa kegiatan-kegiatan PTPN V yang berinisiatif melalui program pemberian konstribusi langsung terhadap kegiatan amal/ kepedulian sosial dalam bina lingkungan yang akan berbentuk donasi, merupakan kewajiban dari setiap perusahaan. Sedangkan *community relations* dipahami secara lebih luas dengan kompleksitas permasalahan komunitas, bukan hanya berkaitan dengan hal-hal *philantropy* saja. Perluasan

aktivitas yang menimbulkan proses interaksi antara internal perusahaan dengan eksternal perusahaan, memerlukan jaringan yang lebih intens lagi. Intensi disini diartikan pada pendekatan-pendekatan komunitas yang telah penulis bahas di paragraf sebelumnya.

PTPN V pada data 7 memaparkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunitas yang telah diberikan di Sei-Kencana selama ini. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan memang mensejahterakan masyarakat yaitu terkait sarana dan prasarana, tapi upaya dalam menumbuhkan rasa bangga komunitas terhadap PTPN V tidak berjalan sesuai konseptual *community relations.* Sehingga komunitas mengalami kesulitan untuk menjadi komunitas mandiri dan tidak hanya memandang perusahaan sebagai pemberi donasi.

Sedangkan untuk pola KKPA merujuk pada pemberdayaan komunitas sekaligus mitra untuk bekerja sama dengan PTPN V. Maksudnya komunitas akan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan lahan yang telah disediakan oleh PTPN V. Pola ini sudah menghasilkan orang-orang yang berhasil dengan mampu memiliki lahan sawit sendiri. Ini sesuai dengan harapan perusahaan yang bermisikan pemerangan kemiskinan.

Basis KKPA melahirkan orang-orang yang berhasil pada dunia perkebunannya, tentunya melalui arahan dan difasilitasi oleh PTPN V. Namun jika dihubungkan dengan salah satu data di lapangan, adanya pernyataan dari komunitas yang menyayangkan tidak secara menyeluruh kegiatan ini diterima oleh komunitas. Namun pada lain sisi, PTPN V mengungkapkan rendahnya ketertarikan komunitas untuk bergabung dengan PTPN V sebagai Petani Binaan dalam KKPA. Maka oleh sebab itu perlunya mengubah pola penanganan khusus Komunitas Sei Kencana, karena tidak didukungnya hubungan harmonis antara perusahaan dengan komunitas dalam jangka waktu yang lama terkait konflik beberapa waktu yang lalu.

Esensi dari fungsi *community relations* dalam operasinalisasi perusahaan di PTPN V inheren (erat hubungannya). Secara historis pembentukan PTPN V ini memang bertugas untuk mengelola dan mengangkat status ekonomi komunitas yang berada dalam wilayah PTPN V beroperasional. Disamping pada sebuah fungsi Konservatif atas proritas laba perusahaan dalam operasionalisasi di Sei kencana tetap terdapat keterlibatan komunitas.

Tugas dari seksi kemitraan masyarakat lebih pada mengembangkan program-program kemitraan sebagai wujud dukungan industri UMKM, selain itu juga berdampak pada pengemabangan perekonomian di Unit Sei Kencana dan sekitarnya. Prinsip yang dianut

di kemitraan ini adalah sebagai mitra usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Namun program kemitraan ini tidak hanya berkembang berdasarkan perolehan keuntungan semata, melainkan untuk membina dan mengembangkan para pelaku perkebunan dan ketujuh sektor kemitraan agar terciptanya bentuk usaha yang proporsional, turut mensejahterakan komunitas.

Jika merujuk pada teoritis, *community relations* sudah seharusnya dipandang sebagai fungsi dari *public relations.* Secara tujuan, keduanya memiliki maksud dalam menjalin, membina dan mengembangkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunitasnya. *Community relations* adalah fungsi dari *public relations* berupa partisipasi yang sudah terencana, aktif, dan berkelanjutan. Di dalamnya komunitas sebagai pemelihara serta meningkatkan lingkungan demi kepentingan semua pihak, baik dari sisi komunitas mau pun perusahaan.

Pada PTPN V data 14 teridentifikasi adanya kegiatan pendekatan personal dengan memanfaatkan suku budaya, hal ini seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan dan analisa PTPN V untuk membangun hubungan dengan komunitas. Karena hakekatnya proses dalam *public relations* yang tidak berjalan sesuai dengan analisa PTPN V, maka hal ini berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah bagaimana taktik dari menyentuh lapisan kemanusiaan komunitas.

Membuat suatu kegiatan seperti *community relations* yang baik memerlukan tahapan atau proses yang matang. Kegiatan apapun jenisnya jika tidak memiliki konsep matang tentu akan membawa peluang kegagalan yang besar. Ini sejalan dengan pemikiran Iriantara (2004:80) dengan mengaplikasikan tahapan-tahapan yang ada di dalam proses *Public Relations* yang sifatnya siklis. Maka program *community relations* PTPN V akan berjalan dengan efektif dengan tahapan pola PKBL seperti berikut:

1) Pengumpulan fakta (*Fact Finding)*

   Fact Finding suatu permasalahan yang kompleks yang sifatnya mengandung unsur sosial. Penelusuran ini dilakukan dengan banyak cara bisa melalui terjung ke lapangan mengunjungi komunitas, atau bisa saja laporan LSM atau segala hal yang menyebar di tengah komunitas. Dalam hal ini tugas dilakukan dengan campur tangan setiap lini dari perusahaan. Hanya saja peran ini condong terlihat pada Humas dan Divisi Umum. Keresahan komunitas yang berbau sosial ini berproses, mulai dari struktur yang berada di unit hingga manager struktur

tertinggi di unit akan menyampaikan kepada HLKHI atau direksi terkait permasalahan komunitas. Salah satunya melalui pola PKBL menjadi salah satu solusi mengeluarkan komunitas dari permasalahan sosial. Terutama dengan permasalahan ekonomi dengan tingkat penganguran yang tinggi, sumber daya manusia yang tidak berketrampilan, rendahnya sikap mental kewirausahaan atau tingkat produktivitas individu yang rendah. PTPN V dengan mandat BUMN telah menjalankan program ini pada tahun 1960 an hingga saat ini dengan pola yang terus berkembang.

Sebelum diadakannya program PKBL PTPN V merancang strategi untuk pengumpulan fakta bagi kedua kata yakni PK dan BL. Untuk PK PTPN V melakukan pengumpulan fakta, ini disebabkan akan sistem PK yang berupa pengajuan proposal dari komunitasnya sendiri. Untuk BL PTPN V Sei Kencana mengumpulkan fakta melalui obrolan komunitas yang sampai ke telinga perusahaan, juga keluhan langsung dari komunitas. Fakta-fakta tersebut akan sampai kepada humas Unit yang kemudian humas unit akan menyampaikan kepada manager struktur teratas di unit lalu manager akan menyampaikannya kepada *public relations* kantor pusat untuk di proses kepada divisi Umum PKBL.

Tim PKBL juga merangkap kegiatan komunikasi dalam suatu perusahaan secara timbal balik *(two way traffic reciprocal communication)*. Hal ini berarti bahwa pada jalur pertama komunikasi berbentuk penyebaran informasi dari perusahaan kepada komunitas. Pada jalur kedua komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian tanggapan atau opini publik *(public opinion)* dari komunitas ke perusahaan tersebut. Melalui komunikasi dua arah tersebut, pihak perusahaan harus selalu mengkaji, apakah informasi yang disebarkan kepada publiknya itu diterima, dipahami dan diaplikasikan atau tidak. Evaluasi pada bagian akhir pada program PKBL atau KKPA juga dilakukan sebagai bahan perencanaan kegiatan ke depannya.

2) Perumusan Masalah

Masalah merupakan kesenjangan yang terjadi tentang apa yang idharapkan dan apa yang dialami. Perumusn masalah akan berguna mengidentifikasi ketepatan program sesuai dengan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Penemuan fakta-fakta, Tim PKBL akan merumuskan masalah yang ada. Ternyata masih ada segelintir komunitas yang belum mendapatkan penanganan dari program PKBL. Misalnya dari fakta diketahui salah satu masalah yang

menjadi hambatan komunitas dengan rendahnya keterampilan komunitas sehingga tidak mampunya komunitas bersaing di pasar kerja bahkan menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri juga tidak mampu. Lalu ditemukannya karakteristik beberapa komunitas yang enggan merintis usahanya dari bawah, ketidaksabaran komunitas untuk melipatgandakan ternak kambing yang sudah di berikan perusahaan. Maka PTPN V merumuskan masalah: Rendahnya keterampilan komunitas dalam pertenakan sekitar Sei Kencana.

Berangkat dari rumusan masalah maka sosialisasi dijalankan oleh tim PKBL secara menyeluruh bisa melalu koordinasi dengan perangkat desa, dan dengan menggunakan media untuk menyalurkan informasi kepada komunitas yang belum mengetahui program PTPN V.

3) Perencanaan dan pemograman (*Planning*)

Bagian ini berguna mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan untuk solusi dibuatnya lapangan kerja. Dalam membuat rencana berdasarkan pengumpulan fakta terkait permasalahan komunitas. Membuat rencana artinya perusahaan memberikan harapan untuk komunitas meski untuk dikemudian hari. Rencana dapat dipahami sebagai sebuah perkiraan yang didasari oleh informasi dan pengumpulan fakta. Untuk pelaksanaan PKBL dalam perencanaan pihak-pihak yang terlibat dikatakan adanya campur tangan melalui Divisi Umum Tim PKBL akan mengambil peran perencanaan program dari hasil survey, kemudian Direksi selaku pembina akan menerima pengajuan dari staff PKBL dan menimbang kelayakan bantuan. Selanjutnya *public relations* mengambil perannya di kantor pusat sebagai penghubung ke komunitas mau pun ke bagian lainnya. Pihak lainnya yang terlibat termasuk dalam mitra perusahaan selaku narasumber dari dinas-dinas pemerintah daerah maupun orang-orang yang memiliki kemampuan di lingkup program yang telah dilakukan PTPN V.

Sebelum pelaksanaannya akan dilakukan, Tim PKBL akan melakukan aktivitas survey dahulu untuk wilayah atau area yang akan diterjunkannya program PKBL. Dalam hal ini, PTPN V tmelakukan kerjasama dengan aparat desa seperti kecamatan dan kelurahan. Bahkan Tim PKBL juga melakukan survey langsung untuk komunitas dengan alasan meminimalisir keterbatasan dana PTPN V. Melalui sistem ring tim akan lebih selektif untuk memilih komunitas yang lebih layak menerima PK maupun BL.

Melalui perencanaan yang terjadi, strategi yang dipakai oleh PTPN V untuk menumbuhkan kesadaran komunitas dengan memberikan solusi dengan bahasa yang ringan dilengkapi *step by step* untuk pembukuan ataupun hal yang mampu mengedukasi komunitas. Materi disampaikan dengan penjelasan langsung dari ahlinya bahkan PTPN V bekerjasama dengan mahasiswa dari UNRI sebagai partner untuk peternakan dan Dokter yang menjelaskan tentang bagaimana beternak yang benar.

Dalam pemogramannya tentu adanya konsekuensi dari penyaluran program kemitraan yang berurusan dengan dana, yaitu kemacetan dari komunitas. Dalam hal ini dapat dijumpai pada Gambar 3.2 tentang kemacetan dana PK PTPN V. PTPN V akan bekerja sama dengan praktisi Hukum untuk memberikan stimuli kewaspadaan komunitas dan memberikan *warning* apabila komunitas tidak melakukan pelunasan.

4) Aksi dan Komunikasi (*Action and communicating)*

Dari ketiga tahapan diatas setelah di realisasikan seluruhnya, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah pelaksanaan PKBL itu, dan baik sosualisasinya. Surveynya akan dilakukan oleh tim PKBL yang telah terbentuk dalam *job desk* masing-masing. Artinya tim akan terbagi menjadi beberapa untuk melakukan survey di beda tempat.

Khusus tim pelaksana sosialisasi akan dilengkapi oleh orang-orang yang dianggap tim PKBL mampu menciptakan kesadaran seperti pejabat pemerintah daerah dari dinas perkebunan, dinas peternakan, bekerjasama dengan koperasi dan perangkat desa. Dalam pelaksanaan ini juga dapat disertakan pencairan dana dari pihak PTPN V untuk komunitas yang telah dipilih Tim PKBL melalui penyaringan yang disetujui oleh Direksi. Untuk waktu sifatnya *avaible* tergantung dari koordinasi orang-orang yang terlibat.

Sosialisasi yang dilakukan PTPN V menggunakan penunjang yang mampu mensukseskan penyampaian informasi kepada msayarakat. Salah satunya dengan menggunakan peralatan infocus, Laptop, Materi sosialisasi, Konsumsi dan segala jenis perlengkapan perkebunan untuk komunitas. Kemudian PTPN V membuat konsep sosialisai berupa berita acara, pencapaian mitra PK yang berhasil dan BL yang membantu mengentaskan kemiskinan komunitas melalui web dan beberapa kerja sama dengan media cetak dan media elektronik Riau.

Semua bentuk sosialisasi PKBL disini secara jelas disamapaikan dengan informasi kepada komunitas agar komunitas tahu dan memahami fungsi program PKBL ini. Mengapa konsep sosialisasi dibuat dengan informasi yang detail dikarenakan suatu tujuan program PKBL ini adalah mengurangi angka pengangguran, pengentasan kemiskinan, tersalurnya kemampuan komunitas melalui tujuh sektor yang disediakan perusahaan, membantu biaya anak sekolah yang berpresatasi dengan penyaluran dana beasiswa, terbantunya kemajuan desa komunitas dan hal lainnya.

5) Evaluasi

Evaluasi adalah suatu keharusan pada setiap akhir program yang telah berlangsung. Evaluasi dapat digunakan untuk elihat tingkat efektivitas dan efesiensi program PKBL berjalan. Lalu PTPN V dapat memutuskan untuk keberlanjutan program apakah ini akan menjadi jangka panjang atau harus diberhentikan.

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor penting yang disorot oleh hampir media massa lokal maupun nasional. Ini di sebabkan akan status PTPN V yang berjalan dibawah naungan BUMN. Mengkomunikasikan kepada komunitas yang rata-rata masyarakat minim pendidikan adalah tantangan bagi PTPN V untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Salah satunya PTPN V manrik salah satu komunitas yang memiliki wawasan bahasa yang luas sehingga kendala tadi mampu dihadapi oleh perusahaan.

Faktor yang menjadi kendala juga bersumber dari dana yang sifatnya bergulir macet di komunitas mitra perusahaan. Adanya faktor pendukung dan kendala kegiatan pola PKBL ini sebagai salah satu kegiatan *Community relations,* ada respon dari komunitas baik positif maupun negatif, namun mampu di cover oleh perusahaan. Alasan komunitas yang masih merasa keresahan akan program yang menurut mereka memiliki proses lama untuk kehidupan mereka, maka dari itu di masa lalu adanya aksi unjuk rasa dan itupun masih menuntut lahan yang mereka akui sebagai milik nenekmoyang komunitas.

Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak PTPN V tim PKBL dengan pembuatan laporan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan laporan keuangan yang telah digunakan untuk keperluan PKBL. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi pertiap tahunnya.

C. Analisis Implementasi *Government Relations* pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) selaku perusahaan perkebunan industri sawit dan karet yang berada dibawah naungan BUMN sangat menyadari perubahan sosial yang akan terjadi. PTPN V masih menjadi perusahaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah perkumpulan komunitas hingga memerlukan adaptasi dari komunitasnya. Adaptasi komunitas merujuk pada sebuah bentuk dukungan terhadap eksistensi dan kegiatan perusahaan dengan suasana perusahaan yang nyaman.

Kegiatan *government relation* PTPN V dapat di jelaskan sebagai salah satu realisasi tanggung jawab sosial yang terdapat pada visi dan misi PTPN V. Sedangkan citra positif akan menjadi bonus bagi perusahaan di mata pemangku kepentingan seperti di beberapa lapisan jajaran pemerintah. Untuk PTPN V akan bersinggungan dengan beberapa jenis pemerintah yang diantaranya kepala desa, aparat desa, pemerintah daerah, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas pertanian hingga struktural teratas yaitu kementerian BUMN. Dalam upaya hubungan yang dibangun terkait komunitas Sei Kencana, pemerintah daerah menjadi ketepatan PTPN V untuk melakukan government relations. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk perkara izin dan hal yang berkaitan dengan masyarakatnya. Begitu pula dengan PTPN V yang beroperasi pada daerah Kampar dimana Sei Kencana terdapat pada wilayah tersebut. Upaya membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah memerlukan peran serta *Public Relations* dan seluruh lini perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan dengan pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menjalin hubungan baik pada PTPN V tidak dapat dikatakan sebagai hubungan yang menyeluruh disetiap divisi pemerintahannya. Ini disebabkan oleh keterbatasan yang diciptakan oleh kedua elemen untuk tidak melewati batas yang sudah di terapkan. Namun memang *public relatios* sering terbentur dengan urusan yang berunsur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pengertian *public relations* menurut Broom, dkk., (2009:6) yaitu, "*Public relations* adalah fungsi managemen yang membangun mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publiknya yang turut mempengaruhi dari kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut".

Dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dengan korelasi perusahaan, komunitas, dan pemerintah yang berdampak pada citra positif perusahaan, diperlukannya tahapan strategi untuk menciptakan satu pemikiran dari ketiga elemen ini. Namun pada

PTPN V tidak dibentuknya tim khusus dalam penangan *government relations* yang segala sesuatunya ditumpahkan kepada tugas *public relations.* Pada PTPN V kegiatan *government relations* juga dapat dilakukan oleh divisi diluar *public relations.* Bahkan managemen puncak melakukan suatu hubungan baik dengan menejemen puncak pemerintah. Ini akan berbeda dengan jenis urusan apa yang akan dilakukan ke pemerintahan daerah.

Government relations dapat mempengaruhi PTPN V pada level lokal, nasional, maupun internasional. Untuk level pemerintah daerah tentunya berpengaruh dengan level lokal, seperti yang penulis temukan dalam data bahwasanya pernyataan dari pihak pemerintah menyatakan adanya hubungan yang tidak baik dengan PTPN V. Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan dinas yang terkait pada pengawasan dan pembinaan perkebunan, yang kerap melakukan hubungan dalam hal legalitas dan perizinan perkebunan.

Dinas perkebunan selaku bagian dari pemerintah daerah menambahkan pada data 46 pada proses penanganan problem yang kerap kali menurunkan Staff Humas. Staff Humas pada struktural masih pada kesekretariatan perusahaan, yang mana Humas tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Sehingga Pemerintah Daerah merasakan ketidak efesiennya penanganan yang ditanggapi oleh PTPN V. Hal ini berimbas pada ketidaknyamanan pemerintah daerah yang mengharapkan kedatangan dari pimpinan, sehingga permasalahan dapat di selesaikan dengan keputusan akhir oleh yang memiliki kewenangan.

Dalam upaya mendapatkan pandangan positif dari pemerintah daerah PTPN V ketika konflik dengan masyarakatnya, *public relations* PTPN V melakukan kecepatan, ketepatan dalam merespons secara cepat terkait keluhan yang sudah dilemparkan kepada perusahaan dari komunitas. *Public relations* selalu membuka saluran komunikasi kepada pemerintahan sebagai tahap awal dalam mengatasi perselisihan paham yang bersumber dari sisi komunitas.

Namun, dalam data menunjukan bahwa hubungan PTPN V dengan pemerintah daerah dibangun berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mendesak. Artinya, harapan yang datang dari pemerintah agar PTPN V lebih tranparasi dan terbuka lagi untuk kepentingan-kepentingan pemerintahan. Pemerintahan daerah menunjukkan keinginan pada respon PTPN V akan sama ketika PTPN V tengah dihadapi permasalahan dengan masyarakatnya, yang melibatkan pemerintah daerah dengan kecepatan respon yang tidak

memerlukan pengulangan permintaan atau pengiriman surat permohonan dari pemerintah daerah.

Pada dasarnya pemerintah daerah kampar digunakan PTPN V sebagai suatu tempat, dimana pemerintah akan menyediakan mediasi untuk perusahaan dengan komunitas. Pemerintah daerah menjaga stabilitasnya dalam menjadi netral tanpa adanya pengaruh kepentingan pemerintah dengan perusahaan. Karena pada tahap mediasi tidak terjadinya stimuli bagi komunitas dari pemerintah. Disini pemerintah hanya mengolah keresahan komunitas dan mengklarifikasi secara langsung dengan perusahaan. Bentuk kerja sama dari *public relations* dengan pemerintah dalam menanamkan kepercayaan masyarakat untuk perusahaan mengolah daerah dan sejenisnya yang intinya membuat komunitas tidak merasakan ancaman akan keberadaan perusahaan di daerah operasi mereka belum terlihat pada hubungan yang di bangun oleh PTPN V.

Model hubungan *government relations* pada PTPN V memang menganggap pemerintah daerah sebagai partner. Dengan alasan pemerintah daerah cenderung memiliki kedekatan khusus dengan komunitas di unit Sei Kencana. Oleh sebab itu untuk mendapatkan perijinan melakukan kegiatan operasional perusahaan, memerlukan banyak langkah untuk ditempuh. Mayoritas komunitas cenderung keberatan apabila tanah mereka diolah oleh orang asing. Komunitas cenderung berpikir perusahaan mengambil keuntungan dari tanah mereka dengan tidak adanya konstribusi atau manfaat untuk komunitas. Dengan adanya pemerintah daerah yang memiliki keistimewaan kedekatan dengan masyarakatnya, maka ini akan menjadi peluang besar untuk meredam konflik yang terjadi.

Jika pada data 47 pemerintah daerah memberikan sebuah perubahan pada penerapan *government relations.* Khususnya diciptakannya keterbukaan terkait operasional perusahaan, sehingga tidak adanya persepsi-persepsi yang didasari oleh praduga kepada PTPN V. Asumsi dari pemerintah daerah dikatakan memiliki pengaruh besar, disamping itu komunitas yang akan mengadukan segala aktivitas atau perlakuan yang mereka dapatkan dari PTPN V. Tujuan dari keterbukaan perusahaan ke pemerintah adalah, dimana semua pihak mampu meraih tujuan dan meminimalisir konflik yang akan muncul dari komunitas.

Makna komunitas di PTPN V masih dalam kategori public. Dimana komunitas yang berada di Sei kencana tidak menunjukan hasrat aau antusiasnya untuk aktif pada ketelibatan perusahaan. Ini sesuai dengan pemikian Iriantara (2013: 23) yaitu ada perbandingan konsep publik dengan komunitas, ini dapat dilihat dari keterlibatan perusahaan. Ketika sifatnya

reaktif, mayoritas kegiatan berdasarkan mandat atau di provokasi kelompok ini adalah ciri dari publik. Sedangkan ketika komunitas secara ideal proaktif mereka merupakan ciri yang mudah di arahkan oleh perusahaan. Lalu dapat juga di kategorikan dari komunikasi perusahaan ketika konsep publik komunikasi kontinum respon mulai dari akomodasi hingga advokasi negosiasi, sedangkan konsep komunitas lebih terintegrasi (keterlibatan, pemeliharaan, dan pengorganisasian).

Pada satu sisi lain, berdasarkan perkembangan dan kemajuan dari PTPN V komunitas yang dikatakan baru menetas atau (berasal dari anak-anak dari orang terlebih dahulu) untuk mendapatkan manfaat personal dari pembagian lahan yang telah di klaim sebagai tanah nenek moyang Sei kencana mengakibatkan mencuatnya isu sosial. Maka untuk meminimalisir isu sosial yang mencuat PTPN V melalui pemerintah daerah membuka lebar-lebar saluran komunikasi

Bentuk Kegiatan *Government Relations* pada PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) sesuai dengan konsep yang diterapkan oleh Willey, dkk., (dalam Prabawati, Jurnal Unair, 2014) bentuk yang melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Direct Lobbying*

   Direct Lobbying atau lobi langsung merupakan pertemuan langsung kepada pihak pemerintah. digunakan PTPN V oleh manajemen dengan upaya pendekatan kepada pihak pemerintahan yang dilaksanakan melalui kunjungan yang bersifat formal ke kantor-kantor pemerintahan. Hal ini untuk mendukung upaya negosiasi terkait permasalahan yang muncul dalam perusahaan. Lobby dilakukan tentunya dengan memiliki tujuan yakni memperoleh informasi dalam pemerintahan yang berhubungan dengan perusahaan. Lobby langsung pada PTPN V dilakukan dari manajemen puncak atau direksi maupun melalui tim divisi HLKHI *Public Relations* kepada pihak pemerintahan.

   Khusus pada lingkup komunitas yang berada di unit Sei Kencana perundingan yang dilakukan oleh PTPN V sangat luas kerana dikaitkan juga dengan pemerintah pusat. Karena untuk perijinan memang pemerintah daerah sebagai lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada lokasi yang sudah pasti memiliki pengaruh pada operasional perusahaan. Tapi untuk konteks lahan yang merupakan aset negara. Pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan otoritas dalam penyelesaian akhir.

Kunjungan secara tetap dan paket informasi kegiatan lobbi dan negosiasi dengan sasaran kesejahteraan masyarakat sekitar daerah operasional dilakukan PTPN V kepada pemerintahan daerah. Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait bagaimana komunitas dapat mandiri dan bertahan dari perkembangan ekonomi. Hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah selalu mengalami kaitan yang mengharuskan perusahaan berkunjung ke pemerintah ataupun sebaliknya, sesuai dengan siapa yang memiliki kepentingan. Kunjungan ini bisa berupa laporan operasional perusahaan dari banyak sudut, mulai dari ketenakerjaan, tanggung jawab sosial dan lainnya. Kunjungan yang telah dilakukan akan disertai informasi-informasi yang dapat digunakan perusahaan atau pemerintah untuk penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang telah di putuskan.

Menjalin silaturahmi dengan pejabat pemerintah daerah. Kedua pihak memiliki keperluan masing-masing untuk operasional maupun secara politisi. Oleh sebab itu silaturahmi secara informal dilakukan dari manajemen puncak kepada pejabat jajaran atas pemerintah daerah. Informal ini seperti makan malam yang dilakukan pihak pemerintah dengan perrusahaan, kemudian rasa kepedulian dari segi agama atau kemalangan yang mengahruskan kehadiran seperti itu.

2. *Grass Roots Lobbying*

Manajemen tidak dapat lepas dari kegiatan pendekatan kepada komunitas lokal. Untuk terlaksananya kerja sama di masa yang akan datang maupun untuk saat ini dengan PTPN V, komunitas lokal memilki andil yang cukup kuat untuk berlangsunganya lingkungan produksi perusahan yang aman dan tentram. Oleh karena itu manajemen melibatkan masyarakat dalam melakukan pendekatan dengan cara manajemen memberikan opini atau argument kepada pihak yang memiliki kewanangan, bahwa PTPN V memiliki hubungan serta kepentingan dengan publik.

Pada PTPN V di hubungkan dengan komunitas, cara ini membawa satu komunitas yang memilki power kuat untuk mendukung perusahaan di level pemerintahan tertinggi kementrian kehutanan. Kesaksian dari komunitas dengan di pantau oleh tim Divisi umum bagian pemerintahan di ranah hukum, dengan konstribusi perusahaan atau kepentingan bersama yang dimiliki komunitas dengan perusahaan hingga kejaksanaan, membawa perusahaan keluar dari gugatan yang bersumber dari aduan komunitas.

Memberikan Sponsorship pemerintah daerah tidak luput dari kegiatan-kegiatan pemerintahan, baik dari segi acara formal maupun acara yang berbau kesenian, olahraga bahkan acara besar perayaan hari jadi pemerintah daerah. Bentuk kepedulian perusahaan akan disalurkan melalui kegiatan sebagai pemberi dana yang telah di ubah menjadi wujud benda yang akan diperlukan oleh pemerintah misalnya ini diterapkan oleh kegiatan olahraga. Pemberian sponsorship ini biasanya PTPN V akan mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah daerah, sehingga PTPN V akan mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan sesuai situasi pemerintah dan apa yang diperlukan pemerintah daerah.

3. Political Actions Committees (PACs)

Artinya melibatkan komunitas atau massa namun dengan konsep yang formal dan kemungkinan besar memiliki unsur politik. Untuk di unit Sei Kencana dengan pemerintah daerah Kampar melakukan suatu bentuk kerja sama dengan komunitas dalam bentuk formal dan informal yang didalamnya mengandung unsur politik. Namun cara ini tidak berjalan secara bergulir, unsur politik yang memiliki pengaruh pada kehidupan komunitas tidak terlalu mendominasi kehidupan di komunitas ini. Hanya saja memang pernah dilakukan tergantung pada manajemen struktural pemerintahan yang berubah. Hal ini terlihat pada saat pihak pemerintah melakukan kunjungan ke Sei Kencana PTPN V untuk meminta andil komunitas Sei Kencana dalam bentuk suara pada saat pemilu. Secara regulasi Pemerintah Daerah tidak melakukan kunjungan langsung kepada komunitas, namun melalui jajaran manajer kebun beserta Humas Kebun yang akan melakukan penyampaian pesan untuk komunitas.

Lobi Political Action Committe yang berada pada PTPN V tidak sampai ke tahap dimana terjadinya pembentukan komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di pemerintah. Jadi, jenis lobi ini pada PTPN V adalah jenis lobi yang sangat jarang terjadi di perusahaan. ini diberlakukan juga untuk semua unit PTPN V, termasuk pada unit Sei Kencana yang berada pada daerah Kampar.

Hubungan pemerintah pada hakikatnya disetiap perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari memiliki hubungan dengan legislator, baik pada tingkatan lokal maupun nasional. Pemerintah memengaruhi aktivitas bisnis terutama melalui regulasi. Begitu pula

dengan PTPN V dalam menjalin hubungan dengan pemerintah memiliki tujuan. Maka tujuan akan membawa perusahaan pada keuntungan-keuntungan sesuai dalam pemikiran Kasali (1994:79) yang mengatakan tujuan dari *government relations* dengan tugas sebagai berikut:

1. Menggali Data dari Pemerintah

   Kegiatan mencari data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan melalui bentuk dari kegiatan *government relations* seperti melakukan lobby langsung. Artinya perusahaan dapat melakukannya menggunakan kunjungan resmi ke pemerintah ataupun dengan bentuk surat. Dalam hal ini data dan informasi dijalankan dari segala lini perusahaan, untuk memperoleh ijin. Ijin yang dimaksud di PTPN V akan sangat luas cakupannya. Karena PTPN V dengan Pemerintah daerah unit Sei Kencana akan selalu berurusan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan mulai dari agraria, kemanan, ketenagakerjaan, dinas perkebunan, tanggung jawab sosial perusahaa, bagian tanaman yang tugasnya menyupap untuk pekerjaan-pekerjaan tanaman untuk kebun atau terkait pupuk, ada tekhnik pengoahan untuk mensuport pabrik, ada keuangan yang nantinya berhubungan dengan pembayaran-pembayaran pembiayaannya dan hal lainnya. Untuk khusus *government relations* pada konflik dengan komunitas, PTPN V menggunakan dua divisi yaitu HLKHI bagian Staff *Public Relations* serta campur tangan dari Divisi Umum. Walaupun ketika ada permasalahn misalnya kepolisian memanggil pejabat dari kantor pusat pertama kali akan ditangani melalui HLKHI yang nantinya akan diteruskan kepada bagian umum.

   Adapun birokrasi perijinan dalam pemerintahan merupakan masalah yang masih tabuh karena bagaimanapun pemerintah daerah adalah mitra bisnis perusahaan, dan pemerintah daerah juga bertugas dalam membela kepentingan komunitas. Dari hal inilah yang membutuhkan divisi HLKHI dan UMUM untuk menggali informasi berupa data yang akan menyelesaikan permasalahan dengan menghindari konflik berkelanjutan. Proses lobbi pada pencarian data dan informasi dengan pemerintah daerah, karena Pemda memiliki wewenang sepenuhnya atas apa yang terjadi didaerah mereka. Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional sedikit banyak akan memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakatnya yang ada di sekitar daerah operasional perusahaan.

   Untuk prosesnya setiap sub bagian Divisi akan menyiapkan segala kepentingan pemerintah daerah dengan cermat dan cepat, hingga perusahaan bisa melakukan kunjungan formal ke kantor pemerintah terkait. Begitu pula dengan kasus

yang menerlibatkan komunitas Sei Kencana yang dilakukan perusahaan melalui menajemen dan didampingi oleh fungsi humas HLKHI ke kantor pemerintah. Adapun untuk waktu, perusahaan akan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini tim humas akan selektif pihak-pihak mana saja yang memenuhi kriteria untuk dikunjungi juga melalui proses pencarian data dan informasi.

2. Memonitoring Langkah-langkah yang Telah dibuat Pemerintah

   Langkah ini diperlukan setelah adanya pergerakan dari penggalian data dan informasi yang dijalankan pada perwakilan Humas, Manager, Bagian umum PTPN V Pusat yang mengikuti setiap perkembangan yang akan menjadi penyambung perusahaan. hal ini berguna sebagai pemantau kebijakan-kebijakan khusus kasus dengan komunitas Sinamanenek di unit Sei Kencana yang dibuat oleh pemerintah daerah. Mengenai perijinan biasanya setiap tahun pemberian informasi terkait tenaga kerja ke dinas ketenagakerjaan itu wajib hukumnya. Melakukan pemerintahan memonitoring, dan pemerintahan analisis juga ada pada tugas HLKHI dan Divisi Umum pada PTPN V pusat.

3. *Feedback* Perusahaan ditujukan kepada Pemerintah

   Respon yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah adalah prioritas utama perusahaan dari sudut kepentingan pemerintah. Maka oleh sebab itu hal ini dilakukan PTPN V melalui menanggapi kebijakan pemerintah dengan melakukan komunikasi dua arah ataupun dengan cara email atau bentuk surat. PTPN V akan membuka diri untuk kebutuhan pemerintah akan perusahaan, tertama pada kasus yang menelibatkan masyarakatnya konflik dengan perusahaan. *feedback* dapat di handle oleh pihak yang bersangkutan dengan kebutuhan pemerintahan. Jadi tugas *public relations* pada perusahaan perkebunan ini memang sudah cukup luas. Sehingga tidak akan terkoordinir dengan semua masalah hanya ditangani oleh sisi HLKHI.

4. Tugas dalam Membangun Posisi

   Membangun posisi jika diartikan untuk PTPN V lebih pada kegiatan lobi melalui kontak pribadi. Kegiatan ini tentunya keluar dari aktivitas formal. Sifatnya yang informal akan menjalin hubungan baik dengan pihak berwenang melalui kontak pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengakrabkan diri atau membangun hubungan personal antara Manajemen puncak dengan pemerintahan. Cara ini biasanya diterapkan melalui makan malam bersama, yang tidak membutuhkan

pengorganisasian acara secara khusus dalam hal ini. Kontak pribadi juga dapat melalui pemberian ucapan selamat kepada wartawan yag merayakan sesuatu dan akan dipublish untuk membangun hubungan yang baik.

D. Analisis SWOT pada implementasi kegiatan *Community* dan *Government Relations* pada Sei Kencana PTPN V

Berdasarkan dari temuan penelitian yang telah dirangkum dalam beberapa bagian sub bagian, penulis melanjutkan dengan tahap analisa tentang *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Treaths* (Ancaman) atau disebut dengan analisis SWOT terhadap implementasi kegiatan *community* dan *government relations* di Sei Kencana PTPN V. Adapun Analisis SWOT yang dilakukan penulis diuraikan sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

   Kekuatan yang telah teridentifikasi dalam implementasi kegiatan *community* dan *government relations* di PTPN V adalah:

   a) PTPN V pada kegiatan *community relations* yang dibangun dengan menggunakan PKBL konsisten terhadap penyelenggaraan PKBL pertiap tahunnya disetiap Unit Perkebunan. PTPN V juga menggunakan pola KKPA yaitu komunitas yang bekerja menjadi mitra perusahaan pada penjualan buah sawit dan karet ke PTPN V. Hal ini mendukung kekuatan hubungan harmonis komunitas dengan perusahaan, yang mana pada seluruh program pada umumnya melibatkan komunitas secara langsung pada operasional perusahaan. Maka secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan kebanggan dari komunitas terhadap perusahaan.

   b) Melalui program Program Kemitraan PTPN V menjadi salah satu solusi meningkatkan ekonomi komunitas pada tingkat yang lebih baik lagi, dilain hal juga dapat meringankan tugas dari Pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. PTPN V dapat memperkenalkan hasil karya dari komunitas yang tergabung didalam kemitraan perusahaan pada tingkat nasional hingga internasional, melalui ajang pameran yang difasilitasi oleh perusahaan. hal ini mengacu pada tujuan utama PTPN V, terbagi atas tiga ketegori yaitu People, Planet, Profit.

c) PKBL pada PTPN V menyita perhatian banyak komunitas lokal maupun komunitas yang berada disekitar perusahaan hal ini dikarenakan keramahan program bina lingkungan dimana prospek yang dijanjikan memberikan kemajuan daerah komunitas, dengan adanya bantuan pendidikan, pembangunan sarana prasarana, membuka akses jalan desa ke kota, bencana alam dan lainnya. Kemudian dengan program kemitraan memberikan harapan komunitas pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya ke dunia luar, dengan keringanan biaya administrasi. Hal ini menjadikan PTPN V menjadi harapan baru bagi banyak komunitas untuk mengentaskan kemiskinan.

d) Melalui program PKBL dan Pola KKPA mampu meminimalisir jumlah peninjaan dan pencurian buah pada lingkungan sekitar perusahaan yang ditimbulkan dari komunitas lokal dan luar perusahaan. ini terbukti pada minimnya kasus pencurian buah pada Sei Kencana setelah diterapkannya kegiatan *community relations.*

e) Komitmen dari program PKBL yang mengharuskan menggunakan strategi *public relations* pada tahap analisis salah satu strategi yang menjadi kekuatan. Karena analisis komunitas yang dilakukan mewajibkan kehadiran komunitas, sehingga akan ditemukannya kepentingan dan kebutuhan apa yang menjadi keresahan komunitas, hingga PTPN V akan memikirkan solusi secara tepat akurat.

f) PTPN V menggunakan tahap lobi dalam menjalankan *government relations* baik secara informal maupun formal, yang akan menghasilkan keakraban perusahaan dengan pemerintah tidak mempersulit perusahaan pada terkait birokrasi dengan regulasinya ataupun pada saat perusahaan mengalami benturan konflik dengan masyarakat pemerintah daerah. Cara ini terbukti ketika PTPN V terlibat konflik dengan komunitas Senamanenek di Sei kencana, PEMDA tidak memposisikan dirinya pada satu arah., namun PEMDA berguna sebagai fasilitator yang mencari jalan tengah penyelesaian perusahaan dengan komunitas.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Dalam implementasi *community* dan *government relations* di PTPN V teridentifikasi beberapa kelemahan sebagai berikut:

a) PTPN V dalam menerapkan kegiatan *community relations* berdasarkan PKBL tidak melibatkan fungsi *Public Relations* secara keseluruhan sebagai jembatan antara perusahaan dengan komunitas. Sehingga sebagian besar strategi komunikasi tidak diterapkan untuk menstimuli komunitas agar memiliki satu pemahaman dengan kepentingan perusahaan. Kemudian pendekatan dengan komunitas melalui unit PKBL pun berdasarkan pada pembina direksi yang menjabat pada saat itu, jadi setiap pergantian pembina, strategi pendekatan dalam komunitas otomatis akan disesuaikan dari awal lagi.
b) Minimnya penggunaan media pada Unit perkebunan sebagai alat penghubung program perusahaan kepada komunitas. Sebagian besar media dikendalikan oleh kantor pusat, sedangkan pada Unit khususnya Sei Kencana memang tidak menggunakan media sebagai wadah bagi komunitas untuk mengetahui program. PTPN V memilih melakukan sosialisasi penyuluhan yang masih menggunakan komunikasi dua arah namun bersifat formal. PTPN V dapat menggunakan Radio, yang dapat dijangkau oleh komunitas dimana pada program hiburan diradio dapat diselingi pengertian program PKBL dan Pola KKPA dengan pembawaan yang ringan dan menyenangkan. Hal ini bisa menjadi sebagai cara mempengaruhi komunitas, dampak serta keuntungan apa saja yang bisa komunitas dapatkan setelah bergabung dengan program perusahaan. Setelah itu, akan berlaku pembicaraan mulut ke mulut antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dengan tema keberadaan perusahaan.
c) Program kemitraan yang menyangkut pendanaan mengharuskan PTPN V dihadapkan pada setoran atau cicilan yang tidak teridentifikasi akibat mitra binaan dalam proses penyetoran ke Bank bukan atas nama mitra. lalu, ketika dilakukan penagihan hutang langsung ke lokasi ketegori macet pada umumnya usaha mitra binaan sudah tidak beroperasi lagi.
d) Pada pemerintah daerah akan terjadi perubahan struktur yang selalu berputar, sehingga perusahaan harus lebih cermat dan peka terhadap perubahan yang terjadi pada struktur manajerial pemerintahan. Hal ini akan menjadi ancaman bagi perusahaan, ketika perubahan pada struktur terjadi, maka akan berubah juga keinginan pemikiran dari pemimpin pemerintah daerah. Sehingga kepentingan perusahaan mengenai perijinan, birokrasi yang pada awalnya telah mendapatkan kemudahan, akan berubah ke tahap yang lebih mudah lagi

atau malah mempersulit perusahaan ketika pimpinan berubah. Padahal PTPN V harus menekan isu konflik dengan masyarakat di Sei Kencana yang membawa tanggapan miring pemerintahan daerah kepada perusahaan. oleh sebab itu, memonitoring perubahan struktural adalah kewajiban PTPN V, sehingga pemerintah daerah tidak mempersulit birokrasi dan hal lainnya yang termasuk pada kepentingan perusahaan.

3. *Opportunities* (Peluang)

Dalam aktivitas implementasi *community* dan *govenrment relations* teridentifikasi beberapa peluang yang ada sebagai berikut:

a. Berdasarkan aktivitas *community relations* dengan PKBL dan Pola KKPA yang dilakukan oleh PTPN V, peluang yang ditemukan penulis ialah perluasan kerjasama dengan pemerintah daerah dan perluasan pengembangan bidang minat untuk komunitas Sei Kencana. Hal ini dinilai mampu dalam menjangkau lapisan Pemerintah Daerah ketika perusahaan melakukan lobi informal, artinya pelaporan kepada pemerintah daerah tidak lagi sebatas dokumen yang merupakan kewajiban perusahaan. Karena Pemerintah daerah juga mengharapkan perubahan persepsi dari perusahaan yang melihat sisi pemerintah daerah sebagai ancaman, paling tidak diperlukannya perkenalan dan memahami posisi perdinas di pemerintah daerah. Kemudian dari kegiatan-kegiatan *community relations* terutama perlu adanya mengkategorikan komunitas lokal akan memudahkan perusahaan pada tahap penanggulangan pemberontakan yang berasal dari komunitas. Menciptakan khalayak *aware* yang akan memberikan keuntungan perusahaan sesuai dengan apa yang telah perusahaan berikan kepada komunitas.
b. Pengelolaan proses pendekatan personal secara struktural untuk membangun keakraban antara perusahaan dengan pemerintah. Sehingga pemerintah dapat menjadi penjamin dari operasinal perusahaan, dan juga pemerintah dapat melakukan kerja sama yang lebih luas lagi dengan perusahaan BUMN.

4. *Threats* (Ancaman)

Dalam kegiatan *community* dan *government relations* di PTPN V teridentifikasi beberapa ancaman sebagai berikut:

a. PTPN V merupakan industri Perkebunan miliki negara, PTPN V bukan satu-satunya perusahaan yang berada di bidang perkebunan sawit dan karet di Riau. Karena telah bermunculan usaha swasta di bidang industri

perkebunan sawit, yang mana mereka tidak memiliki kebun hanya menyediakan pabrik. Perusahaan Swasta akan menargetkan komunitas pada pola KKPA miliki PTPN V dengan pematokan harga saing diatas perusahaan. Persaingan dengan pabrik sawit swasta yang mematokan harga tinggi membuat komunitas berpaling dari perusahaan dan kurangnya produksi dari perusahaan. oleh sebab itu, PTPN V meningkatkan kewaspadaan dan memonitoring harga sawit di perusahaan swasta.

b. Dalam menciptakan kesadaran (*aware)* komunitas akan sebuah identitas perusahaan, maka perlu dilakukannya andil pemerintah daerah yang sepenuhnya memiliki kedekatan lebih dengan masyarakatnya. PTPN V sendiri melalui perangkat desa dan pemerintah daerah terkait dinas yang ahli pada program PTPN V untuk komunitas hanya dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan dalam pertahunnya. Hal yang dapat menjadi ancaman PTPN V ialah, kesadaran (*aware)* akan konstribusi perusahaan hanya berlangsung dengan jangka pendek. Oleh karena itu perlu dilakukan penetapan waktu pasti untuk pemerintah daerah, komunitas, dan perusahaan dalam satu pertemuan, tidak harus melalui kunjungan formal saja tapi bisa melalui pertemuan informal.

c. Dari banyaknya keluhan dari komunitas yang masuk pada pemerintahan daerah, sehingga bisa memperburuk relasi *government relations* yang ada antara PTPN V dengan Pemerintah daerah kampar.

Berikut dijelaskan secara ringkat hasil analisis SWOT yang dilaukan oleh peneliti:

No.	Analisis SWOT	Keterangan
1.	*Strengths* (Kekuatan)	PTPN V pada kegiatan *community relations* yang dibangun dengan menggunakan PKBL konsisten terhadap penyelenggaraan PKBL pertiap tahunnya disetiap Unit Perkebunan. PTPN V juga menggunakan pola KKPA yaitu komunitas yang bekerja menjadi mitra

perusahaan pada penjualan buah sawit dan karet ke PTPN V.

Kekutannya adalah bersama PKBL menjadi salah satu solusi meningkatkan ekonomi komunitas pada tingkat yang lebih baik lagi.

keramahan program bina lingkungan dimana prospek yang dijanjikan memberikan kemajuan daerah komunitas, dengan adanya bantuan pendidikan, pembangunan sarana prasarana, membuka akses jalan desa ke kota, bencana alam dan lainnya.

Melalui program PKBL dan Pola KKPA mampu meminimalisir jumlah peninjaan dan pencurian buah pada lingkungan sekitar perusahaan yang ditimbulkan dari komunitas lokal dan luar perusahaan.

Kekuatannya terletak pada tahap analisis dalam strategi *Public relations*, yang menghadirkan Komunitas lokal Sei Kencana.

Kekuatan tahap lobi dalam menjalankan *government relations* dengan informal maupun formal menghasilkan kemudahan perusahaan terkait birokrasi dengan regulasinya atau ketika perusahaan mengalami benturan konflik dengan masyarakat pemerintah daerah.

		Public Relations pada PTPN V pada pelaksanaan *community relations* masih pada struktur kesekertariatan perusahaan.
	Weakness (Kelemahan)	Minimnya penggunaan media pada Unit perkebunan sebagai alat penghubung program perusahaan kepada komunitas.
2.		Belum adanya sistem yang bagus pada pemerintahan, Sehingga ketika terjaadinya perubahan struktur organisasi di pemerintahan maka struktur komunikasi yang telah dijalin secara personal oleh perusahaan harus dimulai lagi dar awal. Banyaknya dana dalam kategori macet dengan setoran atau cicilan yang tidak teridentifikasi akibat mitra binaan dalam proses penyetoran ke Bank bukan atas nama mitra. lalu, ketika dilakukan penagihan hutang langsung ke lokasi ketegori macet pada umumnya usaha mitra binaan sudah tidak beroperasi lagi
3.	*Opportunities* (Peluang)	Menciptakan khalayak *aware* yang akan terjadinya timbal balik dari komunitas bagi perusahaan kedepan. Perusahaan tidak lagi hanya selaku memberikan saja, tetapi keuntungannya untuk kedepan akan terbentuknya komunitas yang mandiri dan tidak lagi membebani perusahaan.

		Pengelolaan proses pendekatan personal secara struktural untuk membangun keakraban antara perusahaan dengan pemerintah. Sehingga pemerintah dapat menjadi penjamin dari operasinal perusahaan, dan juga pemerintah dapat melakukan kerja sama yang lebih luas lagi dengan perusahaan BUMN.
		Harga beli sawit yang ditetapkan oleh perusahaan swasta lebih mahal atau diatas dari harga yang telah ditetapkan oleh PTPN V. Sehingga ditakutkan warga yang ikut dalam KKPA itu menyetorkan hasil sawitnya ke perusahaan swasta bukan PTPN V.
4.	*Threats* (Ancaman)	kesadaran (*aware)* akan konstribusi perusahaan hanya berlangsung dengan jangka pendek. Oleh karena itu perlu dilakukan penetapan waktu pasti untuk pemerintah daerah, komunitas, dan perusahaan dalam satu pertemuan, tidak harus melalui kunjungan formal saja tapi bisa melalui pertemuan informal.
		Dari banyaknya keluhan dari komunitas yang masuk pada pemerintahan daerah, sehingga bisa memperburuk relasi *government relations* yang ada antara PTPN V dengan Pemerintah daerah kampar.

Tabel 4.1 Ringkasan Analisis SWOT
Sumber: Analisis Peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui tahap wawancara mendalam dengan Unit PKBL, Unit HLKHI Staff *Public Relations,* Humas Perkebunan Sei Kencana, dua komunitas Sei Kencana, serta pejabat Pemerintah Daerah Dinas Perkebunan dan Dinas Tata Pemerintahan. Dari beberapa informan tersebut peneliti memperoleh data yang berkaitan mengenai gambaran implementasi *community relations* dengan komunitas Sei Kencana dan *government relations* dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Di samping data melalui wawancara, penulis menggunakan data yang berasal dari dokumen dan observasi yang dilakukan di PTPN V sebagai pelengkap data.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai implementasi *community* dan *government relations* pada Sei Kencana PTPN V, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan *community relations* yang aplikasikan di lapangan guna menjalin hubungan baik dengan komunitasnya melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan pola KKPA.
2. Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Pola KKPA yang dirangkum dalam satu program PKBL merupakan sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan (ekonomi) komunitas disekitar perusahaan dan diluar perusahaan yaitu komunitas di unit Sei Kencana, Pekanbaru. Dimana lokasi operasional perusahaan dijalankan.
3. Program *community relations* bersifat bantuan terhadap komunitas saja, tanpa adanya komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membentuk hubungan dengan komunitas melalui program-program sosial yang melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan.
4. Dalam melaksanakan *community relations* dibutuhkan program yang membutuhkan banyak sumber daya manusia, PTPN V dapat memanfaatkan dan melibatkan karyawannya untuk turut aktif dan berpartisipasi secara sukarela mengeksekusi program yang nantinya akan ditujukan dengan komunitas. Hal ini akan sejalan dengan

teori *community relations* untuk menambahkan kesadaran pada konteks internal perusahaan, yaitu untuk menanamkan kesadaran sosial karyawannya.

5. Dalam implementasi *community relations* pada Sei Kencana, masih terdapat Pro dan Kontra dari komunitas Sei Kencana tentang PTPN V Pekanbaru. Pro dan Kontra ini berasal dari komunitas yang merasakan adanya kesenjangan pihak PTPN V dengan Komunitas secara pembangunan hubungan dengan komunitas.
6. Dalam perencanaan program *community relations,* unit PKBL sudah melalui tahap riset formatif, artinya dilakukan melalui analisis situasi dilaksanakan dengan cara riset *survey* oleh unit PKBL agar diketahui bagaimana sikap dan persepsi komunitas. Analisis yang dilakukan oleh unit PKBL berlandaskan pada analisi SWOT (*strength, weaknes, opportunities, threats)* perusahaan, dibantu dengan analisis Humas perkebunan dan disalurkan melalui informasi kepada HLKHI selaku Staff *Public Relations* kantor pusat dengan memetakan komunitas, dan berguna untuk mengetahui kondisi di lapangan. Dalam tahap implementasi PKBL telah merumuskan tujuan dan sasaran program. Salah satunya PTPN V melakukan komunikasi dengan komunitasnya. Dalam tahap taktik, PTPN V telah melakukan pemberian berupa output-output program yang menyangkut PKBL. Kemudian akan dilakukan evaluasi sebagai tahap akhir oleh unit PKBL dengan mengukur keberhasilan program yang didasari pada indikasi-indikasi tertentu, seperti halnya kesesuaian suatu program yang sudah diberikan PTPN V, dampaknya, dan bagaimana partisipasi dan peran aktif dari komunitas Sei Kencana itu sendiri.
7. Dalam melaksanakan kegiatan *government relations* HLKHI dan divisi umum telah menggunakan konsep kegiatan dan sasaran *government relations* dengan melakukan berbagai kegiatan lobi, negosiasi, penyuluhan yang menerlibatkan ketiga elemen antara pemerintah, perusahaan, komunitas dalam bidang perkebunan, dan sebagainya.
8. Pada Implementasi *Government Relations* teridentifikasi adanya suatu hubungan yang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh kekurangan-kekurangan PTPN V dalam segi merespon urusan pemerintah daerah maupun ketidak terbukaannya hal-hal yang berkaitan dengan perkebunan PTPN V.
9. Bentuk kegiatan *government relations* pada PTPN V dengan konsep lobby langsung, negosiasi formal, kegiatan *sponsorship* dengan sasaran kesejahteraan komunitas sekitar daerah operasional dan meringankan tugas pemerintah daerah dalam tanggung jawab kepada masyarakatnya. Kegiatan sosialisasi yang masih berkaitan dengan perkebunan, dan dengan kunjungan formal.

10. Dalam pelaksanaan *government relations* PTPN V menghadapi beberapa kendala diantara lainnya tentang kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersumber dari kebijakan pemerintah daerah kampar yang mana telah ditetapkan tidak diperkenankannya urusan dalam memberikan uang kepada pemerintahan, pemerintahan tertentu yang memiliki kepentingan khusus atau terdapat unsur kepentingan politis, dan adanya perubahan struktur yang mengaharuskan perusahaan untuk membangun hubungan mulai dari awal lagi.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian mengenai implementasi *community* dan *government relations* dalam membangun hubungan dengan komunitas lokal di unit Sei kencana Kota Pekanbaru, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk perbaikan dan pengembangan dari implementasi kedua kegiatan tersebut:

1. Untuk PTPN V, kegiatan *community relations* yang ditangani pada unit PKBL yang posisinya berada di bawah binaan Direktur Komersil. Meskipun pada unit PKBL telah menerapkan konsep dari Humas dalam proses pelaksanaannya, akan lebih baik ketika kegiatan *community relations* dapat ditangani langsung oleh bagian Humas. Maka sebab itu, perlunya posisi *Public Relations* dalam struktur organisasi PTPN V dengan harapan peran yang akan dilaksanakan dapat dicapai secara maksimal dan akan mengindari tumpang tindih dalam pembagian peran, fungsi serta tugas antara satu divisi dengan divisi lainnya.
2. Perencanaan PKBL, hendaknya PTPN V dapat lebih jeli lagi dalam menangkap kebutuhan dan harapan komunitas Sei Kencana agar nantinya output program yang dilaksanakan dapat direalisasikan dengan tepat dan bermanfaat bagi perusahaan serta komunitas Sei Kencana itu sendiri. Pada pelaksanaan komunikasi dengan komunitas Sei Kencana hendaknya dilakukan dengan cara lebih intens, agar perusahaan lebih memahami permasalahan ataupun keluhan yang tengah dialami komunitasnya.perusahaan dapat menggunakan perkumpulan melakukan diskusi secara berperiode membahas terkait isu yang berkembang di komunitas dan perusahaan, hingga kedepannya perusahaan dapat tanggap sebagai pemberi solusi dan mengatasi permasalahan tersebut.
3. Walaupun PTPN V sebuah perusahaan besar yang memiliki berbagai jenis kepentingan pada dinas-dinas di Pemerintah Daerah, alangkah baiknya PTPN V memiliki tim khusus *government relations* dalam membangun hubungan baik

dengan pemerintah daerah, tidak hanya melakukan interaksi ketika tengah terbentur permasalahan yang mengaharuskan perusahaan berurusan dengan pemerintah daerah. Hubungan diawal dengan cara menggunakan lobi informal atau kegiatan olahraga akan menumbuhkan rasa peduli antar teman bukan antar instansi lagi yang menguntungkan perusahaan dikemudian hari.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi temuan dilapangan dan mampu menjabarkan data dengan rinci tentang kegiatan *Community* dan *government relations* di sebuah perusahaan atau pemerintahan.

C. Keterbatasan Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, tentunya terdapat keterbatasan dan hambatan yang telah dilalui oleh penulis hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Adapun keterbatasan dan hambatan yang dimaksud yaitu:

1. Penulis belum mempunyai kapasitas kemampuan yang lebih untuk menjelaskan dengan lebih rinci mengenai analisis implementasi *community* dan *government relations* yang dilakukan oleh PTPN V. Hal ini dikarenakan penulis menyadari bahwa kajian kolaborasi konsep *community relation* serta *government relations* merupakan kajian yang luas dalam ranah ilmu komunikasi, sehingga penulis dituntut mempelajari dan mencari referensi sebanyak mungkin tentang hal yang berkaitan dengan tema komunitas dan pemerintahan.
2. Bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini menjadi ladang ilmu tentang kajian *Community* dan *Government Relations.*

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Ardianto, Elvinaro dan Soemirat, Soleh. 2015. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Azwar, saifuddin.1988. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Miles, Matthew., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Cangara, Hafied. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Coulter, Mary., dan Stephen P. Robbins. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Cutlip, Scott M., Broom, Glen M., and Allen H. Center. 2009. *Effective Public Relations Edisi Kesembilan.* Jakarta: Kencana.

Cutlip, Scoot M, Center, Allen H, Broom, Glen M. (2011). *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada Media Group.

Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.* Bandung: Rosdak arya.

Iriantara, Yosal. 2004. *Manajemen strategis Public Relations*. Jakarta: kencana

_____ . 2010. *Media Relations konsep, pendekatan, dan praktik.* Bandung. Simbiosa Rekatama Media.

_____ . 2013. *Community Relations.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

J. Moeleong, Lexy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kaufman, Roger. 1988. *Planning Educational System*. New Holland Avenue: Technomic Publishing Company, Inc.

Kriyantono, Rachmat. (2012). *Public Relations dan Crisis Management.* Jakarta: Kencana

———————. (2012). *Public Relations Writing.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasali, Rhenald, 1994, *Manajemen Public Relations.* Jakarta: Grafiti

Kasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Kruckeberg, Dean & Starck, Kenneth 1988. *Public Relations and Community: A Reconstructed Theory.* New York: Praeger.

Morrisan. (2008). *Manajemen Public Relations.*Jakarta: Kencana

Putra, I Gusti Ngurah. 2008. *Manajemen Hubungan Masyarakat.* Edisi Kedua. Jakarta: Universitas Terbuka.

Rhenald, Kesali. (1994). *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Jakarta: Grafiti

Rumanti, Maria Assumpta. 2005. *Dasar-dasar Public Relations* : *Teori dan Praktik*. Jakarta : Grasindo

Robson, Wendy. (1997). Strategic management and information system: An integrated approach. 2nd ed. Harlow: Perason Education Ltd.

Ruslan, Rosady. 2002. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Edisi Revisi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sendjaja, S, Djuarsa dkk. (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Widjaja, H.A.W. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyrakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

JURNAL

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=92866&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html

http://jurnal.uajy.ac.id/jik/files/2012/05/JIK-Vol1-No2-2004_4.pdf

http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4543-Devita.pdf

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187834&val=6466&title=KEWENANGAN%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DALAM%20MENYALURKAN%20DAhttp://e-journal.uajy.ac.id/6083/3/EM218158.pdfNA%20TANGGUNG%20JAWAB%20SOSIAL%20PERUSAHAAN%20KEPADA%20MASYARAKAT.

http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/66/36

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01649-MC%20Bab2001.pdf

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318058Titi%20Mora%20Margaretha%20S.pdf. Akses 21 Desember 2016

(https://winsukardi.wordpress.com/2015/06/21/peran-strategis-dan-perumusan-strategi-taktis-dan-operasional-fungsi-pengadaan/ diaskes pada tanggal 16 Desember 2017, pukul 22.00 WIB).

SKRIPSI

Brilliant. "*Aktivitas Community Relations Humas PT. (Persero) Angkasa Pura 1 Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menjalin hubungan Komunitas Lokal".* Skripsi Sarjana, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Yogyakarta. 2004.

Kuncoro, Ndaru. "*Strategi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Jakarta Dalam Menjadikan DKI Jakarta Sebagai Kota Gas (City Gas) di Indonesia".* Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Indonesia. Jakarta. 2012.

Prabawati, Arni. *"Strategi Government Relations PT. PAL Indonesia (Persero) Untuk Mempengaruhi Komite Kebijakan Indistri Pertahanan Dalam Penunjukan Lead Integrator Alutsista Matra Laut Pada Tahun 2012".* Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya. 2012.

Moh, Aniq. "*Penerapan Strategi Komunikasi Program Community Relations Oleh Sebuah Organisasi (Studi kasus Program Dana Kompensasi Batubara PLTU 1 Rembang Oleh PT. Zelan Priamanaya Kepada Masyarakat Desa*

Leran dan Trahan Sluke, Kabupaten Rembang)". Skripsi Sarjana, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.

Mora Margaretha S, Titi. "*Strategi Komunikasi Dalam Hubungan Pemerintahan (Government Relations) Pada Pemerintahan Industri Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Pada PT Mosesa Petroleum)"*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta. 2012.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
Program Studi Psikologi (S1), Program Studi Ilmu Komunikasi (S1), Program Pendidikan Bahasa Inggris (S1), Program Studi Hubungan Internasional (S1), Program Magister Profesi Psikologi (S2)

Tanggal : 26 April 2017

Nomor : 376 / Dek / 70/Div.Um.RT /IV -/ 2017

Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data untuk Skripsi

Kepada Yth.

Divisi Umum dan Divisi Humas PTPN V Pekanbaru Riau

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, bagi setiap mahasiswa diwajibkan membuat skripsi/tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan data, baik dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta dan Lembaga maupun individu. Selanjutnya kami mohon ijin penelitian/pengambilan data mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia tersebut dibawah ini :

Nama	:	**VINNY FHIADINA NASUTION**
Nomor Mahasiswa	:	**13321108**
Judul Skripsi	:	*Analisis Implementasi Community Dan Government Relations Di Kebun Sei-Kencana Ptpn V (Persero) Pekanbaru*

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. rer. nat. Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog

Dosen Pembimbing,

Nadia Wasta Utami,S.I.Kom.,MA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Besi, Sleman, YOGYAKARTA 55584
Telp. 0274-898444, Ext. 2106, Fax. 0274-898444, Ext. 2106; E-mail:fpisb@uii.ac.id

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4514/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Riau
Up. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Riau
Di
PEKANBARU

Memperhatikan surat :

Dari	:	Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Nomor	:	356/Dek/70/Div.Um.RT/IV/2017
Tanggal	:	26 April 2017
Perihal	:	Permohonan Izin Pengambilan Data untuk Skripsi

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"ANALISIS IMPLEMENTASI *COMMUNITY* DAN *GOVERNMENT RELATIONS* DI KEBUN SEI-KENCANA PTPN V (PERSERO) PEKANBARU"** kepada :

Nama	:	VINNY FHIADINA NASUTION
NIM	:	13321108
No. HP/Identitas	:	082171771566 / 1471095807940002
Prodi/Jurusan	:	Ilmu Komunikasi
Fakultas/PT	:	Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Lokasi Penelitian	:	Kantor Bupati Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Waktu Penelitian	:	3 Mei 2017 s.d. 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

BAGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/6230

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Kepala Badan Kesbangpol DIY, Nomor : 074/4514/Kesbangpol/2017 Tanggal 3 Mei 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**VINNY FHIADINA NASUTION**
2. NIM	:	13321108
3. Program Studi	:	ILMU KOMUNIKASI
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**ANALISIS IMPLEMENTASI *COMMUNITY DAN GOVERNMENT RELATION* DI KEBUN SEI KENCANA PTPN V (PERSERO) PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian	:	KANTOR BUPATI KAMPAR

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

IEVARENTA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
   Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Kepala Badan Kesbangpol DIY di Jogjakarta
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2017/580

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/6230 tanggal 07 Juni 2017, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1.	N a m a	: **VINNY FHIADINA NASUTION**
2.	NIM	: 13321108
3.	Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA JOGJAKARTA
4.	Program Studi	: ILMU KOMUNIKASI
5.	Jenjang	: S1
6.	Alamat	: PEKANBARU
7.	Judul Penelitian	: **ANALISIS IMPLEMENTASI *COMMUNITY DAN GOVERNMENT RELATION* DI KEBUN SEI KENCANA PTPN V (PERSERO) PEKANBARU**
8.	Lokasi	: KANTOR BUPATI KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 07 Juni 2017

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kasi. Kesatuan Bangsa

ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;
1. Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Bagian Humas Setda Kampar di Bangkinang.
3. Kepala Badan Kesbangpol DIY di Jogjakarta.
4. Yang Bersangkutan.

Transkrip Wawancara Divisi HLKHI PT Perkebunan Nusantara V

Narasumber **:** Rizky Atriansyah, Staff Public Relations

Tanggal Wawancara:10 Mei 2017

1. **Bagaimana sejarah dan perkembangan PTPN V Pekanbaru Riau hingga sekarang?**

   Untuk PTPN V Pekanbaru Riau sebenarnya sih gak pernah dalam apanya dalam anggaran dasarnya gak pernah disebutkan PTPN V Pekanbarunya enggak. Cuman memang orang biasa memanggil karena lokasinya ada di Pekanbaru Riau. Tapi nama PTPN V itu didalam anggaran dasar yang terakhir hanya PT Perkebunan Nusantara V. Karena lokasinya ada di Riau dan kantor pusatnya ada di Pekanbaru kadang-kadang surat-surat dari Stakeholders menyebutnya PTPN V Pekanbaru Riau. Eeee.....PTPN V sebelum adanya PP (Peraturan Pemerintah) 72 2014 itu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengalihan saham PTPN se Indonesia kepada PTPN III selaku Holding itu adalah perusahaan BUMN dibidang industri perkebunan sawit dan karet. Dulu memang sempat ada mengelola Cacao atau coklat, hanya saja sudah tidak lagi dioperasionalkan. Saat ini komoditas utamanya hanya sawit dan karet. PTPN V itu didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1996 sekitar bulan Maret kalau gak silap tanggal 11 atau tanggal 19 saya lupa, tapi intinya PP 10 thn 1996 itu adalah dasar hukum berdirinya PTPN V.asalnya bermula dari kebun-kebun pengembangan PTP yang ada di Sumatera Utara. Jadi sebelum menjadi PTPN V itu ada sekitar 30 an PTP dulu di Indonesia ini. Ada yang berasal dari apa namanya Nasionalisasi kebun-kebun Belanda atau kebun-kebun peninggalan penjajah ada jugak memang yang merupakan kebun-kebun pengembangan dari Nasionalisasi tadi. Dulu di Sumatera Utara itu ada kebun-kebun peninggalan penjajah yang setelah di kemerdekaan di apa namanya di rebut oleh pemerintah melalui TNI, kemudian dilakukan pemberdayaan diatas di kebun-kebun tadi dengan pabrik-pabriknya. Di tahun 1996 dikonsolidasi atau bahasa gampangnya digabungkanlah beberapa PTP tadi ada 30 an tadi menjadi tinggal 14 PTP. Secara garis besar dia digabugkan sesuai dengan lokasinya atau teritorialnya. Ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera Utara, masing-masing provinsi hingga ke Timur sana. Untuk PTPN V ini itu adalah kebun-kebun pengembangan dari kebun PTP II, PTP IV, dan kebun PTP V yang ada di Sumatera Utara. Jadi aslinya ee ..kebun PTPN V

itu adalah kebun pengembangan atau dengan analogi lebih gampangnya kebun yang sudah ada di Sumatera Utara itu melakukan ee.... penambahan areal di Riau kebun PTP II, PTP IV, PTP V yang di Sumatera Utara kantornya melakukan pengembangan atau melakukan pembukaan kebun baru di Riau. Di tahun 1996 dijadikanlah satu perusahaan yang tiga PTP tadi itu di Riau menjadi satu perusahaan menjadi PTPN V. Jadi sebelumnya ada PTP saja tanpa ada Nusantara, setelah PP 1996 tadi menjadi PTPN V namanya PT Perkebunan Nusantara V. Statusnya persero Badan Perusahaan Milik Negara, karena memang 100 % sahamnya oleh pemerintah kita. Melalui menteri keuangan dan menteri BUMN. Dengan terbitnya PP 72 tahun 2014 sekitar tiga tahun yang lalu itu 90 % dari 100 % saham negara tadi dialihkan ke PTPN III holding. Jadi kalau Vinny pernah mendengar atau melihat atau mungkin memperhatikan semen Indonesia, pupuk Indonesia, BUMN-BUMN yang kemudian dijadikan holding dijadikan satu apa namanya, satu perusahaan eee.... PTP Nusantara juga seperti itu. 90 % saham PTP 1, 90 % saham PTP II, PTP IV, V hinga PTP 14 karena sekarang ada 14 PTPN itu dialihkanlah kepada PTPN III selaku holding BUMN perkebunan. Sehingga sekarang saham pemerintah di PTPN I, II, II, V, IV sampai 14 itu hanya 10 % saham pemerintah yang ada di PTPN ini sekarang. Tapi, PTPN III selaku holding tetap 100 % punya pemerintah sahamnya tetap 100 % dimiliki pemerintah. Dengan kata lain statusnya sekarang semacam anak perusahaan BUMN.

2. **Itu PTPN III pak yang statusnya anak perusahaan BUMN?**

Bukan, maksudnya PTPN V, I sampai 14 kecuali PTP III itu adalah anak perusahaan BUMN dari PTPN III kan seperti itu. Karena memang sahamnya dimiliki oleh PTPN III. Holding ini memang holding di saham. Jadi secara awal dimulai dari holding saham, yang berdampak pada hak-hak yang dimiliki oleh PTPN III holding termasuk dalam mengangkat, memberhentikan direksi penyesuaian struktur organisasi, mengefesiensikan organisasi itu hak-haknya dia. Sehingga dulu sebelum holding direksi PTPN itu ada lima sekarang ada tiga, komisarisnya dulu ada lima sekarang tinggal tiga ya. Baik organisasi ataupun penyesuain ulang struktur organisasi itu dilakukan oleh PTPN III untuk ya bisa saja meningkatkan efesiensi dan efektivitasnya. Itu sejarah ringkas terkait bagaimana status hukum dari awal sebelum berdiri sampai berdiri sampai sekarang ini. Untuk apa namanya untuk perkembangannya sendiri kebun-kebun PTPN V itu saat ini ada di enam kabupaten. Ada di Kabupaten Kampar untuk kebun dan pabrik ya. Kalau untuk kantor pusat

semuanya hanya di kota Madya Pekanbaru ini aja kantornya. Kalau kantor perwakilan memang ada di Jakarta. Untuk kebun dan pabrik ada di enam kabupaten yang pertama ada di Kampar, Rokan Hulu, dan juga di Indragiri Hilir, ada juga di Siak, ada di apa lagi satu lagi eee... rokan hilir dan terakhir ada di kuansing. Ada enam kabupaten yang kita punya kebun dan pabrik disana. Untuk kebun Sei Kencana itu sendiri adalah kebun peninggalan atau ex-PTP II kami menyebutnya XPTP II karena kan tadi di tahun 1996 masih ada III PTP yang punya kebun di Riau kan, ha XPTP II itu kebun Sei Kencana itu awalnya adalah kebun XPTP II. Setelah menjadi PTPN V ya PTPN V lah yang memiliki, ya apa namanya dibangun itu sekitar tahun .....

3. **Setiap kebun beda-beda ya pak tahunnya?**

Iya, mirip-mirip dekat-dekat tapikan ada data pastinya. Sekitar tahun 1990an awal sekali dulu dibangunnya tahun 90an. Komoditasnya disana ada sawit dan karet itu dikelola oleh satu manajemen kebun yang dipimpin oleh manajer dan beberapa afdeling. Jumlah total kebun Sei Kencana itu 4.866 hektare. Dia ada di desa Sinamanenek, desa sumber sari, desa kusau kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar.

4. **Jadi ada tiga desa ya pak?**

Ada tiga desa kebun Sei Kencana itu. Kalau yang terkenal dengan permasalahan itu di desa Sinamanenek seperti itu. Dasar pembangunannya eee...dulu itu Sei Kencana itu merupakan bagian dari areal yang dapat pelepasan kawan hutan dari menteri pertanian. Jadi menteri pertanian di kabupaten kampar itu melepaskan hutannya kurang lebih sekitar 30.000 ha. Kemudian dicadangkan oleh gubernur ee... sekitar 30.000 ha itu menjadi sebagai areal perkebunan dengan pembebasan hutan tadi kemudian ada pecandangan gubernur untuk areal perkebunan bisalah PTPN V mendirikan kebun, yang kebun kencana itu inilah dia. Nanti boleh saya kasih bahannya. Baru apa namanya yang sudah eee... terbit sekarang HGUnya disana sebagian, sebagian lagi belum ada HGU nya. Karena memang sedang bermasalah dengan masyarakat. Kalau dalam prinsip badan pertanahan nasional atau BPN itu selagi belum *clean and clear* mereka belum bisa untuk menerbitkan HGU. Walaupun dasar-dasar menerbitkan HGU ada pelepasan kawasan hutan, ada izin dari pemerintah, rekomendai dari bupati tadi sudah dikantongi tapi karena memang sedang bermasalah secara terdata dengan orang yang mengklaim atau masyarakat yang mengklaim disana PTPN juga belum bisa mengelurkan HGUnya.

5. **Jadi, sampai saat ini persoalan HGU masih belum terselesaikan pak?**

   Sampai saat ini itu masih bermasalah, alau dibilang selesai karena memang belum ada apa namanya belum ada terbit HGU. Kami menganggap begitu HGU terbit itulah masalahnya selesai. Nanti saya jabarkan masalahnya terbagi masalah hukum saja ada masalah politik atau masalah sosial dengan yang disana. Karena beda itu penanganannya juga beda-beda.

6. **Bagaimana Profil Kebun Sei kencana PTPN V Pekanbaru Riau?**

   Jadi kalau profil mungkin sudah saya sebutkan sejarahnya sudah saya sebutkan itu asalnya kebun XPTP II dulu disana kebun sawit dan karet sampai sekarang juga masih sama kemudan sudah ada beberapa ha dari areal tersebut yang remejakan saat ini. Tapi yang bermasalah saat ini masih belum di remajakan, sehingga sudah sangat tua sekali umur tanamannya. Karena sudah lewat dari 25 tahun. Kemudian untuk tujuan visi misi perusahaan komitmen budaya nanti saya kasih file saja, nanti saya copykan company profile atau di anual report juga boleh diambil. Disitu adasih apa-apa yang diharapkan. Corporat image yang diharapkan ini dari sisi perusahaan yang diharapkan itu sesuai dengan visi misinya ingin menjadi perusahaan agri bisnis, industri perkebunan yang terintegrasi. Maksudnya itu yang secara sistem secara prosedur kemudian sampai implementasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sistem terintegrasi tadi juga diartikan kita memiliki banyak sistem perkebunan yang kita terapkan sifatnya lestari yang sifatnya untuk mutu yang sifatnya lingkungan harus saling terkait, ini namanya perusahaan agri bisnis yang terintegrasi. Kemudian selanjutnya berwawasan lingkungan, kita ingin menjadi green, kita ingin menjadi perkebunan yang memang bisa apa namanya yang bisa tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan tapi bermanfaat juga untuk lingkungan bukan hanya alam tapi juga sosialnya kira-kira seperti itu.

7. **Bagaimana fungsi dan tugas perusahaan pak?**

   Fungsi dan tugas yang pasti sesuai anggaran dasar. PTPN-V itu, eeeee melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana anggaran dasarnya dalam industri perkebunan, itu tujuan utama. Kalau mau diringkas, yang pasti memenuhi harapan dari stakeholders suatu pemegang saham. Apa yang di gariskan apa yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi di perseroan ya tentu itu yang harus dijalankan. Tugas utama ya melaksanakan itu mencapai itu. Terlepas dari itu ada memang fungsi-fungsi tugas-tugas yang sebenarnya sifatnya eee... adalah sebagai katalisa perekonomian sebenarnya. Makanya kalau vinny yang asli di kebun

mungkin sadarlah dulu waktu di siasam itu dulu orang tua vinny lah orang pertama yang ada disitu. Lama-lama akhirnya ada kampungkan, sebelum ada vinny dan keluarga cuman hutan doang. Begitu kita masuk ada kampung ada desa akhirnya malah mungkin sekarang menjadi kecamatan. Itu yang dibilang itu yang mungkin bisa digambarkan sebagai PTPN V merupakan katalisator perekonomian. Terlepas dulu mungkin sudah ada chevron atau kaltek namanya atau apa itu migas migas perusahaan migas lebih dulu masuk kedalam lokasi tersebut tapi jujur sajakan tidak membangun eh bukan tidak membangun tidak berdampak seperti kalau perkebunan yang membuka usaha disana. Rata-rata kaya dikasikan dulu sebelum ada lindai tandun itukan cuman hanya kampung kecil begitu ada kebun disitu sekarang menjadi seperti kecamatankan seperti itu kira-kira. Belum lagi tugas-tugas lain sebagai apa namanya tugas-tugas untuk mensejahterakan melalui program-programnya jaman-jaman PTP awal dulu itu memang padat karya dibuat. Sehingga mereka yang tidak bekerja ya kalau memang mereka mau masuklah ke PTPN V kan.PTPN Ih Sehingga tenaga kerja di PTPN se Indonesia itu memang luar biasa. Kalau kita bandingkan PT swasta saat ini untuk apa namanya untuk mengelola sehektar kebun mungkin kalau dikita butuh lima orang atau tenaganya ada lima disana cuman cukup satu itulah kira-kira padat karya. Sehingga menyerap tenaga kerja banyak. Belum lagi dampaknya juga untuk mengembangkan masyarakat melalui program eee petani plasmanya. Karena jaman Pak Harto dulu mereka yang tinggal di provinsi atau ditempat yang padat ditransmigrasikan keluar jawa ya salah satu yang menerimanya PTPN V melalui program plasma-plasma. Itu fungsi-fungsi dan peran-peran yang sebenarnya tidak tertulis gamblang atau eksplisit dianggaran dasar. Tetapi memang fungsi dan peran sosial ekonomi itu dijalankan di PTPN V sampai saat ini. Karena memang kalau data BPS menunjukkan petani plasma terbesar di provinsi riau dimiliki oleh PTPN V jumlahnya.

8. **Berarti tanggung jawab sosial sudah dapat dikatakan terpenuhi ya pak?**

   Kalau secara terpenuhi atau tidak indikatornya yang pastikan kita tidak bisa tetapkan ini, tetapi paling tidak kami dari PTPN bisa menyampaikan bahwa tugas-tugas yang diembankan pemerintah itu dijalankan. Kami yakin mudah-mudahan dengan upaya yang ada hasilnya bisa optimal,hanya saja terdapat memang ada kekurangan-kekurangan,tapi semuanya adalah satu kesatuan yang gak putus, misalnya saat ini plasma-plasma itu membutuhkan peremajaan ulang, tetapi kondisinya peremajaan ulang itu, tidak bisa dilakukan kalau tidak ada biaya, apakah itu nanti harus jadi

beban perusahaan juga tidak mungkin kalau keberlangsungan, sebab kestabilitas, perusahaan juga harus difikirkan seperti itu. Tentu harus ada kebijakan –kebijakan itu 2000 sampai 2014 lalu dulu masih ada namanya biaya rotalisasi perkebunan, jatuhnya semacam subsidi dari pemerintah untuk petani, agar bisa meremajakan tanamannya yang sudah tua-tua tadi, hanya saja itu terhenti di tahun 2014 kemarin, saat ini belum ada lagi,ha seperti itu, kebijakan itukan satu kebagian undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah tukan satu kebagian dengan teknis yang akan dilaksanakan di bawah seperti itu kira-kira.

9. Bagaimana struktur perusahaan PTPN V pak?

Setelah itu strukturnya nanti saya kasih ke Vinny didalam profil nanti dilihat, intinya paling tinggi itu di organ kalu gak salah itu ada rapat pemegang saham dibawahnya sebagai pengawas dari rapat umum pemegang saham dilaksanakan atau tidak keputusan-keputusan rekomendasinya disebut dengan dewan komisaris, ada 3 yaitu komisaris utama dan ada dua orang lagi itu komisaris. Untuk komisaris utama namanya Amrizal, untuk dewan komisaris namanya ada Rekdion dan Adi Upayana, Amrizal ini apa namanya ee merupakan ee insan PTPN juga sebelumnya pernah bergabung di PTPN IV kemudian dia diangkat menjadi Direktur Keuangan di PTPN I, setelah itu dia di alih tugaskan di PTPN V menjadi Dewan komisaris, kalau untuk Rekdion ini dia adalah salah seorang pejabat ekselon IV kalau gak salah saya udah tinggi juga di Kementrian BUMN sendiri, untuk adi Upayana dia adalah Staf Komunikasinya Pak Jokowi, jadi dialah yang mengkonsepkan pidato-pidato, narasi-narasi biasanya kalau Pak Jokowi konsfrensi pers, dia dibelakang beliau itu, semacam staf komunikasinya atau staf ahlinya Pak Jokowi untuk berkomunikasi dia adalah dosen di UGM. Baru setelah itu dijajaran direksi dibawah tadi ada rapat umum saham dewan komisaris ada dewan direksi juga ada tiga ada yang disebut dengan direktur utama ada yang disebut dengan direktur operasional dan direktur komersil. Kalau sebelum holding dulu ada lima direksi dirubah empat dirubah tiga sekarang posisinya tetap tiga. Direktur utama namanya Muhammad Hidayat itu apa namanya sebelum menjadi direktur utama merupakan direktur komersil di PTPN V ini. Pada saat direktur utamanya sebelumnya bapak **Mahendra Santosa** di tugaskan menjadi direktur utama di PTPN 12 Surabaya direktur komersilnya pak Muhammad Yudayat diangkat menjadi dipromosikan menjadi direktur utama. Untuk direktur operasional namanya Balaman Tarigan dan direktur komersil namanya Muhammad Arwin Nasution. Kemudian dibawah itu ada dibawah direksi tadi ada kepala bagian

dan general manager. Kepala bagian ini adalah mereka **menyupap** kebun dan pabrik serta SBU-SBU yang ada dibawah PTPN V dibawah direksi ini tadi. Kepala bagian jumlahnya ada 12 sekarang ini. Kaya yang vinny datangin sekarang ini adalah sub bagian sekertaris perusahaan. Jadi kalau didalam bagian-bagian tadi ada lagi sub-sub bagian yang salah satunya Humas legal yang seperti vinny datangin sekarang. Tapi disini sendiri ada 12 ada bagian tanaman itu tugasnya menyupap untuk pekerjaan-pekerjaan tanaman untuk kebun untuk pupuk, ada bagian tekhnik pengolahan itu untuk menyuport pabrik, ada bagian keuangan itu untuk menyupap nanti pembukuan akutansi hingga pembayaran-pembayaran pembiayaannya, ada bagian pengembangan usaha itu yng nanti untuk menyupap pengembangan-pengembangan usaha, ada bagian apa namanya umum itu yang nanti menghubungkan perusahaan dengan pemerintah dengan instansi lebih kepada itu sih. Dibagian umum ini sendiri tugasnya ada agraria, ada perizinan, ada untuk pendidikan, ada untuk keamanan, dan ada sosial yang penting juga disana ada PKBL. Jadi dibagian umum ini memang lebih sering berhubungan dengan nanti kepolisian, pemerintahan tingkat 1 tingkat II, dewan kemudian eh dewan disini dimaksudkan dengan DPR ya maupun dia tingkat 1 atau tingkat II yang dipusat kemudian juga nanti apa namanya kepolisian tadi udah ya. Kemudian dengan masyarakat terkait PKBLnya tadi. Kalau di bagian sekertaris perusahaan ini masih cerita kantor pusat ada memang yang disebut dengan sekertarian kontemporer ada juga yang disebut dengan humas legal. Sekertariat kontemporer tugasnya sama kayak kontemporernya di pemerintahanlah mengatur jadwal direksi, pertemuan-pertemuan, undangan-undangan- acara-acara. Kalau humas legal ini fungsinya khusus biasanya untuk kehumasan yang ada di kantor pusat. Mulai dari pelayanan media, LSM atau mereka yang berkunjung ke kantor pusat ini. Walaupun mungkin ada permasalahan misalnya kepolisian memanggil seseorang atau memanggil pejabat di kantor pusat mungkin bisa saja humas yang menerima terlebih dahulu tapi nanti akan diteruskan kepada bagian umum. Makanya agak berbeda mungkin dengan teori yang vinny dapatkan humas itu berperan sebagai superman dia semua yang ngurus. Kalau dengan kompleksitas yang ada di PTPN V tugas itu sudah dibagi-bagi. Di humas sendiri dikantor pusat lebih kepada bagaimana caranya dia menjaga hubungan atau mengkomunikasikan stakeholders baik eksternal maupun internal kepada bagian-bagian terkait kepada unit yang terkait. Kalau memang bisa diambil tindakan langsung ya langsung kalau tidak harus di komunikasikan dihubungkan dengan bagian terkait. Tapi kalau untuk urusan

pencitraan, publikasi, penanganan wartawan itu memang ada di humas kantor pusat. Tidak ada dibagian lain yang diberikan kewenangan lain untuk itu. Untuk menjadi Publik speaker seperti sekarang untuk memberikan apa namanya untuk memberikan pernyataan-pernyataan memang yang diberikan kekuasaan untuk itu adalah direksi, kabag sektor dan humas. Jadi statement yang disampaikan humas itu bisa mewakili statement direksi. Walaupun mungkin direksi belum membuat persetujuan untuk itu. Tapi dengan sifat-sifat tertentu pada kondisi-kondisi tertentu humas boleh menyampaikan statement yang dianggap mewakili perusahaan. Kalau di kebun lain lagi dikebun itu ada yang disebut dengan manager, ada asisten kepala ada juga asisten. kalau di kantor pusat ini sudah berganti nama kalau KAUR kepala urusan itu namanya sudah berubah menjadi KASUBAG. Kalau asisten seperti saya sudah disebut dengan staff namanya balik lagi ke jaman dulu. Kalau dikebun namanya masih tetap asisten, manager, askep. Ada yang disebut dengan asisten umum itulah yang sebenarnya berperan fungsi sebagai humas dikebun. Tapi berbeda dengan fungsi humas kantor pusat yang murni bekerja di kehumasan dia disana juga melaksanakan personalia. Penggajian, santunan sosial, PHK, peringatan itu semuanya ada di ASUM. Hubungan-hubungan dia dengan pemerintahan setempat ada di Asum asisten Administrasi SDM Umum nama lengkap jabatannya. Tapi kalau dihumas kantor pusat kalaulah ada permasalahan selagi tidak dperintahkan langsung itu tidak menjadi kewenangan humas untuk mengurusinya langsung. Misal kalaulah ada pencurian dikantor pusat kalau dikebun yang melaporkannya asum kalau dikantor pusat bukan humas KP yang melapor tapi bagian umum. Karena kemanan ada di umum. Sudah mulai terbayangkan jadi ada perbedaan antara humas kantor pusat dan humas kebun perannya masing-masing. Kalau humas kebun ya bertanggung jawab untuk mempublikasikan kebunnya saja. Kalau kantor pusat yang semua kebun yang ada di PTPN V di tanggung jawabin. Jadi kalau PKBL itukan ada kalau tidak silap tujuh bidang bina lingkungan. Udah ngertikan tadi PKBL tidak usah saya jelaskan. Ada beberapa PK ada bidang industri juga yang bisa dibantu itu yang diluar itu CSRlah yang dimanfaatkan contohkayak misalnya ada instansiatau organisasi minta bantu mereka menyelenggarakan kegiatan mengejawantah,mereka mengadakan seminar apaa gitu misal anti narkoba atau macam-macam itu PKBL gak bisa bantu karna dalam undang-undang gak diatur untuk memberikan bantuan seminar itu, tanyalah Pak Azman pernah gak kalau seminar-seminar misalnya ada ee organisasi masyarakat LSM buat itu bantuan tetapi itu ada di HUMAS, jadi tugasnya

itu tadi selain untuk mempublikasikan membuat citra perusahaan yang bagus, membantu reputasi supaya baik kemudian melayani tamu-tamu perusahaan juga sponsorsiip CS Up ada di HUMAS di bagian sekretaris perusahaan tadi ya...dibawahnyakan ada HUMAS , merekalah yang membuat tugas menyaring sama yang kayak tadi yang saya suruh dia buat bantu 10 juta. Itu ada Kadin (kantor kamar dagang) itu mintaa... bantu ya...dengan pertimbangan direksi disuruh bantu ya.. kita bantu kita yang mengurus administrasinya kadang-kadang kita dimintai pertimbangannya jadi bisa dibantu atau tidak seperti itu maksudnya, jadi hal–hal utamanya itu komplikasi ke kantor pusat dan penerimaan pelayanan tamu pengkomunikasian kepada bagian terkait,tindak lanjut sesuatu hal kemudian untuk sponsorsip atau CSR lah kalau digeneralkan ya..karna kalau dibagikan satu-satu programnyakan pasti ada di HUMAS, tetapi secara garis besar empat tadi itulah program HUMAS tujuannya semuanya satu kalau bagian sekretaris perusahaan itu bagian HUMAS legalitif tujuannya satu kalau yang HUMAS saja yang pastikan kalau HUMAS legalitif itu sebenarnya beda,beda arah yang satu tujuannya bagaimana bisa menciptakan situasi yang kondusif HUMAS itu agar stake holder perusahaan memiliki rasa memiliki kita gak mau beda halnya dengan mereka yang berjualan rokok atau jualan produk jadi kayak jualan Bimoli, Sunco, mereka beriklan lalu ee.. HUMASnya beriklan bagaimana produk mereka laku PTPN V kan sudah diatur sedemikian rupa sifatnya adalah tender produknya itu dijual apa namanya ..dijual dikantor dipemasaran bersama,kalau di PTPN V produknya ada kelapa sawit dan karet itu dalam bentuknya ada jadi CPO,PKO,PKM yang sawit yang karetnya ada shet 10, shet 20 standar Indonetion Competen dalam IndonetionNumber twenty itu semuanya 80 persennya wajib dipasarkan secara bersama-sama oleh PTPN se Indonesia di satu tempat di satu kantor namanya PTKPBN di Jakarta sana Karisma Pemasaran Bersama Nusantara

10. Jadi dari sana dikirim pak?

Jadi barangnya tetap di tempat dimana kita menempuh apa di Pelabuhan Dumai atau Pelabuhan Siak tetapi barang kita itu dilelang oleh PTPKBN mereka ada satu anak perusahaan dari PTPN ini dibentuk pemerintah dulu satu, untuk menguatkan PTPN supaya tidak saling sikut-sikutan kalau sesama penjual sawit itu yang satu jual harga A yang satu jual harga B tentu akan semakin kecil pahamkan maksudnya? supaya bisa ikut .....Jadi klau memang kita gak jualan pruduk jadi langsung, itu kita bagaimana caranya tumbuhan kita kebun kita pabrik kita gak diganggu sama orang.

Sebenarnya itulah hakikat atau prinsip mendasar tugas HUMAS tadi. Untuk menciptakan rasa memiliki tentu butuh pencitraan, pencitraan itulah yang dilakukan oleh tim PKBL. Tentu perlu namanya PKBL atau juga bisa menggunakan CSR seperti itu kira-kira. Jadi saling kait mengait.

11. **Berarti di PTPN V CSR dijadikan sebagai salah satu program dari comunity Relation?**

    Ya...diluar tadi itu,itulah yang ada disekretaris perusahaan untuk bantuannya,tapi jumlahnya tidak sematerial atau tidak sebesar PKBL. Kalau PKBL itukan 4% dari laba bersih tahun sebelumnya maksimal ya... tergantung nanti rapat umum pemegang saham memutuskan berapa. Tapi maksimalnya di Undang-undang 4%. Tapi kalau CSR ini sifatnya gak materil paling 1-2 milyar dalam satu tahun, gak besar memang.

12. **Bagaimana pembagian kerja tiap divisi community relations dan government relations?**

    Kan sudah saya jelaskan tadi kan, kalau yang di humas hanya sebatas itukan kantor pusat bagian umum lebih terkait untuk itu kalau communitynya tapi kalau di pencitraannya ada dikita. Tapi kalau dikebun itu memang dipegang penuh sama humasnya (Asum) mau yang community mau yang government. Kalau government itu dibagian umum juga karena surat menyurat misalnya terkait perizinan terkait ketenagakerjaan atau terkait hal-hal yang hukum itu semuanya ada di bagian umum. Tetapi yang sifatnya kayak tadi ada pemerintah buat acara atau buat apa itu larinya ke humas. Misalnya ada undangan-undangan ini mewakili perusahaan itu biasanya humas kalau direksi tidak bisa. Gubernur misalnya mengundang makan malam bersama atau apa itu biasanya kadang-kadang dua-dua tapi memang itu lebih kepada sektor nanti humasnya nanti yang lebih berperan. Jadi nanti nampak bedanyakan yang satu lebih kepada tugas komunikasi yang satu lebih pada sifatnya yang prinsipil. Kerjaannya perusahaan izin-izin terkait tenaga kerja itu semuanya dibagian umum.

13. **Saya fikir PR disini lebih kepada urusan terkait government relation pak, bisa dijelaskan ulang pak?**

    Enggak, makanya tadikan sudah dibilang kalau dia di unit memang lebih jelas karena mereka memiliki data yang lebih konkret kan gitu. Kalau humas kantor pusat tentu dia satu provinsi lagi yang diurusnya, tapi kalau dikebun kan bisa fokus pada kecamatannya.

14. **Berarti divisi humas dengan divisi umum saling berkaitan atau dikatakan saling bekerja sama ?**

    Semuanya harus saling terkait semuanya saling mendukung. Kalau dalam struktur organisasi itu memang garis koordinasi tapi dalam satu apa namanya nanti kalau sektor itu saya bilang lebih istimewa kalau bahasa saya kalau umum itu ada dibawah direktur komersil kalau sektor itu dia dibawah tiga direksi. Jadi ada dua bagian dalam 12 bagian tadi yang memang sedikit berbeda dengan bagian-bagian lain. Ada bagian SPI namanya itu dia bertanggung jawab langsung ke Dirut. Ada bagian Sekper itu tiga-tiga direksi namanya sekertaris perusahaan dia melayani ketiga direksi. Ada bagian tanaman dia dibawah direktur operasional. Ada bagian keuangan ia hanya dibawah direksi komersil.

Tinjauan Umum PR

1. **Bagaimana sejarah dan perkembangan divisi PR/CR di perusahaan?**

   Kalau soal sejarah perkembangan divisi ini sebenarnya kalau di apa namanya dia sejalan dengan perkembangan perusahaan itu sendiri. Sejak awal yang namanya humas dikebun itu kalau namanya masing-masing PTP itu beda-beda. Ada yang namanya KPK kepala personalnya kebun ada yang namanya APK asisten personalnya kebun ada yang namanya asum setelah PTPN V namanya menjadi asisten Umum. Setelah tahun 2011 keatas asisten administrasi SDM umum sudah semakin diluaskan namanya karena tugasnya juga bukan umum-umum saja. Administrasi personalia, penggajian, PHK itukan ada dia dia. Kalau kesannya ASUM itukan hanya untuk keluar saja hanya untuk masyarakat desa untuk camat untuk pemerintah sedangkan kalau administrasi SDM umum ya semua tugas-tugas administrasi itu dia juga kan gitu.
2. **Siapa saja pejabat PR/CR?**

   Kalau di kantor pusat ini pejabat PR nya atau public relations tertingginya itu ada di kabag sekper namanya Romat K. Purba dibawahnya ada kepala Sub bagian Humas legal kepatuhan dan hubungan investor (HLKHI) Sampe Sitorus baru dibawah pak Sampe ini ada saya sama pak Fernando Saragih Staff Sub Bagian HLKHI ini garis koordinasi dibawah kami komando ada tiga ini dikantor pusat ya ada namanya krani dokumentasi ada namanya krani hubungan antar instansi ada namya krani administrasi disini namanya Sukir Siswanto, pak Muhammad Ikhsan, Disini ada ibu Nirmayana. Inilah kalau yang di KP PTPN V. Kalau dimasing-masing kebun itu

paling jabatanlah secara garis besar nama orang ada namanya manager yang bertanggung jawab manager kebun, dibawahnya ada asisten bagian umum ASUM tadi dibawah asum ada namanya kerani satu umum, kerani personalian ada namanya kerani agraria, kerani kemanan, jadi semua nampakkan bedakan kalau disini fokus pada kehumasan kalau disini sangat luas. Biasanya juga ada kerani sistem maksudnya dalam penera pan budidaya perkebunan sekarang konsumen menuntut penerapan perkebunan budidayanya yang lesatari yang green yang hijau yang subur sesuai dengan lingkungan, itu untuk bisa menjalani itu kan kita melaksanakannya ada sistem-sistem budidaya perkebunan ada namanya RSPO ada namanya SPO itu intinya budidaya perkebunan yang lestari yang sesuai dengan yang dimintakan oleh konsumen kita. Ada juga yang sifatnya wajib itu kayak SPO itu peraturan pemerintah yang memutuskan jadi gak boleh lagi buka kebun dengan bakar itu mencegah kebakaran hutan, gak boleh lagi sembarangan menggunakan zat kimia, kemudian tenaga kerja harus dijamin, kemudian pengelolaan limbahnya terpelihara seperti itu kira-kira.

3. **Terkait ISPO PTPN V mendapatkannya dari tahun berapa ya pak?**
   2012 kita dapat perdana sih di Indonesia waktu itu ada enam perusahaan termasuk kita salah satunya.
4. **Bagaimana hubungan PR dengan manajemen puncak?**
   Ini manajemen puncakkan kita sebut direksi kan ini diatasnya direksi nih tapi kalau manager ini diatasnya ada GM diatasnya lagi baru ada direksi. Hubungannya kalau di pusat lebih mudah dibandingkan dengan yang di kebun biasanya hanya manager saja yang bisa berhubungan dengan direksi.

Tinjauan tentang komunitas dan Community Relations

1. **Siapa saja yang menjadi publik perusahaan? Bagaimana karakteristik publik tersebut?**
   Berarti komunitasnya yang pertama ada komunitas petani Plasma dan KKPA itu komunitas yang pertama yang pasti itu adalah masyarakat yang ada disekitar unit kerja benar-benar berdampingan bahkan tempat tinggalnya mungkin ada yang sebelahan betullah dengan perusahaan. Ada komunitas Binaan yang mendapatkan bantuan-bantuan kemitraan itu dan usaha-usaha itu. Itu kami katakan komunitas juga karena sesekali waktu mereka ada dikumpul dan ada di buatkan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan-pembinaan. Kalau untuk masyarakat sangat luas apabila

saya jabarkan, yang intinya komunitas yang bersinggungan langsung dengan perusahaan ya komunitas petani plasma dengan komunitas PKBL.

2. **Kalau program PKBL tadi di pilih secara acak atau bagaimana pak?**

   Itu biasanya komunitasnya itu berdasarkan proposal yang masukkan tadi di PKBL. Siapa yang mengajukan, misalnya dari satu tempat ada 10 orang 20 orang diseleksi didatengin survey kemudian nanti dia akan mendapatkan keputusan dibantu atau tidak. Memang dulu pernah ada sempat dibuat desa binaan itu juga ada komunitasnya didalam tapi sekarang gak jalan lagi.

3. **Kalau program KKPA itu bagaimana pak?**

   Ya kayak apa ya, hemmm perusahaan berperan dalam penyedia lahan atau pemilik modal dengan masyarakat selaku pengelola. Nanti untuk hasil itu persentasenya 60% pemilik modal 40% pengelola. Seperti itu kalau KKPA, hampir sama dengan plasma. Bedanya pada pembagian persentase hasil dan plasma ini program pemerintah mereka menyiapkan lahan pengelola atau kita sebut aja ya petani itu bebas dari mana saja. Bukan melulu wajib warga lokal tidak. Kalau KKPA nih kan pengelola memang wajib warga lokal dia. Paham kan vin....

4. **Apa kendala dari berhentinya program desa binaan pak?**

   Peraturannya sih PKBL, karena PK untuk siapa BL untuk siapa kan seperti itu. Sedangkan bina desa itu kemaren menggabungkan dananya itu. Dari PK diambil dari BL diambil. Karena sifatnya ada yang hibah ada yang dikembalikan tanpa biaya administrasi. Jadi kalau dia PK kemitraan itu kan dipinjamin 10 juta nanti dengan biaya administrasinya kembali keperusahaan RP. 10.600.000.

5. **Jadi perusahaan ini bahasa gamblangnya peminjam modal dong pak?**

   Kalau bahasanya memberikan dana kerja tapi sifatnya bergulir. Karena nanti begitu dikembalikan diserahkan lagi ke pengusaha kecil lainnya. Jadi diputer terus duit itu, kalau bina lingkungan ya diserahkan sudah habis. Misalnya dia memperbaiki Masjid, membangun sekolah atau apa itu sifatnya bina lingkungan. Maksudnya begitu dia diserahkan jadi dana hibah gak kembali lagi. Tapi kalau yang kemitraan kan PK program kemitraan BL bina lingkungan yang PK tadi itu perusahaan menyerahkan kepada pengusaha kecil yang tadi misalnya 10 juta dalam jangka waktu biasanya satu sampai dua tahun itu mesti dikembalikan. Ya jumlahnya itu tadi biasanya ya dengan biaya administrasi 6 % bukan bunga ya, kalau bunga kan dia itu. Tapi yang pasti biaya administrasi yang dikenakan tadi itu 6 % dari total yang dia serahkn atau yang diterima oleh si pengusaha.

6. **Ini menggunakan jangka waktu ya pak?**

   Ada jangka waktu kalau yang itu, biasanya satu sampai dua tahun. Nanti pihak PKBL lah yang tau itu. Gak ada yang lama-lama kali biasanya itu.

7. **Menurut bapak pribadi apa arti penting menjalin hubungan baik dengan komunitas?**

   Sangat penting sekali, karena memang rantai pasok atau sumber bahan baku yang diolah di pabrik sePTPN V ini sebagian besar dari komunitas tadi. Karena memang sejak awal dibangun PTPN V ini untuk menampung buahnya masyarakat. Kalau dengan 575 ton kapasitas sekarang untuk TBS ya olahnya perjamnya 575 ton kalau mengandalkan hasil produksi TBS milik PTPN V sendiri masih kurang. Jadi butuh kita memang.

8. **Apa arti penting community relations bagi perusahaan?**

   Sangat penting sekali. Karenakan tinggalnya perusahaan ini hidupnya berdampingan dengan masyarakat. Ada masyarakat yang memang dia tumbuh karena perusahaan itu sendiri misalnya kaya karyawan misalnya kamu dan keluarga tetap juga masyarakat tetap menjadi semacam desa atau kelompok jugalah kan tinggal di Afdelling perumahan kebun itukan. Kalau arti pentingnya yang pasti masyarakat itu merupakan salah satu mitra strategis, baik itu yang diluar maupun yang didalam. Karena kayak karyawan sendiri itu juga sebagai mitra bagi perusahaan tidak sekedar pion tapi sudah menjadi aset penting asek kita untuk mencapai misi-misi perusahaan. Jadi ya masyarakat untuk perusahaan menjaga hubungan dengan masyarakat baik yang di internal maupun di eksternal ya sangat penting sehingga banyak program yang dibuat untuk itu. Kan itu tadi ada yang namanya PKBL ada yang namanya mungkin CSR karena kalau di PTPN itu dipisah dia. Ada yang namanya kemitraan petani kaya plasma kan itu namanya juga masyarakat kalau PKBL itu jatuhnyakan dia diluar plasma, tapi kalau plasma itukan murni pembangunan kebun kemudian peliharaan sampai nanti kerja sama penjualan buahnya kita memasok menerima buah dari dia kita memasarkan buah dia yang seperti itu. Jadi petani itu masuk dalam kategorisasi salah satu komunitas kita, hanya saja di Senamanenek tidak ada. Kalau disenamanenek komunitas plasmanya ada didaerah intan. Jadi memang Sinamanenek dulu ada masyarakat petani binaan tapi lokasinya bersebelahan dengan sinamanenek itu, nah itulah kebun intan. Tapi ya pada dasarnya komunitas di Sinamanenek ya masyarakat tempatan atau masyarakat di sekitar kebun itu aja. Kalau memang masyarakat lokal itu mau dianggap sebagai komunitas ya itu tadi

perusahaan tidak pernah sama sesuai undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan gak pernah menghambat serikat untuk berkumpul. Ya mulai dari sosial keagamaan misalnya ada pengajian-pengajian itu ya dibiarkan kan STM nya tempat kamu misalnya Sei siasam baguskan serikat tolong menolongnya Seisiasamkan salah satu bentuk komunitas yang memang di biarkan kebun tanpa diganggu. Tidak pernah ada pengekangan atau pembredelan untuk itu. Arti penting ya paling itu penjelasan dari saya.

9. **Berarti komunitas yang ada di sekitar perusahaan Sinamanenek tadi adalah warga lokal desa pak?**

   Ya warga lokal sama penduduk yang ada disana. Kalau kita mau pisahkan orang yang bekerja dikebun dengan keluarganya kan satu penduduk juga tuh satu kebunkan ya satu lagi yang ada disekitar kebun tadi.

10. **Bagaimana situasi ekonomi lokal di Komunitas?**

    Ya menjawab itu memang kan beragam ada daerah tang mungkin memang yang situasi ekonominya sudah diatas yang lain ada yang dibawah saya gak bilang miskin dan kaya ya. Karena memang biasanya kalau didaerah-daerah yang pasti menyesuaikan sama kondisi daerahnya. Kalau kayak didaerah Siak itu jujur saja komunitasnya sudah dibilang maju-maju. Karena rata-ratakan petani plasma yang punya lahan sawit yang lumayan yang asetnya lumayan itu dari segi ekonominya ya bisa dikatakan lebih baik daripada di Sinamanenek. Karena mereka memang masyarakat yang hidup entah bertanikah dia berdagangkah dia atau usaha-usaha lainnya. Tapi kalau pertanyaannya di generalisasikan kaya gini disesuaikan dengan kondisi tempat. Kalau di Sinamanenek sendiri tentu sosial ekonominya saya gak punya data pasti tapi yang pasti kayanya bukan seperti yang di Ujung Batu. Ya masih dibawah tapi saya gak bilang disana miskin karena memang itu adalah kota kecamatan. Sinamanenek itu kecamatan dan disitulah ibu kotanya. Ada kantor desa dan kantor camat disana.

11. **Apa masalah khusus yang dihadapi komunitas pak?**

    Secara umum sih biasanya kesinambungan atau continueitas mereka memasok buah ya namanya pengusaha namanya dia pelaku dagang dimana yang harganya lebih tinggi mereka akan jual kesana. Sedangkan memang sebenarnya dari sisi etikanya merekakan anak perusahaan eh bukan apa ya dikatakan perusahaan ini sebagai bapak angkat yang sejak awal membangunkan kebun, kemudian memelihara, sampai dia

berbuah diserahkan sama plasma. Harusnya sih kalau memang secara etis paling tidak itu ada semacam “ketergantunganlah” karena mereka tau pabrik kita itu dibangun untuk nampung buah dia. Cuman sekarang inikan banyak pabrik-pabrik swasta yang dibangun tanpa kebun. Jadi mereka membeli buah masyarakat dengan harga yang lebih tinggi supaya buahnya bisa masuk. Ya wajar karena memang kebunnya tidak ada. Kalau kitakan ada kebun sendiri itulah yang membuat harganya berbeda. Hanya saja memang masalah-masalah tidak masuknya buah yang harusnya masuk atau tidak masuknya TBS salah satulah yang menjadi masalah. Yang kedua ada masalah biasanya si petani ingin meremajakan lahannya itu mereka butuh bantuan perusahaan, yang biasanya menjadi masalah itu legalitasnya ada yang sudah dijual berpindah tangan sedangkan di kita masih data yang lama. Kalau memang mau dia dimasukkan ke BANK dan kita menjadi bapak angkat atau menjadi penjamin itu juga harus jelas legalitasnya. Yang ketiga ada masalah internalnya sendiri yang berdampak kepada kita kadang-kadang antara pengurus koperasi tadi antara ketua dan anggota atau sesama pengurus ada yang tidak lagi sejalan gak selaras mereka nanti bermasalah sehingga piutang yang kita miliki atau utang yang dia punya sama kita tidak terbayar.

12. Apa yang perusahaan lakukan ketika tidak terbayar?

Tentu yang bisa kita lakukan hanya semacam pendekatan-pendekatankan. Kadang-kadang kita kalau disisi-sisi hukumnya kita melibatkan kejaksaan karena kan BUMN itu atau PTPN itukan masih bisa menggunakan jasa JPN jaksa pengacara negara namanya. Jadi kejaksaan itukan berperan sebagai penuntut di pengadilan dia yang menuntut pidana orang bisa juga jadi jaksa pengacara negara untuk BUMN untuk pemerintah jatuhnya menjadi pengacaranya PTPN V lah. Itu juga menggunakan jasa si jaksa untuk melakukan hal-hal lah ntah kadang mereka menjelaskan secara hukum kalau mereka gak bayar apa yang bisa dilakukan. dalam tanda kutip memberikan tekanan-tekananlah seperti itu. Biasanya sih dimulai dari pendekatan persuasif dulu apa yang bisa dibuat mendudukkan kembali menstruktur hutanglah.

13. Kalau untuk masalah khusus Sei Kencana sendiri apa pak?

Masalah di Kencana keran Plasma disana gak ada, plasmanya Sei Kencana itu kan digabung dikebun lain Sei Intan namanya jadi gak masuk ke Sei Kencana ya memang masalah yg general tadi gak ada. Tapi disana itu masalah pengakuan lahan. Masyarakat mengakui lahan yang dimiliki oleh kebun Sei Kencana ada yang masuk kedalam lahan ninik mamak atau masyarakat adat. Sehingga sampai saat ini

menuntutlah lahan itu untuk diserahkan kepada mereka. Belakangan tahun 2013 ada terjadi kesepakatan antara perwakilan masyarakat Sinamanenek dengan perusahaan. Di Fasilisasi oleh pemerintah setempat waktu itu Bupati Kampar dan DPD dewan perwakilan daerah panitia akuntanbilitas publik DPD DAP RI yang menyetujui agar lahan itu tidak diserahkan oleh masyarakat tapi dicarikan lahan lain untuk diserahkan kepada mereka dengan pola KKPA. Kita jadi bapak angkat kita carikan lahan mereka nanti kita belikan lahan mereka nanti membayarnya melalui buah yang dihasilkan tadi.

14. Masyarakat setuju dengan solusi itu pak?

Masyarakat setuju waktu tahun 2013, dikasih jangka waktu satu sampai dua tahun. Tapi ternyata dengan kondisi tata ruang Riau yang sampai sekarang belum final itu, jadikan pengaturan hutan dinegara ini itu ada kewenangannya di tangan presiden, kalau untuk sertifikasinya kan BPN kalau untuk hutankan menteri kehutanan tapi semuanya itu untuk pengesahaan tata ruang rencana tata ruang rencana wilayah RTRW itu pengesahannya melalui PP peraturan pemerintah yang diteken oleh presiden. Yang jadi permasalahannya dari tahun 1986 RTRW Riau itu bentuknya adalah dalam bentuk keputusan presiden kalau gak salah TGHK tata guna hutan kawasan. Jadi yang mana yang hutan mana yang boleh di kelola mana yang tidak boleh dikelola yang mana hutan lindung itu tahun 86. Bayangkan sajalah perkembangan RIAU dari 86 sampai sekarang. Contohnya kantor gubernur yang dijalan sudirman polda itu kalau dalam TGHK 86 itu hutan. Sudirman itu sebagian besar masih hutan, permasalahan-permasalahan seperti itu. Karena kalaulah dia masih hutan seharusnya gak bisa dibangun nah kayak gitu jugalah masalah kawasan atau areal di RIAU ini. Terbentur dengan peraturan yang belum final. Memang belakangan ini lagi disusun, jadi ada beberapa daerah yang sampai saat ini belum selesai yang bermasalah itu RIAU sama Kalimantan saya lupa Kalimantan apa itu yang lain sudah selesai RTRW yang terbaru posisi 2000 keatas lah semua. Tapi sampai sekarang RIAU belum selesai apakah disana banyak benturan-benturan saya tidak bisa jelaskan. Hanya saja menteri kehutanan sama tim terpadunya dan dari pemerintah daerah sekarang sedang menyusun nih. Misalnya dari pemerintah ini 70ha ada kawasan hutan yang bisa dilepas kalian yang tentukan yang mana dibatas-batasilah yang ini gak boleh diganggu ah itulah yang sekarang di godok oleh pemerintah daerah tingkat II tingkat I DPRD merekalah. Balik ketadi kita kan pingin cari lahan pengganti untuk masyarakat untuk dibangunkan kebun sawit atau yang

sudah jadi diserahkan ke masyarakat dengan pola KPPA kayak plasma. Itu mencari lahan ternyata susah.

15. Itu lahan kawasan Sei Kencana atau bebas daerahnya pak?

Bebas kok, gak harus di Kencana waktu itu kesepakatannya 2013 waktu itu boleh di apa namanya pokoknya disekitaran RIAU inilah. Waktu itu bukan 2800 ha yang mau dituntut. Karena berapa sih penduduk asli dusun satu Sinamanenek karena yang bermasalahkan masayarakat adat dusun I Sinamanenekkan banyak dusun-dusun gak semua. Karena yang mengakui mngklaim 2800 ha di Senamanenek adalah masyarakat dusun I jadi berapa KK disana. Nanti sejumlah KK itu akan di kali 2 ha, satu KK dapat dua ha. Selain susahnya mendapatkan lahan pengganti jumlah KK nya ini luar biasa bertambah dalam waktu setahun. Awal 2013 jumlah KK ada 400 KK sekarang sudah menjadi 1400 KK tiba-tiba berkembang gak mungkin lahir semua. Sedangkan kan ceritanya masyarakat adat kalau masyarakat adatkan adalah orang asli bukan pendatang. Nah sekarang yang bermargapun ada jadi masyarakat asli sana tuh dibuatkan. Jadi saat ini posisinya pas 1400 jadi kalau dikali 2 ha pas 2800 itulah dia memang. Jadikan keliatan kali tuh 2013 masih 400 KK belakangan sudah menjadi 1400.

16. Jadi pemerintah pada saat ini pro pada masayarakat?

Sebenarnya pro atau tidak pro tidak bisa gak statement saya itu terserah kamu mau menilai bagaimana hanya sajakan ada jalan tengahnya kemaren. Tapi kalau kita lihat dari sisi legalitasnya, sebenarnya desa Sinamanenek itu adalah masalah lahan. Masalah lahan ini bisa kita lihat yang pertama karena sosial yang kedua karena status hukum. Kalau dari status hukum lahan tadi adalah lahan yang dilepaskan status kawasan hutan oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri kehutanan. Berarti kalau sebenarnya secara hukum itu bukan lahan adat karena kalau lahan adat gak kan mungkin dilepaskan dari kawasan hutan itu dulu yang pertama. Yang kedua masalah sosial, masyarakat ingin mengambil lahan tersebut karena menganggap itu adalah lahan nenek moyangnya. Kalau dari sisi hukum sudah tiga kali PTPN V digugat sudah tiga kali digugat satu kali menang dua kali mereka menarik diri ditengah jalan. Jadi ada gugatan perdata di Bangkinang yang pertama kita menang kita jelas kita punya pelepasan kawasan hutan kita punya rekomendasi dari pemerintah daerah. Sehingga dianggap areal itu adalah areal milik PTPN V. HGU itu diurus tahun 79an keatas sedangkan kita disana tahun 80an. Kenapa tahun 97 98 diurus HGU nya, kenapa gak dari tahun 80 karena memang dulu zaman pak Harto yang PTPN seIndonesia gak perlu

ngurus HGU itu dulu. Reformasi agraria undang-undang agraria keluar wajiblah semua perusahaan memakai HGU. Jadi memang kalau ada yang bilang kok enak kali PTPN V bangun kebun gak pakai HGU dulu, karena memang zaman pak Harto dulu gak perlu. Tapi waktu Pak Harto lengser 98 kan berubah tu reformasi diberlakukanlah undang-undang agraria secara penuh kayaknya kalau bahasa saya jadi wajiblah mulai saat itulah diurus. Jadi Sinamanenek tuh satu hamparan. Selanjutnya ada masalah sosial ada masalah legal dari sisi legal kita punya dasar sama kayak kita mau urus sertifikat tanah SHM itukan udah harus ada SKGR nya dulu ada keterangan desa dulu, ha kita udah punyalah keterangan desa ama SKGR kalau dia di HGU namanya pelepasan kawasan hutan sama rekomendasi dari gubernur itu udah ada. Jadi untuk meningkatkan statusnya menjadi HGU itu BTN akan mau kalau tidak ada klaim. Jadi kebun Sinamanenek itu total kebunnya ada 4.800 tuh kebun Sei Kencana. Dia adalah bagian dari SBU Tandun yang jumlahnya 30.000 ha belum masuk Batu Langka 30.000 ha lagi tapi yang satu hamparan di kebun PTPN V satu hamparan nih kaya bentuk ketupat nah Sei Kencana ada didalamnya. 30.000 ha itu yang di kebun Sei Kencana 4.800 yang bermasalah 2.800 ha. Jadi ada jumlah total ada yang bermasalah. Dasarnya itu adalah pelepasan dari mentri pertanian. Dulu itu hutan dilepaskan status kawasan hutannya dijadikan untuk perkebunan kemudian ada dari gubernur. Jadi tahun 90an itu kan reformasi tuh bolehlah diurus HGU tadi. Jadi totalnya dari 30.000 tadi yang satu hamparan lepas karena memang BPN yang gak sanggup sekaligus mengHGUkan. Kalau HGU itukan menggunakan sertifikat datang ketempatnya diukur diapain baru disiapin surat-suratnya. Ternayata karena dia bertahap 1997 keluar 12.000 itu bagian Tandun keatas, di tahun 2001 berapa kalilah ini keluar suratnya terakhir yang di Sinamanenek tadi waktu pihak BPN mengukur ada 10 orang yang mengklaim ini lahan nenek moyang kami jangan diganggu. Karena ada klaim secara hukum BPN tidak bisa mengeluarkan HGU itulah tadi sebenarnya. BPN meminta pihak perusahaan menyelesaikan terlebih dahulu dengan masyarakat yang mengklaim lahan, di pengadilan sudah dilakukan tahun 2000. Tahun 97 98 kan diukur ada yang klaim sampai 2007 demo demo demo lah mereka. Akhirnya 2007 pemerintah ikut campur tangan dari gubernur dari kementrian hasilnya dibentuklah tim untuk penyelesaian sengketa oleh gubernur. Biar tau dulu cerita sinamanenek ya. Dari 2007 ke 2009 bergeraklah tim ini tadi, dibuatlah hasilnya merekomendasikan agar lahan tadi diserahkan kepada masyarakat itulah rekomendasi dari pemerintah. Yang pasti dari anggaran dasar aset itu yang bisa menghapus menyerahkan dan menghibahkan yang

bisa menjual bukan direksi bukan komisaris adalah rapat umum pemegang saham. Terus dikirimlah surat rekomendasi dari mentri BUMN "pak mentri ini ada rekomendasi dari pemerintah daerah lahan untuk diserahkan. Sebenarnya PTPN V ini kewenangannya kalau nanti dari pemegang saham bilang udah kasih selagi ada tertulis dari pemegang saham itu bisa kita serahkan". Tapi yang memberi pemerintah adalah pemegang saham bukan pemerintah. Karena memang aset negara itu bisa berpindah pertama jual beli, yang kedua hibah, yang ketiga putusan pengadilan jadi bisa berpindah aset negara itu. Jadi oleh pemerintah oleh pemegang saham mentri BUMN dia kan tau juga undang-undang kekayaan negara itu gak bisa serta merta diserahkan begitu saja tanpa persetujuan DPR. Pergilah ke DPR rapat dengan DPR pusat oleh DPR komisi 6 yang membidangi kementrian BUMN gak berani kasih karena gak ada dasar menyerahkannya ke masyrakat. Dikaji hukumnya status hukum tadikan jelas lebih kuat PTPN V jadi oleh kementrian BUMN oleh DPRD pusat Jakarta dibuatlah jalan ini tidak bisa diikuti rekomendasi. Karena rekomendasikan bukan putusan hakim, rekomendasi namanya aja rekomendasi sarankan semacam himbauan agar masyarakat masalah ini diselesaikan dipengadilan itulah jawabannya. Jadikan ndak mau intinya pemegang saham BUMN DPR gak berani, karena kalau dikasih nanti begitu diaudit bisa kenak penjara yang ngasih, karena dianggap korupsi. Menghilangkan atau merugikan kekayaan negara keuangan negara, panjangkan ceritanya. Jadi 2009 dijawablah surat oleh mentri juli 2007 dibentuk tim maret 2009 keluarkan hasilnya kita tuliskan berproseslah sekitar berapa bulan juni 2009 rapatlah mereka di 2009 itu juga dikirimlah surat ke BPN Bangkinang sama ke Gubernur. Kalau di PN bangkinang disuruh jadi mediator cari apalah jalan tengah. Ke gubernur dibilang dapat merekomendasi agar PN Bangkinang menjadi mediator, belum lagi sempat menjadi mediator datang gugatan mewakili Sinamanenek itu diwakilkan oleh KUD Wina Mandiri gugatan di pengadilan. Karena sebenarnya kalau pengadilan perdata kan ada tahap mediasinya disitulah hasilnya kita menang. Karena memang secara hukum kita jelas. 2011 itu 2010, 2009 udah masuk gugatan desember dah hampir satu tahun kan kia menang. 2011 masuk gugatan lagi 2011 itu jugak masuk gugatan ditengah-tengah jalan mungkin mereka sadar buktinya gak kuat akhirnya mereka mencabut gugatannya. 2011 mereka melapor ke KOMNAS HAM, jadi melalui politik udah gak lewat lagi di DPR kita masih dipilih untuk tidak menyerahkan di Hukum kita juga menang. Akhirnya masalah inikan sudah sampai ke presiden kemana-mana ini 2012 masuklah PAP panitia akuntabilitas publik DPD bukan DPRD lagi tadi DPRD gak

lewat diakan DPD lagi. DPD ini dibuatlah akhirnya jalan untuk mempertemukan lagi dikasih tau ini sudah sidang ini udah putusan pengadilan pemegang saham gak mau ngasih pengadilan juga ga ngasih. Cobalah kalian mau gak duduk lagi pa kira-kira jalan tengahnya, oleh Bupati akhirnya di 2012 itu sepakat PTPN V bangun kebun untuk masyarakat. Itu 2012 dikasih waktu setahun oleh PTPN V gak dapat juga lahannyakarena kendalanya itu tadi masih dalam kawasan hutan itu tadi yang saya katakan tata ruang kita sampai sekarang belum final. Kalau kita kasih hutan lagi bermasalah lagi gak bisa keluar sertifikatnya masalahnya udah mulai nampakkan. Sedangkan direksi iya iya aja kalau pemegang saham membolehkan menyerahkan lahan kepada masyarakat, pemegang saham gak berani kalau dikasihnya korupsi menghilangkan aset negara. Sedangkan waktu PTPN V datang dulu kesana ditawarkan sama mereka untuk jadi petani plasma gak mau sebagian yang mau, begitu diliatnya kawan-kawannya di plasma maju akhirnya orang-orang ini pingin itulah yang dituntutnya. Akhirnya sekarang muncul satu kelompok lagi dulukan udah setuju nih, udah ada 95 ha akhirnya terbeli punya swasta. Lahan yang sudah dibeli inikan harus diserahkan ke masyarakat karena dia polanya plasma itu dalam undang-undang kita kewenangan bupati menentukan calon petani calon lahan namanya CPCL. CPCL itu dalam undang-undang harus bupati yang meneken, bupati bingung siapa yang dijadikan CPCL orangnya 1400 kalau dipilih sebagian nanti yang lain nuntut kalau ndak dikasih gak selesai juga masalahnya. Rencananyakan kemaren bertahap yang dapat dikasihkan dulu sampai nanti selesai. Sampai sekarang bupatinya gak mau buat. Jadi 2800 itu belum ada yang lepas tapi sesekali kayak kemaren terakhir tahun 2013 pernah didemo, dua minggu gak bisa dipanen masuk mereka kedalam areal. Masuk ibu-ibu buka buka baju dia masuk kedalam larilah pengamannya tapi kalau laki-laki pukul-pukulan lah paling ini ibu-ibu buka baju lari telanjang bulat kayak gitu ya larilah pengamannya. Saya selaku Humas kebun waktu itu makanya saya ngalamin.

17. **Dari masalah Sinamanenek ini Humas mengambil perannya secara keselurahan atau tidak pak?**

    Humas di perkebunan tidak bisa merumuskan masalah karena memang masalahnya sudah menjadi masalah kantor pusat. Kalau merumuskan masalah atau memetakanlah disana paling tau dikebun paling tau ini siapa sih kelompok baru ini orangnya yang mana tapi kebijakan yang memutuskan rencananya seperti apa paling usulan dari kebun dan kantor pusat yang mengeksekusi nah evaluasi disini karena kewenangannya gak ada disana. Kalaupun disana paling nanti ada kebijakan dari sini

dijalankan disana gak cocok disana melapor lagi ke kantor pusat humas sama manager kebun. Pak gak cocok strateginya kita ganti yok ah di umum nanti baru diputuskan lagi umum itu berarti melibatkan direksi jugak. Jadi sampai ke direksi itu kalau masalah seperti itu gak bisa diputuskan sepihak dan banyak hal-hal yang sifatnya non tekhnis gak ditulis laporan-laporan semuanya gak ditulis ada yang resmi ada yang tidak resmi yang keptusan dan kebijakannya jugak banyak yang tidak tertulis. Jadi ini berjenjang lapor sana lapor sini jadi gak kayak dikampus humasnya superman semuanya diatasi. Karena kalau udah sebesar ini perusahaan humasnya tidak bisa seperti itu.

18. **Jadi bentuk dari community relations di Sei Kencana Kampar itu apa ya pak?**

    Nah ini ada di bagian PKBL, kayak berapa sih ke Kencana untuk bangun sarana air bersih, bangun sekolah, bantuan sapi qurban, bantu jalan, bantu gedung-gedung, kantor. Jadi PKBL itu sudah diterapkan oleh pemerintah khusus BUMN pada tahun 1996.

19. **Bagaimanakah dampak yang dirasakan dengan adanya kegiatan community relations terhadap komunitas?**

    Dampaknya yang pasti masalah juga belum selesai karena yang bermasalahkan memang lahan. Tapi apakah karena kita di komplain terkait lahan gak boleh kita kasih bantuan kan tidak juga, kan kita kasih bantuan disana tetap aja sampai sekarang masih mengklaim. Cuma kalau gak dibantu akan lebih runyam lagi klaimnya, kalau sekarang masih bisa dikasih pengertian janganlah dulu diganggu ya kalailah nanti dia berkeras pingin masuk terus kan sama-sama habis energi dia habis waktu begitupun dengan kita sama habis biaya. Tapi kalau diluar Sinamanenek dampaknya ya mitra kita masuk pasokan bahan baku. Kalau gak masuk bahan bakunya ya PTPN V gak ngolah ya pasti rugi. Kalau hubungan gak baik ya buah gak akan masuk ke perusahaan kan. Kedua kita kalau gak kita bangun kemitraan bagaimana daerah itu bisa berkembang. Kalau gak kita kasih PK tadi bantuan-bantuan untuk mengembangkan usaha penyuluhan-penyuluhan, harapan kita maju bersama juga harapan kita atau visi misi perusahaan gak tercapai kan. Makanya selain plasma, plasma itukan juga membangun ekonomi masyarakat itu ya yang gak pakai plasma jugak usaha-usahanya pedagang, industri, perikanan, perkebunan, apa lagi tuh eee jasa mungkin dia buat bengkel-bengkel atau apa ya dibantu supaya paling tidak ia menjadi agen-agen untuk membangun apa daerah dia menciptakan tenaga kerja jugakan. Tapi yeng terbesar memang yang ketiga ya agar kiat itu aman, komunitas

tadi dijaga masyarakat sekitar mulai dari pemerintah masyarakatnya supaya ya jangan meninjai walaupun sampai sekarang masih ada jangan mencuri jangan menduduki paksa lahan kita jangan mengambil alih, nanti kalau lahan kita di ambil alih terus makin lama lahan kita habis.

20. Kalau untuk media pak, media yang digunakan untuk memberikan informasi kepada komunitas atau khalayak umum itu melalui apa?

Kalau di kantor pusat karena jarang bersinggungan langsung dengan yang dikebun itu melalui media baik yang konvensional maupun yang nonkonvensional. Konvensional maksudnya media cetak elektronik yang nonkonvensional eee jarang sekali sih, tapi itu larinya nanti ke humas asum kebun. Tapi intinya kantor pusat lebih sering menggunakan media cetak dan elektronik. Paling besar itu publikasi di tahun 2015 2016 70 % terkait PKBL. Publikasi tuh banyaklah dibuat jatuhnya misalnya kalau kita menerbitkan 30 atau 20 pemberitaan dengan satu judul itu banyakan terkait PKBL. Jadi 2016 kita misalnya menerbitkan 70 judul dalam setahun berarti kalau 70 berita setahun dibagi 12 sekitar berapa tuh ada 5 berita satu bulan ya sebagian besarnya itu terkait PKBL. Tujuannya biar masyarakat tau PTPN V membantu jadi jatuhnya gak kayak di agama kalau tangan kanan ngasih tangan kiri gak perlu tau kalau diperusahaan memang harus di publikasikan secara kuat supaya mereka tau. Intinya saya gak bisa membahasakannya ya pokoknya kalau kita gak memberi tau bantuan kita ini adalah kesalahan. Nanti persepsi masyarakat akan menjudge kita bahwa perusahaan tutup mata.

21. Menjalin hubungan komunikasi dengan komunitasnya melalui apa pak?

Kalau di kantor pusat melalui surat atau lisan atau yang kita telfon mereka datang kalau surat biasanya resmi. Contohnya komunitas plasma tadi disuratn mereka diajak bertemu atau ada kepentingan yang sama ada tujuan yang sama program apa proyek apa biasanya itu ada surat menyurat setelah itu ada pertemuan ada notulennya akan ada kesepakatannya yang dijanjikan. Ya ada juga sekarang namanya zaman sudah maju bisa via HP, email udah gak susah. Kita butuh apa-apakan bisa telfon mereka butuh bisa telfon. Ada yang lisan juga yang tergantung kebutuhanlah kalau memang penting sekali waktunya mendesak mungkin di tlfn. Kadang ya kalau banyak luang waktu ya datang sekalian silaturahmi ada musyawarah juga ya biasalah kita kerja.

22. Ketika PTPN V melakukan identifikasi untuk mengetahui masalah yang sedang dihadapi komunitas itu bersifat formal atau informal ya pak?

Identifikasi biasanya sifatnya internal di PTPN V, formal gak formal tergantung kebutuhan kalau bisa didapatkan informal tapi kalau harus melalui surat menyurat resmi ya formal. Misalnya untuk mendapatkan data dari kepala desa kalau humas memiliki hubungan baik ya bisa langsung dengan telfon atau datang tanpa surat. Dua-duanya dilakukan lah yang jelas.

23. Proses analisis yang dilakukan PTPN V untuk mengidentifikasi masalah tersebut bagaimana pak?

Secara holistik tidak hanya dengan melihat masalah itu dari sudut pandang perusahaan tapi juga dengan sudut pandang masyarakat. Yang kedua biasanya dilakukan oleh karena kemungkinan yang akan didiagnosa dianalisa seperti apasih sebenarnya apakah dia hanya masalah hukum atau masalah sosial atau masalah ekonomi.

24. Setelah melakukan penanganan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh PTPN V pak?

Biasanya sifatnya evaluasi itu akan dari pimpinan puncak baik itu dari kebun maupun dari pusat. Kalau yang di kebun ada manager ada GM nanti asum kan melapor, pak kita sudah ketemu sama masyarakat mereka mintaknya dilakukan ini “ok lakukan jalan”

Biasanya seperti ituwalaupun gak selalu seperti itu biasanya ada laporan tuh ke kantor pusat. Karena untuk melakukan sesuatu mengerjakan sesuatu ada kewenangan di kebun ada yang enggak. Misalnya pak mereka masyarakat mintak dibangunkan sekolah pak masyarakat mintak tolong dibangunkan sarana air itu dikebun gak punya kewenangan di kantor pusat punya. Kebun nanti akan memasukkan informasi kemari apakah dia akan komunikasi dulu dengan pemerintah daerah disana tolonglah pak buatkan proposalnya. Tapi tugas Humas dikebun tadi ya pak desa mintak dibuatkan ini kata manager yaudah suruh di buat proposalnya tu balik lagi humas pak disuruh buat proposalnya setelah jadi proposal dibawalah ke kantor pusat. Kita ambil contohlah misalnya bantuan bangun masjid atau direhap masjidnya itu sampai ke camat. Itu nanti baru dikirim kemari nanti disini baru ada evaluasi ada surveynya ada analisanya baru penetuannya bisa atau tidak bisa. Kalau bisa baru ditentukan pelaksanaannya nanti ya evaluasinya tetap di kantor pusat.

25. Kalau untuk kontrol yang dilakukan PTPN V terhadap komunitas yang terlibat dalam community relations apa pak?

Yang pasti melalui komunikasi yang sifatnya rutin. Komunikasi tadikan banyak tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk pertemuan atau apa lagi macam-macamlah apalagi dia terkait pihak ketiga ya kayak plasma itu komunikasi setiap hari konfirmasi harga wajib setiap hari. Tapi kalau komunikasi yang terjadi di Sinamanenek saya lihat komunikasinya selalu dalam bentuk pertemuan. Nanti tetap akan ada notulennya tapi kalau dia buat acara kegiatan kayak 17 agustus bantulah acara kami biasanya dalam surat menyurat. Komunikasinya tidak melulu dalam pertemuan formal, informal jugak ada karena memang semua jenis komunikasi itu dipakai kok. Realisasinya dalam pelaksanaan kerja ini gak bisa kaku semua karena nanti legalitasnya harus jelaskan. Ya adapun yang mau dibantu bida secara lisan tapi tolonglah suratnya nanti diurus jugak seperti itu.

26. Adakah rencana jangka pendek dan jangka panjang dalam menjalin hubungan dengan komunitas tersebut?

Kalau untuk pertahun itu ada RKAP cuman di RKAP ini untuk komunitas memang gak kayak detail. Cuman dianggarkan jumlah total misalnya di PKBL rencana kerja untuk tahun 2017 untuk pendidikan misalnya nanti untuk kampar berapa juta, kampar itukan sinamanenek dia sifatnya dia menunggu ada proposal masuk dari Sinamanenek anggaran ada disurvey bisa ya dibantu. Untuk rencana jangka panjang itu disana nanti memang secara detail atau eksplisit jelas gak ada tapi jelas di jangka panjang kita butuh akan mengolah segini banyak. Jadi kita harus membangun sendiri, kemudian kita harus memiliki mitra melalui ini itu ada sih. Kalau dalam jangka panjang ini RJP itu ada tapi memang sifatnya gak detail kayak yang kita bayangkan itu. Dia lebih umum itu anggaran-anggarannya aja biasanya itu untuk rencana kerja setahun ini berapa persensi nanti kalau kita dapat lima tahun lagi laba kita segini berarti segini bisa kita kasih bantuan ke masyarakat itu ada. Untuk anggaran rutin yang kamu tanya juga ada di RKAP semua.

Tinjauan Government Relations

1. **Apa sajakah bentuk-bentuk government relations di PTPN V Pekanbaru pak?**
   Ada surat menyurat ada pertemuan ada rapat yang seperti itu ada pertemuan formal dan formil ada kunjungan ada apa lagi ya kira-kira ya macam-macamlah tapi yang pasti nantinya bentuknya dalam produk surat.
2. **Dari penjelasan bapak sebelumnya melalui pertemuan tentunya terdapat kebijakan-kebijakan terkait Sinamanenek mungkin. Nah bagaimana perusahaan memantau kebijakan tersebut pak?**
   Ya kan ada perwakilan kita humas, manager, bagian umum yang ikut kesana itukan perwakilan dari perusahaan yang pasti. Itulah jadinya nanti menjadi penyambung perusahaan.
3. **Apa tujuan dengan melakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan pemerintah daerah kampar?**
   Yang pasti tujuannya adalah bagaimana caranya agar proses bisnis perusahaan tadi lancar itu dulu. Kalaulah tidak ada hubungan baik izin-izin gak keluar ya tentu kita gak bisa berusaha proses bisnis terganggu. Terganggunya proses bisnis tentunya kita gak bisa melakukan produksi tidak bisa melakukan penjualan tentu ya profit yang yang diharapkan gak dapat. Rencana yang di harapkan shareholder aspirasi gak bisa diwujudkan. Yang kedua kalau gak ada hubungan baik bagaimana kita sama-sama bantu menguntungkan. Kan tadi tetap dibilang sejak awal tujuan utama kitakan bukan hanya sekedar mencari profit, tapi people planet profit. People sama planetnya gimana kalau gak ada izin-izin atau gak ada kerja sama yang baik komunikasi yang baik gimana kita bisa berproses. Karenakan sekarang pasti bukan hanya sekedar mencari laba tetapi juga harus berkesinambungan.
4. **Bagaimana frekuensi komunikasi dengan pemerintah daerah kampar pak?**
   Kalau dibilang sering untuk selevel PTPN V pasti sering. Karena kebun kitakan bukan hanya Kencana ajakan. Masing-masing kebun tadi sedangkan sekarang pemerintah juga apakah harus bupati saja atau yang dibawahnya dinas-dinas atau seperti apa. Tapi yang pasti yang disebut pemerintah tadi mulai dari bupatinya sampai ke camat desanya kades kemudian yang di sebut PTPN V dari yang dikebun sampai kantor pusat ya pasti sering.

5. **Seperti yang bapak katakan perusahaan melakukan kunjungan ke Pemda, dalam rangka apa biasanya pak?**

   Yaaaa....datangnya biasanya yang pasti untuk kepentingan-kepentingan perusahaan atau undangan. Dua itu aja atau kepentingan perusahaan tadikan luas ada yang pengurusan izin ada yang untuk silaturahim ada yang untuk menjaga hubungan membangun hubungan ada untuk menyelesaikan masalah. Biasanya yang kita lobby itu ya terkait perizinan biasanya juga ada pemberian informasi. Contoh setiap tahun itu ada kita memberikan informasi terkait tenaga kerja ke dinas ketenagakerjaan itu wajib hukumnya. Setiap tahun kita datang tuh, untuk mengirimkan surat memberikan laporan. Ini loh surat ketenaga kerja di kebun kami selama setahun ini loh nihil lo. Tapi ini bukan ke Bupati ke dinas ketenaga kerja dengan BRH sekali tiga bulan mereka akan datang ke tempat kita memeriksa batas baku mutu air itu kan ada gak pencemaran seperti itu jadi sifatnya gak ada yang sama. Karena kalau pemerintah tadi diluaskan tapi kalau memang pemerintah itu adalah dinas-dinasnya juga, bupatinya, camat desa, ya kalau desa misalnya butuh tangkos misalnya ada jalan desa atau ada tanaman desa kebun desa yang mau di pupuk bisa sajakan mintak sama kita. Itu sifatnya memang gak bisa dipastikan tiap kami bertemu. Tapi ya pasti ada.

6. **Apakah ada budget khusus dari manajemen untuk government relations ?**

   Pasti ada. Apakah nanti dia dalam bentuk perizinan apakah dia nanti dalam bentuk dana-dana untuk gak boleh lagi sekarang namanya dibilang dana koordinasi kalau dulu masih disebut dana koordinasi melakukan komunikasikan dengan pemerintah itu ada sih dianggarkan.

7. **Adakah PR campur tangan terkait menentukan strategi yang digunakan dalam hal menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah?**

   Ada campur tangan sebatas kewenangan aja. Misalnya dipanggil anggota dewan panggil bupati kalau humas diikutkan ya sebatas kewenangan humaslah.

8. **Strategi seperti apa pak implementasi government relations yang dilakukan?**

   Biasanya sih strategi hubungan baik dimulai dengan menjalin hubungannya sendiri dulu, tak kenal maka tak sayang. Dengan berkenalan setelah berkenalan menjalin hubungan baik itu dengan menjaganya apakah itu dengan pertemuan apakah itu dengan jamuan apakah itu dengan memberikan apa namanya eeeee permohonan-permohonan. Misalnya kita butuh nih pak informasi terkait apa keburuhan tolonglah jadi narasumber kia mau melatih anggota kita untuk tanggap darurat untuk mencegah kebakaran lahan tolonglah kirim narasumber tolonglah kirim tenaga pengajar kan

masing-masing dinas beda-beda itu. Pak kita butuh nih keselamatan kerja kecelakaan kerja dinas kesehatan tolonglah jadi narasumber kayak gitu. Kan banyak hal sih kalau tim khusus tadi gak ada tim yang khusus government relations tadi. Karena memang masing-masing bekerja sesuai dengan porsinya. Cuman yang berperan sebagai itukan ada. Walaupun bisa jadi diambil alih oleh umum bisa jadi diambil alih oleh asum kebun oleh humas tapi masing-masing berjalan sesuai kewenangannya. Kami punya porsi punya RKAP kami punya anggaran kalau gak ada anggaran dikami ya kami melakukan koordinasi kebagian umum. Pak ini anggota dewan mau melaksanakan penghijauan PKBL kira-kira bisa bantu gak? Misalnya pak ini anggota dewan mau kasih bantuan pemerintah mau kasih bantuan untuk masyarakat kebanjiran di kampar waktu banjir dulu itu bupati yang telfon. Nanti humas bisa komunikasikan atau orang PKBL nya langsung yang dia kontak humasnya nanti akan publikasikan jadi semuanya saling terkait. Jadi tim itu saya simpulkan mereka yang terkait dengan kegiatan tadi punya porsi dan kewenangan masing-masing. Sedikit berbeda dengan teori ada satu tim khusus yang menangani itu tidak. Karena masing-masing bisa bekerja dengan jobdesknya. Dikebunkan bisa bergerak sendiri selagi sesuai dengan kewenangan manager tapi kalau udah lewat dari kewenangan manager dia kana ditunjuk ke direksi kantor pusat. Direksi nanti akan menyuruh bagian yang ada di kantor pusat untuk melaksanakan.

5. **Pernah gak pak perusahaan melakukan sponsorship dan kegiatan kerja sama dengan pemda?**

   Pernah

6. **Perusahaan melakukan kunjungan ke perintah itu atas dasar apa?**

   Atas dasar undangan bisa, atas dasar kepentingan perusahaan bisa. Tapi kalau gak ada apa-apa biasanya jarang datang gitu aja. Pasti semua ada kepentingan namanya perusahaankan silaturahmi pun ada kepentingankan menjaga hubungan baik.

7. **Apakah pemerintah melakukan hal yang sama melakukan kunjungan ke perusahaan?**

   Ya, balik ke kepentingan pemerintah tadi kalau dia memang butuh informasi dia datang. Kalau butuh sesuatu dia datang samanya kalau itu. Jarang kayak orang bersaudara datang ya cuman pengen datang liat saudaranya. Haha

8. **Biasanya pemerintah ikut campur dalam hal apa pak apakah pada saat ada krisis aja?**

   Ya tidak sesuai dengan undang-undang aja sesuai dengan kepentingannya. Kapasitasnyakan ada kalau dia untuk reprobusi ndak kita bayar dia datang lagi. Kalau gak dia kaan informasikan dalam kop surat misalnya ini ya. Kalau ada pajak yang PBB yang gak terbayar tentu dinas pajak akan datang misalnya. Ada izin HO gangguan misalnya kan kalau pabrik wajib ada izin HO ternyata belum selesai atau belum diurus ya mereka akan suratin atau datang mengirimkan. Atau BPS misalnya BPS kabupaten melakukan sensus kan kita juga banyak penduduknya itu tadi sesuai dengan kepentingan tadi sih.

9. **Bagaimana pendekatan informal yang dilakukan perusahaan ke pemda pak?**

   Ya menjalin hubungan baik informal salah satunya dengan makan malam

10. **Kalau kendala dalam melaksanakan kegiatan Government relations seperti apa pak?**

    Biasanya yang pasti kendala komunikasi maksudnya orang-orang yang ada dipemerintahan sama di perusahaan itu biasanya saling bertukar. Mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi dengan si A si A dipindah masuk si B ulang lagi dari 0. Yang kedua masalah anggaran bisa saja yang dimintanya sekian kita gak ada anggarannya.

11. **Berarti secara garis besar PTPN V dengan Pemda dalam hubungannya bagaimana pak?**

    Kalau saya bilang secara garis besar hubungan komunikasi bagus cuman ini kan sekarang tapi kan saya gak bilang masalahnya selesai ndak. Tapi kalau hubungan ya buktinya semua yang dia undang kita datang yang kita rencanakan pemerintah kita hadiri. Ada kesepakatan-kesepakatan saya bilang baik sih buktinya masih bisa bertemu acara makan malam bersama masih bisa meresmikan sesuatu bersama kan gitu.

Transkrip Wawancara Divisi Umum PKBL PT Perkebunan Nusantara V

Narasumber **:** Azman Lubis

Tanggal Wawancara: 12 April 2017

1. **Siapa saja pejabat CR di perusahaan?**

   Kalau untuk di divisi umum tentunya di PKBL dibina langsung oleh Direktur Komersil M. Arwin Nasution, dibawahnya ada Kabag Umum/PKBL Badran Zai tugasnya dia mengajukan usul ke Direksi. Ginilah kalau di PK atau di BL lah krani keuangan, krani urusan PK, Krani urusan BL ini berurusan dengan lapangan. Sedangkan Staff urusan administrasi Keuangan dan staff urusan PKBL ini sifatnya mengkepalailah krani-krani ini buat terjun ke lapangan "ayo survey". Jadi selain kita memegang keuangan tidak ada pengecualian untuk tidak turun ke lapangan. Untuk sistem kerjanya biasanya kita bagi tim menjadi dua. Nanti hasil survey yang menandatangani saya selaku staff urusan administrasi keuangan. Setelah saya tanda tangani naiklah proposal ini ke Kasubag, udah di paraf naik lagi ke Kabag umum, kabag umum acc naik ke direksi jadi ada tahapan-tahapan yang artinya keputusan akhir ya ada di direksi selaku pembina. Tapi kalau udah naik di direksi pada umumnya tinggal disposisi aja "salurkan sesuai dengan eraturan yang berlaku". Atau misalnya dari krani yang berurusan dengan lapangan langsung ini dipanggil oleh direksi, bisa saja, kadang berbeda pembina berbeda sistem kerja. Ada direksi yang malas komunikasi melalui kabag atau kasubag ha langsunglah dia panggil yang dilapangan atau saya staff sekaligus orang lapangan dengan alasan kalau ditanya atasan ini jawabannya ngambang-ngambang. Tapi ya kalau birokrasinya ya inilah dia naik-naik terus sampai direksi. Intinya ganti orang ganti kemauan tapi aturan main ya inilah dia naik-naik tingkat.

2. **Apa arti penting community relations bagi perusahaan pak?**

   Arti pentingnya satu kan ada instruksi kementrian untuk kepedulian sosial terutama BUMN terhadap masyarakat terhadap lingkungan, komunitas-komunitas. Jadi arti pentingnya tadi ya kepedulian perusahaan agar masyarakat juga memperlihatkan kepedulian kepada perusahaan dengan kata lain ingin menciptakan secara alamiah atau tanpa paksaan benar-benar ingin membuat masyarakat itu merasa bahwa perusahaan adalah miliknya juga. Eee....jadi misal kata terdapat hambatan dari berbagai arah misalnya demo nah masyarakatkan otomatis akan mendukung

perusahaan seperti itulah. Yang kedua juga jelas kita sebagai perusahaan BUMN mentaatikan instruksi dari kementrian tadi, jadi tidak ada masalah yang akan berdampak pada perusahaan.

3. **Bagaimanakah dampak yang dirasakan perusahaan dengan dilaksanakannya kegiatan** community relations atau PKBL yang bapak lakoni selama berada di divisi PKBL?

   Dampaknya pertama macam perkebunan ini kan dia bertabur disegala kabupaten, bermacam-macam tingkah laku masyarakat ya kan, jadi mengurangi ketidak senangan masyarakat terhadap perusahaan ya itu tadi kepedulian tadi tanggung jawab sosial. Membangun sarana prasarana, membantu ekonomi masyarakat pokoknya dengan tingkat-tingkat sosiallah.

4. **Kalau di kebun Sei kencana yang berada di kampar kira-kira masalah khusus seperti apa yang komunitas hadapi pak? Kenapa kebun lain tidak mengalami hal yang serupa?**

   Mungkin dulu ada janji-janji pendiri bahwasanya bakal dibuatkan mungkin orang tuh. Tapi namanya masyarakat semuanya samanya tuh dimanapun sama, dulu kan gini karyawan di perusahaan itu wajib minimal 30% penduduk setempat minimal. Jadi itukan sudah dilakukan, namanya masyarakat awam kampung-kampung ini kan dia gak tahan dengan kerja rutinitas dengan displin dengan ini dengan ini berhenti berthenti berhenti. Nah tinggallah sekarang paling ada 3%-4% yang ada. Jadi yang 25 % ini lah yang bahasa kasarnya mau enak mau gampang. Intinya lahan itu udah siap mereka klaim bahwa itu milik mereka, itu aja ini tanah nenek moyang kami apa yang kalian kasih buat kami. Memang kalau untuk pribadi ya gak ada, tapi untuk daerah dia kan ada diberikan. Nah itulah yang dituntut mereka. Tapikan yang di Kencana itu masalah yang paling apa kan HGU umurnya 25 tahun karena pintarnya orang kampung sana tamatan-tamatan S2 dan berpolitik ha itu dimanfaatkannya momen itu untuk kepentingan pribadi orang itu. Pimpinannya yang enak-enak itu cari duit istilahnya, jadi orang yang berilmu inilah menjadi provokator masyarakat daerah untuk ribut untuk menuntut ke perusahaan itu untuk merekalah. Bahwasanya yang 2.800 ha itu punya dia bukan kelen punya pukan pemerintah punya bukan PTP punya. Tapikan yang namanya PTP itukan tidak semudah itu melepas asetnya dia harus izin tiga mentri sampai presiden. Ha itulah proses itulah yang sampai sekarang masih berlanjut sampai sekarang.

5. **Bentuk kegiatan community relations yang dilakukan perusahaan itu apa pak?**
   Pertama peningkatan ekonomi masyarakat, bantuan-bantuan alat pertanian, prasarana pembangunan masjid apa bantuan ke kepala desa, pembuatan jalan meratakan jalan. Beasiswa pendidikan pun ada tapi bukan di Sei Kencana. Beasiswa itukan gini penjaringannya luas sifatnya seleksi anak-anak yang berprestasilah yang masuk. Yang berprestasi itu dari kampar ada ha Sei Kencana kan masuk dalam daerah kampar jugak. Jatuhnya perkabupaten dia bukan dari perkampung gitu. Kayak inilah nanti nih rencananya bulan tujuh rekrut lagi anak-anak berprestasi tingkat SMK mau dibawak siswa mengenal nusantara sekitar 25 orang dibawak ke sulawesi tengah itu rencananya. Jadi memang anak-anak yang berprestasi kalau anak situ gak berprestasi macam mana mau dibawak itu aja intinya.
6. **Bagaimana karakter yang dimiliki komunitas menurut perusahaan pak?**
   Jadi kalau karakternya itu tadi mereka kan merasa dijajah, karena itu tanah nenek moyang dia. Kedua emang sifat iri dengkinya tinggi kenapa tinggi? Tadinyakan mereka yang merajai kampung masuklah PTP ekonomi orang PTP inikan namanya orang pejuang yang di belinya lah ladang kan ekonominya meningkat terus jadi persenjangan ekonomi ini yang paling menonjol. Jadi karakternya iri dengki ajalah yang menonjol.
7. **Jadi menurut bapak komunitas di lingkungan Sei Kencana tidak membantu perusahaan ? bukankah mereka bisa dijadikan tameng pencegah krisis?**
   Oh bukan, memang di kebun lain seperti itu. Tapi di Sei Kencana ini banyak merong-rong. Tau merong-rong kan kebalikannya. Tapi memang ada yang dari awal berada di pihak perusahaan tapi malah di musuhin sama orang kampung itu. Itulah yang kamu wawancarai di Sinamanenek itu.
8. **Cuman satu pak yang mendukung perusahaan?**
   Bukanlah ada empat orang tuh kalau saya gak salah waktu itu yang mendukung itu. Cuman yang paling kuat mentalnya memang yang satu itu.
9. **Berarti kawan sama musuh berat sebelah dong pak?**
   Gak seimbang memanglah, karena orang tuh takut dimusuhin orang kampung. Kalau dia inikan enggak. Orang memang tujuan dia bagusnya untuk membangun daerah dia kalau gak kan gak bisa lewat di daerah itu. Masuk ke kemapung itu gak bisa dulu kalau sudah hujan gak terlewati. Ha dengan adanya PTP terbukalah jalan akses-akses jalan, ekonomi mereka meningkat otomatiskan. Ha itu tadi tapi kan yang mananya

tingkat puas tadi relatif, mana ada manusia yang puas. Ketidak puasan ini didukung iri dengki dan syirik ini cocok naiklah dia merusuhi perusahaan. Itu ajanya tuh.

10. **Dampak apa yang paling dirasakan oleh perusahaan dengan kegiatan community relations ini pak?**

    Bagi siapa sekarang?

11. **Untuk PTPN pak, Kencana maupun kebun lainnya?**

    Kencana? Dampaknya ya rugilahhh. Ahahaha rugi. Contoh demon mereka tahun 2013 ratusan orang yang merusuh ya kan. PTP mengeluarkan biaya bukannya sikit itu membentengi mereka biar gak merusak PTP. Ribuan karyawan di kerahkan kesana ratusan polisi didatangkan kesana ratusan tentara didatangkan kesana untuk membentengi itu. Berapa itu ruginya PTP?. Belum lagi biaya pengurusan ini pengurusan ini rapat disana rapat disini sampai Mahkamah Agung kan pakai biaya semua itu.

12. **Berarti untuk kebun Sei Kencana ini belum ada ya pak komunitas yang sebagai benteng perusahaan, sebagai orang-orang yang mencegah penjarahan buah di kebun misalnya?**

    Ohhhh....ga ada vin.

13. **Jadi penjarahan buah disana masih terjadi pak?**

    Kalau penjarahan udah gak ada tapi pencurian. Dulunya memang ada penjarahan maksudnya gini sempat tuh dia status kuo seluas 2800 ha itu status kuo karena ribut ya kan ribut juga PTP bertahan, diambillah kesimpulan ama pemerintah daerah status kuo. PTP tidak boleh memanen masyarakatpun tidak boleh masuk. Sempat itu selama sekitar hampir sembilan bulan. Hutan lah areal itu lagi bayangkanlah berapa itu ruginya PTP. Tapi diambil inisiatif ama pimpinan nah dipanenlah itu dengan pengertian gini, kenapa dipanen? Kalau ini gak dipanen karyawan kan gak bergaji mati gaji berapa ratus karyawan ini gak bergaji dia. Nah ini kan melindungi karyawan, karyawan itukan masyarakat situ jugak sebenarnya. Cuman masyarakat pendatang kan gitu. Kan dia sudah menjadi warga situ, ratusan orang jugak. Nah untuk membela ratusan orang inilah dipanenlah itu balik ha inilah yang demon mereka. Itulah ribut, tapi naik kasusnya kan nyatanya aman. Orang memang itu hak PTP kok, hak BUMN. Cuman itulah ngalahnya PTP KUO katanya KUO tapi sempat berkepanjangankan gak mungkin gitu. Mana yang mau dipilih kan gitu, toh ini harta negaranya nih. Siapa rupanya BUMN 90% itu saham negara hanya 10 % saham perusahaan.

14. Apa sih pak harapan yang komunitas punya dari perusahaan?

Harapan ya itu tadi, dikasih mereka lahan cuman pengertiannya dicari lahan ada dulu dapat jauh gak mau mereka jauh kali. Mereka berharap disitu-situ juga pergantian lahan tadi. Ya gak ada lagi lahan, mau diapakan cobak. Jadi intinya menurut pribadi saya ini ya mereka senang pimpinan rusuh terus, pimpinan orang itu ya bukan pimpinan PTP. Pimpinan mereka itu senang ribut terus rusuh terus biar ada isi ATM nya. Sampai PTP capekkan, tapi mana bisa PTP capek. Ini balik lagi ini aset pemerintah bukan aset kita, mungkin sudah dijelaskan oleh pak rizky lah.

15. Kalau harapan perusahaan terhadap komunitas apa ya pak?

Harapannya ya mereka terima apa adanya, masalah mereka mau istilahnya jadi mitra balik bisanya. Contoh anak-anak mereka diterima menjadi karyawan contohnya jadi itu jadi prioritas perusahaan gak mungkin enggak. Tapi kan syarat-syarat jadi karyawan ini apa? Ya disiplin lah berprestasi. Jangan pulak mau kerja tak kerja bergajikan tadi ada tuh. Gak mau dia datang yang penting gaji jalan, bukan kerja gitu. Bukannya PTP menghalangi mereka mencari nafkah disitu enggak, dibuka peluang tapi ya adalah prestasi kerja kita perusahaan gitu.

16. Apa kekuatan dan kelemahan komunitas menurut bapak atau dari sudut pandang perusahaan?

Banyak kelemahannya lah kalau khusus di Sei Kencana ini. Bagaimanapun sayakan pernah dilapangan turun langsung sebelum mutasi ke tim PKBL kantor pusat. Kalau kekuatan dia kan tadi gini karena pihak perusahaankan dilarang membuat hukum menjalankan hukumkan dilarang karena masyarakat lawannya kan. Kalau kekuatan dia gak adalah berapa orang sih itu cuman 1400 KK nya itu. Kekuatan yang orang tuh pegang hukum negara ajanya.

17. Begini pak, jauh sebelum krisis apa benar-benar komunitas tidak bisa diajak bekerja sama dengan perusahaan?

Tidak ada. Justru dari awal meraung raung terus. Jadi intinya gitu mereka tidak mau menerima PTP berada di situ karena dianggap tidak ada konstribusinya. Padahal kalau gak berdiri PTPN disitu mungkin kampungnya gak terbuka-buka. Sementara dulu saat pertamina ada didalam mulai simpang masuk kampung itu sama sekali gak bisa jalan ada pertamina loh ya itu. Kan begitu PTP itu bukakan produksi angkat buahnya kan keluar terbukalah jalan itu. Bisa dilewati akses jalan kemana-mana dia enak gampang gitu. Jadi intinya begini vin, orang yang bergelar bilanglah yang bpintar-pintar ini mencari keuntungan, tapi hebatnya mereka mampu menggerakkan

masyarakat. Dan saya yakin itu gak semua. Kenapa saya bilang gak semua? Pada saat demon dulu itu paling ada orang dalam 20%, yang 80% orang dibayar.

18. **Cara apa yang perusahaan tempuh untuk melakukan komunikasi kepada komunitasnya pak?**

    Segala cara dilakukan, dengan mengadakan pertemuan memanggil komunitas diajak musyawarah. Kira-kira apa yang masyarakat butuhkan tapi gak berefek, mereka tetap menuntut yang tadi. Mereka fokus pada yang besar sehingga kegiatan community relations kita yang bertahap membangun desa dan memberdayakan masyarakat tak terlihat oleh mereka. Segala cara sudah dibuat kita adakan kunjungan ke kampung mereka, dipanggil tokoh masyarakatnya, inilah data yang saya kasih ke kamu contohnya. Kami perlu kambing katanya kami kasih kambing, itukan langkah-langkah yang kalau mereka gunakan dengan benar mungkin ekonomi mereka pada saat ini bagus. Kambing disitu cemana dibilang ya daerah masih luas masih bebas memelihara tapi itu tadi pagi diterima sore dijual. Itulah kasus kambing itu, kamu dengar sendiri tadi kan salah satu komunitas yang kamu wawancarai, berapa lagi sisa kambing yang ada paling sekitar 10% ntah sampai atau enggak kata dia tadikan.

19. **Perusahaan melakukan identifikasi terlebih dahulu gak pak untuk mengetahui masalah yang tengah dihadapi masyarakat?**

    Enggaklah, kitakan kalau identifikasi itu setelah ada keributan kita pelajari kan gitu. Apa masalah sebenarnya, tapi kalau tanggung jawab sosial kepedulian tadi belum ada masalah pun sudah jalan dari awal. Mangkanya kita heran PTP kok ribut, apa. Intinya ya setelah reformasi inilah berulah. Dari situlah biangnya semua daerah ribut.

20. **Oke, berarti setelah itu setelah krisis tentu diadakannya analisis kan pak terhadap komunitas. Bagaimana proses analisis yang dilakukan PTP untuk mengidentifikasi masalah tersebut?**

    Ya mengadakan survey-surveylah. Bertemu mencari sumber masalahnya apa? Kan dia gini prosesnya ada dibentuk TIM, TIM kerjalah namanya dah kerja hasil analisa mereka dibawa ke direksi dah dibahas di direksi, setelah dianalisa inilah ke pemerintah dibawa pemerintah daerah ha itulah yang dibahas disitu. Jadi pemerintah daerah jadi penyambung tengah penyambung lidahlah dipanggilnya komunitas dipanggilnya PTP rapatlah dipemerintahan sampai hasil keputusan akhir tadi itu mengganti lahan tuntutan komunitas ini. Dan disepakati bukannya gak disepakati, tapi itu tadi lahan kan mencari 2.800 ha sekarangkan udah gak ada lagi dilingkungan sekitar kampung itu. Intinya udah gini saya bilang mereka memang ingin ribut terus

gak mau orang tuh selesai sampai siapa yang ngalah dan PTP gak mungkin ngalah. Apalagi ada instruksi dari mentri BUMN sejengkal tanahpun jangan lepas lagi aset negara ini ha itu ada keluar instruksi.

21. **Wah, berat ya pak beban perusahaan dimana harus memikul dua tanggung jawab pemerintah dan masyaraknya?**

    Ya berat lah bingung kalau PTP nih kan ada aja instruksi dah lepaskan tanah kelen tuh pasti kami lepaskan. Kami ya pening kali, bukan hebat kali 2800 ha tadi. Orang aset negara kok, macam mana kami mau bilang. Instruksi pemerintah begini tuntutan masyarakat begini PTP terjepit. Jadi kalau pemerintah kita bilang pasti pemerintah ngambang juga jawabnya kalaupun kita tanya ngambang itu gak tau dia mana yang dibelanya. Dibelanya masyarakatnya dilawannya mentri, di belanya PTP lawannya masyarakat. Sedangkan yang gaji dia masyarakat, pening kan.

22. **Apa saja tujuan dan sasaran yang ditetapkan PTPN dalam melakukan community relations pak?**

    Tujuannya ya tadi itu agar masyarakat sadar mau bekerja sama mau saling dukung mendukung istilahnya kondusiflah kebun itu daerah itu bisa kondusiflah. Kita mencari produksi dapat dengan tenang dapat keuntungankan otomatis sebagian keuntungan tadi kita limpahkan kepada msayarakat. Itukan sudah menjadi kewajiban sosial dengan adanya keributan inikan gak bisa di dapat itu. Tujuannya sebenaranya mensejahterakan semua lapisan lah, orang ada kewajiban kok 4% dari keuntungan itu wajib dibuang kemasyarakat lagi. Itu wajib bukan adanya sunah sunah itu, untung sekian misalnya perusahaan keluarkan 4 % keuntungan itu untuk masyarakat. Cuman kan masyarakat bukan disitu aja kan luas, makanya gak bisa kita kasih misalnya sekian M disini gak bisa.

23. **Apakah perusahaan tidak ada memiliki komunitas binaan atau mempersempit komunitasnya untuk menjaga perusahaan pak?**

    Gak ada gunanya, untuk apa dibuat. Istilahnyakan gini mereka kita hadang kitakan punya satgas, punya aparat pemerintah punya polisi punya ini ngapainkita persempit lagi. Persempit contonya ditangkaplah pimpinan ini masuk ke sel masuk, tapi kan hany sebatas itu buat apa. Karena kekuatan mereka ini bukan besar, untuk kencana aja ya, kan kalau kampar ada tiga tuh, ini hanya khusus kencana saja. Mereka inikan gini kalau ribut hanya sekedar mulut wa wu wa wu itukan tindakan gak ada yang anarkis. Tapi memang sempat ada anarkis itu itulah orang bayaran tadi. Itu yang anarkis kalau orang dalam sendiri gak adanya tuh yang anarkis. Gak akan

sangguppun orang itu istilahnya contoh orang itu berapa 800 KK lebih kita bilang 600 lah yang demon misalnya orang PTP ini ada berapa 12.000 orang loh. Belum lagi aparat negara kan. Maksud kamu dipersempit dipecah belah gitukan dibentuk komunitas sendiri? Orang itupun yang didalam udah pecah tiga didalam itu. Didalam komunitas itu yang dulunya satu ide sekarang udah pecah tiga. Kenapa? Karena semua ini didasari sifat iri dengki tadi itu, contohnya pimpinannya tiga nih kan ha yang A merasa si B pimpiannya udah dapat ini kok enggak ha ini pecahlah ini sekarang. Ini isu banyak nih katanya sebelum lebaran mau demo, mana nyatanya gak ada.

24. **Lalu kontrol yang perusahaan lakukan terhadap komunitas yang terlibat dalam community relations seperti apa pak?**

    Tetap kita ada mendengar isu kan lalu kita pelajari, misalnya gini kan gak semua orang kampung ini pro dengan komunitasnya itu nanti apa yang rapat dikampung itu sampailah kekita. Ini rencana mereka begini-begini ha nanti mengantisipasinya ya kita pelajari kita panggil pimpinannya cerita-cerita ya pendekatanlah. Pun PKBL tadi paling kita datang penyuluhan kasih pengertian berinteraksi langsung dikasih jarak waktu buat program yang telah dijalankan tadi contoh gimana kambing kau udah berapa anaknya kayak gitu. Intinya kalau kita bilang perduli udah cukup kali perduli. Cuman gak bisa kita buat macam kota besar kan gak mungkin dari mana dananya. Benang merahnya begini setiap individu berharap keuntungan personal bukan keuntungan kampung tidak. Bukan ada pejuang kampung disitu, tidak sama sekali berfikiran mendorong ekonomi desa. Keuntungan pribadilah tujuan awal orang itu.

25. **Adakah anggaran yang rutin untuk melakukan community relations pak?**

    Ada ya itu tadi 4 % dari keuntungan perusahaan

26. **Kalau untuk tingkat keberhasilan dari kegiatan community relations yang dirasakan perusahaan itu bagaimana pak?**

    Tingkat keberhasilannya di beberapa daerahnya bagus mangkanya hanya daerah-daerah konflik kan tinggal dua nih yang konflik. Namanya Air Molek ama Sei Kencana nah sekarang Air Molek sudah aman jadi dibilang tingkat 90% keberhasilan itu sukses.

27. **Apa kendala perusahaan dalam menjalankan community relations itu?**

    Kendalanya banyak, kitakan mau menjalankan itu syarat-syaratnya banyak. Contoh misalnya kita mau membantu sarana prasarana syaratnya kan tanah tersebut ada surah hibahnya ada sertiifikatnya macam-macam itulah dah kadang gak ada itu lah

yang jadi kendala. Kedua ada kepengurusan yang mau kita bantu. Ketiga nanti yang mau kita bantu itu tidak sesuai maksudnya pas survey mereka kan buat proposal dahulu nih beginilah bentuknya besar gitukan sementara kita pelajari daerahnya itu paling 6-7 orang atau lebih kurang lah 20 orang. Untuk apa kan mubazir kitakan punya analisa survey itulah tujuannya disitulah kendala-kendalanya mereka gak terima gitu. Jadi kelengkapan merekalah yang paling kendala contohnya di yang kemitraan syaratnya kan ada macam-macam izinlah kan ha ini gak dilengkapi mereka. Surat nikah kita mintak gak ada surat KK gak ada pokoknya kelengkapan data merekalah yang mengahambat. Udah itu yang paling banyak menghambat itu ya dana itu paling menghambat kali keterbatasannya.

28. Jadi langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tadi itu apa pak?

Kalau caranya kita gunakan skala prioritas mana skala prioritas ini yang maju ini yang maju ha kalau disini ada tambahan lagi BUMN inikan ada dana sinerginya. Gini maksudnya dana di pertamina itu triliunan mereka gak sanggup melakukan ini ha nanti bisa saja dari intruksi menteri dipindahkan dana mereka ke kita. Kita yang menjalankan tapi dianggap program pertamina. Terlaksana tapi nama pertamina hanya bekerja sama dengan kita macam mensponsori. Macam ini yg terakhir Pelindo sama PTP dana sama-sama 50:50 kayak gitulah terus cara mengatasinya. Jadi kementrian nanti yang mengatur. Cuman kalau banyak untung kita ya banyak dana kita makanya kerja sama dengan komunitas itu penting saling memahamilah. Jadi dibilang kendala yang berat kali itu gak adanya hanya hambatan itu terkadang datang dari komunitas itu sendiri. Gak sulit kalilah, kalaulah kita bilang derah pelosok kita kejarnya sampai sana kayak saya di daerah Air Molek namanya sungai paret sana ada proposal dari kampung masuk ke kita, sampai nyebrang kekampung sana gak bisa mobil naik pompong sejenis kapal kecil ha naik itulah kami untuk survey. Itukan rasa kepedulian kita walaupun dia di pelosok-pelosok dunia kita bilang kita kejar karena tanggung jawab sosial tadi. Ha pas kita tengok ternyata cocok wajar dia menerima lengkap semua datanya kondisinya juga sesuai dengan syarat-syarat yang kita terapkan ya kita kasih gitu. Bukan harus berarti hanya dilingkungan kita tok bukan. Cumankan memang dianjurkan ring dia, ring satu ring dua ring tiga gitu kan kita program surveynya gitu nih. misalnya dana kita sekian ring satu dulu kita pelajari ada gak di ring satu, gak ada pindah ke ring dua skala prioritas namanya. Jadi gak mutlak dia hambatan murni enggak hambatan yang paling nyata ya dari mereka sendiri.

29. Ada gak sih pak prinsip perusahaan dalam menjalankan PKBL?

Prinsipnya yang wajib dibantu jangan pulak yang gak wajib dibantu malah dibantu. Macam kemitraannya kan di kemitraannya yang kita bantu menengah ke bawah. Dananya pun terbatas sesuai macam instruksi permen pemerintah 75 juta maksimal. Nah kalau kita kasih yang 75 juta ini UKM contohnya mereka gak akan bisa mengembalikannya karena apa? Kitakan pelajari anggaplah warung kecil kelontong kita bilang kan yang seperti itu yang diajukan. Sempat kita kasih 75 juta mana mampu dia membayar sebulan 4 juta gak mampu kan. Mangkanya kita berilah dia sebatas putaran dia berapa putaran ibu perhari? Itu kita itung semua kita evaluasi nah setelah hasil itu kita buatlah satu resume kitakan keuangan dia kita tengok program dia kedepan apa yang mau dia buat kita pelajari mampu gak berputarnya mangkanya sekianlah paling maksimal. Jadi gak sembarangan gitulah dia, sempat kita kasih jor-joran hancurlah perusahaan. Pokoknya segala bentuk yang ini tadi kita pakai evaluasi, survey dulu yang pertama. Syarat utama tadikan mengajukan bukan kita yang mencari tapi kita buka peluang. Diajukan mereka kita pilah-pilah dah kita survey. Pada saat survey kita sampaikan ke mereka lengkapi ini ini ini kita kasih batas waktu kenapa? Programkan jalan harus sesuai dengan rencana paling lambat sampai dengan tanggal sekian harus masuk yang kekurangan bapak ibu ini ini ini kalau enggak apa boleh buat kami gak bisa bantu lagi. Kita tunggu sampai batas waktu itu mana yang masuk kita proses yang gak ya kita tinggal.

30. Berarti mitra ini sifatnya campur pak, dari Sei Kencana tidak ada?

Adalah satu dua tapi.

31. Contohnya dalam hal apa pak?

Pedagang. Kan di kemitraan itu dibuka peluang perdagangan, jasa, kan itu perkebunan baru apa lagi ada tujuh itu.

32. Oh iya bagaimana cara Tim untuk mengatasi komunitas yang macet dalam cicilan pak?

“Haaa...masalah keuangan inilah yang rumit. Komunitas ini suka kali lari-larian kalau sudah kita turun. Hemmm jadi tim PKBL ini kan selalu mengalami pergantian orang ya, nah jadi setiap orang beda penanganan. Kalau cara saya nih ya, saya dekati betul komunitas ini, saya tengok suku dia. Dari logat suku batak dia nih kan, masuklah saya kan saya tanya “marga kau apa”? Lubis pak. Ha cocok dalam hati nih kan, langsung saya tembak “sinilah kau dulu minum kopi kita, duduk. Jadi cemana mau kau kasih berapa cicilan tuh? Janganlah pulak kau buat mau marga lubis ah”

ahaha itulah salah satu cara yang saya gunakan untuk komunikasi. Nanti diakan segan sama kita kan, dah dianggap kita nih abangnya, dikasih sama dia tuh berapa yang ada besok dah tinggal telpon lagi gampang.

33. **Kalau menurut bapak urgensi dari kemitraan dan bina lingkungan untuk mensukseskan visi misi perusahaan disekitar lingkungan itu bagaimana pak?**

Gak terlalu berpengaruh lah, iya benar. Kalau mencapai visi, misinya kan kerja sama dengan stakeholder kan gitu. Mana ada di kemitraan stakeholder kan gitu. Contohnya dana kita misalnya 10 milyar di tahun ini yang mau kita bagi pada akhir tahun gak habis contohnya di bina lingkungan tadi misalnya habisnya cuman tiga milyar ini kita kenak tegur saaat rapat kementrian. Ada pengaruh tapi gak terlalu besarlah, kenapa? Karena mereka gak pernah merasa itu untuk bantuan pribadi inikan mereka sifatnya ke pribadi jatuhnya baru merasa dapat. Karana kita kan mebangun sarana prasana ini balik lagi ya ke Kencana mambentu ekonomi perorangan ha perorangan kan hanya ekonomi tadi dan itu berproses bukan tinggal metik. Dan yang berhasil ini memang rata-rata orang baik yang pedagang, peternak,petani ini kan orang-orang yang mau kerja. Yang ribut ini kan yang mau ongkang-ongkang kaki aja. Ini sama halnya yang kayak kamu bilang memberdayakan masyarakat hanya beda penyebutan kata. Itulah tujuannya memberdayakan masyarakat, memang terusnya kita sampaikan saat penyuluhan tujuan dana ini dibuat untuk ini ini ini kalau harapan kami kan gitu dengan adanya pemberian ini meningkatlah ekonomi ibu bapak. Caranya bagaimana kita ajari. Contoh walaupun kita cuman pedagang sayur buat pembukuannya ha kan kita ajarin dia, nanti jangan campurkan hasil ini dengan hasil yang lain. Pelajari peningkatannya, sehingga ibu-ibu tau apa yang mau ibu buat kedepannya menjadi meningkat lagi udah kita sampaikan semuanya. Evaluasi kalau malas perbulan pertiga bulan buat evaluasi ibu hasil kerja ibuk, udah kita buatnya itu. Kadang suntuk kita ngomong itu capek tak didengar kemauan nya gak ada. Dari segi kepembukuan kita ajari, dari segi memasarkan kita ajari. Pertama proposal mereka, kedua kita adakan rekapitulasi begitu kita rekap kita adakan survey pada saat survey kita mintaklah memberikan keterangan mereka, apa kekurangan mereka terkait tujuannya maunya apa pokoknya semualah disitu. Setelah lengkap data mereka kita evaluasi. Evaluasi tadi ya hasil survey tadi itu evaluasi itu wajar itu gak wajar. Setelah ini semua wajar kita kan semacam kemitraan kan kita kerja sama dengan dinas koperasi daerah bukan bergerak sendiri kita. Orang dinaspun kita ajak tolong didik mereka kayak gitu. Nanti baru penyuluhan artinya pencairanlah itu

semua datang itu dinas koperasi datang camat datang bupati kalau ada datang ini kepala kepala dinas yang dipanggil. Dari kita perwakilannya direksi kalau gak kabag, penyuluhannya model saya lah penyuluhannya.

34. Adakah prestasi yang sudah di capai dalam PKBL pak?

Ada, contohnya yang berprestasi itu itulah UKM-UKM yang peningkatannya luar biasa kita ajak pameran dia nanti. Misalnya ke Batam kita bawak dia memamerkan produksi dia. Tujuannya apa? Kan kita memasarkan produk dia agar lebih besar, misalnya pameran ke Jogja ya berangkat kita kayak gitu. Kita bawak mitra, cumankan kadang dalam membawa mitra itu gak sembarangan. Ada instruksi dari mentri lima mitra unggulan aja yang dibawak ha gitu itulah yang kita bawak. Kita buat stand dia kita pamerkan gitu. Kan terlihat disini semua memang butuh proses, kalau komunitas yang ada di Kencana itu memang orangnya itu jauh dari kata puas sirik dengkinya tinggi. Orang yang dibantu gak pernah jadi, contohnya nih alat pertanian dikasih penyuluhan lagi nih cara bertani bagaimana ini begini begini apa yang menurut kalian kurang tanya gitu.

35. Itu ada jangka waktu yang dikasih ke komunitas gak pak, misal tim PKBL akan datang dalam kurun waktu berapa bulan atau minggu?

Ada, dia gini tiga bulan. Tiga bulan kita kasih masa tenggang lagi, maksudnya masa tenggang tidak ada kewajiban dia mengembalikan masa tenggang kita kasih misalnya 25 juta sekarang. Nanti dia membayar cicilan dia yang selama tiga tahun itu dibulan ke empat. Jadi arah sasarannya biar berputar duit ini dulu, sehingga dia gak berat mengembalikannya dah ada hasilnyakan baru kembalikan. Itu sasarannya sudah berhasil baru kembalikan.

36. Berarti pak kambing yang sudah di serahkan di Kencana tadi bagaimana ceritanya pak? Hanguskah?

Kambing itu ya hilanglah. Kalau kambing itu bukan untuk dikembalikan malahan. Memang dibantu Cuma-Cuma. Makanya komunitas disana gak pernah sadar, dia dikasih tuh untuk ekonomi dia di nikmatinnya dijual dalam satu hari.

Kan gini ceritanya, masalah kambing itu kita merekrut mahasiswa Universitas Riau sebagai konsultanlah katakan. Jadi mahasiswa inilah yang gerak kesana, mensosialisasikan, membimbing, mengarahkan, sampai tahap mengevaluasi. Masyarakat setuju, bahkan kambing nih kan hasil survey kita. Kita tanyakan ke mereka maunya apa bapak-bapak ibu-ibu? Jadi intinya kalau kambing itu kita pakai perwakilan apa namanya survey mahasiswa UNRI buat kontrak dengan perusahaan

dah kan dikasihnya terus penyuluhan perusahaan menyediakan kambingnya. Jadi istilahnya ini proyek UNRI kita penyedia kambing. Kerja samalah jatuhnya, udah kita sediakan kambing yang buat penyuluhanpun orang UNRI langsung sampai menyuntiknya sampai mendatangkan dokternya ya mahasiswa. Cuman masyarakat ini datang pagi dijual sore.

37. **Jadi bagaimanalah strategi Tim PKBL dalam melakukan pembinaan komunitas yang tidak patuh pada perjanjian awal dengan perusahaan pak?**

    Kita kan terusnya kita, setiap ada acara kita panggil. Macam ini program desa miskin kita perdayakan masyarakat, kepala desa, aparat desa, dinas pertanian, dinas peternakan. Mereka ini dimaksudkan tempat berguru kita bayar honor orang ini, bukan gak kita bayar kita bayar honor orang ini untuk melakukan penyuluhan ahli-ahlinya kita hadirkan untuk mereka gitu. Mangkanya yang sadar maju yang gak sadar ya udah taunya menuntut terus.

Transkrip Wawancara Asum Unit Sei Kencana PT Perkebunan Nusantara V

Narasumber **:** Amir Syafrudin, Asum Unit Sei Kencana

Tanggal wawancara : 22 Juli 2017

1. **Siapa saja komunitas yang ada disekitar perusahaan?**
   Kalau untuk lingkungan kita berhubungan dengan desa yang satu wilayah dengan perusahaan di Sei kencana. Komunitas ini kita sebut dengan komunitas KKPA dan melalui PKBL.
2. **Bagaimana ekonomi komunitas desa Sinamanenek yang berada di Unit Sei Kencana?**
   Kalau untuk masyarakat sekitar kalau ukuranyya kita ambil dari pendapatan karyawan itu setengah diatas menengah ekonomi disana. Separuh kebawah kalau kita menengah kebawah dibagi dualah seperti itu. Artinya kita mengukur kategori menengah keatas itu dengan fasilitas sosial ataupun kebutuhan rumah tangga itu dalam kendaraan. Kalau untuk kendaraan masih memiliki roda dua itu menengah kebawah kalau sudah roda empat itu menengah keatas. Kemudian dari sosial keagamaan juga nampak disana puluhan malah ratusan yang sudah menunaikan ibadah haji, ha itukan termasuk juga ukurannya. Ha jadi kalau misalnya melihat masyarakat di Sinamanenek itu bagi dua lah setengah menengah keatas setengah menegah kebawah.
3. **Untuk masalah khusus yang dihadapi komunitas di Sinamanenek apa pak?**
   Kalau hubungannya bagus ada tidak bagus ada sampai konflikpun ada. Jadi dulukan gini bahwa ee penetapan HGU menurut orag Sinamanenek HGU nya itu masih tersisa 2.800 yang belum di HGU kan dari jumlah tanah semua. Jadi sering lah usulkan orang itu bahwa itu adalah milik ninik mamak atau adat sinamanenek. Tetapi PTPN V pada waktu itu sebelum membukakan udah kita melapor ke BPN ke menteri kehutanan dan minta izin prinsip dari gubernur. Izin prinsip sudah dikantongi dan izin dari kehutanan sudah ada tinggal HGU nya. Biasanya pada tahun 90 an itu HGU itu belakangan. Artinya eee pengukuran itukan bukan kayak sekarang. Kalau sekarang inikan GPS sudah lengkap artinya gunung hutan sudah gampang diukur. Kalau dulu asal sudah ada izin prinsip dari mentri kehutanan ada izin sudah bisa dibuka HGU belakangan. Ternyata setelah tahun mulanya tahun 96 itu ketika mau diurus HGU sisa ini kendala alasannya PTPN karena ini dalam bermasalah dengan

masyarakat, artinya bukan kondisi aman kan gitukan. Jadi sampai sekarang HGU itu masih ditahan belum di keluarkan. Tahun 2014 itu puncak dari konflik artinya sampai masyarakat Sinamanenek menyerang dan karyawan perusahaan beserta aparat hukum memperthankanlah didaerah perkebunan kebun Sei Kencana agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti pembakaran dan sebagainya. Tapi sebelum itu pada tahun 2013 inikan karena permasalahan masyarakat dengan negara bermasalah maka PTP melanjutkan ke pengadilan, dan telah dilaksanakan sidang sesuai dengan aturan yang berlaku, keputusannya pengadilan memihak PTPN V sebagai pemegang hak pakai ini dengan adanya pegangan izin prinsip. Tapi setelah keluar itu semakin tidak terima masyarakat itu, sehingga pada waktu itu kita coba lapor ke Kodim kita selesaikan ke Polda ada 10 hari kita dikawal sama POLRI di tempat ini. Setelah itu berapa orang ditangkapin dari kampung dan dianggap sebagai provokator kejadian dan diminta keterangan di Pemda bangkinang. Kemudian pada waktu itu ada namanya tokoh itu mengatasnamakan LSM dari Pekanbaru dia membawa pasukan sekitar 40 orang untuk merusuhi. Jadi sebenarnya kalau murni bukan orang kampung cuman diperalatlah orang-orang kampung ini dibawah komando oknum-oknum luar tadi ini. Kebetulan polisi menangkap oknum-oknum ini ketika diwawancarai rata-rata orang pekanbaru bukan asli orang kampung sinamanenek. sejak itu diselesaikan oleh manajemen puncak kantor pusat dan kita di unit tetap menjalin hubungan seperti memberikan sumbangan-sumbangan, makan bersama semalam dari kepala desanya semua RT ikut membiayai makan bersama ataupun dengan tujuan terjalin hubungan silaturahmi ini.

4. **Untuk memulihkan kembali hubungan yang renggang tentu ada strategi yang kita bina ke pemerintah daerahnya pak, bagaimana biasanya bentuk yang dilakukan?**

   Itu biasanya tak luput dari dua hal sosial itu. Yang pertama kemalangan yang kedua hajatan, kalau hubungannya sederhana dari dua hal itu. Kayaknya hubungannya sederhana tapi pengaruhnya luar biasa itu melebihi kita menghadiri acara formal pemda. Contohnya saja acara 17 agutusan kita gak koordinasi sama masyarakat, tapi kalau orang tuh ada yang meninggal dunia kita pergi takjiah kita antar ke makam mudah-mudahan dari situ hubungan kita. Kemudian untuk pesta artinya kalau dapat undangan kita hadiri. Jadi dua hal inilah yang menurut saya paling berpengaruh dampaknya ke masyarakat Sinamanenek Sei kencana ini. Kalau yang lain ya acara resmi kayak kunjungan pejabat, hari peringatan nasional kita ikuti acaranya.

5. **Biasanya dalam setahun ada berapa kali melakukan pertemuan pak?**

   Ya tidak tertentu, soalnya kayak dalam 2 bulan ini kita menghadiri pesata kepala desa ada pejabat pemerintah ada, pokoknya kita larut seperti masyarakat biasa. Malah sering itu bercanda ria orang itu "Bagus kali ya solidaritas orang itu? Iyalah orang itukan gak ikut-ikut kasus 2.800 itu" ahaha ada di seloroi sama orang itu. Artinyakan konflik besar yang sudah kita lalui udah mulai sirna. Dan mungkin pembelajaran bagi mereka atau ada didikan dari pihak yang berwajib bisa juga.

6. **Tahap penyelesaian dengan PEMDA biasanya dilakukan oleh siapa pak?**

   Jadi kalau ada masalah ada apa yang berhubungan itu selalu orang kantor pusat yang menyelesaikan ke kabupaten ya. Kita di unit hanya sebatas ke kecamatan, tapi untuk yan permasalahan kita ketika terkena permasalahan di unit Sei Kencana itu yang turun orang Sekda orang dinas perkebunan dan anggota dewan. Kita sering mengalami putus komunikasi di unit jadi pada saat sudah ke tingkat kabupaten orang unit ditinggalkan. Yang sering berbenturan kan itu orang lapangan yang sedikit banyaknya paham situasi desa malah tidak turut disertakan pada saat penyelesaian.

7. **Dari luasnya lapisan pemerintah yang bersinggungan dengan perusahaan lapisan mana yang paling intens melakukan hubungan dengan perusahaan pak?**

   Kalau untuk perizinin kebetulan kebun Sei Kencana tidak ada, sebab BPN itu langsung dipegang bagian SDM kantor pusat. Jadi kita sifatnya melapor, kalau petugas BTN nanti datang itu biasanya didampingin minimal satu orang staff dari kantor pusat SDM datang kesini sifatnya kita menunjukkan arel atau mendampingi. Ya pada dasarnya kita Sei Kencana keseluruhan bertemu langsung dalam hal pengurusan.

8. **Kalau untuk perlakuan PEMDA kepada perusahaan pra konflik yang lalu bagaimana pak?**

   Kalau saya menilai yang menangani permasalahan disini tapi netral ya sifatnya pemerintah masih netral. Cuman eee emosi kedaerahan lantar terlalu simpatik dengan masyarakat itu terkadang oknum-oknum ada yang keblalbasan dalam penyampaiannya. Kalau pada prinsipnya saya menganggap orang ini netral, tapi PEMDA nya ya bukan oknumnya, sebab kalau oknumnya kita tengok berbeda-bedakan gitu. Hanya saja oknum yang emosional ini apa-apa yang di ucapkan dengan

media cetak misalnya terkesan mereka membela masyarakat tanpa melihat dampak umumnya.

9. **Oh iya untuk bentuk kegiatan government relation itu di PTPN apa saja ya bentuknya pak?**

   Program-program terkait community relations dengan government relations itu lebih kekantor pusat ya yang memiliki wewenangnya sebenarnya. Tapi gini kalau yang rutin itu sifatnya bukan melobby ya adanya hubungan rutinitas. Contoh gini kita sering kali ke POLRI, POLSEK untuk menyangkut pengawalan, gaji pokok karyawan itu tiap bulan kita pakai. Kemudian kerja sama dalam bidang kemanan, artinya setiap kita menjumpai hal yang melanggar seperti ada ditemukan pencurian, kekerasan bisa kita langsung ke POLSEK POLRES. Biasanya kalau ada masalah besar kayak yang dulu konflik tuh langsung kita ke POLRES. Tapi hal-hal yang sifatnya material keamanan pengawalan paling ke POLRI. Yang rutin ya, kalau yang lain biasanya paling kunjungan-kunjungan, sumbangan, surat-menyurat sebatas kemampuan PTP lah. Kalau ke pemerintah itu kayanya lebih kaya sumbangan atau sponsor yang tidak didokumentasi.

10. **kegiatan yang berbau politisi yang menerlibatkan komunitas perusahaan ada gak sih pak? Kalau ada bisa tolong dijelaskan?**

    Hemmm, Kalau itu terusnya itu. kalau itu gak bisa dihindarin. Macam manapun apanya dia ee istilahnya hubungan kita dengan dia dianggap tidak bagus, tapi kalau untuk masalah politik hehehe gak perduli dia tetap masuk itu. Kayak semalamlah untuk dia gak usah kita sebut namanya ya, untuk sinamaneneklah husunya kan menang kita buat. Karena waktu itukan permintaan dari kabupatenlah. Tapi ini sifatnya memang tertutup.

11. **Apa kendala yang dirasakan dalam menjlin hubungan dengan pemerintah daerah pak?**

    Kalau khusus itu dimasa waktu konflik ya bukan ada lagi malah fatal. Sayalah yang ikut turun kan, jangankan mengurus KK kalau saya mau berkunjung aja enggan kesana takut. Kebetulan saya pelajari sifat-sifat masyarakat saya pernah kesana untuk menyampaikan pesan manager ke kepala desa karena sudah terjadi bentrok beda lagi ini bukan lahan, ee berantam gak tahan sinamanenek ini berlarian. Orang itukan mayoritas islam jadi orang ini agamanya sangat kuat jadi taktik saya berkunjung kesana tak ubahnya seperti orang yang au ke masjid, soalnya aparat keamanan kita mau kesana dihantam apalagi sayakan. Jadi menyamarlah saya karena sentimen

sekali mereka terkait agama insyaallah mudah memasukinya. Kalau kita nanti memberi keinginannya kita gak sanggup. Menjinakkan masyarakat kasih apa maunya ahaha kita yang tak sanggup. Ahahahah

12. **Berarti untuk kendala yang sangat sering dirasakan dalam menjalin hubungan dengan pemda apa pak?**

    Khusus untuk Sei Kencana ya, hemm jadi gini sekarang tanah tuh kan yang berada di pinggiran sudah mulai ditanamin oleh komunitas. Ya padahal kan sudah jelas tanah tersebut masih dalam wewenang PTPN V. Tapi, komunitas seperti acuh dengan hal itu. Kita sua\ratinlah kebagian Pemda Divisi yang menyangkut persoalan ini, kita surat terus kasih surat, surat, surat sayangnya surat kita tak di respon Pemda. Artinya tanggapan itu hemmm kan kalau kita ini melestarikan sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup terkadang gak ada responnya. Jadi sekarang sekiranyapun ada pemeriksaan atau pengawasan dari lingkungan hidup, kenapa di tanamin seluas 40 meter aliran sungai itu loh jadi kita tinggal menunjukkan laporan kita. Bapak sudah kami suratin tahun sekian tahun sekian tahun sekian, dan sampai sekarang orang itu tak pernah memeriksa itu kan yang harusnya diperiksa setiap tahun. Kira-kira itulah kendala di Sei Kencana nih. Artinya pelarangan terhadap undang-undang yang ditetapkan pemda kurang tanggap.

13. **Balik pada komunitas, bagaimana strategi penyampaian pesan terhadap komunitas Sei Kencana sendiri pak?**

    Untuk metode penyampaian pesan ke masyarakat itu ya paling dari penyuluhan, musayawarah dimana pihak perusahaan bertatap wajah kan dengan komunitas. Gitu aja, kalau yang kamu bilang slogan atau pasang banner itu tidak dilakukan di unit nih, sangat jarang sekali malah. Ada juga kita kayak tahun yang lewat ada namanya pembinaan komunitas terpencil. Itu... kebetulan ada mau pergantian kepala desa maka atas nama permohonan kepala desa Sinamanenek itu kita adakan penataran, apa yang mayoritas dari hasil daerah itu. Misalnya di Sinamanenek di Sumber Sari penghasilannyakan mayoritas utamanya sawit, maka kita adakan penataran di bidang kelapa sawit dan tim tutornya tuh bukan dari PTPN V kita mintak langsung dari departemen perkebunan tingkat dua daerah kampar sebagai narasumbernya. Kita yang menyediakan eeee fasilitas dan kita mengadakan sumbangan tetap yang bisa diingat dan berjangka waktu. Waktu tuh setiap peserta dapat ‘pepsolo” ada 80 oarang jumlahnya waktu itu. Setelah itu ada juga pembinaan kayak masyarakat miskin, saya mendata untuk nantinya agar komunitas dapat dibantu oleh pemerintah. Kemudia

juga dari pembangunan tempat ibadah dan sekolah ini sifatnya jangka panjang. Tapi untuk bentuk nyata yang kita pakai di sini, pas pembukaan Sei Kencana kita mintak itu areal desa kita yang nanam kita yang merawat dan akan kita serahkan ketika telah berhasil kita kelola itu 11 ha. Ini mendukung dana pemerintahan desa, dan itu sekarang sudah repelanting dan surat orang tuh sudah masuk, kepada kita agar PTPN V bersedia lagi menanam kembali dan merawatnya itulah dana desa tadi. Yg terakhir paling nyata tahun lalu kita membagikan 10 kelompok ternak kambing. Dengan lima orang perkeluarga ada 10 kelompok itu. Lengkap kambingnya lengkap dengan biaya pembuatan kandangnya.

14. Ada cara lain dalam melakukan penyampain pesan pak ke komunitas?

Ya paling ke komunitas nih ada sih beberapa kali pakai spanduk eh apa namanya banner tuh ya waktu kegiatan besar kaya sumbangan gitu aja, terus ada pelatihan perkebunan, penyuluan tentang perkebunan.

15. Pernah melakukan kegiatan kayak open house gitu gak pak?

Open house ya? Ke masyarakat itu inilah salah satu hambatan yang susah kita lakukan, kenapa ya gara-gara segelintir kelompok yang tidak suka sama perusahaan tadi ngapain ke PTP. Tapi pernah sih bukan open hose istilahnya duduk tukar fikiran sama komunitas lain pernah dilakukan.

16. Kendala lain yang dirasakan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat apa pak?

Kalau kendala khusus, ha ginilah untuk program selanjutnya kan kita atau PTP V mencarikan lahan untuk dijadikan pola KKPA di Sinamanenek ini. Artinya sebagai penggganti untuk konflik yang telah terjadi, itu pendataan sudah arealnya yang tidak dapat. Soalnya dalam hal ini kita sebagai bapak angkatnya eeee....warga Sinamanenek sebagai pemilik KKPAnya. Sekarang sedang mencari areal atau perkebunan yang sudah jadi yang layak dan akan diserahkan oleh komunitas pasti akan dibagikan kalau sudah kita dapatkan. Jadi menunggu ini orang ini selalu risau, lagi-lagi timbul persepsi yang tidak-tidak ke peusahaan. Kadangpun kita kewalahan untuk memberikan pengertian kepada komunitas yang tidak paham situasi perusahaan. Itu ajasih kendalanya.

17. Ada aksi penolakan dari komunitas dalam menerima bantuan dari perusahaan pak?

Nah dulu tuh, sempat diambil alih untuk segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat oleh Unit Sei Berlian. Karena komunitas menolak segala

aktivitas dari Unit Sei Kencana, padahal sama-samanya kami PTPN V begitulah kira-kira. Heheh Kencana tuh kan dianggap musuh sama komunitas sini tuh dulu. Aneh memang kadang-kadang, waktu kami yang turunkan ngomong komunitas nih"ngapain kami disogok-sogok". Sapi kurban daging tuh dijual ama orang itu, daging tak mau duit tetap diembat. Hhaaa tapi memang itu tidak semuanya hanya segelintir komunitas yang begitu. Kalau dipersentase ada sekitar 30% lagilah komuntas yang masih ngotot.

18. Komunikasi dengan komunitas bagaimana pak?

Komunikasi terkendala ya karena masalah itu tadi, warga disini mayoritas asalnya dari SUMUT dan SUMBAR, SUMUT dengan JAWA paling sulit berkomunikasi di lingkup masyarakata. Kebetulan budayanya dalam bahasa ya masih kental komunitas kita nih. Ada kesenjangan didalam bahasa yang kita rasakan. Caranya ya kita pelajari pelan-pelan tanya dengan yang paham gitulah lagi. Soalnya di desa dekat perusahaan ini dia dikelilingi oleh PTP dan PT jadi bahasa tadi ini sudah campur dia.

19. Untuk karakteristik yang dimiliki komunitas Sei Kencana bagaimana pak?

Kalau saya melihat masa ini bagi yang sudah orang tua sampai tahun 96 sangat membantu. Kenapa? Artinya, dulu pembebasan tanah ini orang tuh manut dengan kepala desanya, artinya dulu ini dibayar duluan secara eee sederhana diantara pihak kebun dengan pemerintahan desa. Ini tak ada masalah, selesai semua. Tapi ketika tahun 2000an banyak orang tua yang sudah meninggal anak-anaknya sudah berkeluarga tanah sudah banyak ynang dijual. 90an keatas memang apalah banyak mencari permasalahan untuk kemenangannya generasi mudanya. Untuk generasi tua sangat membantulah, malah orang tuh bukan untuk kebun saja. Untuk usaha kitapun, inikan sebelah barat ini PTP sebelah timurtuh tanah kosong dulu, itu boleh dibilang kita beli satu ha mau dikasih lebih setengah ha, membantulah. Tapi sekarang banyak yang mencari kesempatan untuk keuntungan pribadi.

20. Bagaimana solusi dari perusahaan pak?

Ya kita hadapkan saja dengan pihak yang berwajib, silakan mengadu ke polisi atau pengadilan kalau perusahaan bersalah. Bersalah tak bersalah kami hadiri kita kan lebih bagus dan bijak tanggapan kita, tapi sebelum itu tetaplah kita maksimalkan pendekatan sosial kita bikin melalui tokoh masyarakat kita angkat humas luar kita dan kita kasih honor sebagai penyambung lidah perusahaan desa.

21. Tidak mencoba untuk melakukan silaturahmi sekedar berkunjung dengan komunitas begitu pak?

Kalau untuk ke komunitasnya ya dikatakan saya sambil lewat kalau ada perlu pasti singgah. Kalau untuk silaturahmi yang sifatnya informal gak pernah saya. Hehe karena ada image yang jelek yang ada di mindsetnya komunitas "Asum kalau mau main seperti itu harus banyak modal". Kita kalau sudah dua sampai tiga kali kedesa orag desa tuh beranggapan kita akan memeberikan apa yang mereka minta. Begitu kita tolak satu kali dia dah langsung "melengos" kekita. Tentu hubungan itu tetap kita jaga tapi tidak terlalu yang mengarah ke informal. Tapi kalau ke acara desa kita diundang atau acara komunitas tetap tuh kita hadir. Cuman ya itu tadi kita terpaksa dituntut untuk membatasi dirilah.

22. Apa yang membuat bapak selaku humas enggan melakukan pendekatan ke komunitas?

Yang susahnya cemana kita bilang nih ya kalau dengan desa tuh memang dekatpun salah jauhpun apalagi, saya ke sinamanenek tuh paling telefon, pak kades gini-gini "ya pak asum ya iya" selesainya tuh. Udah kalau namanya datang kekantor desa memang gak ada pilihan lain baru datang. Tapi kalau kades sekarang masih enak dia, kadang sering via telfon "bang kirim dulu alat berat kita geleder bang rusak jalan desa" ha diantarnya surat nanti baru kita kasih. Komunikasi kita bagus, tapi memang ada satu kelompok si rajak CS itu memang gak mau sama sekali. Sekarang kita nih di sinamanenek tuh kuncinya cuman pak samsir tulah yang kamu bilang sudah kamu wawancarai itukan. Jadi sempat pak samsir ini membelok dari PTPN V karam PTPN V. Karena waktu pembukaan kencana itu pak samsir itu statusnya sekertaris desa. Berenti dia jadi karyawan yang di tandun kerja dia jadi sekdes.

23. Bagaimana komunitas dengan PEMDA saat ini pak, dan bagaimana komunitas yang pro ke perusahaan? Apakah ada perjanjian dengan komunitas ini?

Jadi gini, gak ada perjanjian-perjanjian. Karena sekecil apapun cerita sei kencana itu pak samsir tuh tau, jadi kalau masalah lahan yang tidak terselesaikan tuh tau dia tuh siapa-siapa mereka yang belum dapat. Gini karena ada orang dibelakang yang mensponsori jadi melebar kalau PTPN V ini dituntut ha dapatlah duit tuh kan gitu. Memang ada beberapa orang yang gak dapat waktu itu, kalau saya bilang sudah 99 % tuh pergantian selesai hanya saja dokumentasi kita kan gak ada. Masyarakat ini sekarang larinya ke LSM bukan ke PEMDA karena berapa kali sidang kan gak laku ndak selesai jugakan. Di PEMDA itu kan aturan mainnya menyerahkan kalau

memang ini milik kalian tuntut secara hukum main di pengadilan kalah. Tiga kali mereka pengadilan kalah

24. Dampak dari melakukan PKBL sendiri bagi perusahaan apa ya pak?

Untuk dampak kegiatan PKBL ini hubungan kita yang jelas bagus, yang paling terasa tingkat gangguan ke kebun tuh gak ada. Ga ada orang tuh merong-rong nuntut apa-apa dari perusahaan. Padahal liatlah ada PTPN Sinamanenek tuh jadi kecamatan sekarang dari empat desa keseluruhannya.

25. Dari keseluruhan kegiatan yang telah terlaksana, menurut bapak apa yang menjadi kekurangan sehingga ada persepsi komunitas yang enggan dengan perusahaan?

Semua kegiatan itu jarang didokumentasikan dari dulu. Emang gak pernah ada dokumentasinya, kelemahan PTP ya itu orang beranggapan apa konstribusi PTP mana ada apa-apanya buat desa nih. Gak nampak gak pernah menonjolkan diri, kalau orang swasta di lingkup Sinamanenek tuh dia menyerahkan bantuan langsung tuh masuk ke media cetak bla bla bla. Sekarang lah baru mulai tuh gencar buat banner setiap acara dan lainnya Kalahnya itu tadi PTP nih, kalau Unit sama mediapun tak pernah semuanya yang ngatur itu kantor pusat saja. Karena susahnya kebun itu kalau mau berhubungan dengan media yng mrnanggung dana itu manager pusat, perusahaan tak mau tau itu. Kalau manager mau manager buatlah, tergantung managernya. nanti Unit buat kegiatan dengan media, ha duit darimana nih kebun, korupsi ha kan takut kita jadinya.

26. Bisa dijelaskan bagaimana pembagian jobdesk humas unit dengan yang ada di kantor pusat bagaimana pak, seperti apa komunikasinya?

Komunikasi unit dengan pusat ini bisa dikatakan agak tertutuplah atau sudah ada porsinya masing-masing. Karena orang pusat ini untuk informasi itu dikhususkan kepada manajer, struktur tertinggi di unit. Seharusnya memang asisten umum atau humas di unit dilibatkan tapi seharusnya ahaha, tapi kantor pusat tidak demikian. Asum kebun hanya disuruh jaga pagar aja, kalau ada demo unit didepanlah. Kalau lewat dari itu ha itu dah urusan kantor pusat. Kalau untuk urusan publikasi unit kita juga tidak diberikan wewenang ya publikasi tetap humas kantor pusat.

Transkrip Wawancara dengan Pemerintah Daerah

Narasumber **:** Andri Miko, Kasubag Tata Pemerintahan

Tanggal Wawancara: 25 Juli 2017

1. **Apa saja peran pemerintah daerah selama ini terhadap perusahaan khususnya kepada PTPN V (Unit Sei Kencana Kampar) ?**

   Seharusnya kalau peran kita, jadi sebenarnya begini kalau yang namanya pemerintahan perkebunanpun bagian dari pemerintahan. Jadi intinya dari sektornya perkebunan tuh pemerintahannya ya dinas perkebunan. Jadi yang mengawasi masalah perkebunan, pembinaannya pengawasannya ya dinas perkebunan. Kalau di tata pemerintahan eee...bupatinya itu perannya kita tetap mengawasi. Artinya apakah perusahaan ini berjalan seperti apa.

2. **Seperti apa pak?**

   Yaaa....kita maksudnya apakah sampai CSR nya tapi ya tetap yang melakukan pengawasan adalah dinas perkebunan. Tidak di tata pemerintahannya, tetapi kita eee ya sama-samalah tapi yang fokus ke situ ya dinas perkebunan.

3. **Berarti divisi tata pemerintahannya berperan pada fokus yang mana pak?**

   Tata pemerintahan nih lebih kepada peliharaan masyarakat ketika masyarakat mengalami masalah-masalah terkait pertanahan misalnya itu melapor ke bupati, nanti bupati ke kita ke tata pemerintahannya untuk di konsolidasi. Misalnya tidak ada permasalahan ya memang tidak ada yang perlu kita eee sampaikan kebawah. Paling hanya sekedar pengawasan terhadap CSRnya gimana pelayanannya gimana tata kelolanya seperti apa ada permasalahan gak dimasyarakat, kerjaannya buahnya.

4. **Berarti PTPN V hanya melakukan hubungan dengan pemerintah pada saat terjadinya konflik atau masalah saja?**

   Maksudnya bukan ada hubungan kita pemerintah dengan perusahaan pasti tetap ada hubungan. Tapi yang menjadi sektornya yang mengarah kesitu tuh ya dinas perkebunan. Karena perkebunan itu ya pemerintah bukan perusahaan dia pemerintah yang mengawasi bidang perkebunan.

5. **Jadi, ketika Sei Kencana terkena krisis yang bersumber dari masyarakat tahun 2015 hingga adanya tindak anarkis sebab tanah sebesar 2.800 ha yang mereka persoalkan, divisi tata pemerintahan ikut andil?**

   Engga, tapi memang saya tau.

6. **Apa yang dilakukan oleh PTPN V untuk menyelesaikan dengan masyarakat? Adakah PTPN V dan masyarakat melakukan pertemuan dengan peran Pemerintah ?**

   Oh kita iya, jadi intinya itu menjadi suatu permasalahan itu sudah dibahas hingga ke nasional ya kita bahas kemaren juga ada kita bahas. Itu terkait masalah hak wilayah. Jadi masyarakat itu menuntut bahwa itu tanah wilayahnya Sinamanenek. Dan PTPN V itu katanya wilayah HGU dia. Jadi itulah ada perselisihan ternyata pada saat di cek memang tidak ada izin disana. Kemudian masyarakat tetap menuntut hak wilayahnya, tapi kalau masalah itu tetap kita bawa ke bupati.

7. **Berdasarkan penjelasan bapak, posisi bapak berada di bawah Bupati langsung pak? Artinya bapak dalam struktur memiliki hak dalam berdialog langsung menyampaikan hal-hal kepada Bupati?**

   Iya benar kita memang berada di bawah Bupati kita. Ada Bupati, Asisten baru tata pemerintahannya. Jadi ya saat masyarakat melapor ke bupati, bupati akan menyerahkan ke kami.

8. **Menurut bapak bagaimana kemampuan Perusahaan PTPN V dalam berkomunikasi (menyampaikan pesan) agar terciptanya suatu pemikiran yang sama?**

   Jadi sebenarnya kita kembali kepada pepatah adat Kampar. Tiga tungku kejaranan tali bapilin tigo itu adat kampar. Itu artinya tiga tungku tuh tiga buah tungku masak satu pemerintah satu perusahaan satu masyarakat. Jadi kalau dua masak dikuali akan timpang, jadi harus tiga kokoh dia. Jadi karena tidak bagusnya hubungan tadi *miss communication* nya antara masyarakat perusahaan akhirnya timpang ada gejolak di bawah krisis tadi sampaikan. Tali bapilin tigo tuh tali tuh tiga bepilin sama-sama membangun, jadi antara pemerintah dengan perusahaan sama-sama membangun nih dua nih ada kesepakatan masyarakat tak dibawak ndak jadi barang tuh dibawak. Masyarakat dengan perusahaan ada kerja sama pemerintah tidak dibawa tidak akan bisa karena kebijakan dari pemerintah. Jadi harus sama-sama bertiga tuh saling bersinergi dalam melakukan pembangunan dalam apapun bidangnya. Baik di desa, di kota itu yang tidak ada.

9. **Maksud yang “tidak” ada pak?**

   Loh buktinya ada krisis kan, kenapa ada krisis? Berartikan tidak diajak masyarakat waktu apa ini berartikan tidak ada komunikasi.

10. **Berarti dari sekian banyaknya perkebunan bapak menganggap perusahaan gagal memabangun hubungan baik dengan masyarakat? Dari data yang saya peroleh hanya satu Unit ini saja kok pak yang nyangkut.**

    Ya karena masyarakat memang menuntut di Sei Kencana kan, ya alasannya itu wilayah mereka, tanah adat mereka, ninik mamak mereka punya wilayah disana ada kuburan tua disana. Jadi mereka menuntut 2800, memang solusi dari PTPN V itu mencari lahan kebun lain di daerah kampar.

11. **Masyarakat setuju?**

    Ada yang setuju ada yang tidak. Tapi kalau keinginan masyarakat kampung mereka disana ya mereka pingin tanahnya ada disana. Ngapain jauh-jauh kebun dibangun oleh PTPN V untuk ganti lahan tadi tapi yang ngelola siapa kan mereka tidak bisa melihat hasilnya gimana. Itu yang bermasalah pada saat ini wilayahnya kampar, PTP V cari kebun di Rohul, kuansing, pelalawan apakah mau. Dia itukan waktu itu PTPN V berhubungan lagi dengan pemerintah setempat, 2.800 ha loh yang mau dibangun aggaplah 1.000 ha saja yang dibangun itukan izin lagi ngurus izin itu sosialisasi lagi dibawah masyarakat tempatan yang akan dibangun itu loh inikan tanah kami jugak kok kami gak diberikan juga bangun kebun. Karena syarakt perkebunan tadikan 20% harus diberikan kepada masyarakat. Jadi banyak ininya jadi masyarakat tetap ingin ke hemmm ada masyarakat yang ingin keluar ada masyarakat yang ingin tetap di kampung itu.

12. **Kalau sudah dua keinginan seperti itu, komunitas dikatakan sudah terbagi menjadi dua kubu ya pak?**

    Ha iya sudah terpecah, itu politik tadi banyak masalahnya tuh.

13. **Oh iya pak, dalam Government Relations itu kan identik dengan urusan loby nih pak. Biasanya pelaku loby dari pihak perusahaan siapa pak yang ke pemerintahan?**

    Ya biasanya kalau perusahaan itu memang Humas dulu dek. Jadi kadang-kadang ada permasalahan humasnya datang jadi ketika kita rapat kita gak mau humasnya datang. Kita pingin yang datang rapat tuh orang yang bisa memberikan keputusan. Kadang-kadang humasnya datang kami sampaikan dulu keatasan saya kan berlarut-larut jadinya itu paling banyak alasan secara umum untuk kehutanan kayak gitu.

14. **Menggunakan surat-menyurat gak pak?**

    Iyaa, kan kita suratin kita undang. Tujuannya sudah ke atasannya tapi lagi-lagi alasannya saya disuruh atasan saya seperti itu.

15. **Bagaimana pemerintah menanggapinya pak?**

    Ya kami gak bisa melanjutkan rapat, karena percuma sajakan keputusan tidak bisa diambil. Ya caranya kita undang bertemu pas rapat kita telfon masyarakat perusahaan kita fasilitasi, kita sifatnya memfasilitasi nih pemerintah. Ternyata yang datang itu tidk bisa memberi keputusan ya tidak bisa kita lanjutkan.

16. **Lobby apa saja yang pernah perusahaan gunakan pada pemerintahan pak?**

    Formal saja sih, paling kirim surat kirim kemana gak ada by phone bagi-bagilah gak ada haha.

17. **Cara perusahaan menyampaikan atau melaoprkan informasi ke pemerintahannya itu bagaimana pak?**

    Paling mereka membuat laporan saja.

18. **PTPN V menurut bapak sudah pada posisi standar pemerintahan untuk membantu pemerintahan dalam mengambil keputusan gak pak?**

    Kalau dibilang ideal tidak ideal mereka wajib harus mengeluarkan CSR ke masyarakat itukan salah satu dalam membantu pemerintah. Baik di dalam desa seperti beasiswa anak sekolah membangun masjid membuka jalan kan membantu pemerintah namanya. Itu wajib itu hukumnya, ya ideal gak ideal memang mereka harus mengeluarkan itu. Dan mereka memang harus membuat program, gak asal ngasih begitu saja dan seharusnya itu program itu diketahui oleh dinas perkebunan.

19. **Tapi kembali lagi pada lahan pak, hanya komunitas di unit Sei Kencanakan pak yang mengklaim lahan ?**

    Mengklaim? Bukan mengklaim ya, masyarakat itu punya wilayah mereka. Ya gimana tanah itu memang tanah mereka ada buktinya kalau itu tanah mereka. Ada kuburan tua disana.

20. **Tapi pak, di zaman sekarang inikan tidak cukup dengan hanya kuburan saja pak tentu harus disertai dengan sertifikat dan sejenisnya dan itu tidak dimiliki oleh komunitas pak?**

    Iya, jadi gini wilayah itu ada aturannya. Aturan ninik mamak tuh tak tertulis. Jadi mereka patuh dia oh gaboleh kayak gitu aturannya gak ada tidak tertulis dan komunitas sinamanenek nih patuh. Kayak di kampar nih ada enam lokasi hutan adat, itu kebun-kebun disampingpun tak ada yang berani mengganggu, tak ada aturan tertulis perusahaan misalnya jangan menebang hutan gini-gini. Saya tanya kenapa mas tidak tebang hutan? Kami tak berani pak. Kenapa tak berani? Adat disini melarang nanti kalau kami tebang kami kenak denda itukan contoh aturan adat yang tidak tertulis dan itu

diakui tanah wilayah negri ini. Tidak tertulis jadi memang kendalanya disitu nanti ketika pembuktian ke pengadilan sekarang, mana buktinya ini kita tidak ada. Tapi pemerintah kampar mengakui bahwasanya itu adalah tanah wilayah ninik mereka.

21. **Jadi sampai sekarang komunitas Sinamanenek masih mempersalahkan terkait lahan ya pak?**

    Ya masih, belum selesai. Solusinya itu kemaren solusinya PTPN V mencarikan kebun pengganti bagi warga masyarakat Sinamanenek. Warga ini harus dipilah juga dulu diseleksi, warga yang seperti apa? Ada yang mengatakan pinginnya seluruh warga disana atau orang yang lahir disana jadi didatalah sesuai KTPnya jadi gak sembarang ngasih. Karena tanah wilayah itu milik anak ponakan bukan punya datuk itu. Oh saya datuk saya punya tanah wilayah bukan saya yang punya, yang punya ya anak keponakan saya yang mengatur saja. Jadi yang gerak tuh ya yang ada silsislah disitu, jadi makanya kalau sampai sekarang solusinya pemerintah PTPN V akan mencari lahan diluar.

22. **Kemudian, bagaimana Government sendiri dapat menjadi bermanfaat bagi masyarakatnya?**

    Kita transparan saja, kita dua arah saling terbuka kita. Kita memberikan masukan mereka juga silahkan kita gak masalah tapi ya itu terbuka jangan dan tidak boleh ditutupi.

23. **Jadi masyarakat dapat dikatakan sering berkunjung ke pemerintah ya pak?**

    Ya sering apabila ada permasalahan lahan, ada masalah batas desa macam-macam. Jadi permasalahan tanah itu komplit.

24. **Bagaimana sikap pemerintah ketika dihadapkan dengan kasus sengketa lahan terkhusus di Sei Kencana?**

    Kita, intinya memfasilitasi. Antara dua pihak tadi kita berada di tengah-tengah gak boleh mihak sama aja semuanya intinya kalau kita ini ya harusnya ke masyarakatnya. Jadi kita fasilitasi kita cari data fakta yang ada kita sampaikan kita terbuka saja. Makanya kadang ada perusahaan yang melobi-lobi ndak bisa.

25. **Jadi secara tidak langsung pemerintah enggan untuk melakukan lobby yang informal pak?**

    Ya kita terbuka aja, kita gak mau hal yang kayak gitu. Kayak saya tadi rapat diatas kita terbuka saja.

26. **Bagaimana menurut bapak pada perusahaan dalam mengembangkan isu mengenai corporat?**

    Yaaa...kadang-kadang gini kita melihatnya secara keseluruhan atau disatu tempat. Kadang-kadang disatu tempat kita bilang tak bagus secara keseluruhan ya kadang masyarakat lainnya dapat juga istilahnya tidak ada permasalahan PTPN V baik-baik aja hubungannya. Ditempat lain bermasalah jadi kita gak bisa bilang bagus semuanya tidak juga. Ya tergantung dia tadi buah dia dengan masyarakat tadi intinya. Kalau buah mereka masak dengan baik ya baiklah karena masyarakat intinya mereka berusaha di Tanah masyarakat. Kan intinya mereka buat usaha di tanah mayarakat tentu harus menjaga hubungannya dong. Makanya kalau mereka bagus hubungannya pasti tidak akan terjadi konflik itu.

27. **Jika bapak berkata upaya PTPN V tidak bagus dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, bagaimana tanggung jawab sosial yang sudah perusahaan lakukan? Karena berdasarkan data perusahaan melakukan kegiatan komunitas yang membantu membangun desa pak.**

    Ya itukan jatunya wajib, iya.

28. **Nah bagaimana kalau saya ambil contoh dari data pak, dengan pemberian kambing dari perusahaan ke komunitas. Dikatakan pagi kasih siang jual pak. Kan ini bertujuan untuk membudidayakan masyarakat mengangkat ekonomi warga, tapi sepertinya komunitas tidak merespon dengan baik pak. Ini gimana pak?**

    Dipotong mungkin ndak, hehehe

29. **Tapi bener pak saat saya turun ke lapangan berjumpa dengan komunitasnya mereka mengakuinya pak. Nah gimana pak?**

    Jadi kita gini, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Kita juga tidak bisa menyalahkan perusahaan. Kita kembali lagi ke ini ke mindset kita ke pola pikir kita jadi pola pikir masyarakat tidak bisa disamakan dengan pola pikir di kota. Jadi, kadang-kadang masyarakat kita mungkin malas gitu bekerja. Kadang orang-orang jawa yang trans rajin bekerja, jadi kita gak bisa menyalahkan kok dijual kambingnya ya pola hidupnya memang seperti itu. Ya gini memang kan sudah kewajiban dari perusahaan dalam misalnya CSR memberi kambing untuk menambah usaha mereka gitu ya tujuannya, tujuannya gini masyarakat kalau tidak kita pikirkan nanti mereka mencuri buah kan akhirnya kerugian ada di perusahaan jugak. Jadi kalau mereka ada kegiatan ada penghasilan yang lain ada ternak ayam kambing misalnya jadi mereka menghasilkan uang mereka gak melakukan hal-hal yang negatif lagi.

30. **Tapi pak, kasus kambing ini kan pak mereka jual dalam satu hari kan bisa habis dalam sekejab. Yang jika mereka pergunakan beranak pinak mereka sudah membantu ekonomi mereka pak. Permasalahan komunitas disini seenarnya seperti apa?**

    Ya itu makanya, jadi kita gak bisa menyalahkan masyarakat. Seharusnya perusahaan bertanya dulu bapak ibu apa maunya? Kita kasih nih tapi betul-betul dikerjain bukan dan perusahaan harus memantau jugak. Gimana hasilnya? Ya berikan bimbingan dulu cari ahli yang dari luar untuk monitoring. Maklumlah kita masyarakat kita gak bisa ngapa dijual? Ya mungkin mereka malas ternak dikasih kambing mana akan mau. Sebelum kita memberikan suatu hal kita tanya dulu maunya apa? Pak saya mau jait tapi kami gak bisa jahit, tentu didatangkanlah tenaga ahlinya buat ngajarin biar ada kerjaan ibu-ibu tuh.

31. **Untuk konstribusi yang paling pemerintah rasakan dengan keberadaan perusahaan PTPN V sendiri apa pak?**

    Ya kalau ke pemerintah salah satunya membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Jadi kita makanya tidak terlalu memikirkan masyarakat mereka sudah ada aman sudah ada kebun dikasih kan ada pola KKPA tuh bapak angkat kan, ha jadi kita tidak terlalu memikirkan. Paling yang kita pikirkan eee permasalahan lain ada konflik atau permasalahan desanya bagaimana itu aja sih. Kalau untuk pemerintah kabupatennya ya PAD tadi kalau ada PAD ada pemasukan ke daerah.

32. **Ada kegiatan sponsorship atau kegiatan ucapan hari jadi pemerintah atau perusahaan mungkin pak?**

    Itu ada pasti kalau ndak ada berarti kita suruh pindah berarti tuh haha. Iya dia buka usaha di negri orang tapi dia cuek-cuek aja bawak tuh sawit pulang kan ahah. Ya kan gitu lagi oran itu buka usaha dirumah orang tapi dia gak permisi sama orang yang punya rumah.

33. **Jadi sponshorsipnya dalm bentuk apa pak?**

    Biasanya ada acara ulang tahun kampar ulang tahun kabupaten ya mereka nyumbang. Saya nyumbang pak ini untuk hadiah ini buat acara di desa tanding-tanding bola olahragalah ya ya dibayarin perusahaan. Intinya tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang. Kalau uang nanti habis. Jadi barang apa yang dibutuhkan bola atau apa oke dikasih bola. Kalau uang dikasih habis sama panitianya.

34. **Berarti untuk data sponshorsip ini tidak tertulis ya pak?**

    Tidak ada, paling kita pemerintahkan dalam ulang tahun kampar yaudah kasih tau aja kita nyumbang inilah untuk hadih. Jadi kita kan kasih undangan nih kami ngasih ini pak

dan diapun tau jugak oh besok ulang tahun kampar gak kan mungkin mereka tidak mengasih.

35. **Frekuensi komunikasi perusahaan dengan PEMDA bagaimana pak?**

    Kalau dengan kabupaten pemerintahnya mungkin kurang. Tapi kalau ke dinas teknisnya mungkin sering. Dinas teknis kayak dinas perkebunan dinas ketenagakerjaan mugnkin sering.

36. **Kalau ke Bupati pak?**

    Mungkin jarang juga, ngapain orang perusahaan ngubungin bupati banyak lagi kerjanyakan. Paling ya ke dinan teknis lah menjalankan hubungan sesuai dengan undang-undangkan misal dalam bentuk laporan perusahaan. Dia kan brgerak dierkebunan tentu mereka mengurus sesuai bidangnya.

37. **Kalau hubungan pemda kampar dengan unit Sei Kencana hingga saat ini gimana pak?**

    Baik, tidak ada masalah. Kalau bermasalah kami suruh pindah aja hehehe. Kan sekarang baik-baik aja kerja-kerja lah kan gitu. Gak ada bermasalah keluarlah dari kampar kan tidak.

38. **Kendala yang drasakan pemda dalam menjalin hubungan baik dengan perusahaan apa pak?**

    Apa kendalanya gak ada kayanya, yang merasakan kendala itu masyarakat nanti. Masyarakat baru melaporka ke Bupati. Pemerintah kan ada tingkat kabupaten ada desa jadi yang merasakannya dulu nanti pemerintah desa kecamatan. Desa lapor ke kecamatan camat baru lapor ke bupati. Tapi selesaikan dibawah dulu semuanya, kalau gak selesai baru melapor keatas gak mungkinlah seluruh permasalahan perusahaan bupati yang ngurus capek jugakan hahahahaha. Ndak dapat kerja nanti yang dibawah.

39. **Jadi menurut bapak selaku pejabat pemerintahan tidak adanya kendala oleh perusahaan?**

    Kalau kita gak ada, baik-baik saja.

40. **Dari sudut pandang bapak perusahaan PTPN V berpotensi besar gak pak untuk mengembangkan desa yang tersebar di Unit perusahaan?**

    Bisa, kek tadi mengembangkan desa tadi bisa. Ya itu tadi maunya apa memang harus kayak gitu. Makanya tadi saya bilang tiga tungku ini tadi harus jalan, kalau ndak gak bakalan jalan.

41. **Tapi saat pemerintah turun ke lapangan apakah sudah terealisasikan?**

    Secara masyarakat terbantu sudah, tenaga kerja terbantu juga.

42. Harapan bapak selaku pejabat pemerintah terkait perusahaan apa pak?

Harapannya saling komunikasi saling koordinasi intinya jagala tali bapilin tigo tadi. Sama-sama menjaga hubungan baik dari perusahaan ke pemerintah perusahaan dengan masyarakat, komunikasinya harus bagus.

43. Komunikasi yang seperti apa yang bapak harapkan, kalau formal saya rasa sudah dari surat menyuratkan pak?

Ya intinya maksud saya sesuai dengan aturan-aturan yang ada saja. Jalani aja aturan yang ada terbuka.

Transkrip Wawancara Peemerintah Daerah Dinas Perkebunan

Narasumber **:** Sofyan Hadi, Seksi pembinaan pengawasan perkebunan

Tanggal : 25 Juli 2017

1. **Itu kewajiban pak?**

   Ha itu kewajiban dia seluas 20 %. Yang diatur sesuai didalam Permentan 98 tahun 2013, tentang pedoman izin suatu perkebunan. Cuman yang terjadi di Kabupaten Kampar karenan memang kemaren coba saya pernah koordinasikan ke Jakarta ke Mentrian Ditjenbun itu ada permasalahan yang tidak jelas sampai saat ini, karena Kampar yang namanya lintas itu berartikan melintasi dua kabupaten. Ini ada Rohul ini ada kampar dia melintasi dua kabupaten, itu izinnya dikeluarkan oleh Provinsi. Ha tapi, dibagi orang PTPN V dia menyatakan karena diakan dari Rohul ada di Kampar ada di Siak dia mengatakan itu lintas padahal dia tidak melintasi. Defenisi lintas itu yang sampai saya koordinasikan ke kementrian itu memang tidak diatur secara detail secara rinci. Kata orang kementrian ada boleh-boleh saja tapi yang namanya lintas sebenarnya kana kalau dari versi saya sendiri itukan melintasi dua kabupaten, jadi selama ini pembinaan pengawasan dan perkebunan terhadap PTPN V itu kita juga pernah surati ditjenbun kita juga pernah surati dinas provinsi kita juga pernah surati dulu ada izinnya dikeluarkan oleh atas nama gubernur di bagian ATPEM administrasi pemerintahan kalau gak salah. Ha itu, kita surati kita mempertanyakan sebenarnya yang defenisis lintas ini seperti apa. Dasar dia mengeluarkan itu tuh kita pertanyakan. Defenisi itu tuh kita pertanyakan kemaren, ini rekomendasi izinkah? Karena dari surat pembangunan itu dia di perihalnya itu dia menyatakan rekomendasi tapi disinya nanti dia menyatakan ini izin usaha perkebunannya ha itulah yang dipertanyakan yang pernah disurati ke bagian Kantor Gubernurnya.

2. **Berarti komunikasi dijalin dengan surat menyurat pak?**

   Iya dengan cara surat menyurat. Ini karena memang kemaren ada jawaban dari provinsi itu dinyatakan bahwa PTPN V itu berada di lintas karena ada di Kampar ada di Rohul. Jadi semua kabupaten ada PTPN V, jadi provinsi menganggap itu ada di lintas sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau izin itu ada di lintas itu dikeluarkan oleh provinsi. Secara izin yang dikeluarkan itu dicantumkan pembinaan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang sudah dilakukan itu adalah menjadi kenangan

sebagai penerbit izinnya. Karena izinnya provinsi berarti pembinaan pengawasannya dilakukan oleh provinsi. Jadi Kabupaten tidak pernah lakukan pembinaan kepada PTPN V, jadi untuk lebih jelasnya nanti coba ke PTPN V atau langsung ke dinas perkebunan Provinsinya coba tanyakan kesitu kemitraannya seperti apa. Karena setau saya yang namanya kemitraan perkebunan kalau untuk PTPN V itu hanya ada di kampar kiri, kalau untuk Sei Kencana tidak ada.

Ha jadi ada lagi informasi, jadi waktu itu kan karena ada kewajiban 20% pembangunan kebun untuk masyarakat seluas 20% dari izin yang diberikan itukan sudah dicadangkan dulu ada sekitar 2.800 ha itu untuk masyarakat ya. Kenyataannya dilapangan yang ada itu hanya 100 ha. Itu tanda kutip saya tidak bisa memberikan informasi karena itu juga bukan bidang saya. Itu adalah permasalahan-permasalahan dilapangan. Jadi kalau kita tanya PTPN V siap membangunkan kebun untuk masyarakat. Tapi silahkan cari lahannya, yang jadi permasalahan sekarang adalah mencari satu ha aja sulit apalagi 2.800 ha, kemane nak dicari. Jadi kalau versi PTPN V nya dia siap membangunkan tapi carilah lahannya. Suruh masyarakat cari lahannya.

3. **Bukannya komunitas mengklaim bahwa tanah perkebunan di Sei Kencana merupakan tanah peninggalan nenek moyang komunitas pak?**

   Iyaa betul.

4. **Tapi, yang saya dengar dari bapak 20 % ?**

   Iya jadi secara peraturannya karena itu ada perjanjian-perjanjian PTPN V sebelum izin dikeluarkan tentu ada MoU dengan ninik mamak atau masyarakat tempatan dia sudah bersedia untuk membangun kebun itu. Jadi masyarakat beranggapan waktu itu dari kebun yang sekarang itu kebagianlah masyarakat yang 20% nya itu dianggaplah yang 2.800 ha dari luasannya itu. Yang sekarang buktinya yang 2800 itu tidak ada sama sekali. Apakah itu permainan di pusat atau apakah itu pemainan di desa apakah permainan dari Provinsi kita tidak tau, ha makanyalah saya bilang tanda kutip tadi.

5. **Memang saya tidak terlalu mendalami terkait kasus tersebut sih pak, karena itu sudah bidang pertanahan lagi. Hehehe kalau begitu saya langsung ke inti pertanyaan saya ya pak. Apa saja peran pemerintah daerah selama ini terhadap perusahaan PTPN V khususnya di Kampar?**

   Khusus untuk di kampar kalau bagi kita sebagai penerbit atau yang sebagai mengeluarkan izinnya, kita memang sudah diatur dengan regulasi tadi ada undang-undang perkebunan no 39 ada permentan 98 tahun 2013 kewajiban melakukan

pembinaan pengawasan minimal satu kali dalam satu tahun. Bisa dua kali dalam satu tahun itukan minimalnya yang per enam bulan sekali. Jadi dalam pembinaan pengawasa itu yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnyakan didalam regulasi di kabupaten itu didaerah, kitakan tidak ada penindakan sangsi semacam sifatnya seperti apa, sifatnya hanya pembinaan. Kalau untuk masalah regulasi didana atau apanya itu memang itukan kewenangan dari perusahaan. Jadi yang pembinaan itu ada delapan subsistem, delapan subsistem tadi dari yang pertama kita melakukan pembinaan dari legalitas kita cek legalitasnya. Seharusnya kalau seandainya kebun dia izin perusahaan budidaya (IPB, izin usaha pembangunan budidayanya sudah memenuhi syarat belum kita kroscek semacam sharing aja. Abis tuh visi misinya harus dipampangkan ditempelkan di katornya itu secara legalitasnya itu sifatnya kita melakukan kunjungan.

6. **Berarti bapak melakukan kunjungan ke perusahaan secara resmi ?**

   Dasarnya kita melakukan kunjungan itu adalah laporan perkembangan usaha perkebunan. Makanya dalam kewajiban perusahaan kalau dia sudah diterbitkan izinnya ada dia memiliki kewajiban itu adalah laporan perkembangan usaha perkebunannya.

   Jadi didalam pembinaan itu beberapa subsistem yang kita lakukan kunjungan seperti kita melakukan pengawasan pembinaan itukan kunjungan ke perusahaannya. Ikita disitu hanya sebatas sharing saja, mungkin kalau ada yang kurang kita informasikan karena kitakan sebagai stakeholders eee... kita sebagai mitra kerja kan bagi pelaku usaha perkebunan. Jadi disitu ada sistem legalitasnya, perizinannya, perkebunannya, pemupukannya, sosialnya gimana nanti lengkap disitu sarana prasarananya apa-apa saja didalam subsistem itu.

7. **Untuk sosialnya divisi dinas perkebunak yang bapak perankan juga bertanggung jawab?**

   Kalau untuk sosialnya kita hanya sebatas pembinaan, jadi semacam diskusi. Contoh nanti perusahaan A perusahaan A ini secara sosial masyarakatnya apa yang dia lakukan mungkin semacam ada proposal isra' mi'raj, atau hari-hari kebesaran keagamaan. Itu nantikan melalui desanya tempatan, jadi dari tempatan itu dari desa umpamanya ada pertandingan olahraga menyambut hari raya 17 agustus mungkin semacam mintak bantuan dana atau apajadi kategori ini yang saya maksud dengan sosialnya. Mungkin juga pembangunan lapangan volley nya kalau untuk CSRnya ada

dibagian kantor Bupati itu dibagian kerja sama. Sudah ketemu kamu sama kabag kerja sama?

8. **Sudah pak, tapi tema saya dengan CSR itu beda lagi pak. Takutnya semakin melebar pembahasan saya pak. Hehe**

   Oh iya mengkanya kalau memang bantuan masyarakat sudah sepenuhnya dipegang dengan divisi kerjasama yang baru dua tahun berdiri. Kalau secara apanya memang seperti itu. CSRnya kita dibagi lagi kan, dulunya memang ada regulasi mengatur itu semua diperkebunan hanya sebatas koordinir aja. Sekarang sudah ada badannya untuk itu sendiri. Tapi yang dampak langsung ke masyarakat mungkin ya semacam memperbaiki jalan, membuka jalan itu dari PTPN V semacam sosialnya. Kaya pembangunan mushallanya atau apa lagi ha abis tuh ada lagi dari semacam beasiswa anak-anak dibantu oleh perusahaan. Tapi itukan rekomendasinya kalau dulukan belum ada yang seperti itu, sekarangkan sudah diatur ya itulah bagian CSR itu. Jadi semua koordinator ya sama bapak sulistyadi itu kabagnya kerja sama. Ha kalau dulu hanya kayak ada permohonan dari masyarakat tempatan ada butuh beasiswa lima orang misalnya mintak bantuan kita usulkan ke perusahaan untuk membantu. Nanti perusahaan bantu tiga oranglah atau berapa oranglah jadi orang tuh langsung yang berhubungan.

9. **Jadi bapak atau PEMDA ini menghubungkan perusahaan dengan masyarakat?**

   Jadi kita ini PEMDA hanya memfasilitasi seandainya semacam ada bantuan-bantuan apa. Tapi kebanyakan kalau yang sudah berjalan biasanya dari desa itu tanpa dinas perkebunan lagi langsung saja orang itu ke perusahaan. Soalnya perusahaannya itukan langsung berada diwilayah tempat tinggalnya.

10. **Berarti cara perusahaan menerapkan corpoorat communication tadi itu menganut hubungan formal minimal satu kali dalam setahun ya pak?**

    Yaa betul satu kali dalam setahun, kalau seandainya dia tidak melaporkan kita tidak melakukan pembinaan. Karena dasar kita melakukan pembinaan itukan laporannya. Contoh dia memiliki usaha izin lima dia laporkan perkembangan perkebunannya kepada dinas perkebunan sebagai mitra kerja atau sebagai pemberi izinnya. Dari situ baru kita kroscek laporannya izinnya tiga, seharusnya dia melaporkan lima kok hanya tiga yang dilakukan yang duanya kemana. Jadi kita melakukan semacam kroscek seperti itu. Ha nanti produksi dia dilaporkan nanti dia menghasilkan TBS itu sekian ton dalam luasan sekian ha sedangkan kondisi dilapangan sekian ha sekian

ton sisanya kemana. Apakah dia menguasai lahan diluar izin? Atau bagaimana kan ada hal-hal negativ yang seperti itu ha itulah tujuan dari pemerintahan.

11. **Apakah dalam implimentasi tugas government relations PTPN V telah memnuhi persyaratannya pak?**

    Eee....ada beberapa perusahaan yang sudah memenuhi persyaratan. Karena kalau perusahaan itu tidak memenuhi persyaratan tentu legalitas tidak kita berikan, sesuai dengan regulasi yang ada dan saat penerbitannya kan. Karena regulasi inikan selalu berkembang kan.

12. **Jadi perusahaan dikatakan cukup baik dalam mengenali lembaga ataupun struktur dari pemerintahannya pak dan birokrasinya?**

    Secara komunikasi bagi saya pribadi ataupun organisasi kalau PTPN V itu tadi yang saya sampaikan karena memang secara izinnya pusat yang mengeluarkan SPUP surat pendaftaran usaha perkebunannya itu pusat yang mengeluarkan dan tidak eee kabupaten dan tidak daerah satu. Dan kedua ada legalitas yang dikeluarkan oleh provinsi. Karena defenisi lintas tadi karena dia menganggap ini kampar ini siak ini rohul disini ada satu ini tidak lintas ditengah ini ada satu lagi. Ha jadi kalau orang PTPN V ini dia menganggap itu lintas padahal kalau saya pribadi mengartikan lintas itu yang melintasi. Jadi kebunnya tuh antara dua kabupaten contoh 1000 luasnya 700 dikabupaten kampar 300 di kabupaten Rohul. Itu lintas ha makanya secara regulasi mengeluarkan izinnya ha karena dia sekarang menganggap seperti tiu kita juga pernah mengkonsultasikan ke kementrian, kementrian juga menyampaikan kekita bahwa memang tidak diatur secara rinci lintas itu seperti apa. Jadi dalam artian kalau saya menyimpulkan kementrian melegalkan apa yang dibuat oleh perusahaan. Ha jadi mangkanya sejak tahun 2015 saya masuk di perkebunan itu kita pernah melakukan pembinaan kalau ndak salah ya sekali abis tuh karena memang komunikasi dengan PTPN V kurang bagus kita coba hubungi via telfon, sms ya kayaknya dia lebih kepada mungkin dia berpegang dengan izinnya tadi. Karena izinnya provinsi jadi yang berhak melakukan pembinaan itu provinsi. Jadi seolah-olah kita tidak menganggap perkebunan yang di kabupaten. Ini informasi secara lisan saja ya.

13. **Bagaimana menurut bapak kemampuan perusahaan dalam menyampaikan pesan agar terciptanya suatu pemikiran yang sama dengan PEMDA?**

    Ha kalau untuk perusahaan kadang kita kan ada didalam kegiatan kita tapi itu bukan bertitik tolak kepada perusahaannya bertitik tolak dengan pemerintahannya. Karena

memang ada di kita itu kalau seandainya ada aturan-aturan baru itu kita melakukan sosialisasi, kita tetap menyampaikan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada didaerah kabupaten kampar. Terlepas dia melaksakan atau tidak yang penting kita sosialisasikan dulu karena itu memang tugas dari perusahaan. Itu salah satu kalau dari pemerintahannya. Tapi kalau untuk bagaimana orang itu terhadap kita kalau secara dari perusahaannya itu mungkin kita hany asebatas via telfon komunikasi dan seterusnya dengan laporan tadi. Sesuai dengan regulasi aja sih urusannya kita.

14. Government Relations itu identik dengan lobby ya pak, biasanya siapa pelaku praktek lobby?

Itu humasnya, jadi tiap ada konflik tiap ada permasalahan problem baik itu diluar maupun didalam itu yang turun tangan jarang direktur. Itu pasti humasnya dulu, kalau seandainya masalahnya selesai dengan humas cukup sampai disitu. Kalau tidak baru sampai pada direksi, tergantung kondisi permasalahan.

15. Dengan cara lobby langsung atau dengan lobby cara lain pak?

Dia ada sifatnya hanya perusahaannya saja yang melakukkan lobby tergantung problem yang dialami. Ya kita perusahaan melakukan lobby langsung. Kalau dia sudah menyangkut masyarakat biasanya dia jugak kalau memang mitranya bagus dengan masyarakat dia juga melibatkan masyarakat. Masyarakatnya dibawa ke dinas perkebunan semacam konsultasi kordinasi kita menyampaikan. Tapi yang kita kita fasilitasi ada jugak, beberapa perusahaan di PTPN V ada juga yang sudah bermitra ada juga dengan MoU. Mereka tidak pandai maksud saya tidak hanya perusahaannya sendiri tetap dia melibatkan masyarakat. Ada satu informasi yang saya dapat dia mitra PTPN V bagian Kampar Kiri masyarakat komplain dia mitra KKPA nya berdasarkan informasi lisan dari kelompok KUD nya itu dah sembilah tahun lebih kurang itu tidak pernah dilakukan pemeliharaan oleh PTPN V nya. Jadi yang saya dapatkan informasi biasanya hubungan masyarakat dengan PTPN V ini karena PTPN V ini juga dianggap kalau bahasa saya itu plat merah, milik pemerintahan juga kan BUMN jadi dari kedinas itu mungkin karena dia menganggap sama-sama plat merah mungkin anggapan saya. Jadi dia mungkin agak cuek ajalah jadi semacam acuhlah PTPN V ini. Saya tidak menjelekkan PTPN V tapi inilah yang saya rasakan.

16. **Sewaktu ada insiden di SEI KENCANA bapak turun?**

    Tidak, itu karena saya baru masuk ke dinas perkebunankan tahun 2015 akhir di september. Kalau di Sei Kencanakan sudah lama jadi yang turun pejabat sebelum saya.

17. **Jadi intinya komunikasi dilakukan dengan via telfon ataupun surat menyurat saja ya pak?**

    Iya, tapi kebanyakan biasanya dia sudah terbentur masalah baru berkonsultasi. Sebenarnya perusahaan dengan pemerintahan ini harus cun apa ya bahasa saya klop lah ini tidak. Itu hanya secara teori secara regulasi saja hehehe, kalau sudah kelapang belum ditemukan.

18. **Jadi hubungan dengan PTPN V seperti apa dengan PEMDA pak?**

    Khusus PTPN V saya katakan belum baik.

19. **PTPN V sudah dalam kategori ideal belum sih pak dalam membantu pemerintahan dalam mengambil keputusan serta melibatkan wakil rakyat atau dikatakan implementasi community relationnya sudah belum pak?**

    Kalau PTPN V kebetulan juga saya tidak melakukan pembinaan secara efektif dan optimal jadi saya juga tidak mengetahui terlalu dalam mengenai PTPN V ini.

20. **Apa yang menyebabkan ketidak optimalan pengawasan dan pembinaan dari dinas perkebunan pak?**

    Kalau saya sebelumnya, jadi gini apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin dia menganggap kita sama-sama plat merah bahasa saya seperti itu. Jadi dia acuhlah tidak ada ketakutan atau apa. Karena pernah saat saya melakukan pembinaan saya sampaikan ke manager kebun karena untuk berkomunikasi saja sangat sulit. Ada beberapa surat itu untuk melakukan pembinaan belian tidak respon. Ha kita kirim lagi surat ke jalan apa ini rambutan responnya tidaklah. Jadi melalui manager baru ke pusatlah, kita coba melalui humasnya jugak via sms jugak telfon jugak.

21. **Kalau cara untuk governmentnya sendiri untuk menjadi bermanfaat guna kepentingan masyarakat itu seperti apa pak?**

    Itu kalau bermanfaat itu sebenarnya dilakukan keterbukaan baik perusahaannya ke pemerintahan maupun pemerintahannya ke masyarakat. Jadi kalau itu sudah cun sudah sinkron karena semacam pola bapak angkat itu seandainya ada bahasa orang semacam KUD itu kan ketua untung duluan. Jadi disitukan sudah ada pembohongankan sudah ada ketidak jujuran. Karena orang menganggap ketua untung duluan karena tidak ada kejujuran, masyarakat tidak merasakan manfaat

langsung. Mungkin dia bermanfaat jugak tapi mungkin yang seharusnya dia dapat 100 ribu jadi dapat 20 ribu. Jadi manfaatnya itu kurang optimallah. Tapi kalau dengan keterbukaan, kejujuran, transparan, antara perusahaan dengan pemerintah masyarakatnya itu saya rasa akan berjalan dengan damai.

22. Terbuka dalam hal apa pak?

Baik dalam pelaksanaan pembangunan, pengolahannya, maupun didalam produksi. Kan bisa saja kan didalm produksi itu nanti mereka melaporkan kekitanya satu minggu ini dia hanya produksi tiga ton katanya. Bisa sajakan laporannya enam ton jadi kadang itulah gunanya pengawasan tadi itukan mengkroscek. Kalau seandainya lahan itu satu ha produksinya secara teknisnya sekian ton. Jadi laporan itu kita singkronkan. Nanti karen menyangkut juga kepada pengembangan pabrik minyak kelapa sawitnya. Kalau data itu saja tidak jujur tidak transparan kita kan tidak tau buah melebihi dari kapasitas pabrik yang ada. Jadi buah yang tidak tercover ini kemana? Buahnya buah siapa, kalau buahnya ke masyarakat pasti masyarakat komplainnya ke dinas perkebunan. Loh pak buah kami gak diambil buah kami gak dibeli masyarakat yang teraniaya kurang sejahtera.

23. Solusinya bagaimana pak?

Jadi memang beberapa tahun terakhir ini kita coba selalu kita sosialisasikan kepada didalam pembinaan pengawasan itu selalu kita sampaikan ya paling tidak kita itu merubah mindsetnya jangan gaya lama. Jadi kalau saya artikan gaya lama itu setiap orang pemerintahan datangkan lihat bayangan dia bla bla bla kan gitu. Bayangannya negativ saja, mungkin orang pemerintah mau cari ini mau cari itu kan gitu. Jadi saya tekankan disitu rubah pola pikirnya, yang penting sekarang ini anggap pemerintah ini mitra kerja saling mengisi. Jadi keterbukaan itu belum ada, dan karena itu juga dicampuri dengan politiskan.

24. Oh iya ada tidak pak terkait lobby pemerintah memasukkan formal atau kepentingan unsur politik yang mengaitkan masyarakat pak?

Kalau kita belum ada, non formal semua.

25. Ketika pemerintah dihadapkan pada satu situasi misalnya pada sengketa lahan yang pernah terjadi di SEI KENCANA itu pemerintah berpihak pada pihak mana?

Kita tidak pernah yang namanya pemerintahankan perusahaan itu jugak kita anggap itu adalah mitra kita, masyarakat itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Kita tidak ada pilih kasih pilih asuh, kita terhadap pemerintah daerah eeee perusahaan dengan

masyarakat kita anggap sama. Kita hanya menyangkut regulasinya, jadi kita sesuaikan dengan regulasinya kita identifiksi permasalahannya dimana kita selesaikan dengan cara musyawarah. Jadi kita temukan masyarakat dengan perusahaan kita fasilitasi jadi pemerintah memfasilitasi, misalnya masyarakat ada konflik dengan perusahaan kita fasilitasi secara kecil wadahnya secara dinas perkebunan kalau tidak nanti kita coba lapor ke pimpinan ke bupati coba didaerah kalau tidak bisa ke bupati kita coba ke DPR. Toh seandainya ini tidak berjalan kita coba fasilitasi melalui dinas provinsi melalui gubernur kalau tidak DPR Provinsi kita lempar secara terstruktur seperti itu.

26. Sudahkah efektif cara yang telah diterapkan menurut bapak?

Kalau khusus untuk sei Kencana selama saya disitu tahap-tahap seperti itu memang yang saya alami seperti itu sudah dibilang efektif ada kekurangan dibilang tidak efektif ada juga kemajuan perkembangan disitu jadi belum sempurnalah.

27. Jadi, bagaimana menurut bapak tentang perusahaan dalam mengembangkan isu perusahaan?

Kalau disitu saya tengok ada unsur politisinya juga tuh, bisa jadi ke unsur pemerintahannya tapi tanda kutip bukan dinas perkebunan dalam hal ini mungkin kepala daerahnya karena dia memang mungkin ada unsur kedekatannya dengan kepala daerah. Karena dia memang ada mungkin unsur kedekatan dengan kepala daerah, kan jadi seperti diacuhkan. Karena dia ngerasa bupati teman saya kan gitu, ha dinas perkebunan nanti kalau ada apa-apakan bisa telfon bupatilah kan gitu.

28. Jadi, perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pernah memang melakukan non formal seperti makan malam untuk bersilaturahmi pernah ya pak, tapi bukan ke dinas perkebunannya?

Oh tidak, jarang eh bukan jarang. Yang saya alami tidak ada yang khusus seperti mengadakan pertemuan makan malam sambil ngopi tidak ada. Terkecuali ibaratnya kita mungkin ada hal-hal yang salah satu ada semacam kitakan mau olahraga provinsi dari pemerintah ada arahan dari kepala daerah itukan untuk kantor-kantor perusahaan perkebunan itu wajib pasang stiker ha itu kita coba via telfon email tetap ita kirimkan secara resmi, kalau gak bersurat karena ini dia tergantung kondisi karena waktunya mepet kita bisa kirim email sejam dua jam kita sampai. Kalau memang waktunya lama kita surati nah kalau memang tidak kita coba telfon jadi pas kita telfon nanti kita bicara hal itu kebetulan saya ada dipekan nih pak “bapak dimana ini?” ngopi yok. Jadi hal-hal ini tidak semacam formal. Apa ya? Tidak terstrukturlah.

29. Kemudian pada saat pemerintah merayakan hari jadi perintahan misalnya pak pemerintah mengikutsertakan PTPN V pak?

Oh iya kalau PTPN V kita undang semua perusahaan perkebunan kita undang. Kayak pelantikan Bupati misalnya kemaren tuh kita undang.

30. Begitupun dengan PTPN V pak? Apakah pemerintah diundang untuk hadir dalam acara PTPN V?

Kalau setau saya ya tidak tau ya kalau pimpinan. Kalau setau saya sih saya belum pernah diundang dalam acara ulang tahun PTPN V. Tapi seandainya pas rapat-rapat resmi formal baru ketemu. Kalau nonformal seperti ulang tahun PTPN V yang saya tau sampai saat ini belum ada. Tapi kalau kepala dinas saya tidak tau ya karena itukan kalau undangan untuk kepala dinas tidak melalui saya. Bisa jadi ada udangan cuman saya tidak tau itu diluar ini.

31. Berdasarkan sudut pandang bapak apakah perusahaan berpotensi untuk mengembangkan desa yang berada di sekitar perusahaan?

Sangat berpotensi. Mangkanya didalam regulasi itu sudah diatur didalam pembangunan perkebunan itu kalau seandainya dia membangun kebun disitu kewajiban dia untuk membangun 20% yang saya bilang tadi, pertama itu satu. Yang kedua itu nanti yang namanya PTPN V inikan dia juga punya pabrik kalau seandainya dia KKPA bapak angkatnya PTP V biasanya dimasalah harga itukan lebih terjamin untuk masyarakatny. Kenapa? Karena kalau seandainya masyarakat jual ke luar tempulak ke peron belum main ditimbangannya, belum main diharganya. Harga sawit misalnya sekarang 1.500 kg peron beli nanti 1.200 sudah 300 dimakan tempulak atau peron berapa kerugian masyarakat. Terus kali sekilonya mungkin 300 rupiah kalau dikali sekian ribu ton sekian ratus ton berapa kerugian masyarakat?. Jadi sangat berpotensi jadi bagus membangun ekonomi masyarakat.

32. Ini sudah terrealisasikan pak?

Sudah, untuk hal-hal yang semacam itu sudah. Mangkanya sekarang didalam pedoman izin perusahaan perkebunan itu yang sudah wajib sekarang untuk bermitra. Itu diketahui oleh kepala dinas jadi dia seandainya kita gak bermitrak kebun, sekarang kita punya kebun kita kelola sendiri nanti dibentuk kelompok namanya KUB kelompok usaha bersama, itu juga kemaren program pimpinan strategi kita dari dinas perkebunan membentuk KUB mungkin nanti dari KUB itu ada sekian orang dari sekian orang itu mungkin memiliki lahan berapa ha, kita anggap 10 ha atau 200 ha dari 200 ha itu mungkin berapa poduksinya. Itu kita mitrakan dengan minyak

kepala sawit dengan perusahaan perkebunan itu diketahui oleh kepala dinas dibawahnya. Jadi disitu MoU antara itu diharapkan saling menguntungkanpabrik butuh buah masyarakt butuh harga jadi cun dia disitu. Tentu dengan ketentuan tentu yang buah TBS masyarakat ini seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan mungkin yang kadar airnya tinggi minyaknya sedikit biasanya pabrikkan mintaknya minyaknya bawak kadar airnya sedikit dengan pola tekhnis yang berstandar teknis pengolahannya kan diatur oleh perusahaan.

33. **Konstribusi apa pak yang paling pemerintah rasakan dari keberadaan perusahaan?**

    Yang pertama yah membantu mensejahterakan masyarakat, kedua itukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itukan tujuan dari pemerintah inikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau dulu program bupati menzerokan kemiskinan itu salah satunya. Jadi kalau di perkebunan ini cara perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat ya dengan cara perkebunan pulak. Banyak aspek pertama kontribusi kita disitu dengan adanya perusahaan itu membuka lapangan kerja bagi kita prioritaskan masyarakat tempatan.

34. **Pernah tidak pak PTPN V menjadi sponsor acara pemerintah pak?**

    Jadi gini kalau sponsor gimana ya pasti sponsorlah. Mungkin karena kita ada undangan tadi semacam dia mungkin ada buat spanduk atau papan bunga itukan termasuk spinsor tapi tidak tertulis atau terdata. Itu tidak terukurlah kalau dibilang.

35. **Kalau frekuensi komunikasi dengan pemda yang dilakukan perusahaan bagaimana pak?**

    Sangat rendahlah kayaknya, itu untuk kedinas perkebunannya karena dia memang yang seperti saya sampaikan tadi apabila ada terbentur sesuatu hal baru berkomunikasi kalau tidak terbentur ya kewajibannya tadi hanya menyampaikan laporan, bisa juga dibilang sering karena dia perusahaan yang tertib, disiplin, tiap enam bulan dia melaporkan laporan ee perkembangan usahanya berarti dia rutinkan. Ada komunikasi terus disana ha itu dari seginya seperti itu.

36. **Untuk hubungan perusahaan PTPN V dengan Pemda pada saat ini bagaimana pak?**

    Gimana ya sulit menjawab ya, kalau hubungan dengan kebetulan dengan dinasnya tapi dengan seksi pembinaan kebetulan saya diseksi pembinaan pengawasan perkebunan itu kurang baik. Tapi dengan dinas perkebunannya kan disitu ada kepala bidang ada kepala dinas ada sekertaris itukan terlepas dari kontrol saya mungkin dia

kontak langsung dengan pimpinan atau secara organisasinya bisa saja saya jawab kurang baik memang.

37. **Jadi, kendala apa yang pemerintah rasakan dalam menjalin hubungan baik dengan perusahaan?**

    Sebenarnya kendala tersbesarnya ya politis, ya karena ya yang namanya politis kita gak bisa nebak ya. Namanya pimpinan-pimpinan diatas level-level tinggikan sering bermain diatas jadi kalau dia sudah kenal dengan kepala daerah bos PTPN V sudah kenal dengan kepala daerah jadi dia sudah merasa memegang pucuk pimpinan. Jadi ibaratnya untuk kekita itu ya walaupun kita jalan secara tertib administrasi orang tuh ya acuh. Sulit sebenarnya saya jawabnya itu tapi keadaan realnya ya seperti itu. Hehehe

38. **Harapan apa yang bapak harapkan selaku pejabat pemerintah terhadap adanya perusahaan?**

    Sebenarnyakan kita mengharapkan adanya perusahaan inikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, abis itu ya saling terbuka transparan terhadap pemerintahan karena didalam sifatnya dinas perkebunan inikan hanya sifatnya pembinaan dan pengawasan kalau seandainya dia salah kita tegur kalau seandainya mereka kelebihan dosis kita sampaikan secara tekhnis. Kitakan maunya perusahaan itu pengolahan perkebunannya baik itu industri itu berstandar tekhnisla paling tidak masyarakat tempatanlah.

39. **Jadi dasarnya bapak atau pemerintah ingin perusahaan mensejahterakan masyarakat, ketika saya melihat data-data dan turun ke lapangan perusahaan telah melakukan community relatiosnnya dengan sangat baik baik. Bagaimana dengan bapak ketika melakuakn pengawasan di Sei Kencana?**

    Kita melihat kesejahteraan masyarakat itu ada, tapi kan itu tidak gimana ya kan misalanya seharusnya 500 orang kan sulit kita ukur kesejahteraan ini tadi mungkin dengan satu juta per KK itu beda dengan KK yang lain. Jadi kalau biasanya dari perusahaan kita tidak bisa menyampaikan perusaan ini tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dia ada melakukan communtity relations itu cuman kadang tidak pada posisinya, salah satu contoh nanti itukan ada semacam beasiswa kepala desa mengusulkan mintak bantuan ke perusahaan untuk beasiswa anak itu kadang inikan ada salah juga dari pemerintah itu bukan secara desanya tapi secara person. Mungkin anak dia sepupu dia seharusnya perusahaan juga melihat seperti itu yang layak dibantu beasiswa itu yang manaloh. Jadi kita jugak ada seperti peningkatan-

peningkatan didalam pembinaan-pembinaan itukan perusahaan wajib melakukan semacam peningkatan SDM karyawannya juga ada itu kewajibannya dia.

Kalau di tata pemerintahan kalau semacam ada regulasi dulu itu tata pemerintahan yang lebih tau, karena di tata pemerintahan inikan sebelum ada izin perkebunan ini dikeluarkan itukan ada beberapa persyaratan perizinan salah satunya adalah izin prinsip dari bupati dengan izin lokasi itu dulu dibawah tata pemerintahan langsung. Karena kita tidak bisa mengizinkan izin perkebunannya sebelum ada izin lokasinya sebelum ada izin prinsipnya sebelum ada izin lingkungannya. Kita juga harus cek lingkungannya dulu limbahnya bagaimana rekom tata ruangnya seperti apa.

TRANSKRIP WAWANCARA RESPONDEN PENERIMA MANFAAT

NARASUMBER : Bapak Samsir

TANGGAL WAWANCARA : 1 Juni 2017

1. **Apa saja program yang telah atuk dapatkan dari perusahaan?**
   Kalau untuk menunjang ekonomi masyarakat ada berupa ternak ada hemm program yang banyak didapatkan itu seperti rumah dan sarana prasarana. Kalau kita orang desa ini minta alat berat perusahaan bisa digunakan kapan saja, seperti untuk membuat parit di depan rumah dengan backhoe loader boleh tuh tinggal angkat aja asal jangan pas jam kerja ajalah. Cuman kita nih kepala sama hitam, tapi kalau tanya sama pihak sebelah nanti perusahaan membawa hama ke kampung nih kan gitu. Kalau menurut pendapat saya tidak, masjid dibikin suraw dibikin jalan semua dibikin apa kebutuhan pemerintah tapi bukan kebutuhan pribadi lah ya. Tapi kalau untuk desa saya rasa cukup. Sekarang ada masuk proposal kami dua tuh, kapan dia lagi dimintak tuk? Tunggulah masih becek lag dibilangnya. Ha kan kalau sama kita asal namanya untuk umum saya rasa PTP bukannya membawa hama kedesa nih. Liatlah depan rumah saya tuh parit segitu bagusnya pakai alat berat perusahaan tuh ha, kalau ndak ada apa jadi desa nih banjirlah. Jadi kalau ada yang aneh-aneh tuh ada segelintir orang yang tak senang tuh. Saya mulai 89 berdomisili dengan PTP nih termasuk saya tim nya dulu gak ada bawak hama. Jadi orang yang tak puas orang yang sakit hati.
2. **Bagaimana tanggapan komunitas terhadap program yang telah di berikan perusahaan?**
   Menurut saya sendiri cukup membantu
3. **Menurut atuk apakah perusahaan sudah cukup membantu memberdayakan masyarakat?**
   Untuk memberdayakan masyarakat ada juga sih sebagian kecil untuk memberdayakan masyarakat itu. Ya contohnya dari inilah ternak kambing kan didatngkan ahli-ahlinya ama ptp tuh, biaya mereka semua yang nanggung tuh.
4. **Manfaat apa yang atuk dapatkan dari adanya perusahaan di dekat desa?**
   Kalau menurut saya pribadi cukup senang adanya perusahaan di dekat desa, sebab kita itu istilahnya ndak resah menerima tamu didesa tuh hanya kita apa bersyukur, asal jangan membawa penyakit tuh udah kan. Kalau membawa nikmat nih kan kita tampung semua perusahaan tuh kan.

5. **Bagaimana sikap perusahaan jika program tidak berjalan?**

   Banyak yang tidak sesuai dengan rencana, Program perusahaan itu kan contohnya seperti kambing yang di berikan ke masyarakat. Itu saya rasa kambingtuh 20 % yang ada lagi, nanti kalau apa nanti ntah siapa yang salah ntah pengawasnya yang salah ntah masyarakat yang salah itukan ada bimbingan dari kampus dari UNRI. Jadi perusahaan itu memakai UNRI jadi perpanjangan tangan kepada masyarakat jadi orang tuh lah pengawasnya disini. Kemaren ada asum yang menanyakan berapa persen kambing yang ada dan berapa persen kambing yang mati untuk didata ke kantor pusat, tapi kita sendiri tidak bisa merealisasikannya. Ya bahasanya perusahaan ini meninjaulah melalui asum unit ke komunitaskan. Jadi karena atuk tidak bisa, perusahaan membuat proposal untuk masyarakat yang mendapatkan kambing. Saya rasa menurut pak asum, yang berhasil membudidayakan kambing akan mendapatkan tambahan kambing lagi, namun yang tidak ada sama sekali maka tidak akan dipercaya untuk mendapatkan kambing untuk seterusnya. Kalau menurut atuk sendiri kira-kira hanya ada 20% kambing yang tersisa. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya sarana prasarana itu masih berjalanlah sampai sekarang, perusahaan perduli sama perkembangan desa.

6. **Pernahkah ada permasalahan dengan perusahaan? Dan jika ada bagaimana perusahaan menanggapinya? Dan apa yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah?**

   Kalau permasalahan dengan perusahaan sih pasti ada, cuman seperti pepatah "Tidak ada gading yang tak retak", asal tangan kiri dengan tangan kanan bacok-bacokan apalagi masyarakat dengan perusahaan kan gitu. Perusahaan mempertahankan aset negara, masyarakat meminta itu dengan secara itu aja kan gak mungkin. Cuman bukan satu jalan menuju romah, semua permasalahan itu bisa diselesaikan tapi sementara waktu aman sekarang gak kayak dulu bentrok-bentrokan. Tapi itu dulu kalau sekarang alhamdulillah masyarakat sekarang sudah aman. Perusahaan menanggapinya dengan membuat perjanjian kepada masyarakat, namun masyarakat disini menginginkan lahan di dekat desa. Tapi perusahaan belum mengabulkannya.

7. **Bagaimana tingkat persentase kepuasan atuk sebagai komunitas kepada perusahaan dalam mengatasi masalah?**

   Belum lagi ntah karena rencana itu belum sampai ke tangan kan gitu. Kemaren kalau mau selesai perusahaan itu dengan masyarakat mau tidur nyenyak dia janjinyakan itu

apa ada masalah dengan masyarakat diganti dengan pergantian lahan belum teraelisasikan belum ada tanya jawab belum berkesinambungan lagi.

8. **Harapan atuk sebagai komunitas yang hidup di lingkungan perusahaan itu apa tuh mewakili komunitas?**

   Ha kalau kita nih istilahnya namanya orang tak punya asal namanya perusahaan manajemennya kan lengkap sarana prasarananya lengkap. Cuman kita tuh harus mengharapkan dia secara umum. Kalau gak ada PTPN V kebun Sei Kencana disini nih mobil tak akan bisa lewat sampai sekarang menuju kampung nih. Itu chevron dengan apa tuh gak ada inisiatif buat benah jalan, Sei Kencana semua itu. Dibilang nanti bawak hama untuk kampung perusahaan itu salah itu. Perusahaan raksasa migas itu ndak punya dia alat berat untuk bolo jalan. Cobaklah tengok tuh kan, hanya PTP semua. Cuman permintaan masyarakat tuh belum dikabulkan, belum terealisasi masalah lahan itu. Jangan sempat terulang lagi dua kali bentrok-bentrok masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan taulah tanggung jawab dia, masyarakat istilahnya kalau nuntut sih boleh-boleh saja tapi jangan anarkis kan gitu. Cuman kalau istilahnya kita duduk satu meja dengan perusahaan dengan berdada lapang dan kepala dingin semuanya bisa selesai. Tapi kalau istilahnya mengeras mana akan selesai , karena tidak ada masalah yang tidak selesai. Intinya tolonglah rangkul kami masyarakat baik dari pemerintahkah ataupun perusahaan, semoga ketiga elemen ini mampu menuju satu pemikiran yang tak merugikan pihak manapun.

Transkrip Wawancara Komunitas Sinamanenek

Narasumber **:** Bapak Mardianto

Tanggal Wawancara: 22 Juli 2017

1. **Apa saja program yang telah di terima dari perusahaan PTPN V ?**

   Yang sudah didapatkan satu pembangunan sarana prasarana ya kan, kayak masjid bantuan balai desa terus yang kedua program bantuan terhadap masyarakat miskin dalam bentuk sembako yang ketiganya bantuan alat-alat pertanian bagi kami masyarakat miskin dengan mendatangkan orang-orang untuk melakukan penyuluhan dari dinas pertanian, dari dinas peternakan, dari dinas koperasi. Biasanya orang-orang ini akan memberikan penjelasan atau apa namanya penyuluhan ya, kemudian pada saat itu juga bantuan akan diserahkan kepada kami. Biasanya dalam penyerahan ini hadirlah bapak camat beserta jajarannya.

2. **Bagaimana tanggapan bapak selaku komunitas terhadap program yang sudah diberikan?**

   Tanggapan saya selaku komunitas ya positif untuk saya pribadi loh ya. Saya merasa terbantu, terdukung, merasa diperhatikan. Tapi dek ya untuk yang kontra pasti berbeda dengan saya kan.

3. **Jadi, komunitas ini ada yang kontra pak? Apa yang menjadi penyebab mereka kontra dengan bantuan yang diberikan PTPN V ?**

   Begini untuk yang kontra saya jelaskan dalam tanda kutip “mereka menerimanya tapi dengan melontarkan kata-kata kayak “ah masa cuman segini” ha itu contohnya”. Tapi memang ya relativ lah tuh ya, bagi kami yang merasa bersyukur ya bersyukur yang enggak ya enggak. Kalau adek tanyakan penyebab ya dah taulah adek kan masalah sinamanenek ini, asik ke itu itu aja masalahna. Lahan ke lahan lahan ke lahan tak ada ujungnya. Jadi yang kontra nih karena terlalu fokus dengan tuntutannya tak berkembang-kembanglah dia. Jadi pada intinya kami sebagai komunitas yang hidup di lingkungan yang sama bisa dikatakan sudah terpecah. Sampai ada pulak yang udah masuk penjarakan karena memberontak, ha sekarang apa yang dia dapat tuh gak adakan.

4. **Menurut bapak, apakah perusahaan sudah cukup membantu dalam memberdayakan masyarakat?**

   Kalau dibilang cukup ya enggak jugalah masih kurang hehehe. Tapi tingkat persentasenya sudah lumayan lah ya namanya kami nih masyarakat tetap kurang. Karena segala lini diperhatikan ya contohnya perbaikan jalan dilaksanakan, acara-acara kami didesa seperti olahraga mintak tolong ke perusahaan kami dibantu, ekonomi kami diangkat, tapi ya gak menyeluruh.

5. **Maksudnya gak menyeluruh itu bagaimana pak?**

   Ya bagi yang mau aja kayak saya, jadi yang menentukan juga melalui kepala desakan. Nantik kepala desanya tuh kayak iniloh si anu si anu si anu gitu. Jadi bagi yang keras apa istilahnya itu hemmmm menolak lah ama yang mau diberikan PTPN V nih ya udah gak mau dia. Kalau saya nih kan orangnya mau memulai dari 0 paham saya susah hidup dengan praktis oang bilang tuh hahaha, ya ndak mungkin saya kaya menadadak tanpa kerjakan. Tentu saya harus pandai mengolah apa yang bisa diolah salah satunya ya dengan pembinaan yang diberikan PTPN V tadi secara penyuluhan diasaha kemampuan saya di beri penjelasana bagaimana cara merawat kebun saya atau yang wanita dapat berdagang. Berproses semuanya tuh dek, makanya orang yang tak mau alamat tertinggal dibelakang.

6. **Hehe, jadi manfaat apa yang bapak rasakan dengan adanya perusahaan didekat desa?**

   Itulah tadi sarana prasarana terbangun. Ekonomi kami terperhatikan walaupun sedikit, itu sebelum PTPN V ada perusahaan migas ada dekat desa mana ada pengaruh apa-apa buat kami. Jalan hancur bukannya diperbaikan, kami keluar susah. Ha adanya ptpn V enak kurang enak apa lagi, mau keluar jalan dah terbuka, sekarang dah jadi kecamatan pulak kami. Masjid bobrok di renovasi, pasar murah pun sangat menolong kami. Banyaklah manfaat kalau untuk desa ya. Kalau untuk individu tuh iya pandai-pandai kita lah lagi kan, dikasih lowongan kerja kami itupun selelintir orang yang mau, orang kampung nih susah buat disiplin dek. Jadi beda pola pikir orang kampung sama orang kota nih. Hehehe

7. **Adakah manfaat lain yang bapak rasakan dari adanya program KKPA misalnya?**

   Ya itu jelas ya dek. Gini Anggota KKPA kami khususnya memperoleh banyak sekali keuntungan dari program tersebut. Kami mendapatkan pendapatan yang lebih lebih banyak saat ini dan kami bahkan bisa menabung. Infrastruktur juga diperbaharui

secara pesat .Sebelumnya, kami hanya mampu mengunjungi pasar seminggu sekali tuh dek, karena terlalu jauh kan dari tempat kami tinggal dengan berjalan kaki atau sepeda . Sekarang , kami bisa pergi ke pasar setiap hari memakai sepeda motor dan mobil untuk mendapatkan bahan yang lebih segar karena jalan telah dibangun dan kami memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepeda motor atau mobil ."

8. **Ketika program tidak berjalan, menurut bapak bagaimana sikap perusahaan kepada komunitas?**

   Apa ya, paling kayak teguran-teguran biasalah hanya kayak sebatas memberikan kami anjuran-anjuran sifatnya. Kami diajak ngobrol, ditanya kendala kami apa kok macet paling gitu lah tuker pikiran aja apa tuh bahasa kalian tuh.

9. **Jadi, pernah gak pak terjadi permasalahan dengan perusahaan? Bagaimana perusahaan menanggapinya? Dan apa yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah?**

   Pernah, mereka memang menerima aspirasi kami. Nantik ditindak lanjutin tapi ya sifatnyakan menunggu kan kami sebagai komunitas bukannya dengan spontan tidak. Kemudian perusahaan menampung, menyampaikan kepada pimpinan mereka. Kami komunitas menunggu hasilnya gitu dia. Nanti dikasih tau sama kami jangka waktu yang sudah mereka tentukan pastinya.

10. **Biasanya untuk komunitas ini pernah gak sih pak di sangkut pautin dengan pemda / politik?**

    Pernah, ini yang kasih komandan ke kita biasanya pekerja yang di unit. Ha pas pemilihan nanti kami serempak nih pilih dia mintak tolong nih buat kami satu suara. Kayak gitu sih, nanti paling pas penyampaian dari pihak unit ngancem sambil guyon ya biasalah.

11. **Kalau ada masalah seperti lahan tadi pak, pemerintah daerah ini merangkul masyarakatnya gak pak?**

    Oh iya inikan kita nanti melalui pemerintah desa dahulu mereka mengadu ke pemda nanti biasanya ada mediasi antara ketiga belah pihak. Nah pemda itu tidak berat pada satu sisi tidak, biasanya nanti mereka mempertemukan kita dengan perusahaan lalu dicarikanlah solusi buat permasalahan kami. Kalau yang sudah-sudah seperti itu.